Rencana Aksi Daerah

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2018 - 2022

2018

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Rencana Aksi Daerah 2018

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

2018 - 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018-2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:

a. Bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan Pencapaian target-target TPB melalui Rencana Aksi Nasional dan Daerah yang telah di tetapkan;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (RAD TPB) TAHUN 2018-2022

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 3

RAD TPB merupakan panduan dalam rangka pencapaian target TPB dan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat Tujuan, Indikator, Target dan strategi pencapaian serta dukungan program dan kegiatan Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah Daerah dalam pencapaian sebagaimana tercantum dalam RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam lampiran, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

1.2. TPB Menyempurnakan Tujuan Pembangunan Milenium

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB

1.5. Pembiayaan TPB di Daerah

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB

1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Pasal 5

RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun Renstra dan RKPD serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memprioritaskan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB dalam lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Dalam hal peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memanfaatkan aplikasi E-Planning.

(3) Dalam hal asistensi, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berjenjang, secara operasional oleh Sekretariat Tetap Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Rencana Aksi Daerah 2018

Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

TPB

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

2018 - 2022

Daftar Isi

Daftar Tabel

2018

2018

Daftar Gambar

2018

2018

Bab I

Pendahuluan

2018

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2018 - 2022

Bab I
Pendahuluan

A. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selaras dengan muatan TPB yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 Nomor 3 Tahun 2018.

Beberapa poin TPB terdapat dalam isu-isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan risiko bencana melingkupi beberapa tema TPB yaitu air bersih dan sanitasi (tujuan ke-6), penyediaan permukiman (tujuan ke-11), perubahan iklim (tujuan ke-13), pengelolaan ekosistem laut dan pengelolaan ekosistem daratan (tujuan ke-15). Isu pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan tujuan TPB ke-6 yaitu “menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”. Salah satu jenis pencemaran, yaitu pencemaran

air, dapat ditekan dengan beberapa sasaran dalam tujuan TPB ke 6. Terutama terkait penyediaan air baku, pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengolah air limbah, peningkatan kualitas air sungai, dan pengendalian penggunaan air tanah. Isu pencemaran lingkungan dan risiko bencana juga memiliki hubungan dengan tujuan TPB ke-11 yaitu "Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan". Sasaran tujuan TPB ke-11, yang tercakup dalam isu pencemaran lingkungan, adalah penanganan sampah dan limbah perkotaan. Sementara sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Isu risiko bencana memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-13 yaitu "mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya", sasaran TPB terkait yaitu menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan berkaitan dengan tujuan ke-14 mengenai pengelolaan ekosistem perairan dan tujuan ke-15 tentang pengelolaan ekosistem darat. Dalam tujuan ke-14, sasarannya adalah peningkatan wilayah konservasi perairan. Untuk tujuan ke-15, sasaran-sasaran TPB bidang pengelolaan ekosistem darat yang terkait dengan isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan dan pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi.

2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian, melingkupi beberapa tujuan TPB. Isu ini berkaitan dengan tujuan TPB ke-11 dan ke-2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melingkupi sasaran dalam tujuan TPB ke-11 mengenai upaya menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sasaran yang dilingkupi adalah perwujudan kota dan kawasan permukiman yang layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya. Tingginya alih fungsi lahan pertanian melingkupi sasaran tujuan TPB ke-2 terkait upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sasaran pembangunan berkelanjutan yang terkait adalah penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Ketimpangan wilayah melingkupi sasaran pada tujuan TPB ke-8 terkait “meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Sasaran tujuan TPB yang berkaitan dengan isu ketimpangan wilayah yaitu peningkatan PDRB. Isu ketimpangan juga berhubungan dengan tujuan TPB ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Sasaran yang terlingkupi adalah penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri.
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY merupakan isu bidang ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-9. Tujuan tersebut adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif, dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Sasaran TPB yang terlingkupi dalam isu penyediaan infrastruktur ini adalah pembangunan bandara baru.
5. Masih tingginya angka kemiskinan melingkupi dua tujuan TPB. Tujuan ke-1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, dan tujuan ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Sasaran dalam tujuan ke-1 yang tercakup dalam isu kemiskinan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan penurunan jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat. Sasaran dalam tujuan ke-10 yang terkait dengan isu ini yaitu penurunan persentase penduduk miskin terutama di daerah tertinggal.

Tabel 1.1. Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan DIY dengan TPB

Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
1. Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	1. Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) 2. Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) 3. Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) 4. Ekosistem Lautan (tujuan 14) 5. Ekosistem Daratan (tujuan 15)

Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	1. Tanpa Kelaparan (tujuan 2) 2. Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3. Masih Tingginya ketimpangan wilayah	1. Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4. Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	1. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5. Angka kemiskinan masih tinggi	1. Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) 2. Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
6. Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	1. Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7. Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	1. Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8. Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (*Good Governance)* pada semua lini pemerintahan	1. Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16)
9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	1. Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) 2. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) 3. Industri, Inovasi dan Infratruktur (Tujuan 9) 4. Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10. Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	1. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 dan RAN TPB 2017-2019

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan *Milenium Development Goals*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global, merupakan transformasi yang ambisius dari *Milenium Development Goal's* (MDG's). Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan "Tanpa Kemiskinan" dan "Tanpa Kelaparan", akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai "*Zero Goal*". Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol. Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol.

TPB juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

DIY termasuk provinsi yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan provinsi lainnya. 37 indikator dari 41 indikator MDGs telah berhasil dicapai DIY pada akhir tahun 2015. Enam indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) Akses pendidikan dasar; 2) Kesetaraan gender dalam pendidikan; 3) Angka Kematian Bayi dan Balita; 4) Pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 5) Akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 6) permukiman kumuh perkotaan. Empat indikator MDGs yang belum dapat

dicapai pada akhir tahun 2015 di yaitu: 1) Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1 US dolar/kapita/hari; 2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD; 3) *Unmeet need;* 4) Jumlah emisi karbondioksida (CO_2). Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan dalam pelaksanaan TPB.

C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berkomitmen untuk menyukseskan pencapaian TPB. Hal ini dibuktikan dengan keseriusannya dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan menjadi panduan pelaksanaan TPB. Pemda DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang RAD TPB Nomor 34 Tahun 2018. Selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 124/TIM/2018 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB di daerah.

Isu-isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 selaras dengan pencapaian TPB di DIY. Pemda DIY berkomitmen menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran tujuan pertama TPB yaitu pada tahun 2030 mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tingkat kemiskinan DIY pada 2010 sampai dengan 2018 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83%, turun menjadi 12,36% pada September 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional, tingkat kemiskinan DIY masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dalam RPJMD DIY ditargetkan tingkat kemiskinan secara bertahap turun kurang lebih 1% per tahun sehingga diharapkan pada tahun 2022 menjadi 7%.

Isu strategis pembangunan di DIY terkait ketimpangan wilayah mendapatkan perhatian dalam TPB. Tujuan 8 secara khusus berkaitan dengan ketimpangan wilayah yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan layak bagi semua. Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan daerah, dengan sasarannya yaitu: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya Produk Domestik

Bruto (PDB) per kapita per tahun, tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, menurunnya koefisien gini, dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Nilai PDRB kedua wilayah ini mencapai 60% dari total PDRB DIY. Sementara Kulon Progo dan Gunungkidul, yang mencakup 65 % dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Dua wilayah terletak jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum ada pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat.

Komposisi struktur ekonomi tiap kabupaten/kota perlu untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Sementara di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut, tantangan ke depan adalah menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi tiap daerah untuk menghilangkan kesenjangan kabupaten/kota.

Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu sasaran dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022. Dengan indikator Indeks Williamson, tahun 2017 sebesar 0,4662 dan pada tahun 2022 menjadi 0,4489. Isu strategis ketimpangan wilayah diatasi dengan strategi mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru (selaras dengan TPB 8) dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian (selaras dengan TPB 9).

Isu lingkungan menjadi masalah yang terus dibicarakan mulai dari MDGs sampai dengan adanya SDGs/TPB. Dalam pelaksanaan aksi pencapaian SDGs/TPB, lingkungan menjadi pilar tersendiri. Pilar ini terdiri dari tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan ke-11 (kota dan permukiman berkelanjutan), tujuan ke-12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim), tujuan ke-14 (ekosistem lautan), dan tujuan ke-15 (ekosistem daratan). Terkait hal tersebut, isu lingkungan di DIY dianggap sangat penting sehingga menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD yaitu meningkatnya aktivitas

perekonomian yang berkelanjutan. Dua indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi naik dari 5,05 (tahun 2017) menjadi 5,34 (tahun 2022) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari 55,80 (2017) menjadi 66,15 (tahun 2022).

Masalah pengembangan pendidikan, DIY telah menyelaraskannya sesuai dengan tujuan ke-4 TPB yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur budaya. Adapun sasarannya adalah:

1. Pada tahun 2022, terwujudnya aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat;
2. Pada tahun 2022, terwujudnya relevansi pendidikan menengah untuk menjawab pembangunan daerah;
3. Pada tahun 2022, terwujudnya tata kelola management pendidikan yang bermutu menuju pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Pada tahun 2022, terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

Terkait isu tata kelola pemerintahan, menjadi bahasan dalam TPB khususnya pada tujuan ke-16. Tujuannya adalah meningkatkan perdamaian dan menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang (termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan). Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemda DIY perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungannya serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pilar tersendiri dalam. Pilar tersebut terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu: energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), industri, inovasi dan infrastruktur (Tujuan 9), berkurangnya kesenjangan (Tujuan 10).

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

Pertumbuhan inklusif diukur melalui *Inclusive Growth Index* (IGI) yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) Dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi; (2) Dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) Dimensi kesetaraan gender; (4) Dimensi kapabilitas; dan (5) Dimensi perlindungan sosial. Hasil kajian BPS menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY memuaskan tetapi belum inklusif. Berdasarkan pengukuran indeks IGI diperoleh dimensi infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender, dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Sedangkan dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relatif rendah pencapaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belum diikuti dengan penurunan kesenjangan baik distribusi pendapatan antar individu maupun distribusi pendapatan antar kabupaten/kota. Pemda DIY berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan meletakkan IGI sebagai indikator tujuan meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta (yaitu indikator Angka IGI dari 5,59 pada tahun 2016 menjadi 6,2 pada tahun 2022).

Komitmen pelaksanaan Pencapaian TPB di atas dapat disajikan dalam skema Visi Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan di DIY secara umum sebagai berikut:

Tabel 1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD DIY 2017-2022

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-*Bhinneka-Tunggal-Ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2 (2022);	1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM *(selaras dengan TPB ke-4)*	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,73	80,29	80,72	81,08	81,4	81,68
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	70,02	70,12	70,22	70,32
				2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. *(selaras dengan TPB ke-1, TPB ke-4, TPB ke-9, TPB ke-12)*	Indeks Gini	0,440	0,3917	0,3846	0,3776	0,3705	0,3635
					Persentase Angka Kemiskinan	12,36%	11,23%	10,19%	9,11%	8,07%	7,00%
				3. Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	10,98%	11.46%	11.68%	11.72%	11.99%	12.04%
				4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan *(selaras dengan TPB ke-7, TPB ke-8, TPB ke-13, TPB ke-14; TPB ke-15)*	Pertumbuhan Ekonomi.	5,21%	5,24%	5,26%	5,29%	5,31%	5,34%
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	58,58	60,51	62,44	64,18	66,15
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75%	76.5%	78%	79.5%	81%	82.5%
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11.11%	21,11%	30,42%	40,69%	49,03%	54,44%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Base -line 2017	2018	2019	2020	2021	2022
				5. Menu-runnya kesenjang-an ekono-mi antar wilayah *(selaras dengan TPB ke-8, TPB ke-9 TPB ke-10)*	Indeks Williamson	0.45 77	0,45 59	0,45 42	0,45 24	0,45 06	0,44 89
2.	**Mewujud-kan Tata Pemerintah -an yang Demokratis;**	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik *(good governance)*	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (BB) (2016) menjadi 76 (A) (2022)	1. Mening-katnya kapasitas tata kelola pemerintahan *(selaras dengan TPB ke-16)*	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	WTP A	WTP A	WTP A	WTP A	WTP A	WTP A
				2. Mening-katnya Kapasitas Pengelola-an Keis-timewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	N/A	65.22 %	73.91 %	82.61 %	86.96 %	91.30 %
				3. Mening-katnya Pengelola-an dan pemanfaat -an tanah Kasultan-an, Kadipa-ten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.3 69	7.9 19	9.4 19	13.4 19	17.6 19	21.8 77

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

D. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB

Beranjak dari pengalaman dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, telah disepakati penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB. TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga daerah (kabupaten/kota) dan non pemerintah.

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 *platform* partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap *platform* ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya

bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB di atas, DIY berketetapan untuk menjadikan TPB sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh *platform* yang tercermin pada Matriks RAD, baik yang akan dilaksanakan oleh Pemda maupun nonpemerintah.

E. Pembiayaan TPB di Daerah

Sebagai wujud komitmen kuat dalam menjalankan TPB Pemda DIY mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Sehubungan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda, dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB di daerah. Sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD), namun juga pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dan swasta di wujudkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya pencapaian pelaksanaan TPB.

F. Metodologi Penyusunan RAD TPB

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, maka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen RAD TPB tahun 2018-2022 harus ditetapkan.

RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Untuk pencapaian sasaran TPB daerah, gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD SDGs menjadi sangat penting.

Mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan TPB.

Penyusunan RAD TPB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (pokja) yang didasarkan atas Pergub terkait Tim Koordinasi Nasional TPB;
2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB;
3. Masing-masing pokja, yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB, dengan tahapan:
    a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB
    b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB
    c. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
    d. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB
4. Melaksanakan pembahasan Draf RAD TPB (narasi dan matrik) masing-masing pokja;
5. Melaksanakan pleno penyempurnaan Draf Final RAD TPB berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja;

6. Melakukan Penyempurnaan Draf Final RAD TPB oleh Tim Pelaksana TPB;
7. Mengesahkan RAD TPB oleh gubernur;
8. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi RAD TPB kepada seluruh pemangku kepentingan;
9. Melakukan penyusunan RAD TPB di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB di tingkat nasional.

G. Sistematika RAD TPB

Sistematika penulisan dalam dokumen RAD TPB (RAD TPB) DIY adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari sub bab sebagai berikut:

A. Keselarasan (TPB) dengan RPJMD
B. (TPB) Menyempurnakan MDGs
C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian (TPB) di Daerah
D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB
E. Pembiayaan TPB di Daerah
F. Metodologi Penyusunan RAD TPB
G. Sistematika RAD TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

Bab II terdiri dari sub bab sebagai berikut:

A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
Q. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

Bab III terdiri dari sub bab sebagai berikut:
A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
B. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
C. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
D. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
E. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
F. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
G. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
H. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
I. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
J. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
K. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
L. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
M. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
N. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
O. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
P. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Q. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bab IV terdiri dari sub bab sebagai berikut:

A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2018-2022

C. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V   PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Bab II

Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB

2018

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

2018 - 2022

Bab II

Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB

A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Berbagai macam definisi kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan oleh pemerhati kemiskinan. Bank Dunia (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Menurut Amartya Sen (1999), kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata.

Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. *World Bank Institute* (2005) mengemukakan empat alasan urgensi pengukuran kemiskinan, yaitu:

1. Agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan,
2. Pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan,

3. Pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orangmiskin,
4. Evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan mutlak dan dilihat dari sisi ekonomi. Pengukuran tersebut menggunakan indikator kesejahteraan. Ravallion (1998) mengemukakan tiga tahapan pengukuran kemiskinan, meliputi:

1. Mendefinisikan indikator kesejahteraan yang digunakan,
2. Membangun standar minimum dari indikator kesejahteraan. Standar minumun ini dikenal dengan garis kemiskinan (GK),
3. Membuat ringkasan statistik.

Terkait pengukuran kemiskinan, *World Bank Institute* (2005) menyebutkan tiga ukuran agregat kemiskinan yang bisa dihitung, yaitu:

1. *Headcount index* (P_0) yang mengukur proporsi penduduk terkategori miskin. Kelebihan dari ukuran kemiskinan ini adalah kemudahannya dalam penghitungan dan mudah dipahami. Kelemahan *headcount index* ialah tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak menunjukkan level kemiskinan, dan tidak berubah jika penduduk di bawah GK menjadi lebih miskin.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1 atau *Poverty Gap Index*) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P_1 berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* atau *Squared Poverty Gap Index*/P_2) yang mengukur sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P_2 berarti semakin parah tingkat kemiskinannya akibat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan oleh BPS. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin.

BPS merumuskan garis kemiskinan dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari Komoditas-Komoditas non-makanan terpilih, meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per Komoditas/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran Komoditas/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran Komoditas/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. GKM, GKNM, dan garis kemiskinan dihitung untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Perhitungannya pun dipisahkan juga untuk daerah pedesaan/perkotaan, sehingga nilainya tidak akan sama (tergantung cakupan/tingkatan wilayah dan daerah pedesaan/perkotaan).

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin atau *Headcount index* (Po) adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dibanding dengan jumlah penduduk wilayah pada tahun yang yang bersangkutan. Persentase penduduk miskin DIY dan Nasional selama 2012-2017 seperti ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin DIY dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DIY	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36
Nasional	11,66	11,46	10,96	11,13	10,70	10,12

Sumber: BPS DIY

Angka kemiskinan di DIY selama enam tahun terakhir (2012-2017) menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, angka kemiskinan sebesar 15,88 % dengan jumlah penduduk miskin 565,73 ribu jiwa. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2017 menjadi 12,36 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 466,33 ribu jiwa. Berbagai upaya yang ditempuh Pemda untuk mengurangi penduduk miskin sekaligus peningkatan taraf kesejahteraan penduduknya. Diantaranya melalui peningkatan perekonomian, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana pada level provinsi, pada seluruh wilayah masing-masing Kabupaten/Kota juga menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 (Maret) persentase kemiskinan terendah adalah Kota Yogyakarta sebesar 7,64 persen dan persentase tertinggi ada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 20,03 persen. Pada dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2015, kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar 21,73 %, sementara Kabupaten Kulon Progo sebesar 21,40 %. Selama dua tahun terakhir (2015-2017), tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dapat turun dari 21,73 % menjadi 18,65 atau turun sebesar 3,08 (rata-rata per tahun turun sebesar 1,54%).

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-DIY

Kabupaten/ Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)
Kulon Progo	23,62	23,31	21,39	20,64	21.40	20.30	20,03
Bantul	17,20	16,97	16,48	15,89	16.33	14.55	14,07
Gunungkidul	23,03	22,72	21,70	20,83	21.73	19.34	18,65
Sleman	10,61	10,44	9,68	9,50	9.46	8.21	8,13
Yogyakarta	9,62	9,38	8,82	8,67	8.75	7.70	7,64

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan data BPS, dalam kurun tujuh tahun terakhir Garis Kemiskinan DIY terus mengalami kenaikan. Pada daerah tipe perkotaan, tahun 2011 Garis Kemiskinan sebesar Rp227.602-/Kapita/Bulan. Setiap tahun selalu mengalami perbaikan seperti terlihat pada tabel di atas. Bila dibandingkan dengan nasional, terlihat mulai tahun 2016 dan 2017 GK perkotaan DIY nilainya lebih kecil dari GK perkotaan nasional.

Demikian pula untuk daerah tipe perdesaan. Nilai garis kemiskinan perdesaan DIY selalu mengalami kenaikan seperti ditunjukkan dalam tabel 1.3 dan grafik 1.2. Tahun 2011, garis kemiskinan perdesaan DIY sebesar Rp213.752-. Bila dibandingkan dengan nasional, terlihat mulai tahun 2015 sampai tahun 2017, garis kemiskinan perdesaan DIY nilainya lebih kecil dari garis kemiskinan perdesaan nasional.
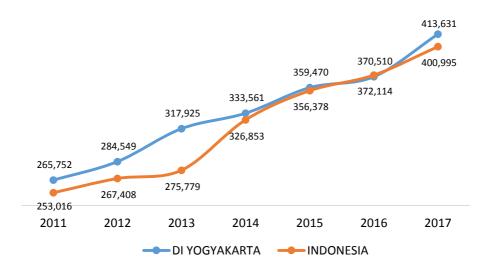
Gambar 2.1. Garis Kemiskinan Daerah Perkotaan DIY 2011-2017

Sumber: BPS DIY

Gambar 2.2. Garis Kemiskinan Daerah Perdesaan DIY 2011-2017

Sumber: BPS DIY

Besarnya garis kemiskinan tahun 2017 (September) adalah Rp396.271- untuk nilai gabungan desa dan kota. Peningkatan Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada peningkatan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan. Pada periode Maret-September 2017, Garis Kemiskinan di daerah perkotaan meningkat dari Rp385.308 per kapita per bulan menjadi Rp413.631 per kapita per bulan (naik sebesar 7,35 persen). Pada periode yang sama, Garis Kemiskinan di perdesaan hanya meningkat 1,38 persen dari Rp348.061 menjadi Rp352.861.

Pada tipe daerah perkotaan dalam tahun 2017, kontribusi 5 Komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan DIY komponen makanan secara beruturt-turut adalah beras, daging sapi, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir (sebesar 61,20%). Sedangkan pada komponen Non Makanan secara berturut berupa Perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi (sebesar 71,12%).

Pada tipe daerah perdesaan dalam tahun 2017, kontribusi 5 Komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan DIY komponen makanan secara berturut-turut berupa beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, dan kue basah (sebesar 55,97%). Sedangkan Non Makanan (Perumahan, bensin, air, kayu bakar, dan listrik) sebesar 65,85%;

Tabel 2.3. Lima Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan menurut Tipe Daerah (September 2017)

Jenis Komoditas	Perkotaan (%)	Jenis Komoditas	Perdesaan (%)
Garis Kemiskinan Makanan			
Beras	23,06	Beras	28,27
Daging Sapi	16,57	Rokok Kretek Filter	11,23
Rokok Kretek Filter	11,36	Daging Sapi	7,02
Telur ayam ras	5,79	Telur ayam ras	5,33
Gula pasir	4,42	Kue Basah	4,12
Garis Kemiskinan Non Makanan			
Perumahan	22,39	Perumahan	23,18
Bensin	21,5	Bensin	22,58
Listrik	13,94	Air	7,39
Pendidikan	9,32	Kayu Bakar	6,94
Perlengkapan Mandi	3,97	Listrik	5,76

Sumber: BPS Susenas 2017

2. Tingkat Kemiskinan DIY Per September 2017

Pada tahun 2012 (September), tingkat kemiskinan DIY sebesar 15,88, sementara pada tahun 2017 tingkat kemiskinan DIY sebesar 12,36%. Terjadi penurunan 3,52 poin selama 5 tahun dalam masa RPJMD DIY (2012-2017). Bila dirata-rata, penurunan per tahun sebesar 0,70 poin. Prestasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang nilai penurunannya sebesar 1,39 poin, dan penurunan terendah pada tahun 2016 yang hanya sebesar 0,06 poin.

Gambar 2.3. Tingkat Kemiskinan DIY

Sumber: BPS, Susenas September 2012 - September 2017

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2016-September 2017

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
Perkotaan		
September 2016	301,25	11,68
Maret 2017	309,03	11,72
September 2017	298,39	11,00
Perdesaan		
September 2016	187,58	16,27
Maret 2017	179,51	16,11
September 2017	167,94	15,86
Kota+Desa		
September 2016	488,83	13,1
Maret 2017	488,53	13,02
September 2017	466,33	12,36

Sumber: BPS Susenas September 2016, Maret 2017, September 2017

Berdasarkan hasil analisis BPS, turunnya tingkat kemiskinan pada September 2017 selaras dengan pertumbuhan positif beberapa indikator ekonomi. Pada Triwulan III 2017, perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen dibandingkan periode sebelumnya. Lapangan usaha pertanian yang merupakan salah satu tumpuan utama penduduk miskin di pedesaan tumbuh sebesar 14,61 persen. Pada periode yang sama, lapangan usaha yang diduga menjadi tumpuan penduduk miskin di perkotaan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing tumbuh sebesar 9,37; 2,69; 6,17 persen (BRS BPS DIY No. 63/11/Th XIX, 2017).

Industri Mikro Kecil (IMK), yang juga merupakan salah satu basis perekonomian bagi penduduk miskin, turut mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan II 2017. Pertumbuhan produksi IMK pada kurun waktu tersebut sebesar 2,93 (*q to q*) dan 18,25 (*y on y*).

3. Jumlah Penduduk Miskin DIY September 2012-2017

Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin DIY sebanyak 565,73 ribu jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin DIY sebanyak 541,95 ribu jiwa (berkurang 23,78 ribu jiwa). Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin DIY sebanyak 466,33 ribu. Bila dibandingkan dengan penduduk tahun 2016 yang sebesar 488,83ribu jiwa, maka berkurang sebesar 22,5 ribu jiwa.

Nilai penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi tahun 2015 (September) dari tahun 2014 sebesar 532,59 ribu jiwa menjadi 485,56 ribu jiwa (berkurang sebesar 47,03 ribu jiwa). Dilihat dari persentasenya, nilai penurunan terkecil terjadi pada tahun 2016 yakni 0,06. Namun dilihat dari jumlah penduduknya bertambah dari 485,56 ribu jiwa menjadi 488,83 ribu jiwa, atau bertambah sebesar 3,27 ribu jiwa.
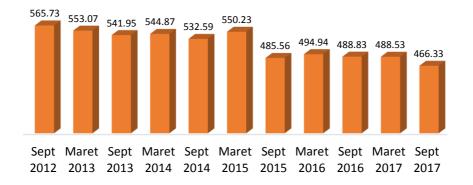
Gambar 2.4. Jumlah Penduduk Miskin di DIY September 2012-September 2017 (dalam ribuan orang)

Sumber: BPS, Susenas September 2012 - September 2017

4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) DIY 2012- 2017

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengatasi kedalaman kemiskinan DIY. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2012 (September) tingkat kedalaman kemiskinan (P1) DIY sebesar 2,89, sedangkan pada tahun 2017 (September) tingkat kedalam kemiskinan (P1) DIY sebesar 2,09 (turun sebesar 0,80 poin). Perkembangan P1 dari tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Bila dirata-rata per tahun maka penurunan P1 pertahun sebesar 0,16 poin. Pada tahun 2017 (September) nilai P1 sebesar 2,09. Bila dibanding dengan 2016 (September) yang sebesar 1,75, maka nilai P1 ini mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin.

Tabel 2.5. Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman, dan Indeks Keparahan DIY 2012-217

Bulan/Tahun	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	Po (%)	P1	P2	Po (%)	P1	P2	Po (%)	P1	P2
Sep-12	13.10	2.29	0.58	21.29	4.07	1.09	15.88	2.89	0.75
Sep-13	13.73	2.18	0.52	17.62	2.03	0.34	15.03	2.13	0.46
Sep-14	13.36	2.03	0.52	16.88	2.98	0.79	14.55	2.35	0.61
Sep-15	11.93	2.19	0.60	15.62	2.57	0.68	13.16	2.32	0.63
Sep-16	11.68	1.26	0.22	16.27	2.83	0.67	13.10	1.75	0.36
Sep-17	11.00	1.79	0.39	15.86	2.86	0.64	12.36	2.09	0.46

Sumber: BPS DIY: Statistik DIY 2017; BRS Januari 2018, diolah
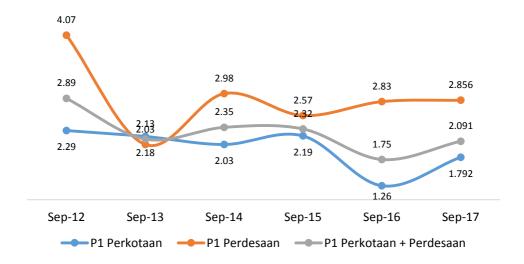
Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY, 2012-2017

Sumber: BPS DIY (Statistik DIY, 2017), diolah
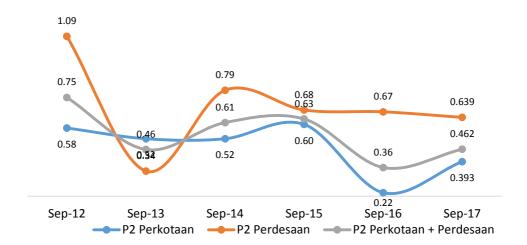
Gambar 2.6. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2012-2017

Sumber: BPS DIY

Tabel 2.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Menurut Daerah, September 2016 - September 2017

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2016	1,265	2,826	1,747
Maret 2017	2,148	2,290	2,191
September 2017	1,792	2,856	2,091
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2016	0,219	0,666	0,357
Maret 2017	0,582	0,471	0,549
September 2017	0,393	0,639	0,462

Sumber: BPS, Susenas September 2016, Maret 2017, September 2017

5. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) DIY 2012 – 2017

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Periode waktu 2012-2017 tingkat keparahan kemiskinan (P2) DIY cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 (September) tingkat keparahan kemiskinan (P2) DIY (Tabel 2.5.) sebesar 0,75, sedangkan pada tahun 2017 (September) tingkat

keparahan kemiskinan (P2) DIY sebesar 0,46 atau turun sebesar 0,29 poin. Bila dirata-rata per tahun, maka penurunan tingkat keparahan sebesar 0,06. Pada tahun terakhir 2017 (September) ini bila dibanding dengan tahun 2016 (September) sebesar 0,36, maka terjadi penurunan sebesar 0,10 poin.

6. Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan DIY 2012-2017

Pada tahun 2012 (September), tingkat kemiskinan perdesaan DIY sebesar 21,29% dan pada tahun 2107 kemiskinan perdesaannya sebesar 15,86%. Selama 2012-2017 telah dapat diturunkan sebesar 5,43 poin atau rata-rata per tahun sebesar 1,09 poin. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan perdesaan DIY sebesar 16,27% sehingga pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,59 poin.
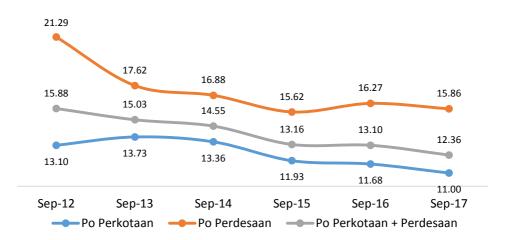
Gambar 2.7. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan DIY 2012-2017

Sumber: BPS DIY: Statistik DIY 2017 dan BRS Januari 2018, diolah

Tingkat kemiskinan perkotaan, pada tahun 2012 (September) adalah 13,10% dan pada tahun 2017 sebesar 11,00%. Selama 2012-2017, terjadi penurunan sebesar 2,10 poin. Bila dirata-rata per tahun, maka penurunannya sebesar 0,42 poin. Sementara dengan nilai Po perkotaan tahun 2016 sebesar 11,68%, maka perkembangan terakhir terjadi penurunan sebesar 0,68 poin. Selama enam tahun tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan untuk wilayah perdesaan selalu lebih tinggi.

7. Tantangan Pelaksanaan TPB

a. Menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sampai dengan 7%, dari tahun 2017 sebesar 12,36%. Mengingat selama 5 tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan rata-rata per tahun sebesar 0,70%.

b. Terkait dengan angka 1, beberapa persoalan perlu dipecahkan untuk efektivitas penurunan tingkat kemiskinan:
   1) Menyatukan data antara kabupaten-provinsi-pusat
   2) Terjadinya *inclusion dan exclusion error* pada data yang saat ini ada (Basis Data Terpadu dan Data Terpadu Pogram Penanganan Fakir Miskin/DTPPFM)
   3) Menyelesaikan kesenjangan antara tingkat kemiskinan makro (Susenas) dengan tingkat kemiskinan termonitor (*by name by address*)

c. Mengembalikan budaya, mental, karakter, atau perilaku miskin kembali kepada perilaku sosial yang bermartabat.

d. Menyelesaikan kesenjangan antara input (termasuk pembiayaan) program kebutuhan dasar (misalnya perbaikan RTLH) dan signifikansinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

e. Mengoptimalkan peran serta dari segala potensi yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan (CSR, perguruan tinggi, filantropy, dan lembaga lainnya: sosial masyarakat, Lembaga keagamaan, dsb).

f. Mengoptimalkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang berhak.

B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara maupun perseorangan. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan pangan. Meliputi jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, pangan tersebut tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan yang dimanfaatkan untuk hidup sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan peran dari masing-masing komponen ketahanan pangan. Komponen tersebut adalah ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Semuanya dilakukan melalui kegiatan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan, menyosialisasikan tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat. Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Termasuk upaya pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal.

Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat diukur dengan indikator kinerja skor PPH (Pola Pangan Harapan). Capaian skor PPH terlihat meningkat. Capaian tahun 2017 sebesar 88,5 (menggunakan data Susenas 2016 yang diolah). Hasil tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 83,4. Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA.
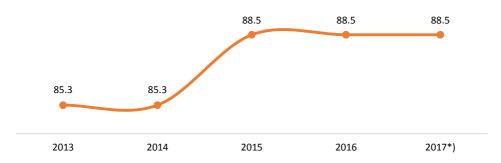
Gambar 2.8. Capaian Skor PPH DIY Tahun 2013-2017

Sumber: BKPP DIY, 2018

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan didukung oleh 3 (tiga) sub sistem penyusunnya. Ketiga hal tersebut adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Sasaran strategis pembangunan ketahanan pangan pertama adalah terwujudnya ketersediaan

pangan dengan indikator kinerja angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik (baik pangan hasil produksi dalam daerah maupun dari impor). Pencapaian indikator ketersediaan energi dan protein tahun 2017 sebesar 3.727 kal/kapita/hari dan 101,41 gr/kapita/hari. Hasil ini melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan (sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari).

Dari sisi konsumsi, selain pelaksanaan Gerakan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pencapaian target skor PPH didukung melalui usaha pemberdayaan wanita. Kegiatannya berupa pemanfaatan pekarangan, pengembangan diversifikasi produk antara, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Sasaran strategis pembangunan ketahanan pangan kedua adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja angka konsumsi energi dan angka konsumsi protein. Capaian tahun 2017, angka konsumsi energi di DIY adalah 2.299,5 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 68 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan (2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari), tingkat konsumsi energi di DIY telah melebihi angka kecukupan. Tetapi jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang dikonsumsi masyarakat, masih perlu ditingkatkan. Khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.
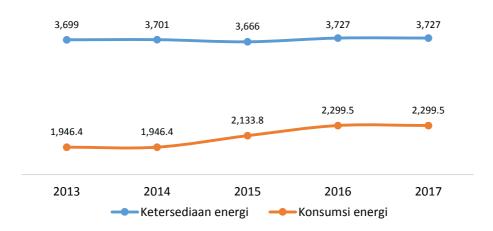
Gambar 2.9. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2013-2017

Sumber: BKPP DIY 2018

Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, terutama umbi-umbian, menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal tersebut sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif (seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung). Sebab umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glisemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan. Di wilayah DIY, tingkat ketersediaan energi dan protein lebih tinggi dibanding tingkat konsumsi masyarakatnya. Kondisi ini menggambarkan ketersediaan pangan di DIY mencukupi bahkan melebihi kebutuhan konsumsi penduduk DIY.
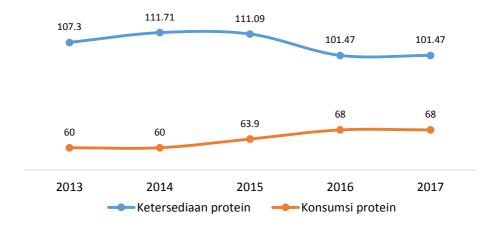
Gambar 2.10. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2013-2017

Sumber: BKPP DIY 2018

Selain mutu/kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting diperhatikan. Dengan terbukanya pasar terhadap produk pangan dari luar daerah maupun luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar. Baik pangan segar maupun olahan. Sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan pun terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman, sekaligus dapat bersaing menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA).

Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitasi diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan ke masyarakat. Tujuannya tersedia pangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan. Gapoktan di daerah sentra produksi pangan difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat. Harga pangan pun dapat terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya, dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Harga pangan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi dipantau secara rutin. Termasuk dilakukan pengendalian melalui operasi pasar oleh instansi terkait. Harga pangan pokok di DIY selama tahun 2017 relatif terkendali. Hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Selama periode 6 tahun sebelumnya, jumlah desa rawan pangan di DIY turun dari 80 desa (tahun 2012) menjadi 10 desa (tahun 2017). Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul (3 desa), Kabupaten Kulon Progo (4 desa), dan Kabupaten Gunungkidul (3 desa).
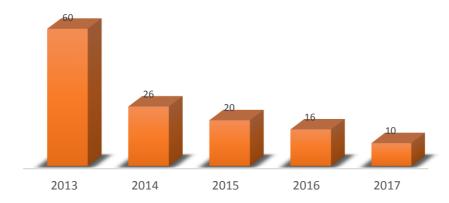
Gambar 2.11. Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2013-2017

Sumber: BKPP DIY, 2018

Persentase penyuluh, yang meningkat kapasitasnya, mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 74% dan pada tahun 2016 menjadi 87,22%. Bahkan pada tahun 2017 mencapai 100% (sesuai dengan target akhir RPJMD periode 2012-2017). Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang

mantap dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Program penyuluhan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian kedepannya. Program disusun dengan mengakomodir keperluan masyarakat yang dibuat berjenjang. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Program tersebut tetap berpegang pada rambu-rambu perundangan kebijakan pemerintah, RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Program yang disusun secara partisipatif diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Hasil akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatkan kualitas penyuluh tersebut.

Menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh. Salah satu upaya untuk menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sebab alih fungsi lahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pertanian menempati posisi tiga besar penyumbang PDRB di DIY, yaitu sebesar 10,41%, pada tahun 2016. Tetapi, dalam kurun 2012-2016, kontribusi sektor ini mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,06% dalam hal distribusi persentase PDRB DIY. Hal tersebut disebabkan oleh kompetisi sektor pertanian dengan sektor lain dalam penggunaan sumber daya lahan dan air. Selama rentang waktu tersebut, telah terjadi alih fungsi lahan sawah rata-rata sebesar 0,083% per tahun. Alih fungsi justru terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan produktivitas tinggi. Kasus ini banyak ditemui di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Penyebab alih fungsi lahan yang tinggi disebabkan oleh: peningkatan kebutuhan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2007-2017, lahan sawah DIY mengalami penurunan dari 57.443 ha menjadi 51.161 ha (rata-rata sebesar 1,13% per tahun). Tantangan yang

harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Upaya perlindungan lahan pertanian juga belum didukung langkah penetapan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kebupaten. Penurunan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12. Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY

Sumber: BPS, 2018

Sawah di DIY terbagi menjadi sawah beririgasi dan sawah non-irigasi (sawah tadah hujan). Luasan sawah beririgasi cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun, namun sebaliknya sawah non irigasi/tadah hujan mengalami kenaikan. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY Tahun 2013-2017

Jenis Lahan Sawah	2013	2014	2015	2016	2017*
Sawah Beririgasi	47.133	46.300	45.976	45.880	41.712
Sawah Non Irigasi	9.406	9.350	9.449	9.412	9.449

**)Angka Sementara*

Sumber: Dataku Jogja. Bappeda DIY, 2018

Rencana kawasan budidaya untuk kawasan peruntukan pertanian memiliki arah pemanfaatan ruang untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Selain itu, untuk meningkatkan prasarana dan sarana pendukung di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian dengan cara melestarikan

kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan kering. Tujuannya mendukung ketahanan pangan dan energi, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Berdasarkan pencermatan RTRW DIY pada tahun 2018, dilakukan pengusulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY seluas 104.905,8 ha.

DIY mengalami fluktuasi produksi padi pada kurun waktu 2013-2017, dimana pada tahun 2017 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2.045 ton. Dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang tahun 2017, pertanian mengalami penurunan sebesar 34.204 ton dan ladang mengalami peningkatan sebesar 1.507 ton pada tahun2017 karena peningkatan produktivitas. Produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Hal ini diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.

Produksi tanaman pangan di DIY Tahun 2013-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2013-2017

No	Jenis Tanaman	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017*)	
1	Padi Sawah	721.674	719.194	746.810	712.285	678.081	-1,48
2	Padi Ladang	200.150	200.379	198.326	170.417	202.576	0,97
	Total Padi	921.824	919.573	945.136	882.702	880.657	-1,08
3	Jagung	289.580	312.236	299.084	310.257	331.764	1,96
4	Kedelai	31.677	19.579	18.822	16.763	8656	-25,34
5	Kacang Tanah	70.834	71.582	83.300	75.816	79.907	3,46
6	Kacang Hijau	318	261	230	289	301	-0,001
7	Ubi Kayu	1.013 .565	884 .931	873 .362	1.125 .375	1.025 .779	1,50
8	Ubi Jalar	4.951	5.237	6.070	3.256	5289	9,44
9	Cantel/Sorghum	135	145	51	56	31	-23,06

*)Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Tanaman hortikultura di DIY juga mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 383.913 ton menjadi menjadi 394.800 ton pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir sebesar 0,67%. Produksi hortikultura selengkapnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Produksi Hortikultura di DIY (dalam ton), Tahun 2015-2017

Kelompok	2015	2016	2017*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Buah dan Sayur Semusim	98.600	100.177	100.630	1,03
Buah dan Sayur Tahunan	273.239	272.763	276.259	0,55
Tanaman Biofarmaka	17.734	19.481	17.911	0,90

**)Angka Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Komoditas melon merupakan kontributor terbesar kelompok buah dan sayur semusim dengan sumbangan sebesar 26,04%. Komoditas tersebut banyak dikembangkan di lahan pesisir. Kontributor terbesar kelompok buah dan sayur tahunan adalah komoditas Salak (26,63%) yang banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, Pakem). Sedangkan Jahe (27,45%) merupakan kontributor terbesar kelompok tanaman biofarmaka. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mudah dikembangkan serta permintaan pasarnya sebagai bahan farmasi herbal cukup tinggi.

Untuk sub sektor perternakan, jumlah populasi ternak tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,53% dibanding tahun 2016 (setara dengan 578.361 ekor). Ternak unggas merupakan komoditas yang pertumbuhannya cukup tinggi. Kebutuhan unggas untuk bahan pangan cukup tinggi di DIY, terutama dalam rangka mendukung daerah ini sebagai tujuan wisata. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2013 hingga 2017 sebesar 7,50%. Lebih rinci pertumbuhan populasi ternak disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10. Populasi Ternak di DIY (dalam ekor), Tahun 2013-2017

Kelompok	2013	2014	2015	2016	2017*	Rata-rata Pertumbuhan
Ternak Besar	279.877	309.037	307.418	311.766	322.212	3,67
Ternak Kecil	514.030	565.786	576.697	585.622	600.868	4,04
Ternak Unggas	11.937.631	13.535.473	15.047.604	15.465.288	16.017.957	7,73

**)Angka Sementara*

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Populasi ternak besar DIY didominasi oleh sapi potong yang berkontribusi sebesar 97,65%. Sedangkan kambing merupakan kontributor terbesar kelompok ternak kecil dengan sumbangan sebesar 67,33%. Gunungkidul merupakan sentra penghasil ternak besar dan kecil. Gunungkidul menyumbang 48,39% populasi sapi potong DIY dan 44,23% populasi kambing DIY. Sementara ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas dengan peranan sebesar 44,89%. Kabupaten Sleman adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar dengan kontribusi sebesar 38,16%.

Wilayah DIY yang memiliki lahan kering dengan topografi bergelombang (berbukit/bergunung). Hal ini membuat konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan. Diantaranya komoditas tersebut adalah: kelapa, kakao, kopi, tembakau, dan tebu. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut memiliki cakupan luas yang besar, prospek pasar yang potensial, nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Luas lahan perkebunan di DIY tahun 2017 mencapai 67.290,704 ha. Luasan tersebut tersebar di 4 Kabupaten di DIY. Kabupaten Kulon Progo menjadi sentra produksi komoditas kelapa, kopi, kakao dan nilam. Kabupaten Gunungkidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Sedangkan komoditas tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.11. Produksi 5 Komoditas Uggulan Perkebunan DIY Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kelapa	55.752,71	53.775,40	58.725,92	54.606,52	47,318.93
2.	Kopi	1.073,09	865,23	766,00	584,67	2.933,75
3.	Jambu mete	260,63	452,36	567,90	421,29	277,78
4.	Kakao	1.124,10	1.597,67	2.540,79	1.608,96	1.896,12
5.	Tebu	15.960,80	14.896,78	11.251,80	10.206,37	7.988,90
	Jumlah	**74.171,33**	**71.587,44**	**73.852,41**	**67.427,81**	**60.415,48**

**) Angka Sementara*

Sumber: Dishutbun DIY, 2018

Produksi perikanan DIY, baik budidaya maupun tangkap, cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan budidaya yang mendominasi hasil perikanan di DIY ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.13. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2018

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi *stunting* pada anak di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi dan angkanya fluktuatif. Pada tahun 2014, proporsi *stunting* pada anak balita sebesar 22,1% dan menurun menjadi 19,8% tahun 2017. Angka Kurang Gizi pada balita masih menjadi masalah di DIY. Angkanya meningkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Tahun 2014 sebesar 12,7% dan tahun 2017 menjadi 15,9%. Faktor yang berperan penting dalam

mempengaruhi *stunting* dan kurang gizi adalah rendahnya akses terhadap makanan dari jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik (terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak), rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan (termasuk akses sanitasi dan air bersih). Masalah *stunting* dan kurang gizi juga berhubungan dengan konsumsi pangan. Data menunjukkan balita 53% defisit energi dan 24,3% defisit protein, dan ibu hamil 51,2% defisit energi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan gizi berkaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak.

Permasalahan gizi yang lain adalah masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil di DIY. Pada tahun 2015 sebesar 14,85 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 16,09 %. Upaya penurunan prevalensi anemia ibu hamil perlu dilakukan secara optimal. Sebab target penurunan jumlah kematian ibu menjadi prioritas permasalahan kesehatan di DIY. Prevalensi ibu hamil yang menderita KEK di DIY mengalami kenaikan. Tahun 2015 adalah 9,11%,, tahun 2016 menjadi 10,39 %, tahun 2017 menjadi 10,70. Permasalahan anemia ibu hamil dan ibu hamil KEK merupakan permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan lebih baik, mengingat status kesehatan ibu hamil sangat menentukan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi gizi lebih pada anak balita. Gizi lebih di DIY juga merupakan masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi di DIY, balita kegemukan (berat badan per Umur) tahun 2014 adalah 5,84%. Tahun 2015 menjadi 3,81% dan tahun 2016 menjadi 3,11%. Pada usia diatas 18 tahun, DIY adalah salah satu provinsi dengan angka obesitas diatas nasional. Prevalensinya sebesar 15,8%, sementara nasional adalah 15,4% (Riskesdas, 2013). Dengan memperhatikan masalah gizi, DIY menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.
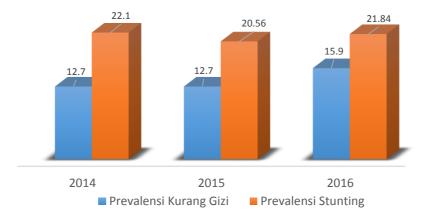
**Hasil Sementara Sirkesnas 2016*

Gambar 2.14. Prevalensi Kurang Gizi dan Stunting pada Balita dan Baduta di DIY Tahun 2014-2016

Sumber: Riskesdas Tahun 2007, 2010, dan 2013

C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Upaya pemerintah mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditangani tenaga kesehatan. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap tahunnya. Persentasenya adalah 46% (2007), 63,2% (2012) dan 79% (2017). Data Susenas menunjukkan peningkatan sebesar 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional meningkat dari 73% (2007), 83% (2012) dan menjadi 90,9% (2017). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di DIY cenderung stagnan. Penyebabnya karena pencapaiannya sudah maksimal (yaitu 99,92% tahun 2013 menjadi 99,97% tahun 2017). Sedangkan persalinan di fasilitas kesehatan pencapaiannya tidak jauh berbeda dengan persalinan oleh tenaga kesehatan. Tahun 2013 sebesar 99,80% dan tahun 2017 sebesar 99,87%. Jumlah kematian ibu angkanya fluktuatif. Tetapi ada kecenderungan menurun. Kasus kematian ibu tahun 2012 sebesar 40 kematian dan menjadi 34 pada tahun 2017. Secara nasional AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Artinya terjadi penurunan

sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual ReductionRate*/ARR). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Kematian bayi adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah kematian bayi menurun dari tahun 2012 sampai tahun tahun 2017. Kematian bayi tahun 2012 sebanyak 400 kematian menjadi 313 pada tahun 2017. Sedangkan kematian balita pun mengalami penurunan dari 450 pada tahun 2012 menjadi 343 kematian pada tahun 2017. Data proyeksi kematian bayi di DIY cenderung stabil. Dari 13 per 1000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup tahun 2035. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) di Indonesia terus menurun. Data SDKI tahun 1991 sebesar 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup tahun 2017. Angka Kematian Balita (AKBA) mengalami penurunan sejak tahun 1991. Dari 97 per 1000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup tahun 2017.

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) stagnan dalam 3 tahun terakhir. Capaian tahun 2015 sebesar 97,16% menjadi 97,44% tahun 2017. Data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap, dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.
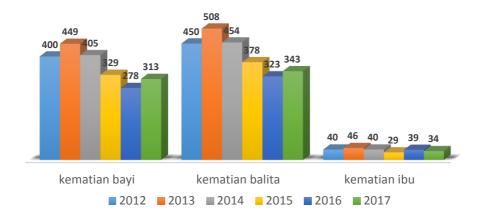
Gambar 2.15. Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu tahun 2012-2017

Sumber: Profil Kesehatan DIY (2012-2017)

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, sistem rujukan, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan surveilans gizi; 4) peningkatan kompetensi petugas gizi dan KIA; 5) pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;dan 6) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama capaian imunisasi tiap desa dan daerah yang belum sepaham untuk imunisasi.

Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular. DIY menempati urutan ke-9 sebagai provinsi dengan penderita HIV-AIDS terbanyak. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) terus meningkat dari 2 orang (1997) menjadi 4012 orang (2017). Penemuan TB BTA (+) dari tahun 200-2016 masih belum mencapai target 70% (gambar 7). Kemajuan yang signifikan dicapai dalam upaya mengakhiri epidemi malaria, kusta dan filariasis. DIY merupakan wilayah endemis Malaria, yang sampai dengan saat ini belum dapat dieliminasi. Wilayah endemis malaria berada di Kabupaten Kulon Progo, khususnya terjadi di wilayah

perbukitan Menoreh yang terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Kecenderungan penurunan jumlah kasus malaria dari tahun 2012-2016, dari 241 kasus menjadi 95 kasus. DIY hanya memiliki satu kabupaten yang memiliki kasus malaria dimana direncanakan tahun 2022 akan eliminasi. Pada penyakit kusta, DIY sudah eliminasi begitu juga filariasis.
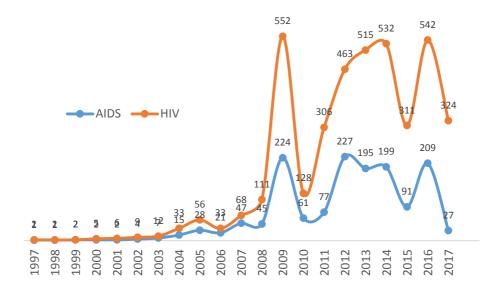
Gambar 2.16. Jumlah kasus HIV dan AIDS 1997-2017

Sumber: Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY (2017)

Gambar 2.17. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit Tuberkolosis (TBC) di DIY

Gambar 2.18. Kasus Malaria DIY tahun 2012-2017

Gambar 2.19. API (*Annual Parasite Index*) Malaria di DIY Tahun 2015-2017

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% (hampir 42,1 juta penduduk di atas 18 tahun). Di DIY, beberapa prevalensi PTM melebihi angka nasional. Prevalensi Diabetes Mellitus sebesar 2,6% dibanding nasional 1,5%. Hipertensi hampir sama dengan angka nasional (25,7%), stroke 16,9 permil dibandingkan nasional 12,1 permil, dan kanker 4,1 permil dibandingkan nasional 1,4 permil. Prevalensi hipertensi pun mengalami fluktuasi berdasarkan Riskesdas 2007, Riskesdas 2013 dan Sirkesnas 2016. Prevalensi obesitas penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013).

Di DIY, prevalensi obesitas diatas angka nasional sebesar 15,8%. Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia. Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sedangkan di DIY angkanya lebih kecil dari nasional, yaitu sebesar 15,6%. Sebanyak 26,1% penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik, dan tidak berbeda jauh dengan DIY yang angkanya 27,5%. Konsumsi buah dan sayur pada 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun masih kurang, sedangkan di DIY jumlahnya lebih kecil dari angka nasional sebesar 52,1% (2013).

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan *screening* wajib pada ibu hamil dan kelompok beresiko tinggi; 2) kerja sama lintas sektor dan masyarakat untuk penemuan TB; 3) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR); 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *diagnostic kit*) dan TB; 5) Eliminasi malaria pada kawasan menoreh.

Tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus meningkat Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 3,1 juta penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya *unmet need* pelayanan kesehatan. Dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antar wilayah. Upaya yang perlu dilakukan adalah: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) mendorong Pemda untuk dapat mendorong integrasi jamkesda ke dalam JKN; 3) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 4) mengurangi ketimpangan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan. Tantangan utama yang

dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata. Sebagian besar tenaga kesehatan terutama dokter, dokter spesialis dan dokter gigi terkonsentrasi di kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan Bantul. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas di Indonesia meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk DIY, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2016 sebesar 97,73% dan tahun 2017 sebesar 95,88%. Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersedian layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan diantaranya: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara itu, keberhasilan pembangunan kesehatan dinilai dari capaian indikator yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Status Gizi Bayi/Balita.

2018

1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitunganya. Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Capaian AHLS DIY tahun 2016 adalah sebesar 15,23 tahun, meningkat 0,20 poin dari 15,03 pada tahun 2015. Untuk kabupaten/kota, capaian tertinggi Kota Yogyakarta sebesar 16,81 tahun dan capaian terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 12,93 tahun.
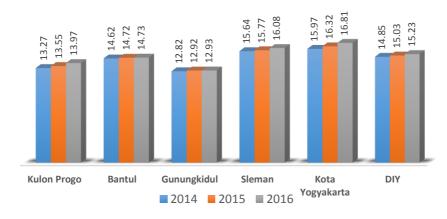
Gambar 2.20. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2014-2016

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

Dari gambar tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY, sedangkan AHLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY, ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS di kabupaten kota di DIY. Dari data bisa disimpulkan bahwa AHLS Gunungkidul selain capaiannya terendah di antara kabupaten kota di DIY, meskipun ada peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun tetapi peningkatannya kurang signifikan.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri.

Untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama 2010-2016 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah DIY yaitu dari 8,51 di tahun 2010 menjadi 9,12 di tahun 2016.
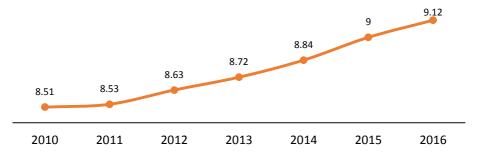
Gambar 2.21. Rata-rata lama sekolah

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DIY Tahun 2010-2016. Dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2015 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,41 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 6,46 tahun, dengan kata lain terdapat ketimpangan yang mencolok antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar.

Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2014-2016 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar berikut.
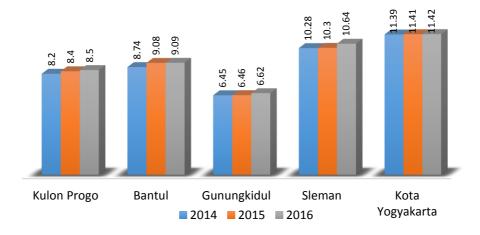
Gambar 2.22. Capaian rata-rata lama sekolah DIY

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016

E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. DIY (DIY) meraih capaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia selama dua tahun berturut-turut. Meskipun begitu,

terjadi penurunan skor dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015, IPG DIY adalah 94,41 dan turun menjadi 94,27 pada tahun 2016. Selain itu, disparitas pencapaian IPG antar kabupaten/kota di DIY cukup tajam. Berdasarkan data tahun 2015 capaian IPG tertinggi sebesar 98,78 untuk Kota Yogyakarta dan terendah 83,10 untuk kabupaten Gunungkidul. Demikian pula dengan IDG, terdapat penurunan dari 68,75 pada tahun 2015 menjadi 66,96 pada tahun 2016. Disparitas IDG antar kabupaten/kota juga terlihat lebar, IDG Kota Yogyakarta tertinggi dengan 79,33 dan Kabupaten Bantul terendah dengan pencapaian IDG sebesar 61,77.

Gambar 2.23. Trend IPG dan IDG Tahun 2010-2016

Salah satu faktor krusial penyebab menurunnya skor IPG dan IDG DIY adalah rendahnya tingkat partisipasi perempuan di ranah politik. Tantangannya adalah meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Prevalensi Perempuan Korban KDRT yang dilaksanakan oleh BPPM DIY dan Rifka Annisa Women Crisis Centre pada tahun 2017 di Kabupaten Sleman menunjukkan:

1. Kekerasan oleh pasangan: diperkirakan 1 dari 5 (19,3%) perempuan berusia 18-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya sepanjang hidupnya. Lebih lanjut, 2 diantara 10 (5,5%) orang perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan emosional sebesar 17,5%. Sedangkan rentang usia mayoritas perempuan yang mengalami kekerasan adalah 35-49 tahun (12,5%).
2. Kekerasan oleh selain pasangan: Sebesar 10,1% pernah mengalami kekerasan fisik sebelum berusia 15 tahun. Sebagian besar pelaku kekerasan sejak berusia 15 tahun adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Prevalensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh non-pasangan sejak usia 15 tahun adalah sebanyak 2,4%. Terdapat sebanyak 22,5 % perempuan yang mengaku mengalami kekerasan seksual semenjak usia 15 tahun. Pelaku kekerasan seksual non-pasangan terbesar (39,5%) adalah orang yang terdekat dikenal oleh korban.

Data yang dihimpun oleh BPPM DIY menunjukkan perempuan dan anak koban kekerasan angkanya terus meningkat. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1497 korban yang melapor. Pada tahun 2016 meningkat mejadi 1509 korban melapor. Angka ini ditengarai hanya merupakan puncak dari gunung es mengingat masih kentalnya budaya patriarki dan tabu di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Persentase perempuan yang menikah pada usia anak tahun 2016 meningkat 12,76% dari 8,85% di tahun 2015 menjadi 21,61%. Pada tahun 2016, Bantul mengalami kenaikan jumlah pernikahan anak yang signifikan, dimana pada perempuan usai <16 tahun terjadi peningkatan dari

8 menjadi 31 anak, dan pada anak laki-laki <19 tahun dari 31 menjadi 81. Pernikahan anak perempuan usia 17-21 tahun meningkat lebih dari 100% dan laki-laki 19-21 tahun meningkat lebih dari 2 kali lipat jumlah tahun 2015. Kenaikan jumlah usia pernikahan anak juga terjadi di Kulon Progo. Gunungkidul justru mengalami penurunan pernikahan usia anak dan usia muda. Keberadaan peraturan bupati tentang peningkatan usia perkawinan memberikan hasil yang signifikan pada pendewasaan usia menikah.

Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS). Disparitas gender dalam pemerataan pendidikan masih ditemui di berbagai wilayah di DIY. Tren angka harapan lama sekolah perempuan di DIY masih berada di bawah laki-laki dan terjadi dari tahun ke tahun tanpa terbatas antara wilayah rural dan urban. Di tingkat provinsi, AHL perempuan di tahun 2015 adalah 14.88 tahun, sementara laki-laki mencapai 15.22 tahun. Keduanya terpaut 0.34 tahun. Dari kelima wilayah, AHL terendah adalah anak perempuan di Gunungkidul yang hanya berada di angka 12.70 tahun. Meskipun sesama daerah rural, pencapaian AHL perempuan di Kulon Progo justru lebih tinggi dibanding laki-laki dengan selisih angka mencapai 1.13 tahun.

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ditemukan dalam rata-rata lama sekolah. Secara keseluruhan, angka rata-rata sekolah perempuan di DIY adalah 8.40 tahun, sementara laki-laki adalah 9.64 tahun. Selisih di antara keduanya mencapai 1.24 tahun. Kondisi ini secara merata terjadi di setiap daerah di DIY. Di Gunungkidul, kesenjangan semakin melebar mencapai 1.54 tahun dimana rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 7.27 tahun, sementara perempuan jauh di angka 5.73 tahun.

Di Sleman, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga melebar, laki-laki 10,83 tahun dan perempuan 9,78 tahun. Jika melihat tren lima tahunan, di Gunungkidul sendiri bisa dilihat bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah laki-laki lebih progresif dibandingkan perempuan yang cenderung pelan. Di DIY, dari tahun 2014 hingga 2015, pencapaian rata-rata lama pendidikan laki-laki dan perempuan pun terlihat tidak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerataan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki tidak terbatas pada persoalan ekonomi, infrastruktur, dan kondisi geografis. Di bidang pendidikan, pemerataan bagi perempuan dan laki-laki berkelindan dengan berbagai faktor yang lebih rumit dan seringkali tidak kasat mata. Seperti stereotip gender yang melekat baik pada laki-laki atau perempuan. Pernikahan dini dan kehamilan remaja merupakan persoalan penting lain yang ikut menghambat perempuan menamatkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Peneliti dari PSKK UGM, Dr. Umi Listyaningsih, M.Si., memaparkan tren pernikahan usia dini di Yogyakarta tidak hanya dipicu oleh kehamilan. Rendahnya angka wajib belajar dan minimnya pengetahuan tentang konsep perencanaan keluarga menjadi penyebab lain pernikahan dini. Upaya peningkatan masa menempuh pendidikan dengan penerapan wajib belajar 12 tahun yang digencarkan pemerintah pada 2015 lalu sendiri masih belum diterapkan secara serius karena tidak ada payung hukum yang mewajibkan pemerintah provinsi dan daerah untuk segera menerapkan.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan peraturan daerah dan kebijakan yang ada; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Melemahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan kebijakan publik masih terjadi di DIY. Kuota 30% perempuan yang menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara umum masih belum terpenuhi, kecuali jaksa dan pejabat eselon 3, 4 dan 5.

Perempuan yang menduduki jabatan kepala daerah mengalami penurunan dari 40% menjadi 20% di tahun 2016, sementara persentase perempuan wakil kepala daerah masih tetap 20%. Di level kecamatan, jumlah camat perempuan, tetap pada posisi 9% dari 78 camat di DIY. Di Gunungkidul, tidak ada satupun

perempuan yang menduduki jabatan camat di tahun 2016. Sementara perempuan yang menduduki jabatan lurah atau kepala desa pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 10,3% menjadi 9,6%, namun Bantul menambah satu orang perempuan sebagai kepala desa.

Perempuan di DIY yang menduduki jabatan eselon 2 dan eselon 3 meningkat jumlahnya, terutama di Pemda DIY. Sementara eselon 4, jumlahnya menurun banyak, terutama karena restrukturisasi kelembagaan OPD. Namun DIY justru mengalami peningkatan jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon 4. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan struktural, persentase perempuan justru semakin rendah, meskipun persentase pegawai golongan 3 dan 4 lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dengan kata lain, isunya bisa jadi bukanlah pada fase rekrutmen pegawai negeri sipil, namun bagaimana skema pengembangan karir memungkinkan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menduduki jabatan-jabatan strategis.

Problematika kebijakan netral gender, lingkungan kerja yang tidak ramah perempuan, budaya *ewuh pakewuh*, pandangan miring masyarakat terhadap perempuan yang memiliki jabatan/karir lebih tinggi dibanding suami, ditambah dengan masalah internal perempuan yang terperangkap dalam konstruksi gender, seringkali membuat perempuan kurang berani mengambil kesempatan dalam berkarir, maupun meneruskan pendidikan. Perempuan cenderung kurang berani dan memilih aman, memilih rumah tangga dan keluarga sebagai pertimbangan melanjutkan pendidikan ataupun mengejar jabatan.

Dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah di 5 kabupaten/kota, partisipasi perempuan sebagai pemilih selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di Kulon Progo, perempuan yang menggunakan hak pilih mencapai lebih dari 80%, sementara laki-laki 77%. Namun, tingginya partisipasi dalam menggunakan hak pilih ini tidak sejalan dengan jumlah atau persentase perempuan sebagai calon legislaif ataupun calon kepala daerah. Meski kuota 30% telah dilampaui, dalam pertarungan sesunggunya, banyak peempuan yang tersingkir. Data anggota legislatif perempuan di DIY maupun kabupaten/kota memperlihatkan sulitnya mencapai kuota 30% anggota dewan.

Tahun 2015, Sleman adalah wilayah dengan anggota legislatif perempuan terbanyak sebesar 26%, disusul Kota Yogyakarta 25%, Kulon Progo dengan 18%, Gunungkidul 16%, dan Bantul dengan 8%. Sementara di DIY, 11% anggota dewan adalah perempuan. Di level desa, perempuan yang menjadi anggota BPD persentasenya paling tinggi adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 7,94%, sementara terendah adalah Sleman dengan 2% BPD perempuan.

Begitupun dalam kepengurusan partai politik. Beberapa isu gendernya antara lain, partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai masih dibawah 20%, kecuali kota yang mencapai 27%. Penyebabnya karena perempuan tidak tertarik berkarir di dunia politik dan dukungan partai terhadap kepemimpinan perempuan masih setengah hati. Meski sudah diatas kuota 30%, namun persentase jaksa perempuan yang menduduki jabatan struktural dan fungsional mengalami penurunan dari 51,37% di tahun 2015 menjadi 45,76% di tahun 2016. Penurunan persentase ini terutama terjadi pada jabatan struktural. Perempuan yang menjabat sebagai hakim dan pejabat struktural di jajaran pengadilan di DIY mengalami penurunan yang signifikan dari 28,57% di tahun 2015 menjadi 9,09% di tahun 2016. Perempuan yang menduduki jabatan di kepolisian mengalami penurunan dari 8,8 % di tahun 2015 menjadi 6,25% di tahun 2016.

Penyebab rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan publik antara lain karena, pandangan masyarakat (termasuk pegawai) bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sehingga karir suami menjadi lebih penting dibandingkan karir istri. Pandangan masyarakat (termasuk pegawai) bahwa perempuan kurang berani mengambil keputusan strategis dibandingkan laki-laki, sehingga laki-laki lebih tepat untuk menduduki jabatan strategis. Disamping itu, menguatnya fundamentalisme tekstualis yang juga menempatkan posisi perempuan identik dengan urusan domestik.

Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik maupun dalam jabatan publik. Perempuan memilih berkarir dengan "*sakmadyo*", dengan pertimbangan peran sebagai penangung jawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga dan pengasuhan anak. Pendidikan politik di keluarga juga ditengarai tidak cukup

mengajarkan anak berpartisipasi (termasuk berdialog dan bernegosiasi) dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam politik harian keluarga, pengambilan keputusan seringkali dilakukan sepihak dan menjadi otoritas orang tua.

Meningkatnya beban perempuan di ranah produktif dan publik yang tidak diimbangi dengan pembagian peran domestik, menjadikan perempuan tidak memiliki banyak pilihan. Perempuan pekerja yang memiliki penghasilan memadai akan membagi peran domestiknya dengan perempuan lain sebagai asisten rumah tangga (baca PRT). Konsekuensinya tentu membagi penghasilannya untuk 'membayar' berkurangnya beban praktek domestik yang harus dijalani. Pilihan yang lain adalah membagi beban domestik dengan keluarga. Mislanya dalam pengasuhan anak, banyak keluarga yang meminta jasa oang tuanya untuk mengasuh anak selama perempuan menjalani peran produksinya. Pada posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan, beban ganda semakin 'mengikat' karena pandangan masyarakat bahwa setinggi apapun karir perempuan, dia tetap harus menunjukkan keteladanan sebagai perempuan yang tidak meninggalkan peran yang pada banyak pihak termasuk perempuan sendiri masih menganggap bahwa peran domestik adalah kodrat yang harus dijalani sebagai perempuan.

Dukungan bagi kepemimpinan perempuan masih terbatas, termasuk dari perempuan maupun dari keluarga. Tingginya jumlah calon legislatif perempuan yang tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif perempuan memperlihatkan bahwa di satu sisi, perempuan masih menjadi pelengkap prasyarat kuota 30%, kurangnya modal (baik kapasitas internal, modal, dan pengalaman) yang dimiliki perempuan menjadi peluang bagi lawan politik, baik yang berasal dari partai yang sama ataupun partai lain. Hal ini juga menggambarkan bagaimana pendidikan politik dalam keluarga tidak cukup mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan memilih karir profesional maupun politik.

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Di DIY, pengguna alat kontrasepsi tahun 2016 didominasi oleh perempuan. Sebanyak 44 % alat kontrasepsi yang dipilih adalah suntik; 25 % IUD; 11 % menggunakan pil; masing-masing 7% untuk metode kontrasepsi implant dan kondom; 5% untuk MOW, dan pengguna paling sedikit adalah MOP sebanyak 1%.

Namun demikian, yang menggembirakan adalah jumlah pengguna alat kontrasepsi laki-laki meningkat dari tahun 2015, yakni menjadi 32.898 dari 32.404 akseptor. Kabupaten dengan tingkat penggunaan alat kontrasepsi untuk laki-laki cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya adalah Bantul (9.609 akseptor). Di lain sisi, peserta KB perempuan di DIY mengalami penuruan dari tahun sebelumnya, yaitu 398.915 akseptor di tahun 2016 setelah sebelumnya berjumlah 399.014 akseptor.

Hal tersebut menunjukkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan kepemilikan anak hanya dititikberatkan kepada perempuan. Sekali lagi, perempuan secara langsung memang menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, tetapi di kehidupan sosial diposisikan hanya pada urusan domestik, walau pada dasarnya kesehatan dan proses reproduksi adalah tanggung jawab semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Di banyak tempat, perempuan tidak banyak mendapatkan pengetahuan tentang informasi kesehatan reproduksi sekaligus penyakit penyerta yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu. Bahkan perempuan kerap menjadi "korban" atas kuasa yang timpang dari suami atau keluarga.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Berdasarkan data dari UNICEF, stereotip terefleksi dalam cara siswa memilih spesialisasi dalam menempuh pendidikan. Sebagai contoh, ilmu sosial umumnya diambil oleh pelajar perempuan sementara bidang teknologi lebih banyak dipelajari oleh pelajar laki-laki. Baik laki-laki atau perempuan kerap mendapat label negatif ketika mengambil spesialisasi tak umum. Kondisi ini akan terlihat pada jenjang lebih tinggi ketika pelajar mulai memilih jurusan dan konsentrasi yang diambil. Dengan stereotip tersebut, kesempatan perempuan mengembangkan kapasitas dan berkontribusi di bidang-bidang teknologi menjadi terbatas.

Di luar itu, perempuan juga banyak yang melakukan usaha sendiri, dalam jumlah yang lebih banyak dibanding laki-laki yang mengerjakan hal yang sama. Pada tahun 2015 misalnya, sebanyak 50,63% perempuan memiliki usaha sendiri, jumlah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang sebanyak 49,37%. Usaha sendiri ini, banyak dilakukan perempuan, seperti usaha warung, membuat usaha produksi makanan rumahan, hingga modiste/usaha jahitan. Namun juga,

dengan berkembangnya teknologi, banyak perempuan yang sekarang melakukan bisnis online: dari menjual baju, sepatu, pakaian bayi, makanan siap saji, sepatu, bahkan hingga perlengkapan rumah tangga.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Saat ini BPPM telah mengembangkan sebuah aplikasi penganggaran bernama "Sipager". Aplikasi berbasis online ini diharapkan akan lebih memudahkan berbagai perangkat daerah baik di DIY maupun kabupaten/kota untuk dapat menyusun penganggaran yang responsif gender.

F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kualitas air di DIY terus-menerus dipantau. Termasuk sungai-sungainya. Data hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) DIY. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air adalah indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas akibat senyawa pencemar.

Tabel 2.12. Target IKA DIY 2018-2022

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IKU	86,39	87,06	87,73	88,40	89,07	89,74

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij. ‘Ci’ menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke ‘i’. Sementara ‘Lij’ menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ‘i’ yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air ‘j’. Peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai PIj>1 menggambarkan bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
2. Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform;
3. Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:
   a. IKA = 100, untuk PIj≤1,
   b. IKA = 80, untuk PIj>1 dan PIj≤4,67 (4,67 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
   c. IKA = 60, untuk PIj>4,67 dan PIj≤6,32 (6,32 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas III terhadap kelas I),
   d. IKA = 40, untuk PIj>6,32 dan PIj≤6,88 (6,88 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I),
   e. IKA = 20, untuk PIj>6,88.
4. Selanjutnya Nilai IKA setiap provinsi dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam provinsi tersebut.

Tabel 2.13. Target Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai di 10 Sungai di DIY

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai	7	10	13	16	19	22

Dalam rangka meningkatkan IKA di DIY, Pemda melakukan berbagai upaya. Termasuk meningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai di DIY. Caranya dengan melibatkan komunitas/ kelompok masyarakat sekitar sungai yang berpartisipasi dalam pengelolaan sungai.

Komunitas pegiat sungai yang ada di DIY diantaranya adalah:

1. Pemerti Kali Code (Forum Masyarakat Code) Masjid Al-Sallam RW 07 Jetisharjo, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta.
2. FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) Badran, RT 49/RW 11, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
3. FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
4. FORSIDAS (Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai) Gajahwong, Gambiran Baru UH 5 No. 7 RT 45/RW 08, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta.
5. Forum Pemerhati Sungai Gawe "Kalijogo", Srimartani, Piyungan
6. Payung Hijau untuk Sungai Bedog.
7. Pelestari Kali Kuning.

Air Bersih/Air Minum pun menjadi perhatian Pemda DIY. Merujuk laporan kinerja Pemda tahun anggaran 2017, realisasi persentase penduduk berakses air minum sebesar 88,85% (jumlah penduduk DIY akhir tahun 2017 DIY adalah 3.762.167 jiwa). Berdasarkan dokumen RAD 100-0-100, direncanakan 98,38% penduduk DIY telah dapat terlayani air minum.

Melalui program pengembangan pengelolaan air minum, dan dukungan APBN Ditjend Cipta Karya, hingga tahun 2017 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 3.342.838 jiwa dari total 3.762.167 penduduk di DIY. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat,

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi provinsi dalam cakupan pelayanan air minum DIY dilakukan melalui:

1. Pengembangan SPAM Regional
2. Pengembangan SPAM Perkotaan
3. Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air
4. Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat

Hingga tahun 2030, diperkirakan kebutuhan air minum di DIY akan mencapai 9.355 l/detik. Jumlah ini dipasok dengan penambahan air baku yang mencapai 6.998 liter/detik. Berdasarkan jumlah tersebut, kebutuhan terbesar ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Rincian proyeksi kebutuhan air minum di DIY disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.14. Proyeksi Kebutuhan Air Minum di DIY Sampai Dengan Tahun 2030

No	Kabupaten/kota	Tahun 2013 (l/dt)	Tahun 2015 (l/dt)	Tahun 2020 (l/dt)	Tahun 2025 (l/dt)	Tahun 2030 (l/dt)
1	Kulon Progo	271	597	853	1.166	1.966
2	Sleman	486	1.073	1.491	2.044	2.682
3	Bantul	392	534	1.050	1.628	2.518
4	Gunungkidul	658	968	993	1.020	1.047
5	Yogyakarta	550	328	558	815	1.142
	Total	**2.357**	**3.5**	**4945**	**6.673**	**9.355**

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap air bersih DIY maka diperlukan pengembangan penyediaan air bersih regional. Pilihan terhadap penyediaan air bersih regional yang diurutkan berdasarkan prioritas adalah:

1. SPAM Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (dikenal dengan nama Kartamantul). Proyek ini rencanakan berkapasitas 700 liter/detik dengan menggunakan Sistem Kebonagung dan Sistem Bantar yang berasal dari Sungai Progo. Untuk mencapai kapasitas tersebut dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap I dengan kapasitas 400 liter/detik dan Tahap II dengan kapasitas 300 liter/detik. Biaya investasi diperkirakan mencapai 571 milyar rupiah.
2. SPAM Regional Kapet Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Industri Pajangan Kabupaten Bantul. Sistem ini direncanakan dibangun di bawah Bendung Sapon /Groundsill Srandakan & S. Bogowonto dengan jumlah 1.400 Lt/det. Biaya investasi diperkirakan mencapai 559 milyar rupiah.
3. SPAM Regional Banyusoco-Sungai Oyo yang akan melayani Kec. Playen di Kab. Gunungkidul dan Kec. Dlingo di Kab. Bantul dengan menggunakan dari mata air Banyusuco, Kab. Gunung Kidul, sebesar 100 l/dt. Biaya investasi diperkirakan mencapai 56 milyar rupiah.

4. SPAM Regional Sungai Bawah Tanah (SBT) Gunungkidul yang akan melayani wilayah Kota Yogyakarta, Kec Prambanan di Kab. Sleman, Kec Piyungan dan Dlingo di Kab. Bantul serta Kec. Patuk di kab. Gunungkidul dengan kapasitas mencapai 100 l/dt. Biaya investasi diperkirakan mencapai 391 milyar rupiah.

Sampai dengan saat ini telah diprogramkan pembangunan SPAM Regional secara bertahap pembangunan SPAM Regional melalui 2 Sistim, terdiri dari:

1. Sistim Bantar dan Kebonagung-SPAM Regional Kartamantul (700 Lt/det);
2. Sistim Kamijoro-SPAM Regional KAPET Kulon Progo (500 lt/det);

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY, jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak sejumlah 1.103.298 rumah tangga atau sama dengan 96,78 % dari total rumah tangga DIY. Jumlah rumah tangga DIY pada akhir tahun 2017 berjumlah 1.140.061 rumah tangga (dalam RAD 100-0-100, Bidang Cipta Karya, 2017).

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat (baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan). Pengelolaan sampah dapat dibagi dalam dua kegiatan utama yaitu:

1. Pengumpulan sampah
2. Pemrosesan akhir

Tabel 2.15. Volume Timbulan Sampah Kabupaten/Kota

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk			Volume Timbulan Sampah					
		Wilayah Perdesaan (Orang)	Wilayah Perkotaan (Orang)	Total (Orang)	Wilayah Perdesaan		Wilayah Perkotaan		Total	
					(%)	m^3/hr	(%)	m3/hr	(%)	m^3/hr
1	Bantul	519.280	409.396	928.676	14,31	1.298,20	11,28	1.023,49	25,60	2.321,69
2	Gunungkidul	692.949	69.503	762.452	19,10	1.732,37	1,92	173,76	21,02	1.906,13

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk			Volume Timbulan Sampah					
		Wilayah Perdesaan (Orang)	Wilayah Perkotaan (Orang)	Total (Orang)	Wilayah Perdesaan		Wilayah Perkotaan		Total	
					(%)	m³/hr	(%)	m3/hr	(%)	m³/hr
3	Kulon Progo	307.838	137.455	445.293	8,49	769,60	3,79	343,64	12,27	1.113,23
4	Sleman	547.094	532.116	1.079.210	15,08	1.367,74	14,67	1.330,29	29,75	2.698,03
5	Yogyakarta	-	412.331	412.331	0,00	-	11,37	1.030,83	11,37	1.030,83
	Jumlah	**2.067.161**	**1.560.801**	**3.627.962**	**56,98**	**5.167,90**	**43,02**	**3.902,00**	**100**	**9.069,91**

Sumber: Analisis Data Penduduk dan Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota

Akses layanan air limbah domestik DIY menempati posisi pertama nasional dengan akses layak sebanyak 5,72% menggunakan jamban bersama, 10.95 menggunakan jamban sehat semi permanen, 83,33% menggunakan jamban sehat permanen, dan 89,05% tidak ada penduduk yang terindikasi buang air besar sembarangan.

Jumlah infrastruktur layanan air limbah domestik DIY adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) skala perkotaan IPAL Sewon Bantul melayani 22.465 KK (2,09%),
2. Sistem pengolahan air limbah terpusat (SPALD-T) skala permukiman IPAL Komunal sejumlah 435 unit melayani 37.918 KK (3,49%),
3. Sistem pengolahan air limbah setempat (SPALD-S) individual 830.916 unit melayani 906.412 KK, (83,34%),
4. Sistem pengolahan air limbah setempat (SPALD-S) komunal 234 unit melayani 1.071 KK (0,10%).

Sedangkan masyarakat yang masih menggunakan jamban yang tidak aman/tidak layak di DIY teridentifikasi 110.059 KK (10,95%). Rincian akses layanan air limbah domestik nasional dan DIY dapat dilihat pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.16. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah DIY Tahun 2017

No	Kabu-paten/ Kota	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak								Jum-lah (%)
				SPALD-SETEMPAT				SPALD-TERPUSAT				
				Sistem Individual		Sistem Komunal		SPALD-T Permukiman	SPALD-T Perkotaan			
		BABS (%)	Cubluk/ Tangki Septik Individual Tidak Layak (%)	Jam-ban Keluarga Dengan Tangki Septick aman (%)	Memiliki akses ke jamban bersama "layak" (%)	MCK Komunal (%)	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK) (%)	IPAL Komunal (%)	Sambungan Rumah yang Berfungsi (%)			
1	Bantul	0,00	16,63	75,97	2,35	0,00	0,00	4,23	0,82			100,00
2	Gunung-kidul	0,00	16,72	69,71	11,01	0,00	0,00	2,56	0,00			100,00
3	Kulon-progo	0,00	16,18	73,26	7,79	0,00	0,02	2,76	0,00			100,00
4	Sleman	0,00	3,93	85,22	5,53	0,04	0,00	4,40	0,88			100,00
5	Yogya-karta	0,00	1,26	79,47	3,24	0,73	0,50	1,73	13,07			100,00
6	DIY	0,00	10,95	77,62	5,72	0,10	0,06	3,49	2,07			100,00
Persentase Layanan Limbah Domestik		**0,00**	**10,95**	**83,34**		**0,16**		**3,49**	**2,07**			
				83,50				**5,55**				
				89,05%								

Sumber Analisis Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota 2017

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi provinsi pengelolaan air limbah DIY telah dirumuskan dalam RAD (RAD 100-0-100) DIY Tahun 2015-2019. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan cakupan penduduk berakses sanitasi melalui tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.17. Arah Kebijakan dan Strategi RAD 100-0-100 DIY

Arah Kebijakan	Strategi
Penyediaan sarana dan prasarana air limbah untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan air limbah layak 100% (92% Layak dan 8% Dasar)	• Pengembangan Jaringan Air Limbah Terpusat • Pengembangan IPAL Komunal • Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Sumber: RAD 100-0-100 DIY (Randal DIY, 2016)

G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

1. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik adalah parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah penting diperhatikan oleh pemda. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemda dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu pemda berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Berdasarkan data rata-rata rasio elektrifikasi PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta tahun 2015 adalah untuk kota Yogyakarta 68,52%, Kabupaten Bantul 97,17%, Kulon Progo 88,91%, Sleman 87,78%, Gunungkidul 80,10% dan total rasio elektrifikasi sebesar 86,27%. Pemda DIY pada tahun 2016 melakukan *updating* data dan sinkronisasi pemenuhan rasio elektrifikasi untuk mengkaji potensi peningkatan rasio elektrifikasi yang meliputi Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebagai pelanggan PLN, Pemetaan terhadap jumlah rumah tangga (KK) yang listriknya masih menyalur, pemetaan terhadap jumlah KK yang belum berlistrik.

Dari hasil pemetaan diperoleh data KK belum berlistrik sekitar 333 rumah tangga. Jumlah rumah tangga belum berlistrik tersebut nilainya cukup kecil. Apabila diinputkan di dalam perhitungan rasio elektrifikasi seharusnya rasio elektrifikasi di DIY bisa mencapai 96,31% dengan rincian untuk kota Yogyakarta 99,86%, Kabupaten Bantul 99,22%, Kulon Progo 94,08%, Sleman 99,995%, dan Gunungkidul 84,69%.

Rasio elektrifikasi nasional berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2017 telah mencapai 92,80%. Angka ini jika diperbandingkan dengan capaian DIY akan menyisakan isu signifikan bahwa rasio elektrifikasi pada waktu yang sama baru mencapai angka 89,63% (terendah di Pulau Jawa). Distribusi rasio elektrifikasi per kabupaten/kota juga memperlihatkan pola yang khusus.

Sesuai perhitungan dari bidang ESDM bahwa capaian rasio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 adalah 91,20%, dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik pelanggan PLN dan nonPLN sebanyak 1.039.719 rumah tangga dan jumlah rumah tangga total sebanya 1.140.061 rumah tangga.

2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2015 dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pada tahun 2015 pencapaian Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 118.153,28 SBM dari target sebesar 117.950 SBM. Realisasi pencapaian target di tahun 2015 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM sebesar 13.600 watt peak di Kabupaten Gunungkidul atau setara 187,27 SBM;
b. Pemasangan 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari APBD DIY di 10 unit gedung Pemda DIY atau setara 206,54 SBM;
c. Pembangunan Digester Biogas sebanyak 50 unit dari APBD DIY di Kabupaten Sleman, 150 unit dari Dana Alokasi Khusus Kementerian ESDM di Kabupaten Gunungkidul dan 50 unit dari Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan lokasi tersebar di DIY atau total setara 693,03 SBM;
d. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 30 kW di Kabupaten Kulon Progo dan 8 kW di Kabupaten Sleman atau setara 523,24 SBM.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang terpasang pada tahun 2015.

Tabel 2.18. Data Jenis Energi Baru Terbarukan

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG 2015	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE
PLTS	10 MWp	301	200 kWp	0.32
PLTMH	2 MW	817	882 kW	358
PLT Bayu	100 MW	165.920	131 kW	24,6
PLT Bagasse	3.6 MVA /2.5 MW	929	3.6 MVA /2.5 MW	873
PLT Sampah	30 MW	9,040	5 kW	2
Bioethanol	36 Juta Liter	18.060	5 juta	2.508
Biogas Ternak Sapi	15,000 unit	2.768	1.500 Unit	328
Biogas Sanitasi	500 unit	92	100 Unit	11
Biogas Ampas Tahu	500 Unit	91	10 Unit	2
Biomassa Pellet	1,500 Ton	548	600 Ton	219
DME	20 Lokasi		1 Lokasi	
Total Energi (TOE)	**98.567**		**4.388**	

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Pada tahun 2016, pencapaian target Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di DIY sebesar 123.590 SBM. Kegiatan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga sebanyak 120 unit di Kabupaten Sleman, 230 unit di Kabupaten Gunungkidul, 130 unit di Kabupaten Bantul, dan 120 unit di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga pembangunan PLTS tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 100 unit dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 100 unit. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro off grid sebanyak 3 unit juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Di tahun 2017, capaian EBT di DIY adalah 143.573,26 SBM dan dilakukan melalui PLT Bagasse, PLTS, PLT Hybrid, dan biogas. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY yang mendukung capaian target di tahun 2017.

Tabel 2.19. Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang mendukung capaian target di tahun 2017

Jenis	Daya		SBM	
PLT Bayu Pantai Baru	54	kW	743,56	SBM
PLTMH	0	kW	0	SBM
PLTS DAK	5000	Wp	68,85	SBM
PLTS Pantai Baru	29000	Wp	399,32	SBM
PLTS APBD	0	Wp	0	SBM
Bagasse Madukismo	2500	kW	17.211,96	SBM
Biogas	25	Unit	50,82	SBM
Biogas Hivos	450	Unit	914,76	SBM
Biogas Poantai Baru	384.65	m3	130,32	SBM
Biogas Tuksono	24	m3	8,13	SBM
Biogas 4 m3	300	Unit	406,56	SBM
Jumlah			**19.934,27**	**SBM**

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

3. Konservasi Energi

Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal. Belum optimalnya konservasi energi dapat terlihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar.

Tabel 2.20. Konsumsi Listrik di DIY (GWH)

Sektor	Tahun		
	2014	2015	2016
a. Rumah Tangga	1338,38	1377,49	1466.53
b. Bisnis	527.55	570.22	660.35
c. Publik	282.38	299.7	332.82
d. Industri	222.38	237.84	239.62
TOTAL	**2369.6**	**2484.16**	**2698.23**

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi. Elastisitas energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan konsumsi energi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil angka elastisitas, maka semakin efisien penggunaan energi. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi.

Tabel 2.21. Elastisitas Energi

Uraian Asumsi dan Target	Satuan	Tahun		
		2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi *)	%	5,2	5,0	5,0
HASIL PROYEKSI				
Kebutuhan Tenaga Listrik	GWh	2.369,6	2.484,2	2.698,2
Pertumbuhan Kebutuhan Tenaga Listrik	%	7,4	4,8	8,6
Elastisitas		1,4	1,0	1,7

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2017

Dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Sebagai upaya mencapai target tersebut, dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Pelaksanaan konservasi energi melalui APBD DIY mulai Tahun 2014 diprioritaskan untuk sektor publik yaitu gedung pemerintah, yang dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik Pemda. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Sampai dengan tahun 2017, pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi sebesar 28% (42 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah).

H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Secara absolut, nilai PDRB DIY terus meningkat (baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan). Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku, dalam setahun, mencapai 9,1 triliun rupiah di tahun 2017. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan harga konstan peningkatan nilai PDRB di tahun yang sama mencapai 4,6 triliun rupiah (dan juga terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya). Total PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar 119,2 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 92,3 triliun rupiah.

Struktur perekonomian DIY tahun 2017, atas dasar harga berlaku, menunjukkan komposisi lapangan usaha/sektor di DIY beragam. Tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masing-masing sebesar 13,12%, 10,32%, dan 10,01%. Urutan dari ketiga lapangan usaha tersebut mengalami pergeseran. Pertanian turun dari urutan kedua pada tahun 2016 menjadi urutan ketiga. Sementara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sebaliknya Pergeseran tersebut sudah bisa diprediksi. Sebab kontribusi lapangan usaha pertanian mengalami tren menurun, sementara urutan di bawahnya (penyediaan akomodasi dan makan minum) terus mengalami tren meningkat.

Khusus Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusinya cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Penyebabnya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air serta terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Selain itu, SDM pertanian juga cenderung mengalami penurunan, sementara tingkat produktivitasnya juga rendah. Perkembangan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam tahun 2013 hingga 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.22. PDRB DIY ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.741.414,9	6.539.528,2	6.666.702,6	6.766.494,7	6.884.010,1
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	657.699,9	680.932,8	700.236,9	708.450,0	728.827,2
3.	Perikanan	270.911,3	288.519,3	300.662,1	304.856,6	317.809,3

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 2.23. Distribusi Persentase PDRB DIY ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,83	9,20	9,31	9,12	8,75
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,88	0,90	0,89	0,87	0,84
3.	Perikanan	0,41	0,40	0,44	0,42	0,42

Sumber: BPS DIY, 2018

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Tambahan kesempatan kerja di DIY selama periode 2013-2016 sebesar 156.329 orang.

Tabel 2.24. Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja

LAPANGAN USAHA *)	Jumlah Penduduk Yang Bekerja		Tambahan Kesempatan Kerja
	2013	2016	
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	531,559	475,346	-56,213
2. Pertambangan dan penggalian	9,075	21,172	12,097
3. Industri pengolahan	251,892	282,309	30,417
4. Listrik, gas dan air	5,388	7,571	2,183
5. Bangunan	104,506	133,849	29,343
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	487,923	606,474	118,551

LAPANGAN USAHA *)	Jumlah Penduduk Yang Bekerja		Tambahan Kesempatan Kerja
	2013	2016	
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi	65,684	77,195	11,511
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	54,090	58,496	4,406
9. Jasa kemasyarakatan	375,954	379,988	4,034
JUMLAH	**1,886,071**	**2,042,400**	**156,329**

Sumber : Sakernas, BPS

Penyerapan tenaga kerja DIY selama empat tahun terakhir (2013-2016) masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri. Sektor pertanian penyerap tenaga kerja tertinggi tetapi mengalami penurunan jumlahnya. Penyebabnya beralihnya fungsi lahan serta minat generasi muda di sektor ini yang menurun. Sektor yang memberikan tambahan kesempatan kerja tinggi adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel, serta sektor industri pengolahan. Hal ini seiring dengan pertumbuhan DIY sebagai kota pariwisata.

Perumbuhan kesempatan kerja diikuti turunnya jumlah pengangguran yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
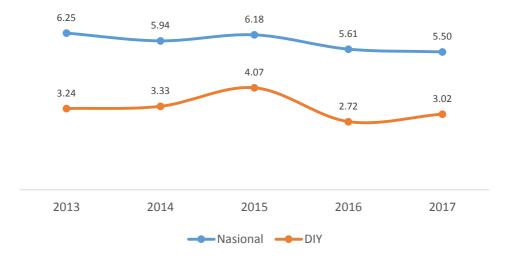
Gambar 2.24. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Nasional & DIY

Sumber : Sakernas Agustus 2013-2016

Meskipun tingkat penganggur terbuka yang rendah, tetapi kualitas kesempatan kerja perlu dicermati. Sebab ketimpangan pendapatan menyebabkan kerentanan sosial akibat tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Kecenderungan perubahan perekonomian ikut mendorong peningkatan proporsi penduduk yang bekerja dengan status formal. Penduduk yang bekerja formal jumlahnya lebih sedikit bila dibanding jumlah pekerja informal. Tetapi jumlah ini terus mengalami peningkatan selama tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 pekerja formal sebanyak 838.169 orang (bertambah sebanyak 82.800 orang atau 9,88%). Dilihat dari proporsi penduduk yang bekerja secara formal setiap tahunnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebesar 44,44% pada tahun 2013 menjadi 45,09% tahun 2016. Pekerja formal menurut status pekerjaan adalah no. 3 dan 4 pada tabel di bawah. Sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sisanya (nomor 1,2,5,6 dan 7) digolongkan pada sektor informal.

Tabel 2.25. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama DIY, Tahun 2013-2016

STATUS PEKERJAAN*)	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
1. Berusaha sendiri	12,92	13,92	15,54	15,35
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19,83	16,59	14,04	18,83
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,57	3,90	3,48	3,51
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	39,46	43,22	45,31	41,58
5. Pekerja bebas di Pertanian	1,47	1,43	2,18	2,55
6. Pekerja bebas di Non Pertanian	5,65	6,19	7,53	5,64
7. Pekerja tidak dibayar	16,10	14,75	11,92	12,53
JUMLAH	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2013-2016 (Agustus)

Walaupun pekerja informal jumlahnya lebih banyak dari pekerja formal, namun dalam empat tahun terakhir jumlah dan proporsinya terus menurun. Apabila dilihat menurut status pekerjaan, pekerja informal dengan status berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap mendominasi seluruh pekerja informal di DIY.

Berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training*/NEET) pada tahun 2016 relatif besar. Jumlahnya sebesar 102.285 orang. Maka pemberian motivasi serta peningkatan pendidikan, pelatihan bagi usia muda masih sangat diperlukan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja. Termasuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Upaya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan dilakukan dengan mendorong tambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan peningkatan sarana hubungan industrial.

Melihat rata-rata upah pekerja di DIY, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Penyebabnya peningkatan produktivitas serta naiknya Upah Minimum Kab/Kota (UMK) di DIY. Hal ini diharapkan akan mendorong upaya mewujudkan tenaga kerja yang lebih sejahtera.
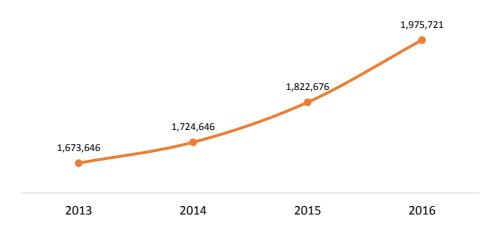
Gambar 2.25. Upah Rata Rata pekerja per Bulan Di DIY Tahun 2013-2016

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi DIY dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai di tempat kerja;
7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sektor formal;
8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara umum, keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendominasi perekonomian Indonesia, termasuk DIY. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016, jumlah usaha mikro dan kecil mencapai mencapai 98,4 persen dari total usaha/perusahaan di DIY. Keberadaan UMK memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah. Pada umumnya UMK menggunakan bahan baku lokal dan pemodalan yang tidak ditopang dari pinjaman perbankan. Hal tersebut memberikan dampak pada ketahanan UMK terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun kondisi perekonomian global. Namun demkian, untuk mencapai peningkatan pendapatan diperlukan peningkatan skala usaha. Hal tersebut berimplikasi UMK harus keluar dari zona nyaman dan bersaing dengan kompetitor baik dari wilayah lain atau dari luar negeri. UMK perlu memperbaiki produktivitas serta kualitas produk. Untuk memperbesar skala usaha, diperlukan pemodalan yang cukup sehingga peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan diperlukan.

Berdasarakan data dari Dinas Koperasi dan UKM, Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY mengalami pertumbuhan positif rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir. Tercatat jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 2.206 unit usaha (4,02%) dari semula 238.619 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 248.217 unit usaha pada tahun 2017. Apabia dinilai dari

aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan sebesar 28,52% dari total UKM di DIY dengan jumlah usaha sebanyak 70.794 unit usaha, diikuti oleh diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,20%), sektor Industri non Pertanian (22,61%), serta sektor aneka usaha sebesar (21,67%)

Tabel 2.26. Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2017

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Aneka Usaha	44.452	47.810	49.923	51.780	54.649
2	Perdagangan	58.601	63.025	65.610	68.054	69.486
3	Industri Pertanian	55.767	59.976	62.519	64.857	64.523
4	Industri Non Pertanian	46.390	49.892	51.995	53.928	59.559
	Jumlah	**205.210**	**220.703**	**230.047**	**238.619**	**248.217**

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018

Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke DIY merupakan variabel penting bagi Pemda DIY. Diperlukan bentuk pemasaran pariwisata yang dilakukan secara efektif dan efisien, hal itu dilakukan agar minat dari calon wisatawan ataupun wisatawan *repeater* selalu berminat untuk datang ke DIY. Pelaksanaan promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY. Selain itu pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke DIY. Kunci pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi, Aksesbilitas, dan Amenitas).

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2016, yaitu sebesar 10,22%. Sementara itu laju pertumbuhan tahun 2016 adalah sebesar 5,51% (data BPS tahun 2016). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2016, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

Tabel 2.27. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah		JumlahWisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)
	Wisman	Wisnus	
2013	235.888	2.602.074	2.837.962
2014	254.213	3.091.967	3.346.180
2015	308.485	3.813.720	4.122.205
2016	355.313	4.194.261	4.549.574
2017	397.951	4.831.387	5.229.298

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2018

Pada tahun 2017, peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi sebanyak 679.724 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 211.68 (tahun 2016 sebesar 321.103 orang).

Destinasi wisata DIY masih diminati oleh wisawatan nusantara. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang meningkay setiap tahunnya dengan cukup signifikan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 4.194.261 orang, sedangkan pada tahun 2017 kunjungan wisatawan nusantara bertambah sebanyak 637.086 orang (naik 15.2%), sehingga pada tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara telah mencapai 4.831.347 orang dan telah melebihi target indikator kinerja tahun 2017.

Faktor pendukung dalam pencapaian target inidikator jumlah wisatawan nusantara adalah makin beragamnya destinasi wisata baru yang ada di DIY. Termasuk wisata yang *booming* melalui media sosial dan semakin bervariasinya atraksi wisata. Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY dengan tujuan berlibur. Untuk merespon hal tersebut, Pemda DIY bersama dengan *stakeholder* pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Semakin banyak event yang dilakukan oleh para pelaku wisata di DIY, akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara yang berencana unutk berlibur. Atraksi wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut juga dilaksanakan oleh Pemda DIY dengan dukungan yang besar dari *stakeholder* pariwisata serta dari masyarakat DIY.

I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian DIY yaitu mencapai 13,12% dari total PDRB DIY. Kontribusi tersebut ditopang baik oleh skala industri besar, sedang maupun industri kecil. Dari sisi jenis usaha, kontribusi terbesar ditopang oleh kontribusi golongan industri pengolahan makanan dan minuman dan diikuti oleh industri tekstil dan pakaian jadi. Dari sisi nilai tambahnya, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Walapun harus diakui pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan mengalami fluktuasi yaitu sempat mengalami penurunan pada kurun waktu 2014-2015 kemudian meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2.28. Nilai PDRB DIY ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai PDRB Industri Pengolahan	10.084.213	10.469.749	10.693.036	11.234.804	11.879.550
2	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6,87	3,82	2,13	5,07	5,74

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 2.29. Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Industri Pengolahan	13,62	13,59	13,11	13,21	13,12

Sumber: BPS DIY, 2018

Pertumbuhan industri didorong untuk menjadi lebih inklusif dengan cara memberdayakan pelaku industri kecil serta tenaga kerja setempat. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di DIY dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah IKM di

DIY mengalami pertumbuhan sebesar 308 unit usaha (0,34%) jika dibandingkan tahun 2016. IKM di DIY pada umumnya berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Geliat kegiatan industri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat terutama dalam aspek budaya. Produk IKM, terutama kerajinan, banyak yang merupakan produk budaya seperti gerabah, batik, wayang dan sebagainya. Pengembangan industri di DIY masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya daya saing produk IKM belum optimal, ketersediaan bahan baku, belum optimalnya kualitas produk, keterbatasan kemampuan teknologi IKM, serta keterbatasan dukungan infrastruktur dan sistem logistik.

Tenaga kerja sektor industri di DIY mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi tenaga kerja sektor industri pada tahun 2013 terhadap total penduduk bekerja hanya 13,45%. Jumlah tersebut meningka menjadi 15,83% pada tahun 2017. Peningkatan tenaga kerja tersebut terjadi baik untuk pekerja laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada tahun 2017, proporsi keterlibatan perempuan dalam sektor industri semakin lebih baik. Pada tahun 2013, proporsi perempuan dalam tenaga kerja sektor industri baru mencapai 47%. Pada tahun 2017, proporsi perempuan dalam tenaga kerja sektor industri sudah hampir mencapai angka 50%.

Tabel 2.30. Penduduk Bekerja Menurut Pada Sektor Industrri di DIY 2013 - 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Bekerja pada Sektor Industri	253.720	273.329	276.386	262.108	325.061
Total Penduduk Bekerja	1.886.071	1.721.976	1.891.218	2.042.400	2.053.168

Sumber: Sakernas Agustus Th.2031- 2017, BPS , diolah Pusdatinaker

J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Dalam mendukung pencapaian TPB tujuan 10, yaitu mengurangi kesenjangan, maka target yang ditetapkan, yaitu: (1) Pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional; dan (2) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan

hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Sebagai pedoman pencapaian target tersebut ditetapkan beberapa indikator, yaitu: (1) Koefisien Gini; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; (3) Desa mandiri berbudaya; (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB tujuan ini diuraikan menurut indikator capaian target berikut:

1. Koefisien Gini

Ketimpangan pendapatan DIY saat ini menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan daerah karena meskipun termasuk dalam kategori ketimpangan moderat, perkembangan ketimpangan DIY cenderung meningkat. Selain itu, ketimpangan DIY yang diindikasikan oleh koefisien gini berada di atas rata-rata nasional dan tertinggi di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Koefisien gini DIY tahun 2016 tercatat sebesar 0,420 meningkat menjadi 0,432 tahun 2017.
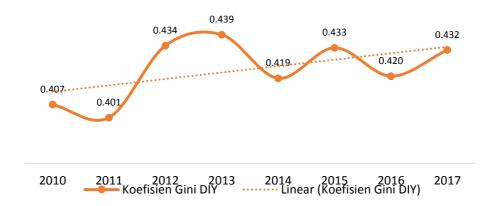
Gambar 2.26. Perkembangan Koefisien Gini DIY, 2010-2017 (Maret)

Sumber: BPS

Menurut kabupaten/kota di DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung memiliki Koefisien Gini yang lebih tinggi dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh struktur perekonomian masing-masing kabupaten/kota. Perekonomian Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung didominasi oleh sektor industri, sedangkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul didominasi oleh sektor pertanian. Ketimpangan di wilayah yang didominasi sektor pertanian cenderung lebih kecil dibandingkan ketimpangan di wilayah industri karena penghasilan di wilayah pertanian cenderung rendah. Tingkat penghasilan yang cenderung rendah di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul sejalan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di 3 kabupaten tersebut.

Tantangan yang dihadapi untuk mengurangi ketimpangan adalah meningkatkan produktifitas sektor pertanian untuk mendorong peningkatan pendapatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor yang potensial untuk berkembang di tiga kabupaten tersebut sebagai alternatif matapencaharian yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, tantangan lain adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Penurunan persentase penduduk miskin merupakan indikator berikutnya dalam pencapaian target tujuan 10 pembangunan berkelajutan. Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 68,85 ribu orang miskin dari 535,18 ribu orang tahun 2013 menjadi 466,33 ribu orang tahun 2017 atau tingkat kemiskinan turun 2,67% dari 15,03% tahun 2013 menjadi 12,36% tahun 2017. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi prioritas dalam pembangunan DIY karena tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional dan berada pada peringkat ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2017. Selain itu, dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa dan Bali, tingkat kemiskinan DIY

adalah yang paling tinggi. Hal ini diantaranya disebabkan kurangnya infrastruktur yang terbangun di wilayah DIY yang menyebabkan minat investor untuk menanamkan modal masih rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat juga masih terkonsentrasi pada area perkotaan yang menyebabkan ketimpangan investasi antar kabupaten/kota di DIY.

Gambar 2.27. Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Tingkat Kemiskinan DIY, 2013-2017 (September)

Sumber: BPS

Menurut kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo diikuti Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta cenderung rendah. Penurunan tingkat kemiskinan terutama di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul merupakan salah satu tantangan yang dihadapi untuk mengurangi ketimpangan di DIY.

Tabel 2.31. Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	21.39	20.64	21.40	20.3	20.03
Bantul	16.48	15.89	16.33	14.55	14.07
Gunungkidul	21.7	20.83	21.73	19.34	18.65
Sleman	9.68	9.5	9.46	8.21	8.13
Yogyakarta	8.82	8.67	8.75	7.70	7.64

Sumber: BPS, per Maret

Jika dilihat dari karakteristik kemiskinan di wilayah kabupaten/kota, selama tahun 2013-2017 Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan provinsi, tetapi pengurangan kemiskinannya di bawah penurunan kemiskinan provinsi. Kabupaten Gunungkidul dan Bantul rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata provinsi tetapi penurunan kemiskinan berada di atas penurunan provinsi. Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan tantangan yang dihadapi di kabupaten Gunungkidul dan Bantul adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial untuk berkembang. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo membutuhkan perhatian khusus karena baik rata-rata pertumbuhan ekonomi maupun penurunan kemiskinannya masih di bawah rata-rata provinsi.
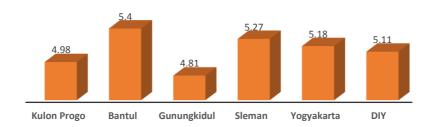
Gambar 2.28. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 2013-2017 menurut Kabupaten/Kota di DIY
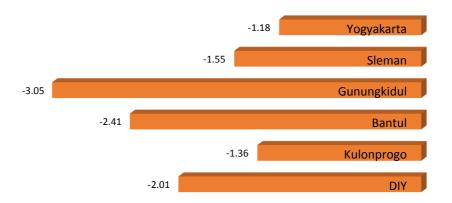
Sumber: BPS, diolah

Gambar 2.29. Penurunan Kemiskinan 2013-2017 menurut Kabupaten/Kota di DIY

Sumber: BPS, diolah

K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Salah satu TPB adalah mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial, mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana. Fokusnya adalah melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Tujuan lainnya meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengimplementasi kebijakan dan perencanaan terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi. Hal ini harus adaptif terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini. Pencapaian ini sesuai dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.*

Meningkatkan Ketahanan Daerah menghadapi bencana. Sebanyak 301 desa/kelurahan dari 438 desa/kelurahan di DIY berada di kawasan rawan bencana. Maraknya pembangunan, yang didominasi berbagai bentuk bangunan/gedung, harus mempertimbangan keberlanjutan lingkungan hidup maupun manfaat pembangunan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan biasanya diikuti dengan tingginya risiko bencana, Sebab semakin banyak nilai aset yang ada di kawasan pertumbuhan tersebut dan peningkatan jumlah penduduk.
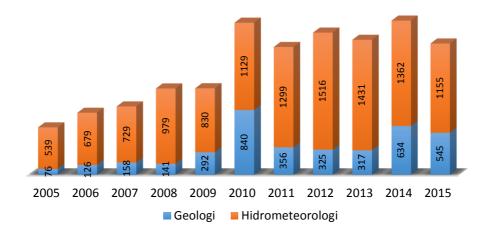
Gambar 2.30. Grafik Jumlah Kejadian Bencana 2005-2015

Sumber: BNPB, Buku RBI, 2016.

Dalam kurun waktu 2005-2015, terlihat tren peningkatan jumlah kejadian bencana alam di DIY. Terutama kejadian bencana yang sebagian merupakan dampak perubahan iklim. Sebut saja banjir, longsor, gelombang pasang, abrasi, dan angin kencang. Dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana, BPBD DIY menjalankan melakukan dua strategi: pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda 8/2010 tentang Penanggulangan Bencana; (3) Pergub No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman SIstem Komando Tanggap Darurat Bencana di DIY; (4) Pergub No. 11 Tahun 2016 tetang Pedoman Penyelenggaraan Pencarian, Pertolongan dan Upaya Penyelamatan Sektor Kesehatan pada Situasi Bencana; (5) Pergub No. 72 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana PB Pada Saat Tidak Terjadi Bencana; (6) Pergub No. 71 Tahun 2014 tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis; (7) Pergub No. 70 Tahun 2014 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam PB; (8) Pergub No. 67 Tahun 2014 tentang Pola Koordinasi BPBD DIY dalam Penyelenggaraan PB; (9) Pergub No. 81 Tahun 2013 tentang Rencana PB Daerah tahun 2013-2017; (10) Pergub No. 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana; (11) Pergub No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana; (12) Pergub No. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Status Potensi

Bencana; (13) Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang SOP PB; (14) Pergub No. 56 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD DIY; (15) Penyusunan RAD PRB DIY setiap 3 (tiga) tahun sekali; (16) Penyusunan RPB DIY; dan (17) Penyusunan Rencana Kontijensi. Strategi program pembangunan yang relevan, yaitu: (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tantangan mewujudkan pembangunan DIY yang tanggap dan tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, antara lain: (1) pengarusutamaan PRB sehingga menjadi prioritas pembangunan daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanannya; (2) ketersediaan berbagai kajian risiko bencana dan peta risiko bencana berdasarkan data bahaya dan kerentanan daerah; (3) belum memadai dan terintegrasinya basis data dan sistem informasi mengenai kerawanan dan kerentanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim; dan (4) masih lemahnya koordinasi dari berbagai para pemangku kepentingan untuk melindungi warga DIY dari ancaman bencana.

Gambar 2.31. Infografis Data Bencana DIY 2017

Kawasan kumuh masih ditemui di DIY. Oleh sebab itu, kawasan kumuh di DIY ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tersebut, luasan kawasan kumuh di DIY seluas 966,65 ha.

Tabel 2.32. Luas Kawasan Kumuh DIY

KABUPATEN	LUASAN KAWASAN KUMUH (ha)	Dasar Hukum
GUNUNGKIDUL	164,91	Keputusan Bupati Gunungkidul No. 132/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomo. 287/KPTS/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh dan Tahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019
KULON PROGO	293,79	SK Bupati Kulon Progo No. 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019
SLEMAN	163,47	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
BANTUL	79,58	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul
KOTA YOGYAKARTA	264,90	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta
DIY	**966,65**	

Sumber : SK Bupati/Walikota

Pembagian wewenang penanganan kawasan permukiman kumuh mengacu pada UU No 23 Tahun 2014, pembagian wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat menangani kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 15ha;
2. Pemda provinsi menangani kawasan kumuh dengan luasan 10-15ha; dan
3. Pemda kabupaten/kota menangani kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10ha.

Tabel 2.33. Penanganan Kawasan Kumuh 2017

Kewenangan	Luas (ha)	Penanganan Kws Kumuh 2017				Sisa Kawasan Kumuh diakhir 2017 (ha)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		ha		%		
Pusat	682,02	260,23	371,49	26,95	38,48	310,53
Provinsi	110,39	12,91	31,97	1,34	3,31	78,42
Kabupaten	173,1	0	65,82	0	6,82	107,28
DIY	965,51	273,14	469,28	28,29	48,61	496,23

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Pada tahun 2017, penanganan kawasan kumuh yang tercantum sebagai baseline adalah 273,14 ha atau setara dengan 28,29%. Penanganan tersebut terdiri atas 12,91 ha penanganan provinsi dan 260,23 ha penanganan pusat. Penanganan yang telah dilaksanakan sebesar 469,28 ha atau setara dengan 48,60%. Penanganan yang dilakukan selain melalui Pemda, juga dilakukan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) dan Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kotaku.

Tabel 2.34. Rencana Penanganan Kumuh 2018

Kewenangan	Luas Kumuh diakhir 2017 (ha)	Rencana Penanganan Kws Kumuh 2018				Sisa Kawasan Kumuh diakhir 2018 (ha)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		ha		%		
Pusat	310,53	39,09	39,09	4,05	4,05	271,44
Provinsi	78,42	72,04	72,04	7,46	7,46	6,38
Kabupaten	107,28	0	0	0	0	107,28
DIY	496,23	111,13	111,13	11,51	11,51	385,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Target kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2018 sebesar 111,13 ha yang setara dengan 11,51%. Penanganan ini terdiri dari 72,04 ha di kawasan kewenangan provinsi dan 39,09 ha di kawasan kewenangan pusat. Untuk penanganan di kawasan kewenangan provinsi, target tersebut diproyeksikan tercapai di akhir 2018 seiring dengan penanganan yang sedang dilakukan oleh DPUP ESDM DIY. Target penanganan pada kawasan kewenangan pusat melalui APBN diproyeksikan akan terlampaui di akhir 2018 mengingat penuntasan kawasan kumuh pada tahun 2019 merupakan salah satu target dalam gerakan 100-0-100.

Kondisi 0 % Kondisi 100 %

Gambar 2.32. Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Permukiman di Kawasan Kumuh melalui APBD Provinsi 2017

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, 2017.

Secara akumulatif, diakhir tahun 2017, penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan sebesar 469,28 ha. Apabila target 2018 terealisasikan seluruhnya maka diakhir tahun 2018 penanganan yang telah dilaksanakan mencapai 580,41 ha (setara dengan 60,11%). Sisa penanganan kawasan kumuh untuk 2019-2022 mencapai 385,10 ha atau 39,89% dari kawasan kumuh keseluruhan.

Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2017, DPUP ESDM DIY beserta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota, melakukan pendataan sekaligus penyepakatan mengenai data rumah tidak layak huni yang akan digunakan sebagai baseline penanganan. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di DIY pada akhir 2016 berjumlah 65.578 unit, dengan proporsi terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.35. Data Rumah Tidak Layak Huni 2016

Kabupaten	Kecamatan	RTLH (unit)
Gunungkidul	Wonosari	2002
Gunungkidul	Nglipar	1708
Gunungkidul	Playen	3062
Gunungkidul	Patuk	896
Gunungkidul	Paliyan	1410
Gunungkidul	Panggang	530
Gunungkidul	Tepus	1170

Kabupaten	Kecamatan	RTLH (unit)
Gunungkidul	Semanu	1005
Gunungkidul	Karangmojo	1956
Gunungkidul	Ponjong	1871
Gunungkidul	Rongkop	1359
Gunungkidul	Semin	1709
Gunungkidul	Ngawen	1614
Gunungkidul	Gedangsari	2219
Gunungkidul	Saptosari	1108
Gunungkidul	Girisubo	1264
Gunungkidul	Tanjungsari	602
Gunungkidul	Purwosari	355
Kabupaten Gunungkidul		**25.840**
Sleman	Gamping	340
Sleman	Godean	778
Sleman	Moyudan	617
Sleman	Minggir	1570
Sleman	Seyegan	1004
Sleman	Mlati	1088
Sleman	Depok	684
Sleman	Berbah	514
Sleman	Prambanan	528
Sleman	Kalasan	1015
Sleman	Ngemplak	218
Sleman	Ngaglik	1783
Sleman	Sleman	1821
Sleman	Tempel	2449
Sleman	Turi	996
Sleman	Pakem	669
Sleman	Cangkringan	273
Kabupaten Sleman		**16.347**
Kulon Progo	Temon	468
Kulon Progo	Wates	656
Kulon Progo	Panjatan	879
Kulon Progo	Galur	501
Kulon Progo	Lendah	1162
Kulon Progo	Sentolo	1923
Kulon Progo	Pengasih	1741
Kulon Progo	Kokap	2748
Kulon Progo	Girimulyo	1468
Kulon Progo	Nanggulan	848
Kulon Progo	Samigaluh	1513
Kulon Progo	Kalibawang	984
Kabupaten Kulon Progo		**14.891**
Bantul	Srandakan	222

Kabupaten	Kecamatan	RTLH (unit)
Bantul	Sanden	233
Bantul	Kretek	81
Bantul	Pundong	146
Bantul	Bambanglipuro	122
Bantul	Pandak	230
Bantul	Pajangan	578
Bantul	Bantul	83
Bantul	Jetis	277
Bantul	Imogiri	1484
Bantul	Dlingo	717
Bantul	Banguntapan	213
Bantul	Pleret	254
Bantul	Piyungan	354
Bantul	Sewon	151
Bantul	Kasihan	261
Bantul	Sedayu	297
Kabupaten Bantul		**5.703**
Kota Yogyakarta	Tegalrejo	438
Kota Yogyakarta	Jetis	184
Kota Yogyakarta	Gondokusuman	97
Kota Yogyakarta	Danurejan	302
Kota Yogyakarta	Gedongtengen	34
Kota Yogyakarta	Ngampilan	62
Kota Yogyakarta	Wirobrajan	128
Kota Yogyakarta	Mantrijeron	167
Kota Yogyakarta	Kraton	199
Kota Yogyakarta	Gondomanan	18
Kota Yogyakarta	Pakualaman	136
Kota Yogyakarta	Mergangsan	580
Kota Yogyakarta	Umbulharjo	237
Kota Yogyakarta	Kotagede	215
Kota Yogyakarta		**2.797**
DIY		**65.578**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2017

Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemda dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat pun memiliki andil dalam mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penanganan RTLH melalui beberapa skema pembiayaan yakni APBN, APBD Kab/Kota dan CSR.

Tabel 2.36. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2017

Kabupaten / Kota	Database	Penanganan RTLH 2017					Total Penanganan 2017	Sisa RTLH diakhir tahun 2017
		DAK	BSPS	BKK	APBD Kab/Kota	CSR		
Kota Yogyakarta	2797	0	92	110	15	10	227	2570
Kulon Progo	14891	564	406	457	474	82	1983	12908
Bantul	5703	622	289	76	557	0	1544	4159
Sleman	16347	529	381	546	256	143	1855	14492
Gunungkidul	25840	0	398	521	0	0	919	24921
DIY	**65578**	**1715**	**1566**	**1710**	**1302**	**235**	**6528**	**59050**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Berdasarkan data di atas, jumlah RTLH pada tahun 2017 telah berkurang 6528 unit menjadi 59.050 unit. Penanganan yang dilakukan ini setara dengan 9,95%. Penanganan berdiri dari 1715 unit DAK, 1566 unit BSPS, 1710 unit BKK, 1302 APBD Kab/Kota dan 235 unit melalui dukungan CSR.

Tabel 2.37. Rencana Penanganan RTLH 2018

Kabupaten / Kota	Rencana Penanganan RTLH 2018					Total Rencana Penanganan 2018	Sisa RTLH diakhir tahun 2018
	DAK	BSPS	APBD Prov	APBD Kab/ Kota	CSR		
Kota Yogyakarta	207	179	203	20	5	614	1956
Kulon Progo	271	418	534	526	39	1788	11120
Bantul	172	592	528	200	0	1492	2667
Sleman	439	420	257	300	0	1416	13076
Gunungkidul	0	0	950	0	0	950	23971
DIY	**1089**	**1609**	**2472**	**1046**	**44**	**6260**	**52790**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2018.

Target penanganan RTLH pada tahun 2018 adalah 7,62% atau setara dengan ± 5000 unit. Adapun rencana penanganan RTLH pada tahun 2018 sebesar 6260 unit. Penanganan tersebut berasal dari BSPS, DAK, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan CSR. Penanganan yang direncanakan pada tahun 2018 ini setara dengan 9,55%.

Kondisi 0% Kondisi 100%

Gambar 2.33. Penerima Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui skema BSPS 2017 di Kabupaten Sleman

Sumber : SNVT Penyediaan Perumahan DIY, 2017.

Secara akumulatif, diakhir tahun 2018 total penanganan RTLH yang telah dilakukan sejak 2017 berjumlah 12.788 unit atau setara dengan 19,15%. Jumlah RTLH diakhir 2018 diproyeksikan turun menjadi 52.790 unit. Pada tahun 2019 target penanganan rumah tidak layak huni adalah sebesar 14,13% yang setara dengan 9266 unit. Sampai dengan tahun 2022, target penanganan rumah tidak layak huni setiap tahunnya berjumlah ± 7000 unit yang setara dengan 10,68% per tahun. Dengan target kinerja tersebut diharapkan pada akhir 2022 total penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan adalah sebesar 53,78% atau setara dengan 35.268 unit.

Kawasan Cagar Budaya dan Warisan Budaya. DIY diperkaya dengan kawasan-kawasan cagar budaya. Kawasan-kawasan tersebut mendukung pembangunan sosial budaya dan keberadaannya berpacu dengan dinamika kota. Pengembangan kawasan cagar budaya tidak lepas dari pengembangan perkotaan DIY secara keseluruhan. Benturan kepentingan, yang sering terjadi antar pihak-pihak terkait, dapat berakibat dalam proses pelestariannya.

Persebaran kawasan cagar budaya di wilayah DIY mencakup tiga kawasan di Bantul (Imogiri, Pleret, Parangtritis), satu kawasan di Gunungkidul (Sokoliman), tiga kawasan di Sleman (Prambanan, Ratu Boko, Ambarketawang), dan di kawasan di Kota (Kotagede, Kotabaru, Kraton, Puro Pakualaman, dan Maliboro). Berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 186/Kep/2011, terdapat 6 kawasan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Imogiri, Kotabaru, Kotagede, dan Malioboro. Sumbu filosofi (Panggung Krapyak-Kraton-Tugu) telah masuk dalam tentatif list warisan budaya dunia UNESCO.

L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DIY berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban pencapaian target program-program pemprov di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6. Pada saat ini kondisi kualitas air sungai di DIY menurun karena pencemaran limbah domestik yang mengakibatkan parameter BOD, fecal coli, dan total coliform melebihi baku Selain itu penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

1. Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform;
2. Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO_2 dan NO_2;
3. Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Tabel 2.38. Kriteria dan Indikator IKLH

No.	Indikator	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air	TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform	30%
2	Kualitas Udara	SO2 dan NO2	30%
3	Kualitas Tutupan Lahan	Luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi	40%

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH provinsi adalah:

IKLH_Provinsi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)

Keterangan: IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi
IKA = indeks kualitas air
IKU = indeks kualitas udara
IKTL = indeks kualitas tutupan lahan

Tabel 2.39. Target IKLH DIY tahun 2018-2022

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IKLH	55,80	56,65	58,58	60,51	62,44	64,18	66,15
IKU	86,39	86,39	87,06	87,73	88,40	89,07	89,74
IKA	29,17	32,00	34,20	36,40	38,60	40,80	42,50
ITTL	52,84	52,84	55,50	58,18	60,86	63,05	66,20

Indeks Kualitas Air (IKA). Di DIY sungai-sungai yang dipantau kualitas airnya adalah Sungai Opak, Oyo, Code, Winongo dan Sungai Progo. Data hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut dipergunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) DIY. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai PIj > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001.

Indeks Kualitas Udara (IKU). Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O_3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan:

1. sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO_2. Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Parameter NO_2 dan SO_2, diukur pada empat lokasi pada setiap

kabupaten/kota dengan menggunakan metode *passive sampler*. Lokasi tersebut mewakili area transportasi, industri, perumahan dan komersial atau perkantoran/perdagangan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Tabel berikut ini menyajikan lokasi pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY.

Tabel 2.40. Lokasi Pengukuran Kualitas Udara

No	Kabupaten/Kota	Peruntukan	Lokasi Pemantauan
1	KULON PROGO (3401)	Transportasi	Kantor Cabang BRI Wates, Jl. Wates Purworejo Karangnongko Wates
		Industri/Agro Industri	Sekitar Industri PT Aneka Sinendo, Banguncipto Sentolo
		Pemukiman	Rumah Bapak Sudarmadi, ST, Kasatriyan Giripeni Wates
		Perkantoran/Komersial	KLH Kabupaten Kulon Progo, Jl. Sugiman Watulunyu Wates
2	BANTUL (3402)	Transportasi	Balai Pengujian Kendaraan Dishub Bantul ,Jl. Parangtritis Bantul
		Industri/Agro Industri	PT Samitex, Jl. Krapyak Sewon
		Pemukiman	Perum Sewon Residence
		Perkantoran/Komersial	Bank BPD Bantul, Jl. Bantul.
3	GUNUNG KIDUL (3403)	Transportasi	Depan Kapedal Wonosari, Jalan Wonosari- Yogyakarta km. 3
		Industri/Agro Industri	Depan BPP Semanu, Jl. Wonosari-Semanu Mijahan
		Pemukiman	Depan Pendopo Sewoko Projo Kabupaten Gunungkidul
		Perkantoran/Komersial	Rumah Bapak Eko Suharso, Desa Madusari Wonosari
4	SLEMAN (3404)	Transportasi	Terminal Condongcatur
		Industri/Agro Industri	PT Westa Pusaka

No	Kabupaten/Kota	Peruntukan	Lokasi Pemantauan
5	KOTA Yogyakarta (3471)	Pemukiman	Perumahan Sleman Permai I
		Perkantoran/Komersial	Dishubkominfo Sleman
		Transportasi	Halaman Kantor Kelurahan Giwangan
		Industri/Agro Industri	Halaman Kantor Kelurahan Sorosutan
		Pemukiman	Halaman UPT Malioboro
		Perkantoran/Komersial	Halaman Kantor Kelurahan Baciro

M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Dalam komitmen global (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Hingga akhir tahun 2016, jumlah kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terus meningkat. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana dari BNPB, terdapat 322 Kabupaten/Kota yang masih berada pada kelas risiko tinggi dan 174 Kabupaten/Kota pada kelas risiko bencana sedang. Hal ini masih menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.

Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta dampak perubahan iklim, BPBD DIY menjalankan melakukan dua strategi yaitu adaptasi dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural melalui program pembangunan yang relevan. Strategi program pembangunan yang relevan, yaitu: (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi struktural dan non-struktural, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas daerah sehingga dapat menurunkan jumlah korban terkena dampak bencana; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektoral bukan hanya saat kondisi tanggap darurat tapi terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana; (3) memperkuat kelembagaan dan regulasi terkait PRB dampak perubahan iklim sebagai tindak lanjut dari beberapa regulasi antara lain: Indonesia Adaptation Strategy (Bappenas, 2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (DNPI, 2011), dan *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map* (Bappenas, 2010), Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007), serta Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang disahkan pada Februari 2014 sebagai alat harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan adaptasi yang sudah ada.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan melaksanakan program aksi adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan TPB (TPB/SDGs). Pengarusutamaan penanganan perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional lintas bidang terus dilakukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJMN 2015-2019) dan perenacaan pembangunan tahunan (RKP). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam melaksanakan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Secara reguler, dokumen bukti kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim disampaikan ke UNFCCC, baik dalam bentuk *National Communication* maupun *Biennial Update Report* (BUR*).*

Untuk mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut

mengamanatkan Pemda wajib untuk menyusun RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario *fair*) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Penyusunan Tata Ruang Laut. Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan UU No. 27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Maksud RZWP3K adalah mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (ii) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (iv) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang mencakup hingga 12 mil dari garis pantai diukur dari pasang tertinggi. Pada akhir 2017, Pemda DIY telah menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah terkait RZWP3K dan ditargetkan pada Tahun 2018 disahkan di DPRD menjadi Perda RZWP3K DIY Tahun 2018-2038. Seiring dengan proses penetapan Perda tersebut, Pemda DIY sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K pada tahun 2018.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2014. Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai *platform* kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan

2018

pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*). DIY termasuk dalam WPP RI 573 yang termasuk selatan pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Gambar 3.4. Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Penangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis yang Aman. Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahanikan (*stock assessment)* dilaut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield*/MSY) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch*/TAC). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarinya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,3 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,9 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY meningkat menjadi 12,5 juta ton (Kepmen KP No.50/2017). Peningkatan nilai MSY ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, pencatatan kapal, perbaikan metodologi perhitungan, dan masuknya spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan pembuatan *Log Book* perikanan dan *Vessel Monitoring System* yang kemudian masuk dalam sistem satu data.

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing* terus ditingkatkan. Pemberantasan IUU *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam rangka mendukung pemberantasan IUU fishing, Pemda DIY telah membentuk tim pengawasan terpadu dari Lanal, Polair, Dishub DIY dan Dinas terkait lainnya yang tugasnya mengawasi di perairan laut dan daratan. Selain itu diperlukan pelibatan inklusif semua pelaku perikanan dalam memanfaatkan potensi perikanan secara *legal*, *reported* dan *regulated*.

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Pemda DIY melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Beberapa dukungan dalam peraturan tersebut untuk nelayan kecil adalah (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuh kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Hibah untuk nelayan skala kecil juga terus ditingkatkan berupa peralatan tangkap, kapal, pelatihan dan sosialisasi/pembinaan. Adapun tantangan yang perlu diatasi dalam memberikan bantuan kepada nelayan kecil adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil.

O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kehadiran KPH sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yaitu illegal activities (*logging, hunting, encroaching*), pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Upaya lainnya untuk peningkatan kinerja tata kelola kehutanan adalah dengan peningkatan aset kehutanan melalui upaya restorasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Pada tahun 2017, pemanfaatan sumberdaya hutan tercatat sebesar 36,09%. Pemanfaatan sumberdaya hutan pada tahun 2017 berupa pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Dari luas total hutan sebesar 18.715 ha sebesar 6.753,76 ha (terdiri dari 3.771,26 ha untuk produksi minyak kayu putih dan 2.985,50 ha untuk produksi kayu). Pemanfaatan tersebut hanya dilakukan di area hutan produksi yang memang diperuntukkan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Pada tahun 2017 luas pemanfaatan hutan secara optimal.

Secara umum, pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu dapat dilakukan pada area seluas 10.117 ha atau sebesar 54,06% dari luas hutan keseluruhan dengan catatan kondisi tanaman seluruhnya pada kondisi normal dan produktif. Namun pada kenyataannya keadaan tanaman dengan kondisi normal hanya tercatat seluas 3.087,20 ha yang terdiri atas tegakan jati dan rimba seluas 2.985,50 dan tegakan kayu putih seluas 104,70 ha. Pada tegakan kayu putih dengan kondisi bertumbuhan kurang juga dilakukan pungutan daun untuk produksi minyak kayu putih seluas 3.666,56 ha. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target produksi minyak kayu putih.

Tantangan besar dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan adalah kondisi tegakan yang mayoritas berupa tegakan bertumbuhan kurang sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan dalam hal ini untuk produksi kayu dan minyak kayu putih tidak bisa dilakukan secara optimal. Selain itu masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal.

Kerusakan hutan sebagian besar diakibatkan karena adanya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan sebagian besar karena adanya tanah kosong dan petak bertumbuhan kurang. Penyebab lain dari kerusakan hutan adalah adanya gangguan keamanan hutan serta adanya bencana alam. Jumlah kerusakan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul dari tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki kasus terbanyak.

Kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2012 – 2016 terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 hektar. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu. Tindakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran

masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan upaya perlindungan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Indeks Tutupan Hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan ITH ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ITH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Penghitungan indeks tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Penghitungan indeks tutupan hutan menggunakan rumus:

$$TH = \frac{LTH}{LWP}$$

Keterangan: TH = Tutupan Hutan

LTH = Luas Tutupan Hutan

LWP = Luas Wilayah Provinsi

Kemudian dilakukan konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah provinsi melalui persamaan sebagai berikut:

$$ITH = 100 - \left(\left(84{,}3 - (TH \; x \; 100)\right) x \; \frac{50}{54{,}3} \right)$$

Keterangan: ITH = Indeks Tutupan Hutan

TH = Tutupan Hutan

P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan, BPPM melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Perda Nomor 3/2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; (2) Pergub Nomor 66/ 2012 Forum perlindungan korban kekerasan; (3) Pergub Nomor 67/2012 tentang organiasai dan tata kerja P2TPA RDU; (4) Pergub Nomor 34/2013 tentang RAD perlindungan perempuan dan akan korban kekerasan tahun 2013-2017; (5) Perda Nomor. 6/2014 tentang Perlindungan terhadap korban TPPO, (6) Perda Nomor. 2 tahun 2018 tentang Pelindungan anak; (7) Penyusunan Perda Ketahanan Keluarga

Strategi program pembangunan yang relevan, antara lain: (1) peningkatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor pencegahan kekerasan; (2) pelayanan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Layanan ini berupa saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaraan terhadap anak; (3) penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas SDM pada institusi yang mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dengan pengembangan dan penguatan program kesejahteraan sosial anak–integratif dan penguatan; (4) penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan didukung Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA); (5) pengembangan program untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dengan mempromosikan penggunaan disiplin positif bagi guru dan pengembangan program pencegahan perundungan (*anti-bullying*); (6) penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan,

perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaraan melalui peningkatan peran dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam penguatan pengasuhan berbasis keluarga dan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); serta (7) peningkatan partisipasi masyarakat termasuk anak-anak melalui pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (2) penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan.

Q. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Keterbukaan ekonomi memberikan manfaat bagi perekonomian DIY melalui perdagangan antar negara. Secara umum, perkembangan ekspor di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Dalam tiga tahun terakhir, kinerja sektor perdagangan mulai membaik dan tercatat surplus karena terpengaruh oleh pulihnya kondisi perekonomian global. Tercatat, Nilai Ekspor DIY pada tahun 2017 sebesar 296,61 Juta US$. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,43 Juta US$ (17,62%) jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 252,18 Juta US$. Peningkatan ekspor DIY didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, atsiri daun cengkeh, dan produk tekstil lainnya. Sementara tujuan utama ekspor komoditas DIY adalah Jerman, diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda.

Tabel 2.41. Perkembangan Ekspor di DIY, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Volume (Juta kg)	34,03	57,51	56,9	57,01	59,24
Nilai (Juta US $)	211,76	233,25	242,47	252,18	296,61
Komoditas	127	166	110	88	78
Negara	111	114	115	112	112
Eksportir	286	310	325	286	314

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Kemitraan untuk mencapai TPB diwujudkan melalui kerjasama pada level internasional. Pada sasaran global, target pembangunan adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk mencari dukungan internasinal untuk peningkatan kapasitas lokal. Pada sisi perkuatan sumber daya domestik, Pemda DIY terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, dan pada sisi kerjasama internasional Pemda DIY diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan beberapa negara maju di dunia.

Pemda DIY menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang pada tanggal 24 November 2016. Kerjasama dilakukan dalam bidang pertanian selama 3 tahun (dari tahun 2018 hingga 2021). Skema kerjasama dilakukan dengan pemagangan tenaga pertanian dari pemda DIY di prefektur Yamanashi untuk belajar tentang budidaya tanaman anggur dan stroberi.

Serangkaian kerjasama dalam bentuk *sister province* juga dilaksanakan dengan pemerintah Australia (khususnya negara bagian Victoria) dalam bidang seni dan kebudayaan. Kerjasama pun dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Gangwon dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Kegiatannya adalah *"Gangwon Provincial Program for Local Government Officials of Sisterhood Governments"* dan *Saemaul Undong Program.* Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan, aktivitas relawan dan pengenalan budaya Korea.

Bab III

Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB

2018

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2018 - 2022

Bab III

Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB

A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggungnya. Kemiskinan, yang menjadi tujuan utama MDGs, kembali menjadi tujuan utama dalam TPB. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian RAD MDG's DIY 2010-2015, salah satu indikator dengan kategori merah (belum tercapai) adalah indikator penurunan kemiskinan. Target pencapaian penurunan yang seharusnya diakhir periode MDG's berada pada 10,30%, namun kenyataanya hanya turun pada angka 13,16%. Maka, Pemda (Pemda) DIY, dalam rangka mencapai Tujuan 1 TPB Tanpa Kemiskinan, menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 7-8 % (RPJMD DIY 2017-2022).

Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan

seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Arah kebijakan untuk mencapai target mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun adalah:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja organisasi Pemda (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program.
2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin.
3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.
4. Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah.
5. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah.
6. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan tempat produksi dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.
7. Peningkatan infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan.
8. Pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, peningkatan perekonomian desa dan kawasan perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.
9. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.

10. Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial.
11. Peningkatan kerjasama kemitraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan perguruan tinggi, forum tanggungjawab dan lingkungan perusahaan (TLSP), organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMD 2017-2022 diarahkan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dengan program penanggulangan kemiskinan yang indikator kinerjanya meliputi:

1. Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru
2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)
3. Pengeluaran per kapita masyarakat

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 1, program dan kegiatanya mencakup: (1) Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri (2) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat (3) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin (4) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak (5) Peningkatan enduduk berakses energi (6) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah (7) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin (8) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.

Selain itu, ada program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Diantaranya bisa dilihat pada lampiran.

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2018	2020	2021	2022
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1	Tingkat kemiskin-an daerah	BPS	%	13,02 % (2017: 12.36%)	11,23	10,19	9,11	8,07	7
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1	Presentase Penduduk Miskin yang mendapat-kan layanan jami-nan kesehatan	Dinkes	%	75,28 (Indo-nesia dalam angka 2017)	83,8	100	100	100	100
1.3.2	Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Disna-ker	Jiwa	279 .519	331 .665	339 .957	348 .456	357 .167	366 .097
1.3.3	Jumlah peserta Program SJSN Ketenagakerjaan (Formal)	Disna-ker	Jiwa	256 .099	307 .074	314 .136	321 .344	328 .700	336 .206
1.3.4	Jumlah peserta Program SJSN Ketenagakerjaan (Nonformal)	Disna-ker	Jiwa	23 .420	24.59 1	25.82 1	27.11 2	28.46 7	29.89 1
1.3.5	Jumlah penyan-dang difabilitas miskin dan ren-tan yang meneri-ma bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinsos	Jiwa	672	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
1.3.6	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH Graduasi	Dinsos	Jiwa		660	660	660	660	660
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2018	2020	2021	2022
1.4.1	Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	SDKI 2017	%	76	76,1	76,2	76,3	76,4	76,5
1.4.2	Cakupan persali-nan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinkes	%		99,77	99,77	99,77	99,77	99,77
1.4.3	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mene-rima imunisasi dasar lengkap.	Dinkes	%	96,4	97	97,5	98	98	98
1.4.4	Meningkatnya akses air minum layak	Indone -sia dalam angka	%	81,04	86,98	88,71	90,49	92,30	94,14
1.4.5	Penanganan kawasan kumuh	Dinas PU ESDM	%	39,8	39,80	58,22	72,16	86,08	100,00
1.4.6	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas PU ESDM	%		11,54 7,62	23,08 21,75	34,62 32,43	46,15 43,10	57,69 53,78
1.4.7	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat	Dinas Pendi-dikan	%	SD LK = 98,68. PR = 94,86	97,10	97,33	97,57	97,8	98,27
1.4.8	Angka Parisipasi Murni SMP/MTs sederajat	Dinas Pendi-dikan	%	SMP LK= 8492. PR= 8376	84,7	84,75	84,79	84,84	84,89
1.4.9	Angka Parisipasi Murni SMA/SMK/ MAsederajat	Dinas Pendi-dikan	%	SMA/K LK=6634. PR= 6647	97,96	99,76	101,56	103,36	105,16
1.4.10	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan persentase (%) kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP elektronik.	Tapem	%	2.736 .850	97,9	98	98,5	99	99,5
1.4.11	Meningkatnya ak-ses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi)	PU ESDM	%	88,66	93,02	95,6	98,14	99,7	100

Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2018	2020	2021	2022
1.5.1	Jumlah desa yang sudah menjadi Destana/Katana	BPBD	Lokasi	323	323	350	350	350	350
1.5.2	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Dinsos	Lokasi	189	214	239	264	289	301
1.5.3	Persentase korban mening-gal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	BPBD	%	12	12	11	10	9	8
1.5.4	Capaian indeks pemulihan pasca-bencana di DIY	BPBD		50	65	70	75	80	85
1.5.5	Kebutuhan dasar korban bencana kebakaran		jiwa	196	196	200	200	200	200
1.5.6	Pemulangan Orang Telantar	Dinsos	jiwa	323	323	350	350	350	350
1.5.7	Jumlah dokumen RPB DIY & RAD PRB DIY	BPBD	Doku-men	155	149	143	137	131	125

Keterangan: Indikator tidak memakai 40% masyarakat terbawah karena ketidaktersediaan data di lapangan. Layanan pun tidak memandang strata dan capaianya sudah maksimal mendekati 100% (99,77%)

B. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Upaya perbaikan gizi masyarakat diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif; (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal); (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya; (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan
2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat
3. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan

Pogram Tujuan 2 adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan keamanan pangan; Pemberdayaan daerah rawan pangan; Peningkatan produksi tanaman pangan; Peningkatan produksi hortikultura; Peningkatan populasi peternakan; Peningkatan produksi perkebunan; Peningkatan produksi perikanan budidaya; Peningkatan produksi perikanan tangkap.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Base-line (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1	Kualitas kon-sumsi pang-an yang di-indikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan per kapita	Dinas Per-tanian dan Ketahanan Pangan	Skor	88,5	89,92	90,22	90,52	90,82	91,12
		BPS	Kg/ Kapita/ Tahun	23,1	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
2.2.2	Jumlah Desa Rawan Pangan	Dinas Per-tanian dan Ketahanan Pangan	Desa	10	N/A	6	4	2	0
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.									
2.3.1	Penetapan Kawasan Pertanian Berkelanjut-an (KP2B) seluas 104. 905,8 ha	Dinas Per-tanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas PTR	ha	N/A	104.905 ,80	104.905 ,80	104.905 ,80	104.905 ,80	104.905 ,80
2.3.2	Produksi tanaman pangan	Dinas Per-tanian dan Ketahanan Pangan	ton	2.204 .717	2.209 .769	2.312 .780	2.313 .050	2.313 .255	2.313 .500
2.3.3	Produksi hortikultura	Dinas Per-tanian dan Ketahanan Pangan	ton	392.421	396.375	397.965	399.550	401.150	402.750

2018

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Base-line (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
2.3.4	Populasi ternak	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Animal Unit	620.516	620.869	622.842	624.874	626.885	628.870
2.3.5	Produksi perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ton	68.602,97	68.740	68.877	69.015	69.153	69.290
2.3.6	Produksi perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	ton	76.875,60	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700
2.3.7	Produksi perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	ton	5.001,20	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063

C. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau *(tobacco control)*, pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (2) Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan) (3) Peningkatan pelayanan Medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa (4) Peningkatan aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
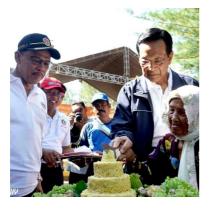
Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana, prasarana dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan SDM kesehatan.

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1	Meningkat-nya jumlah peserta KB aktif	BKKBN	Jiwa	363.937 (PPM PA 2018)	363.937	369.093	366.297	367.502	368.707
3.7.2	Meningkat-nya cakupan CPR cara modern (*Contracep-tive Preva-lence Rate*)	BPS	%	32,18 (SDKI 2017)	57,9	58,0	58,2	58,3	58,5

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
3.7.3	Meningkat-nya cakupan CPR cara modern pada peng-gunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	BPS	%	20 (SDKI 2017)	32,40	32,50	32,70	32,90	33,00
3.7.4	Menurunnya jumlah kela-hiran pada remaja usia 15-19 tahun	BPS	%	2,2 (SDKI 2017)	20	20	20	19	19
3.7.5	Menurunnya rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa repro-duksinya	BPS	%	2,2 (SDKI 2017)	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1

D. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas didasarkan pada strategi meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kulitas Pendidikan (2) Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung Pendidikan (3) Peningkatan layanan pendidikan di DIY (4) Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan pembinaan, dan pelindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4. Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1	Meningkatnya per-sentase SD/MI ter-akreditasi minimal B	Disdik-pora	%	96,33	97,21	97,88	98,12	98,46	99,11
4.1.2	Meningkatnya per-sentase SMA/MA ter-akreditasi minimal B	Disdik-pora	%	94,57	94,62	95,13	95,81	96,02	96,58

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
4.1.3	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Disdik-pora	%	108,19	108,26	108,22	108,18	108,13	108,7
4.1.4	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat	Disdik-pora	%	112,47	112,34	112,26	112,15	112,15	112,10
4.1.5	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat	Disdik-pora	%	94,27	94,35	94,41	94,49	94,56	94,64
4.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)	Disdik-pora	%	9,10	93,68	93,89	93,91	93,94	93,97
4.1.7	Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Disdik-pora	%	94,27	94,35	94,41	94,49	94,56	94,64

E. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Isu kesetaraan gender perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibanding laki-laki. Di sektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan dan anak-anak sebagai korban.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di berbagai perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: (1) pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin untuk membuka dan meningkatkan akses perempuan pada potensi pemberdayaan ekonomi (2) peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik dengan diprioritaskan pada penguatan kapasitas pada perempuan dan advokasi lembaga (3) percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan pada kegiatan pencegahan dengan

memperkuat jejaring antar lembaga (4) peningkatan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA terutama di Kab. Bantul yang belum mencapai level terendah KLA (pratama) (5) peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban terutama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (6) penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan (7) pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan integratif sesuai dengan rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga, dan (8) pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program perlindungan perempuan dan anak yang didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (b) Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak (c) Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak. (2) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didukung dengan kegiatan (a) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak (b) Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi. (3) Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk yang didukung dengan kegiatan (a) Pembinaan Keluarga Berencana (b) Peningkatan kesehatan reproduksi. (4) Program peningkatan kualitas keluarga yang didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan Ketahanan keluarga (b) Pengembangan Bina Keluarga.

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam martiks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator ini bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	BPPM DIY, Biro Hukum DIY	Dokumen	14	14	15	16	16	17
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1	Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	BPPM, BPS	%	0,042 (2015) 0,050 (2016)	0,049	0,048	0,047	0,046	0,045
5.2.2	Proporsi pe-rempuan dan anak perem-puaan meng-alami kekeras-an Dalam Ru-mah Tangga (KDRT)	BPPM, BPS	%	0,019 (2017)	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014
5.2.3	Proporsi pe-rempuan dan anak perem-puan meng-alami kekeras-an non-KDRT	BPPM, BPS	%	0,046 (2017)	0,045	0,044	0,043	0,042	0,041
5.2.4	Persentase korban keke-rasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	BPPM, BPS	%	52,23	70	73	76	80	85
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1.	Median usia kawin pertama perempuan	Cascad-ing Rancang-	Tahun	Rata-rata usia menikah	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	pernah kawin umur 25-49 tahun.	an RPJMD, IKU BPPM		Perempu-an: 2015: 25,8 2016: 25,1 Rata-rata usia menikah Laki-laki: 2015: 27 2016: 26 Sumber Data Kemenag DIY 2017					
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Data Gender dan Anak 2017	%	DPRD Prov= 13 (2015)	DPRD Prov=13 (2016)	DPRD Prov=13 (2016)	DPRD Prov=13 (2016)	DPRD Prov=13 (2016)	DPRD Prov=13 (2016)
				DPRD Kab/kota= 17,72 (2015)	DPRD Kab/kota=17,97 (2016)	DPRD Kab/kota=17,97 (2016)	DPRD Kab/kota= 17,97 (2016)	DPRD Kab/kota=17,97 (2016)	DPRD Kab/kota=17,97 (2016)
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Data Gender dan Anak 2017	%	Eselon I= 0% (2015)	Eselon I= 0% (2016)	Eselon I= 0% (2016)	Eselon I= 0% (2016)	Eselon I= 0% (2016)	Eselon I= 0% (2016)
				Eselon II=19,10% (2015)	Eselon II=20,22% (2016)	Eselon II=20,22% (2016)	Eselon II=20,22% (2016)	Eselon II=21% (2016)	Eselon II=21% (2016)
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang men-jamin perem-puan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehat-	BPPM DIY, Biro Hukum DIY	Dokumen	Pergub = 1	Pergub = 1	Pergub = 1	Pergub = 1	Pergub = 1	Pergub = 1

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
	an seksual dan reproduksi.								
Target 5.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak- anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.									
5.7.1	Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak di DIY	Data Gender dan Anak 2017	Lembaga P2TP2A	6 (Semua kabupaten/kota dan Provinsi telah terbentuk P2TP2A)	6	6	6	6	6

F. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah

Untuk mewujudkan Tujuan ini, Pemda DIY menetapkan Strategi: (1) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi (2) Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi (3) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat (4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi (5) Meningkatkan peran rencana

tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi (6) Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah: (1) Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh gubernur (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang, fasilitasi upaya ketaatan terhadap rencana rata ruang (3) Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah sosial (4) Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air (5) Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya (6) Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan (7) Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (9) Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif.

Program Tujuan 6. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB, program yang akan dilaksanakan DIY mencakup (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (2) Peningkatan Penduduk Berakses Air Bersih Layak (3) Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah.

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan yang sebagian bersumber dari data capaian kinerja program dan kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas PU ESDM	%	85.27	86.98	88.71	90.49	92.30	94.14
6.1.2	Penambahan kapasitas air baku	Dinas PU ESDM	Liter/detik		35	36	37	38	39
6.2 Pada tahun 2013, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
6.2.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas PU ESDM	%	86,97	88,71	90,49	92,30	94,14	94,92
6.2.4	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	Dinas PU ESDM	Jumlah kabupaten		5	5	5	5	5
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1	Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai	BLH DIY	-	29,17	34	36	38	40	42
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektro, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
6.4.1	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap renca-na tata ruang	Dinas PU ESDM	izin	290	330	370	410	450	490
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.									
6.5.1	Jumlah Kelom-pok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisi-pasi dalam Pengelolaan Sungai	BLH DIY	Kelompok	7	10	13	16	19	22

G. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Untuk mewujudkan Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Pemda DIY didasarkan pada strategi Pemenuhan layanan Dasar Masyarakat Miskin, dengan arah

kebijakan: (1) Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi (2) Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (3) Meningkatkan aksesibilitas energi (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Program Tujuan 7. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 7 TPB, program yang akan dilaksanakan DIY mencakup**:** (1) Program Pengawasan dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah dan Pertambangan (2) Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan.

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	Dinas PUP & ESDM	persen	88,66	93,02	95,60	98,14	99,70	100,00
7.1.2	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	Dinas PUP & ESDM	RT	3.000	N/A	7.848	9.848	11.848	13.848
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.									
7.3.1	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Dinas PUP & ESDM	Unit	32,00	N/A	62,00	72,00	82,00	92,00
7.3.2	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	Dinas PUP & ESDM	Izin	0,00	N/A	30,00	45,00	60,00	75,00

H. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY berkembang seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan teknologi. Selama lima tahun terakhir, perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,11 % per tahun. Kondisi ekonomi DIY, dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi yang membanggakan. Tahun 2017 landasan ekonomi DIY cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB DIY. Sektor tersebut antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi.

Tujuan 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target meliputi kebijakan: (1) Pertumbuhan Ekonomi Makro secara berkelanjutan, (2) Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif, (3) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), (4) Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi makro meliputi: (1) Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sector pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif (2) Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi (3) Penumbuhan Wirausaha Baru yang Mandiri (4) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial. (5) Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja

(6) Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (7) Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian (8) Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat (9) Memperkuat peran pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah (10) Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata (11) pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya.

Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif meliputi: (1) Mendorong masuknya investasi dengan promosi keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki DIY, dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi. Selanjutnya investasi diarahkan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan memajukan wilayah-wilayah pinggiran yang terpencil, dengan prioritas investasi dan program strategi pemerintah diarahkan ke Kab. Kulon Progo, Gunungkidul dan bantul. (2) Meningkatkan akses pelayanan informasi pasar kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas; (3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi kurikulum, standarisasi dan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja; (4) Meningkatkan perluasan kerja melalui usaha mandiri dengan penyesuain dengan perkembangan inovasi saat ini. (5) Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip *collective bargaining* dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial; (6) Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja; (7) Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan

prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi: (1) Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat. (2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan (4) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

Kebijakan Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan Meliputi: (1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan diversifikasi produk wisata berbasis potensi lokal dengan dukungan ekosistem kepariwisataan yang handal untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan. (2) Mengembangkan keterpaduan dan komplementaritas pengembangan produk wisata serta konektivitas yang handal antar destinasi/kawasan strategis pariwisata, khususnya kawasan pantai selatan, untuk menciptakan keseimbangan pengembangan kepariwisataan wilayah (3) Mewujudkan komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkat-kan citra pariwisata DIY di tingkat nasional dan internasional dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (4) Mewujudkan industri pariwisata handal dan unggul untuk mampu menggerakkan perekonomian DIY melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (5) Mengembangkan organisasi, tata kelola dan sumber daya manusia bidang kepariwisataan yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien di DIY

Program Tujuan 8. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 TPB, program yang akan dilaksanakan DIY mencakup: (1) Pengembangan UKM Peningkatan Akses Pembiayaan (2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (3) Program Pengembangan Industri

Pariwisata (4) Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata (5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga (6) Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan (7) Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi (8) Program Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan (9) Program Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial. (10) Program Pengujian Lingkungan Kerja Dan Kesehatan Kerja (11) Program Peningkatan produksi tanaman pangan (12) Program Peningkatan produksi hortikultura (13) Program Peningkatan populasi peternakan (14) Program Peningkatan produksi perkebunan (15) Program Peningkatan produksi perikanan budidaya (16) Program Peningkatan produksi perikanan tangkap (17) Program Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	BPS	Juta rupiah	6.903 .079	7.041 .831	7.112 .249	7.183 .372	7.255 .205	7.327 .757
8.1.2	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (ADHK)	BPS	Juta rupiah	720 .236	734 .713	742 .060	749 .480	756 .975	764 .545
8.1.3	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	BPS	Juta rupiah	312 .662	318 .947	322 .136	325 .357	328 .611	331 .897
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									

2018

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
8.2.1	Laju pertum-buhan PDB per tenaga kerja	BPS (Statistik Indonesia Sakernas)	%	-2,71	3,43	3,48	3,55	3,62	3,69
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1	Proporsi lapangan kerja infor-mal sektor nonpertanian	BPS (Sakernas)	%	42,54	43,86	42,49	41,12	39,75	38,38
8.3.2	Persentase tenaga kerja formal	BPS (Sakernas)	%	43,87	43,34	43,94	44,54	45,14	45,74
8.3.3	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (Sakernas)	%	95,66	96,06	95,49	94,93	94,36	93,79
8.3.4	Proporsi kredit UMKM terha-dap total kredit	BI	%	32,04	32,62	33,21	33,79	34,37	34,96
8.3.5	Jumlah pem-biayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun n (Rp)	Dinas Koperasi dan UKM	Rp	12.000 .000 .000	12.000 .000 .000	15.870 .000 .000	18.250 .500 .000	20.988 .075 .000	24.136 .286 .250
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1	Upah rata-rata perbulan	BPS (Sakernas)	Rupiah	1.975 .721	2.136 .940	2.222 .417	2.311 .314	2.403 .767	2.499 .917
8.5.2	Tingkat pe-ngangguran terbuka (TPT)	BPS (Sakernas)	%	2,72	3,21	3,11	3,01	2,92	2,82
8.5.3	Persentase setengah pe-ngangguran	BPS (Sakernas)	%	5,06	4,72	4,55	4,08	3,99	3,90
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan									

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
8.6.1	Persentase usia muda (15-24) yang se-dang tidak se-kolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Disnaker	%		89,478	85,209	80,940	76,671	93,747
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1	Jumlah peru-sahaan yang menerapkan norma K3.	Disnakertrans DIY	Perusahaan	1.224	1.224	1.368	1.368	1.440	1.440
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1	Meningkatnya nilai sektor akomodasi makan mi-num dalam PDRB	Dinas Pariwisata		8,274,501	9,297,230	9,855,064	10,446,367	11,073,149	11,737,538
8.9.2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata DIY	Jiwa	355.313	433.400	498.410	598.092	747.614	971.899
8.9.3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata DIY	Jiwa	4.194.261	4.972.194	5.427.818	5.944.235	6.542.235	7.405.200

I. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas

teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Sesuai dengan RPJMD DIY 2017-2022 yang telah dijabarkan juga dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, arah kebijakan terkait dengan target mempromosikan industri inklusif dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk sektor (2) Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan *(Green Sector*) (3) Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif (4) Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha (5) Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.

Program Tujuan 9. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung tujuan 9 antara lain terkait dengan: (1) Program Peningkatan Teknologi Industri (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri pengo-lahan non migas terhadap PDRB	BPS	%	13	13	13	13	13	13

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
9.2.2	Laju pertumbuh-an PDRB industri pengolahan	BPS	%	6	2,29	4	4	4	4
9.2.3	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	BPS	%	13	13	13	13	13	13
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar									
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil menengan terhadap total nilai tambah indusrti	Dinas Perindustrian	%	18	18	18	18	18	18

J. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara

Pemda DIY mendukung pencapaian TPB untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022, yaitu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adapun target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut: (1) Koefisien Gini (2) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (3) Desa mandiri berbudaya (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Arah kebijakan Tujuan 10 adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan wirausaha baru yang mandiri (2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin (3) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan

tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial (4) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat (5) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin (6) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak. (7) Peningkatan penduduk berakses energi (8) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah (9) Memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya (10) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (11) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1	Koefisien Gini.	BPS		0,42	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36
10.1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	12,36	11,23	9,78	8.82	7,85	7
10.1.3	Desa mandiri berbudaya	Dinas Kebudayaan	Desa	0	0	5	10	15	20
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1	Jumlah pena-nganan pengadu-an pelanggaran HAM	Kumham	Kasus		17	20	23	26	29

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
10.3.2	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Kumham	Kasus		1	1	1	1	1
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan,terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar									
10.4.1	Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Disnaker-trans	Jiwa	279 ,519	331 ,665	339 ,957	348 ,456	357 ,167	366 ,097
Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggungjawab, termasuk melalui penerapan kebijakan imigrasi yang terencana dan terkelola dengan baik									
10.7.1	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Disnaker-trans		782	862	905	951	998	1048

K. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui RAN TPB ditetapkan 10 target nasional. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Pemda DIY didasarkan pada strategi Pemenuhan layanan Dasar Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemda DIY, dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 11 sebagai berikut:

2018

Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB (1) Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Hunian Layak dan Terjangkau (2) Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (3) Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian (4) Pengembangan Kawasan Keistimewaan (5) Pemenuhan kebutuhan sarpras keistimewaan (6) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) (7) Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan (RAD Sanitasi) (8) Ruang Terbuka Hijau (RTH) (9) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (11) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana (12) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.11. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	BPBD	%	12	12	11	10	9	8
11.5.2	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	BPBD	Indeks	165	160	155	145	135	125
11.5.3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	BPBD	Indeks	65	68	71	74	77	80

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
11.5.4	Jumlah desa/ kelurahan tang-guh bencana yang terbentuk	BPBD	Desa/ Kelurahan	189	214	239	264	289	301
11.5.5	Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi.	BPBD	Sistem Peringatan Dini	4	4	5	6	7	8
11.5.6	Capaian indeks pemulihan pascabencana di DIY.	BPBD	Indeks	50	65	70	75	80	85
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									
11.4.1	Jumlah kawa-san cagar buda-ya dan warisan budaya dunia	Dinas Kebudaya-an	kawasan	1	1	1	1	1	1
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1	Jumlah doku-men RPB DIY & RAD PRB DIY.	BPBD	Dokumen	2	2	2	2	2	2
11.5.2	Persentase jumlah doku-men Rencana Kontijensi ter-hadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY.	BPBD	%	n/a	n/a	80	100	100	100

L. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Strategi untuk mencapai Tujuan 12 Menjamin Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab di DIY adalah: (1) Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (2) Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah (3) Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut (4) Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur (5) Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah: (1) Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas (2) Peningkatan kualitas air dan kualitas udara (3) Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut (4) Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3).

Program Tujuan 12. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (2) Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (3) Program Kajian dan Penaatan Lingkungan Hidup

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	BLH	Peserta proper	30	33	36	39	42	45
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.4.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	BLH	ton	-	-	-	-	-	-

M. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Pemda DIY didasarkan pada strategi: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pengelolaan

pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.

Pemda DIY dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 13 adalah: (1) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) (2) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara Tahunan (3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Program Tujuan 13. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 13 TPB, program yang terkait dengan penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam yang akan dilaksanakan oleh Pemda DIY mencakup (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1	Persentase jumlah doku-men Rencana Kontijensi terhadap lima jenis ancaman bencana di DIY.	BPBD	%	n/a	n/a	80	100	100	100
13.1.2	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana.	BPBD	%	12	12	11	10	9	8

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2.1	Dokumen pela-poran penurun-an emisi gas rumah kaca (GRK).	Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1	1

O. Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fisihing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMD 2017-2022 terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Visi Misi Gubernur DIY pada RPJMD 2017-2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan DIY utamanya bidang Kelautan dan pesisir dan Bidang Perikanan. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) pengelolaan pesisir serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan (2) pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya; (2) Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya; (3) Mengendalikan IUU *fishing* dan kegiatan yang merusak di laut (4) Menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritime (5) Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;

Program Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB, program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2) Pengelolaan Pelabuhan.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya									
14.4.1	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Ton	5001,2	5817	5899	5981	6063	6145

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
14.5.1	Peningkatan status kawasan konservasi perairan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	%	N/A	20	30	60	80	100
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization									
14.6.1	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	%	N/A	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
14.6.2	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	%	N/A	10	10	10	10	10
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.									
14.b.1	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/ tempat pelelangan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	milyar rupiah	N/A	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73

P. Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan eksosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekargaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum

bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Pembangunan kehutanan pada periode 2017–2022 diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu pengelolaan hutan lestari. Perumusan arah kebijakan pembangunan kehutanan dilakukan berdasar analisis pola pemanfaatan ruang (analisis spasial) di DIY dengan membagi wilayah dalam kawasan-kawasan dengan arah pemanfaatan dan kriteria tertentu. Berdasarkan analisis pemanfaatan ruang, strategi pembangunan kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan berbasis fungsi hutan yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Selanjutnya maka dapat ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan. (2) Mempertahankan keberadaan kawasan hutan (3) Pemantapan Kawasan Hutan (4) Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan berkesinambungan (5) Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumberdaya hutan dan fungsinya (6) Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan (7) Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan (8) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan (9) Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan (10) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan (11) Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya (12) Konservasi Keanekaragaman Hayati (13) Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem (14) Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) (15) Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam (16) Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB, program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam (2) Pengembangan Pembibitan

Kehutanan (3) Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan (4) Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung (5) Pengelolaan Hutan Konservasi

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian									
15.1.1	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ha	150	N/A	160	165	170	175
15.1.2	Persentase Penurunan kerusakan hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	7,18	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1
15.1.3	Produksi bibit tanam-an bersertifi-kat yang ditanam (batang)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Batang	315.000	N/A	325.000	330.000	340.000	350.000
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.2.1	Persentase kawasan hutan tertata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	84,12	N/A	87,40	89,40	90,68	92,32
15.2.2	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memili-ki sertifikat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	2,00	N/A	2,00	2,00	2,00	2,00
15.2.3	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio	86,57	86,60	86,62	86,64	86,65	86,66

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
15.2.4	Persentase hutan konservasi terkelola	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	75,21	N/A	75,86	76,62	76,97	77,09

Q. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Dalam kaitannya dengan Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator.

Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di DIY difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi; dan (3) menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakannya adalah: (1) meningkatkan akses semua perempuan dan anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (2) menguatkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak (4) mendorong perempuan untuk ikut aktif terlibat dalam dunia politik (5) meningkatkan kapasitas dan skill perempuan yang berpotensi di dunia politik (6) Mendorong dibukanya kesempatan yang sama bagi perempuan di semua lini kepemimpinan di masyarakat (7) KIE tentang Hak Anak kepada seluruh

stakeholder yang terlibat (8) Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan pemenuhan Hak Anak.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dilaksanakan oleh Pemda DIY adalah: (1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak (2) Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1	Persentase keterwakilan perempuan sebagai peng-ambilan ke-putusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III).		%	34,25	34,25	34,34	34,38	34,42	34,45
16.7.2	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	82	84	84	84	84	84
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan - sipil, menurut umur.	Kependudukan DIY	%	86,84	92	94	96	98	99,9
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									
16.10.1	Jumlah OPD Pemda DIY yang telah menyusun Draf Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kominfo	OPD	39	39	0	0	0	0
16.10.2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi	Kominfo			75	85	90	95	100

R. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh TPB (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/ SDGs 17 yang memiliki target nasional dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Untuk mewujudkan Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, Pemda DIY didasarkan pada strategi Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui

kerjasama dengan badan usaha/swasta dengan arah kebijakan: (1) Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata (2) Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya.

Program Tujuan 17. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 17 TPB, program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Program Peningkatan Ekspor dan (2) Pengembangan Ekspor

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target Pencapaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.									
	Nilai ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Juta US$	296,61	302,54	308,59	314,76	321,06	327,48

Bab IV

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

2018

Bab IV

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Tahapan penting dalam upaya pencapaian target-target TPB adalah pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus pelaksanaan pencapaian di tingkat pusat maupun daerah. Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan dan dimulai sejak tahap penyusunan rencana aksi, baik di level nasional maupun daerah.

A. Landasan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB (khususnya pada pasal 7 butir b), kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah tugas Tim Pelaksanaan TPB/SDGs. Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Sedangkan untuk pemerintah, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Agar pelaporan pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dapat berjalan komprehensif, keterlibatan organisasi nonpemerintah -seperti organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi serta akademisi- memiliki peran yang penting dan dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme tersendiri.

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan pemantauan adalah memonitor perkembangan pencapaian TPB/SDGs secara periodik. Kegiatan dilakukan untuk menilai kemajuan pencapaian target berdasarkan indikator yang telah disahkan sekaligus mengidentifikasi dan mengantisipasi hambatan/persoalan yang menghambat pencapaian target. Sehingga dapat diambil kebijakan maupun tindakan untuk mengatasi persoalan sedini mungkin sebelum kompleksitasnya bertambah. Tujuan evaluasi dimaksudkan memberikan gambaran tentang tingkat capaian TPB/SDGs dan memberikan analisis terkait masalah/hambatan serta faktor penyebabnya. Secara ideal, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik/masukan yang tepat untuk penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan yang secara khusus terkait TPB/SDGs.

2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.

Ruang lingkup TPB/SDGs meliputi 17 tujuan global dan 49 target daerah yang seluruhnya terkait dengan target nasional yang telah diselaraskan dengan RPJMD DIY Tahun 2017–2022. Setiap target dilaksanakan oleh OPD dan Lembaga pelaksana yang pencapaiannya diukur dengan 126 indikator. Secara menyeluruh, Tujuan, Target dan Indikator dikelompokkan ke dalam empat pilar (gambar 4.1). Lingkup Pemantauan dan evaluasi terhadap tujuan, target dan indikator TPB/SDGs harus dilakukan secara menyeluruh pada program-program baik yang oleh APBN maupun APBD.
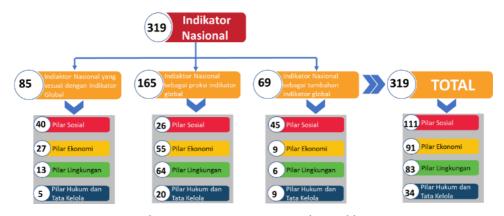
Gambar 4.1. Tujuan, Target dan Indikator

B. Mekanisme Pemantauan RAD

Berdasarkan Perpres 59/2017 pada pasal 15 ayat 1, daerah diamanatkan menyusun RAD dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Saat penyusunan, gubernur bekerja bersama dengan bupati/walikota di wilayahnya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak lainnya. Pada pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017, mengamanatkan gubernur untuk menyampaikan Laporan tahunan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti mekanisme (Gambar 4.2) sebagai berikut:
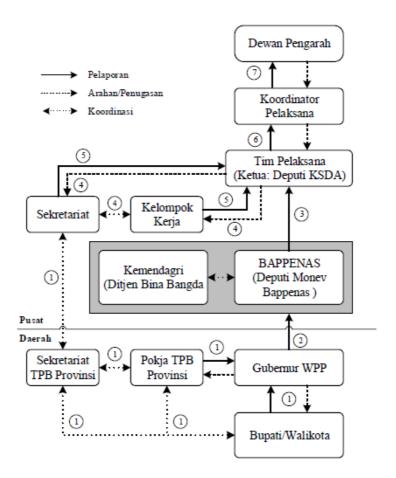
Gambar 4.2. Alur Pemantauan RAD

1. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melakukan koordinasi pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) setiap enam bulan sekali. Koordinasi dilakukan terkait program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi kemudian melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
2. **Gubernur** sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) menyampaikan laporan progress pencapaian TPB/SDGs sesuai format yang berlaku kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Laporan juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
3. **Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS** kemudian menyampaikan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).
4. **Ketua Tim Pelaksana** mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. **Masing-masing Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
6. **Ketua Tim Pelaksana** melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (Langkah 6).
7. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS** selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden **selaku** Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

C. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak NonPemerintah

Berbeda dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi rencana aksi program/kegiatan pemerintah, mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah dilakukan menggunakan mekanisme "penilaian diri sukarela" (*voluntary self assesment*). Pihak nonpemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi, serta akademisi. Perbedaan ini disebabkan karena program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga mekanisme pelaporannya pun bersifat sukarela. Sebagai catatan, meskipun bersifat sukarela, pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.
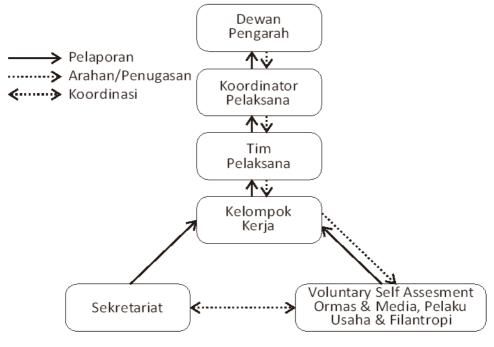
Gambar 4.3 Alur Pelaporan

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah berikut:

1. **Organisasi nonpemerintah** melakukan *voluntary self assessment* terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai format *self assessment tool*. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar yang terkait dan ditembuskan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs kemudian bertugas mengkompilasi laporan dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
2. **Kelompok Kerja** dibantu oleh Sekretariat SDGs selanjutnya menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
3. **Ketua Tim Pelaksana** kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
4. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan** pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi bagi organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc.* Forum ini merupakan panel independen dan nirkepentingan. Kelembagaan forum terdiri dari anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

C. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2018-2022

Jadwal Pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGS 2018-2022 dilaksanakan berdasarkan Perpres 59/2017 Pasal 20. Pasal ini mengatur tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 berlaku, atau tepatnya 10 Januari 2018, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden

RI. Untuk tingkat daerah, RAD harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres 59/2017 kemudian mengamanatkan agar *roadmap*/Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah selesai 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Sesuai dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan, pemantauan RAN dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada Januari 2019 (atau bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN). Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

Gambar 4.4. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

D. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik dilakukan melalui laman sdgs.BAPPENAS.go.id yang dipersiapkan oleh Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dan dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS. Laman ini akan terus dikembangkan untuk dapat mengakomodir muatan yang dihasilkan dari pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGS di DIY dilakukan melalui media massa.
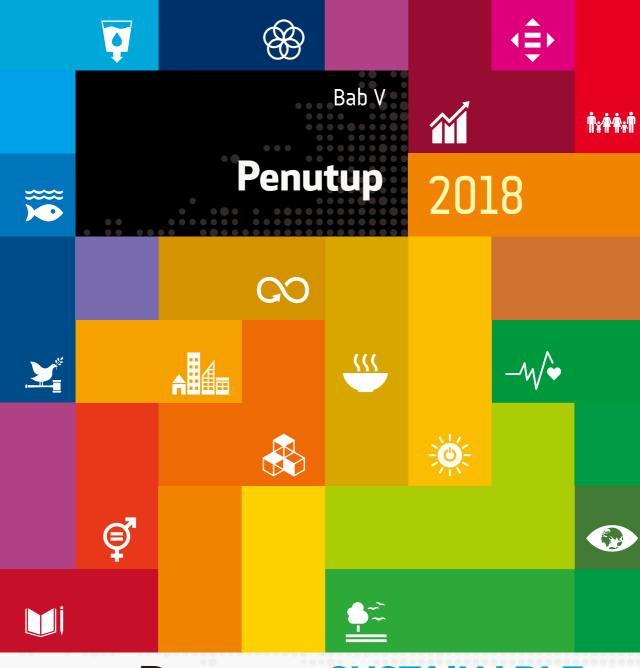
Bab V

Penutup

2018

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bab V
Penutup

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dan berisi aksi-aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda dan nonpemerintah secara bersama-sama. TPB berpegang pada prinsip integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB di daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/*Goal* tertentu menentukan keberhasilan dari Tujuan/*Goal* lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB, yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Maka, mekanisme pemantauan yang inklusif diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Pemda maupun nonpemerintah.

Pelaksanaan RAD TPB memerlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi. Teknologi informasi juga berfungsi mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, Pemda, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global dan nasional, juga diterapkan di tingkat daerah (DIY). Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemda, filantropi dan pelaku usaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya perwakilan setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB. Kemitraan ini memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB secara bersama. Termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB.

Dalam aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB serta hubungan antara pemerintah pusat, Pemda dan organisasi nonpemerintah.

Terkait aspek **kelembagaan**, telah ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB di tingkat daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 124/TIM/2018 tentang Tim Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPB Daerah yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya.

Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB. Dalam aspek **pendanaan** perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana Pemda (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemda (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada Pemda kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB.

Strategi Komunikasi. Agar TPB menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak Pemda dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

Yogyakarta, 10 Juli 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Daftar Pustaka

2018

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Daftar Pustaka

Buku Status Lingkungan Hidup DIY (SLHD) Tahun 2011

___________________________________ Tahun 2012

___________________________________ Tahun 2013

___________________________________ Tahun 2014

___________________________________ Tahun 2015

___________________________________ Tahun 2016

Dokumen SNI No.8357 Tahun 2017 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/kemiskinan/166-pengukuran-kemiskinan-sebuah-pendekatan-ekonomi

Hyogo Framework for Action 2005-2015

Inpres No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Perda DIY No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY

Perda DIY No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Raung Wialayah DIY Tahun 2009-2029

Perda DIY No.2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Perda DIY No.3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

Perda DIY No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perda DIY No.3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda DIY No.5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Perda DIY No.8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Perka BNPB No.02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Perka BNPB No.04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

Perka BNPB No.11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dam Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Perka BNPB No.17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Perka BNPB No.21 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan (Knowledge Sharing) Serta Pengalaman Penanggulangan Bencana

Perka BNPB No.4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana

Permen Desa PDTT No.22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Permen Desa PDTT No.5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Perpres No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ravallion, M.1998. *Poverty Lines in Theory and Practice, Living Standards Measurement Study Working Paper No.133*, World Bank.

Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. New York.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan: Kontekstualisasi Indonesia. 2015 : Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia.

Supadi dan Nurmanaf, A.R. 2004. *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan dan Kaitannya dengan Tingkat Kemiskinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

The Sphere Project : Humanitarian Minimum Standards in Humanitarian Response, Edisi Bahasa Indonesia, 2012: MPBI Jakarta.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No.23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

World Bank Institute. 2005. *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.

Lampiran 2018

Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2018 - 2022

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's Kabupaten Bantul

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1	Tingkat kemiskinan daerah	DinsosP3A	%	14	12.75	12.75	12.75	12.50	DinsosP3A
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	DinsosP3A	%	100	100	100	100	100	DinsosP3A
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan	Dinsos	%	100	100	100	100	100	Dinsos
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketengakerjaaan	Disnakertrans	formal (%)	70	72	74	76	80	Disnakertrans
			informal (%)	50	52	54	56	58	
1.3.1 (c)	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inkusifnya	Dinsos	%	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	Dinsos
		Dinsos	orang	576 orang	576 orang	576 orang	576 orang	576 orang	Dinsos
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	Dinsos	jiwa		67585	65000	62000	60000	Dinsos
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelatanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro									
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinkes	%	97.5	97.5	97.63	97.63	98.00	Dinkes
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinkes	%	100	100%	100%	100%	100%	Dinkes
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DPPKBPMD	%	76,4%	76,6%	76,8%	77.00%	77,2%	DPPKBPMD
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	DPPKBPMD	%	32,6%	39,80%	47.00%	54,2%	54,2%	DPPKBPMD
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	DPPKBPMD	%	%	0.61%	0.45%	0.29%	0.13%	DPPKBPMD
1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DPUPKP	%	0.61%	0.45%	0.29%	0.13%	0.00%	DPUPKP
1.4.1. (g)	APM SD/MI/sederajat	Disdikpora	%	88,25	84,45	84,55	84,65	84,75	Disdikpora
1.4.1. (h)	APM SMP/MTS/sederajat	Disdikpora	%	77,01	67,9	68	68,2	68,22	Disdikpora
1.4.1. (i)	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Disdukcapil	%	91,74	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	Disdukcapil
1.4.1. (j)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Dinsos/ DPUPKP	%						Dinsos/ DPUPKP
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miuskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekosnomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah	BPBD	lokasi	16	18	20	22	25	BPBD
1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	BPBD	jiwa	100	100	100	100	100	BPBD
1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinsos	jiwa	100	100	100	100	100	BPBD
1.5.1. (d)	Kajian resiko bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	BPBD	kajian	1	0	0	0	0	BPBD
Target 1.a. Menajmin mobilitas yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khsusunya negara kurang berekmbang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi									
1.a.1	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda	rupiah						Bappeda
1.a.2.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanaja pemerintah	Bappeda	rupiah (fungsi pendidikan)						Bappeda
			rupiah (fungsi kesehatan)						

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Diperpautkan	%	2017					Diperpautkan
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Desa Mandiri Pangan								
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita	Dinkes	%	11.80%	11.70%	11.60%	11.50%	11.40%	Dinkes
2.1.2.	Prevalensi penduduk dengan kerwanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	Diperpautkan	%	2017					Diperpautkan
	Persentase kecukupan air irigasi								
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari	#		2017					Dinkes
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasioanl untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita	Dinkes	%	11.80%	11.70%	11.60%	11.50%	11.40%	Dinkes
2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta	Dinkes	%	-	-	-	-	-	Dinkes
2.2.2.	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) amak pada usia kurang dari 5 tahun	Dinkes	%	100.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Dinkes
2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinkes	%	16.32%	19.50%	19.40%	19.30%	19.20%	Dinkes
2.2.2. (b)	Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinkes	%	74.27%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	Dinkes
2.2.2. (c)	Tingkat konsumsi ikan perkapita	Diperpautkan	kg/kapita/tahun	2017					Diperpautkan

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes	%	87.5	87.5	85	85	Dinkes
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinkes	%	100	100	100	100	Dinkes
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinkes	%	100%	100%	100%	100%	BPS. Dinkes
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 1000 kelahiran hidup	8.20%	8.20%	8.00%	8.00%	Dinkes
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 1000 kelahiran hidup	-	-	-	-	Dinkes
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 1000 kelahiran hidup	8.20%	8.20%	8.00%	8.00%	Dinkes
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1*	Angka Infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Dinkes	%	<0,3	<0,2	<0,1	<0,1	Dinkes
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinkes	%	-	-	-	-	Dinkes
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinkes	%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	Dinkes
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinkes		-	-	-	-	Dinkes
3.3.4*	Insiden hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinkes		-	-	-	-	Dinkes
3.3.5(a)	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Dinkes		-	-	-	-	Dinkes
3.3.5(c)	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%	Dinkes		-	-	-	-	Dinkes
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1. (a)	jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa	Dinkes	puskesmas					Dinkes
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi							Dinkes

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun							Dinkes
3.4.1(d)	Persentase perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara							Dinkes
3.4.2*	Angka Kematian dari Percobaan Bunuh Diri							Dinkes
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan Narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di Fasyankes	BNN	orang					Dinkes
3.5.1(b)	Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinsos	orang	45	50	55	60	Dinkes
3.5.1(c)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Dinsos	orang	1,19	1,19	1,19	1,19	Dinkes
3.5.1(d)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan							Dinkes
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk usia ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir							Dinkes
Target 3.6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal tergadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alkon metode modern	DPPKBPMD	%					DPPKBPMD
3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	DPPKBPMD	%	72,02%	72,02%	72,01%	72,01%	DPPKBPMD
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi MKJP	DPPKBPMD	%	34,28%	34,29%	34,30%	34,30%	DPPKBPMD
3.7.1. ©	ASFR	DPPKBPMD	kelahiran per 1000 perempuan 15-49 tahun	27	26	25	24	DPPKBPMD
3.7.1. (d)	TFR	DPPKBPMD	jumlah anak perWUS	2,09	2,08	2,07	2,06	DPPKBPMD
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatn universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinsos	%					Dinkes, Dinsos
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk							Dinkes
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk usia ≥15 tahun							Dinkes

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis kelamin								
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Disdikpora	%	97,73	96,2	96,3	96,4	96,5	Disdikpora
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Disdikpora	%	99,76	95,2	95,25	95,3	96	Disdikpora
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Disdikpora	Tahun	9,4	8,89	8,94	8,99	9	Disdikpora
Target 4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdikpora	%	108,68	98,8	98,85	98,9	98,95	Disdikpora
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1*	Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menurut tipe keterampilan.	Disdikpora							Disdikpora
Target 4.5. Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1.*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederakat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi								Disdikpora

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
	Rasio APM di SD/MI/sederajat	Disdikpora	%	88,25	84,45	84,55	84,65	84,75	Disdikpora
	Rasio APM di SMP/MTs/sederajat	Disdikpora	%	77,01	67,9	68	68,2	68,22	Disdikpora
Target 4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1(b)	Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia 15-24 tahun dan usia 15-59 tahun								Disdikpora
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru (SD, dan SMP) yang bersertifikat pendidik	Disdikpora	%	SD: 46 SMP: 67	SD: 46 SMP: 67	SD: 48 SMP: 68	SD: 50 SMP: 70	SD: 52 SMP: 72	Disdikpora

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinsos	Desa		3 desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	Dinsos
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinsos	%	100	100	100	100	100	Dinsos
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinsos	%						Dinsos
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinsos	%	100	100	100	100	100	Dinsos
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinsos	%		20	20	30	30	Dinsos
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinsos	% (sebelum umur 15 tahun)	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	Dinsos
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinsos	Tahun						Dinsos
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	#	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun						#
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Setwan	%	6,6	6,6	6,6	-	-	Setwan
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPP	%	40					BKPP
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinkes, DPPKBPMD	%						Dinkes, DPPKBPMD
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DPPKBPMD	%	8,42%	8,42%	8,42%	8,39%	8,37%	DPPKBPMD
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DPPKBPMD	%	8,42	8,42	8,4	8,39	8,37	DPPKBPMD
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	DPPKBPMD	Dokumen	60 1	63 1	65 1	67 1	70 1	DPPKBPMD
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.2*	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol								
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Kominfo	%						Kominfo

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinkes	%						Dinkes
Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	#		-	-	-	-	-	#
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinkes	%	-	-	-	-	-	Dinkes
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinkes	desa/kelurahan	4	15	27	40	54	Dinkes
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinkes	desa/kelurahan	50,3 %	50,8 %	51,3 %	51,8 %	52,3 %	Dinkes
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	#	%						#

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 7.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	% (persen)						
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	PLN	kWh						
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	DPUPKP	SR (Sambungan Rumah Tangga)						
Target 7.2. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substasial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	DPUPKP	% (Persen)						
Target 7.1. Pada Tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat									
7.3.1*	Intensitas energi primer	DPUPKP	SBM (Setara Barrel Minyak)						

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Bappeda	% (Persen)						
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Bappeda	Juta Rupiah						
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Bappeda	% (Persen)						
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Disnakertrans	% (Persen)	80	82	84	86	88	Disnakertrans
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Disnakertrans	% (Persen)	22.0	25	27	30	32	Disnakertrans
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Disnakertrans	% (Persen)	19	21	23	25	27	Disnakertrans
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	KUKMP	% (Persen)		5%	5%	5%	5%	KUKMP
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Disnakertrans	Rupiah	7891	8579	8867	9399	9963	Disnakertrans
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Disnakertrans	% (Persen)						Disnakertrans

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	Disnakertrans	% (Persen)						Disnakertrans
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Disnakertrans	% (Persen)						Disnakertrans
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Bappeda	% (Persen)						Bappeda
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dispar	Orang	12.500	15000	18300	22200	27500	Dispar
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dispar	Orang	3393185	3629083	4427481	5446111	6753206	Dispar
8.9.1.(c)	Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata	Dispar	Juta Rupiah	5%	8%	11%	14%	17%	Dispar
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Disnakertrans / Pariwisata	% (Persen)						Disnakertrans / Pariwisata
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	BKAD	Unit						BKAD
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	BKAD	Unit						BKAD
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BKAD	Km						BKAD
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	KUKMP	% (Persen)	5	8	11	14	17	KUKMP
8.B Pada tahun 2030, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.									
8.B.1.2	Jumlah peserta Program SJSN Ketenagakerjaan								

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan kabupaten.	DPUPKP	%	74.18	75.42	76.52	77.62	78.72	DPUPKP
9.1.1.(b)	Panjang peningkatan jalan kabupaten.	DPUPKP	km	33	15	17	17	17	DPUPKP
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Bappeda	%						Bappeda
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Bappeda	%						Bappeda
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	Bappeda	%						Bappeda
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil menengah terhadap total nilai tambah industri.	KUKMP	%		49,5	51	53	55	KUKMP
9.3.2*	Cakupan industri kecil menengah dengan pinjaman atau kredit.	KUKMP	Rp (juta)	300	250	235	210	200	KUKMP
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	DLH	%	46	44	42	40	38	DLH
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)								
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	DLH	%						DLH
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Bappeda	%						Bappeda
			%						
			%						
			Rupiah						
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Kominfo	%						Kominfo
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Kominfo	%						Kominfo
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Kominfo	%						Kominfo

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi paling bawah pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional									
10.1.1*	Koefisien Gini.	Bappeda	index						Bappeda
	Pertumbuhan ekonomi								
	Pemerataan Pendapatan								
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Bappeda	%						Bappeda
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Bappeda	kabupaten						Bappeda
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Bappeda	desa						Bappeda
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Bappeda	desa						Bappeda
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Bappeda	%						Bappeda
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Bappeda	%						Bappeda
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinsos	%						Dinsos
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kesbangpol	indeks						Kesbangpol
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kesbangpol	Berkas Pengaduan						Kesbangpol
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kesbangpol	%						Kesbangpol
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kesbangpol	Kebijakan/Dokumen						Kesbangpol
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	Bappeda	Persen						Bappeda
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnakertrans	Formal (%)	70	72	74	76	78	Disnakertrans
			Informal (%)	50	52	54	56	58	
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.									
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara daerah.	Disnakertrans	Penambahan dokumen						Disnakertrans
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Disnakertrans	Fasilitasi TKLN						Disnakertrans

TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DPUPKP	%	99.03	99.41	99.78	100	100	DPUPKP
Target 11.2. Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orangtua									
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dishub	%						Dishub

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
	Persentase 'ketersediaan simpul transportasi yang memadai								
	Persentase angkutan umum yang layak jalan								
	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji								
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	2	0	0	0	0	BPBD
	Persentase Penanganan Banjir								
11.5.1.(b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	BPBD	desa tangguh	22	27	32	37	42	BPBD
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang terkini	DLH	%	20	25	30	35	40	DLH
	Volume sampah yang tertangani	DLH	ribu m3	441	440	450	460	470	DLH
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terangkut	DLH	%	14,24	16	18	20	22	DLH
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas									
11.7.1.(a)	Jumlah ruang terbuka hijau	DLH	%	34.3					DLH
	Indeks Tutupan Lahan								
11.7.1.(b)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	%						POLRES
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030									
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	BPBD	%						
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	Dokumen				1		BPBD

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.									
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	Bappeda	Kolaborasi tematik						Bappeda
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	Peserta Proper	2	3	3	4	4	DLH
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	ton	27	155	190	200	250	DLH
Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	ton	3000	8250	13500	18750	24000	DLH
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH	Perusahaan						DLH
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.									
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	Produk Ramah Lingkungan						DLH
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Fasilitas Publik						DLH

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen				1		BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	2	0	0	0	0	BPBD
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	BPBD	Dokumen BUR ke-						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	1	1	1	1	1	DLH

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.									
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut	Diperpautkan	Dokumen (PP)						Diperpautkan
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Diperpautkan	WPP						Diperpautkan
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.									
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Diperpautkan	% (Target dibagi dengan MSY)						Diperpautkan
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.									
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Diperpautkan	Jt Ha						Diperpautkan
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Disnakertrans	%	60	62	64	66	68	Diperpautkan
	Jumlah kepatuhan pelaku usaha.								
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Diperpautkan	Regulasi /Kebijakan	1	1	1	1	1	Diperpautkan
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Diperpautkan	lokasi						Diperpautkan
	Jumlah kecamatan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.								
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Diperpautkan	orang	450	450	450	450	450	Diperpautkan
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".									
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	Diperpautkan	Dokumen Ratifikasi						Diperpautkan

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARAT

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Diperpautkan, DLH	%						Diperpautkan, DLH
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.2.1.(a).	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Diperpautkan, DLH	Hektar						Diperpautkan, DLH
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.									
15.3.1.(a).	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Diperpautkan, DLH	Ha						Diperpautkan, DLH
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.									
15.6.1*.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Diperpautkan, DLH	PIC						Diperpautkan, DLH
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.									
15.7.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Diperpautkan, DLH	%						Diperpautkan, DLH
	Persentase penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan								
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.									
15.c.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Diperpautkan, DLH	%						Diperpautkan, DLH

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Satpol PP, POLRES	kasus						Satpol PP, POLRES
	Persentase penyelesaian pelanggaran K3								
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES	kematian/100.000 penduduk						POLRES
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Satpol PP, POLRES	persentase						Satpol PP, POLRES
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.								
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Dinsos	persentase						Dinsos
16.2.1.(b)	Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Dinsos	persentase						Dinsos
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinsos	persentase						Dinsos
16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.								
16.3.2*	Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana.								
Target 16.6 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan ransparan di semua tingkat									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Bappeda	Persentase						Bappeda
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	BKAD	persentase	1	1	1	1	1	BKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Adm. Pemerintahan	Persentase						Adm. Pemerintahan
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	ULP	persentase	98.75	100	100	100	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
		ULP	persentase	98.75	100	100	100	100	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiiki Indeks Reformasi Birokrasi baik Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Bag. Organisasi	Persentase						Bag. Organisasi
	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul								
16.6.2.(a)	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/kota)	Satpol PP, Bagian organisasi	persentase						Satpol PP, Bagian organisasi
	Persentase OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik yang sudah menyusun Standar Pelayanan (SP)								
Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU, Setwan	Persentase						KPU, Setwan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKPP	persentase	15%	15%				BKPP
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Kesbangpol	Indeks						Kesbangpol
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	Kesbangpol	Indeks						Kesbangpol
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak politik	Kesbangpol	Indeks						Kesbangpol
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Disdukcapil, Dinkes	persen						Disdukcapil, Dinkes
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Disdukcapil	persen						Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Disdukcapil	persen	91,74	93	94	95	96	Disdukcapil
Target 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional									
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Kesbangpol	Berkas pengaduan						Kesbangpol
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Kesbangpol	Persentase						Kesbangpol
16.10.2*	Jumlah instansi yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Kominfo	Negara	54	54	54	54	54	Kominfo
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kominfo	persentase	100	100	100	100		Kominfo
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Kominfo	Persentase	0	100	100	100	100	Kominfo
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Kominfo	PPID	7	9	11	13		Kominfo
Target 16.a memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan									
16.a.1*	tersedianya lembaga HAM nasiona yang independen yang sejalan dengan Paris Principles	Kesbangpol	lembaga						Kesbangpol
Target 16.b menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Kesbangpol	Kebijakan/dokumen						Kesbangpol
	Persentase penegakan perda								

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah kabupaten sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BKAD	Persentase	22	23	24	25	26	BKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BKAD	Persentase	17.5	18	19.00	20.0	21	BKAD
17.1.2*	Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah	BKAD	Persentase	60.00	65	68.00	70.00	75	BKAD

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menghubungkan kecamatan.	Kominfo	Persentase	47	100	100	100	100	Kominfo
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1.(a)	Persentase desa yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kominfo	Persentase	100	100	100	100	100	Kominfo
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.									
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Disdag	Persentase	7.09	7.10	7.15	7.20	7.25	Dinas Perdagangan
Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.									
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Bappeda	Dashboard						Bappeda
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.									
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	DPMPT, Bag. Perekonomian	Dokumen berisi daftar proyek KPBU						DPMPT, Bag. Perekonomian
	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti								
	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat								
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag. Adm. Pemerintahan	Alokasi						Bag. Adm. Pemerintahan
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Persentase	98,19	88	90			BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persentase	77,78	88	90			BPS
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.		UU						
17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.		Review						
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).		Strategi Nasional						
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional pranata komputer pada Pemerintah Daerah	BKPP	Pegawai	23	28				BKPP
17.19.1.(b)	Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	BKPP	Persen	14%	14%				BKPP
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata computer OPD	BKPP	Persen	32%	39%				BKPP
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.		Sensus Penduduk						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*)	Disdukcapil	Data Registrasi						Disdukcapil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Kominfo	Pengunjung	66.778	72,000	75,000	80,000		Kominfo
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Persentase	94,81	88	90			BPS
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	Persentase	26,47	35	40			BPS

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Bantul

TUJUAN: 1. TANPA KEMISKINAN

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
INDIKATOR SDG's : '1.2.1 Tingkat kemiskinan daerah												
INDIKATOR SDG's : '1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
INDIKATOR SDG's : '1.3.1 (c) Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inkusifnya												
INDIKATOR SDG's : 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKHnasional.												
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL		Tersusunnya data statistik kemiskinan daerah							1200		Dinsos	DinsosP3A
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Penyusunan data Miskin									Dinsos	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ban-tuan bagi Keluarga Miskin							8825		Dinsos	
	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENDAMPING SOSIAL, FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	Jumlah PMKS yang men-dapatkan pendampingan									Dinsos	
	PENYUSUNAN DATA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PMKS	Jumlah pemohon Rekomendasi Jaminan Kesehatan									Dinsos	
	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	Jumlah pengawasan dan pengendalian bantuan bagi Raskin									Dinsos	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ban-tuan bagi Keluarga Miskin							9970			
	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani										
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS											
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial											
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kemampuan berorganisasi dan prestasi pada karang taruna							5994			
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga										
Program perencanaan sosial dan budaya		Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya							6294			

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	dokumen										
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	dokumen										
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan												
1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan												
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL		Tersusunnya data statistik kemiskinan daerah							1200		Dinsos	DinsosP3A
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Penyusunan data Miskin									Dinsos	
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN		jumlah peserta PBI Jamkesda	%	100	100	100	100	100	106994		Dinkes	
	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	pelayanan kesehatan warga miskin	%	100	100	100	100	100	106994			
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)									Disnakertrans	
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan pemberian perlindungan hukum dan JAMSOSTEK	kegiatan									
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	perusahaan									
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kegiatan sosialisasi/ workshop	kegiatan									
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelatanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro												
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan												
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Angka Kematian Ibu									Dinkes	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan										
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap												
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA		Persentase pelayanan kesehatan bayi	%	92	100%	100%	100%	100%	630		Dinkes	
	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita		80	100%	100%	100%	100%				
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Distribusi Vaksin	Persentase desa/ kelu-rahan yang mencapai UCI									Dinkes	
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin												
Program Keluarga Berencana		Cakupan peserta KB aktif									DPPKBPMD, Dinkes	
	Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan KIE IMP									DPPKBPMD, Dinkes	
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak												

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Perdesaan	Ketersediaan dan kualitas air bersih									DPPKBPMD, Dinkes	
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak												
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan												
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan								3102		DPPKBPMD, Dinkes	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penanganan Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh tertangani									DPUPKP	DPUPKP
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (f) APM SD/MI/sederajat												
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (f) APM SMP/MTS/sederajat												
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD									Disdikpora	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTS/sederajat	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP									Disdikpora	
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (i) Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran												
	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kepemilika Akta Kelahir-an usia 0-18 Tahun							711.938		Disdukcapil	Disdukcapil
INDIKATOR SDG's : 1.4.1. (j) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN												
Program Pengembangan Perumahan											DPUPKP	DPUPKP
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miuskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekosnomi, sosial, lingkungan, dan bencana												
INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah												
INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (d) Kajian resiko bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana												
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase Desa Tangguh Bencana							16946		BPBD	BPBD
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase Desa Tangguh Bencana							16946		BPBD	BPBD
INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social												
INDIKATOR SDG's : 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana social												
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana		Persentase relokasi warga yang terdampak							5624		BPBD	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Penyaluran bencana									Dinsos	
Target 1.a. Menajmin mobilitas yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khsusunya negara kurang berekmbang untuk melaksanakanProgram dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi												
INDIKATOR SDG's : 1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untukProgram pemberantasan kemiskinan												
INDIKATOR SDG's : 1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanaja pemerintah												

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	Target Pencapaian 2018	Target Pencapaian 2019	Target Pencapaian 2020	Target Pencapaian 2021	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya							8687		Bappeda	
	Perencanaan pembangunan pemerintahan	dokumen									Bappeda	
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	dokumen										
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	dokumen										

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian 2018	Target Pencapaian 2019	Target Pencapaian 2020	Target Pencapaian 2021	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun												
INDIKATOR SDG's : 2.1.1 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan												
INDIKATOR SDG's : 2.1.2. (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /Perkebunan		Ketersediaan pangan pokok							5854		Diperpautkan	Diperpautkan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		Cadangan Pangan							1,471		Diperpautkan	Diperpautkan
		Kelompok bahan pangan yang di konsumsi									Diperpautkan	Diperpautkan
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Workshop akhir Demapan									Diperpautkan	Diperpautkan
		Evaluasi Demapan									Diperpautkan	Diperpautkan
		Pembinaan Demapan									Diperpautkan	Diperpautkan
		Pelatihan teknis									Diperpautkan	Diperpautkan
		Lomba APN									Diperpautkan	Diperpautkan
		Workshop NBM									Diperpautkan	Diperpautkan
		Workshop SKPG									Diperpautkan	Diperpautkan
		Laporan ketersediaan dan kerawanan pangan									Diperpautkan	Diperpautkan
		Peringatan HPS (Hari Pangan Sedunia)									Diperpautkan	Diperpautkan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya									128,398			DPUPKP
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah dokumen perencanaan										
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehab jaringan irigasi										
	Pengelolaan jaringan irigasi	Pemeliharaan saluran irigasi										
INDIKATOR SDG's : 2.1.1. (a) Prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita												
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan status gizi	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita							4,512		Dinkes	Dinkes

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasioanl untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manulamencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan												
INDIKATOR SDG's : 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita												
INDIKATOR SDG's : 2.2.1. (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta												
INDIKATOR SDG's : 2.2.2. Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) amak pada usia kurang dari 5 tahun												
Program Perbaikan Gizi Masyarakat									4,512			
	Peningkatan status gizi	Prevalensi Balita Stunting									Dinkes	Dinkes
	Peningkatan status gizi	Cakupan Balita ditimbang									Dinkes	Dinkes
	Peningkatan status gizi	Jumlah balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan Pemulihan									Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDG's : 2.2.2. (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil												
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	5,512		Dinkes	Dinkes
INDIKATOR SDG's : 2.2.2. (b) Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif												
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi	%	92	100%	100%	100%	100%	630	APBD	Dinkes	Dinkes
2.2.2. (c)Tingkat konsumsi ikan perkapita												
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN	Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya								10,133		Diperpautkan	Diperpautkan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap											

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.												
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).												
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	5,512		Dinkes	Dinkes
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di puskesmas	Cakupan pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	394771		#	BPS, Dinkes
3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	394771		Dinkes	BPS. Dinkes
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.												
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.												
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.												

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.												
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		Persentase pelayanan kesehatan bayi	%	92	100%	100%	100%	100%	630		Dinkes	
ANAK BALITA	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita		80	100%	100%	100%	100%				
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
3.3.1* Angka Infeksi Baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV									Dinkes	
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Prevalensi HIV									Dinkes	Dinkes
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	penemuan TB									Dinkes	Dinkes
3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Distribusi Vaksin									Dinkes	
3.3.4* Insiden hepatitis B per 100.000 penduduk												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Distribusi Vaksin									Dinkes	
3.3.5(a) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		pelayanan kesehatan dengan kasus kusta									Dinkes	
3.3.5(c) Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		pelayanan kesehatan dengan penyakit filariasis									Dinkes	
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengiobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan												
jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa												
Prevalensi tekanan darah tinggi												
Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun												
Persentase perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	Cakupan Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP							393,000	APBN-APBD	Dinkes	Dinkes
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas								280,827			
Program peningkatan Pencegahan Penyakit tidak menular	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular											
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular											
	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah											
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan												
3.5.1(a) Jumlah penyalahgunaan Narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di Fasyankes												
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi										BNN	Dinsos, BNN
3.5.1(b) Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan												
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Penanganan PMKS (Lansia, Jenazah terlantar, anjal, gepeng)							9,970		Dinsos	Dinsos
3.5.1(c) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.												
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	jumlah peserta sosialisasi P4GN (orang)							9,970			
3.5.1(d) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan												
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk usia ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir												
Target 3.6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal tergadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional												
3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alkon metode modern												
Program Keluarga Berencana	Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB										DPPKBPMD	DPPKBPMD
3.7.1. (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS												
Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan Pemasangan Konstrasepsi KB	Persentase Kepesertaan KB							484		DPPKBPMD	DPPKBPMD
3.7.1. (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi MKJP												
Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan Pemasangan Konstrasepsi KB	Jumlah Penghargaan Pelayanan KB Baru (MOP)							484		DPPKBPMD	DPPKBPMD
3.7.1. © ASFR												
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	KIE Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga							755		DPPKBPMD	DPPKBPMD
3.7.1. (d) TFR												
Program Keluarga Berencana	Pembinaan KB	Cakupan ketersediaan data dan informasi keluarga							755		DPPKBPMD	DPPKBPMD
Program Pelayanan Kontrasepsi												
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga	Pelayanan KIE											
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatn universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjanglkau bagi semua orang												
3.8.1. (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)												
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk												
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan										Dinsos	Dinkes, Dinsos

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.												
3.a.1 Persentase merokok pada penduduk usia ≥15 tahun												

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif											
INDIKATOR SDG's : 4.1.1* Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis kelamin											
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.											
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.											
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun											
Target 4.5. Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
INDIKATOR SDG's : 4.5.1.* Rasio APM di SD/MI/sederajat											
INDIKATOR SDG's : 4.5.1.* Rasio APM di SMP/MTs/sederajat											
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		Angka rata-rata lama sekolah									
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD								Disdikpora	Disdikpora
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTS/sederajat	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP								Disdikpora	Disdikpora
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	siswa yang mengikuti Tes Pendalaman Materi Kelas 9 SMP								Disdikpora	Disdikpora
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	jumlah sarana dan prasarana sekolah SMP								Disdikpora	Disdikpora
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	jumlah sekolah model penguatan kurikulum 13 di sekolah dasar								Disdikpora	Disdikpora
Target 4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
INDIKATOR SDG's : 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan							27356	Disdikpora	BPS, Disdikpora
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini								27356	Disdikpora	BPS, Disdikpora
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini								27356	Disdikpora	BPS, Disdikpora
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD								27356	Disdikpora	BPS, Disdikpora
Target 4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
INDIKATOR SDG's : 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun											
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	jumlah penyelenggaraan Kejar paket								Disdikpora	BPS, Disdikpora
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
INDIKATOR SDG's : 4.c.1* Persentase guru (SD, dan SMP) yang bersertifikat pendidik											
INDIKATOR SDG's : 4.c.1* Jumlah guru TK dan SD dan SMP yang bersertifikat pendidik											
INDIKATOR SDG's : 4.c.1* Jumlah guru TK, SD dan SMP dengan kualifikasi minimal S1/D4											
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase guru yang bersertifikasi								Disdikpora	Disdikpora
	Evaluasi standar pelayanan minimal	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi 27 indikator pencapaian SPM								Disdikpora	Disdikpora
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah pelaksanaan Verifikasi, sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan sertifikasi guru (kegiatan rutin)								Disdikpora	Disdikpora
	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah laporan individu sekolah, data pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan satuan pendidikan.								Disdikpora	Disdikpora

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.											
Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelatihan bagi Kelompok Desa Prima (desa)								Dinsos	
	Penyusunan Data Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah buku profil									
	Operasional Gabugan Organisasi Wanita	Jumlah Organsasi wanita									
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (OPD)									
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	jumlah persen korban yang ditangani								Dinsos	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Korban yang didampingai lingkungannya									
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.											
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana									Dinsos	
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendampingan Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	jumlah persen korban yang ditangani								Dinsos	
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Korban yang didampingai lingkungannya								Dinsos	
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Advokasi KIE PUG (desa)								Dinsos	
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.											
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi dan KIE Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Advokasi KIE PUG (desa)								Dinsos	
5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).											
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak									Dinsos	
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.											
Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatkan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pembahasan rancangan peraturan daerah								Setwan	
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											
Pengelolaan kepegawaian pindah/ purna tugas PNS	Pengelolaan mutasi jabatan administrasi dan JPT	Persentase penempatan aparatur dalam jabatan								BKPP	
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.											
5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).											
Program Keluarga Berencana	Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB	PUS yang tidak ber KB								DPPKBPMD	
5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.											
Program KB	Pelayanan KIE, Sarana Mobilitas KB	PUS yang paham metode kontrasepsi moder								DPPKBPMD	

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1(a)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak											
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah									Dinkes	
Target 6.2. Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air											
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)								#	
6.2.1.(b)Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)								Dinkes	
6.2.1.(c)Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)											
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)								Dinkes	
6.2.1.(d)Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)											
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan Masyarakat	Cakupan Desa Stop BABS								Dinkes	
6.2.1.(f)Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat											
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)								DLH	

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 7.2. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substasial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global											
7.2.1*Bauran energi terbarukan											
Program Potensi Energi		Meningkatnya cakupan potensi ketersediaan energi								DKUKMP	
7.2.1*Bauran energi terbarukan											
	Pendataan Potensi Energi	Tersusunnya Draft Dokumen Potensi Energi Panas Bumi Geotherma								DKUKMP	

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang												
8.1.1*Laju pertumbuhan PDB per kapita												
Perencanaan Pembangunan Perekonomian											Bappeda	
8.1.1.(a)PDB per kapita												
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri										Bappeda	
	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam											
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.												
INDIKATOR SDG's : 8.2.1*Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun												
Program Perluasan Kerja		Persentase tenaga kerja yang berwirausaha									Bappeda	
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Jumlah Peserta TTG										

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Jumlah paket padat karya										
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Jumlah Peserta Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat										
	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Jumlah Peserta TKM										
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.												
8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin												
Penempatan Tenaga Kerja	1) Penyuluhan ketenagakerja-an, 2) Penempatan Pencari ker-ja melalui AKAL, AKAD, AKAN	Pencari kerja yang ditempatkan									Disnakertrans	
8.3.1.(a)Persentase tenaga kerja formal												
Penempatan Tenaga Kerja	1) Penyuluhan ketenagakerja-an, 2) Penempatan Pencari ker-ja melalui AKAL, AKAD, AKAN	Pencari kerja yang ditempatkan									Disnakertrans	
8.3.1.(b)Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian												
Penempatan Tenaga Kerja	1) Penyuluhan ketenagakerja-an, 2) Penempatan Pencari ker-ja melalui AKAL, AKAD, AKAN	Pencari kerja yang ditempatkan									Disnakertrans	
8.3.1.(c)Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
Program Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah dan kondusif	Pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah										KUKMP	
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.												
8.5.1*Upah rata-rata per jam pekerja												
Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Pendampingan dewan pengupahan	jumlah lembaga yang didampingi									Disnakertrans	
8.5.2*Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur												
Program penempatan tenaga kerja	1) Penyuluhan ketenagakerja-an, 2) Penempatan Pencari ker-ja melalui AKAL, AKAD, AKAN	Pencari kerja yang ditempatkan									Disnakertrans	
8.5.2.(a)Persentase setengah pengangguran												
Program penempatan tenaga kerja	1) Penyuluhan ketenagakerja-an, 2) Penempatan Pencari ker-ja melalui AKAL, AKAD, AKAN	Pencari kerja yang ditempatkan									Disnakertrans	
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya												
8.8.1.(a)Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.												
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial										Disnakertrans	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan											
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan											
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.												
8.9.1*Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB												
Program pengembangan destinasi pariwisata		Jumlah peningkatan destinasi pariwisat									Bappeda	
8.9.1.(a)Jumlah wisatawan mancanegara												
Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan daerah tujuan wisata	Tersusunnya studi pengembang-an daerah tujuan wisata									Dispar	
8.9.1.(b)Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.												
	Peningkatan daya tarik Wisata	jumlah pentas seni di obyek wisata									Dispar	
8.9.1.(c)Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata												
	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan	Terselenggaranya koordinasi pelayanan kepariwisataan									Dispar	
8.9.2*Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja												
	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	jumlah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata									Disnakertrans / Pariwisata	
Program pengembangan Kemitraan		Peningkatan jumlah mitra pariwisat										
	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi usaha pariwisata										
	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	Terselenggaranya sarasehan forkom pokdarwis										
	Pemberdayaan Desa Wisata	Terlaksananya lomba desa wisata dan workshop										
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.												
8.10.1.(b)Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit												
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah	Jumlah KUKM Yang mendapatkan Kemudahan Akses Permodalan									KUKMP	

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1.(a)Kondisi mantap jalan kabupaten.											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase Jalan kabupaten kondisi mantap								DPUPKP	
9.1.1.(b)Panjang peningkatan jalan kabupaten.											
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan jalan	Penanganan jalan kabupaten								DPUPKP	
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9.2.1*Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.											
Perencanaan Pembangunan Perekonomian										Bappeda	
9.2.1.(a)Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.											
	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri									Bappeda	
9.2.2*Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.											
Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam									Bappeda	
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
9.3.1*Proporsi nilai tambah industri kecil menengah terhadap total nilai tambah industri.											
Program pengembangan industri kecil dan menengah		cakupan jumlah IKM Non sentra yang dikembangkan								KUKMP	
	Pengembangan dan pemberdayaan IKM	Terlaksananya Pelatihan Industri								KUKMP	
9.3.2*Cakupan industri kecil menengah dengan pinjaman atau kredit.											
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Pelatihan Industri								KUKMP	
	Pengembangan Pemasaran IKM	Terlaksananya Pameran									
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		jumlah wirausaha baru									
	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Dana									
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif		Jumlah KUKM Yang mendapatkan Kemudahan Akses Permodalan									
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas UKM									
		Terlaksananya Fasilitas SPIRT									
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi		jumlah usaha yang terstandarisasi									
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Jumlah Dana									
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah											
	Pengembangan Industri Rumah Tangga dan UMKM	Terlaksanya penyuluhan IRT dan UMKM : 1 Kali									
	Peningkatan Promosi UMKM	jumlah promosi									
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
9.4.1*Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.											
										DLH	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengkajian dampak lingkungan	Angka konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (mg/L)								DLH	DLH
9.4.1.(a)Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.											
										DLH	
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.											
9.5.1*Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	Pengembangan sistem inovasi daerah									Bappeda	
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah									Bappeda	

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi paling bawah pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional												
10.1.1*Koefisien Gini.												
Perencanaan Pembangunan Perekonomian												
10.1.1.(a)Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN		Tersusunnya data statistik kemiskinan daerah							1200		Dinsos	DinsosP3A
SOSIAL	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Penyusunan data Miskin									Dinsos	
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.												
10.2.1*Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.												
PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN		Tersusunnya data statistik kemiskinan daerah							1200		Dinsos	
SOSIAL	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Penyusunan data Miskin									Dinsos	
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.												
10.3.1.(a)Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia												
Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi								535		Kesbangpol	
10.3.1.(b)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).												
10.3.1.(c)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.												
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak											
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
	Peningkatan SDM Forum Perlindung-an Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)											
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak											
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.												
10.4.1.(a)Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah												
Program perencanaan sosial dan budaya		Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya									Bappeda	
	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	dokumen										
	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	dokumen										
10.4.1.(b)Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.												
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial										Disnakertrans	
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan											
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja											
	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja											
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana												
10.7.2.(a)Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara daerah.												
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi										Disnakertrans	

TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu	Presentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)							98.63	DPUPKP	
Target 11.2. Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orangtua											
11.2.1.(a)Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan											
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor										
	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan										
	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU										
POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal										

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan										
	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan										
	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan										
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal										
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan											
11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
11.5.1.(b)Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk											
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Pembentukan Desa Tangguh Bencana									BPBD	
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota											
11.6.1.(a)Persentase sampah perkotaan yang terkini											
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kerja sama pengelolaan persampahan	Cakupan kelompok pengelola sampah (kelompok)							128,846	DLH	DLH
11.6.1.(b)Persentase sampah yang terangkut											
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan								128,846	DLH	
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas											
11.7.1.(a)Jumlah ruang terbuka hijau											
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Cakupan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)							21,111	DLH	DLH
	Koordinasi Pengelolaan konservasi sumberdaya alam	Cakupan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)								DLH	
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030											
11.b.2*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah											
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana									BPBD	

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.												
12.1.1*Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.												
Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan penganggaran										Bappeda	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
	Perencanaan pembangunan sektoral											
	Perencanaan pembangunan kewilayahan											
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.												
12.4.1.(a)Jumlah peserta Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang mencapai minimal ranking BIRU.												
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengkajian dampak lingkungan	Angka konsentrasi DO (*dissolved oxygen*) di Sungai Winongo (mg/L)									DLH	
12.4.2.(a)Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).												
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Cakupan kelompok pengelola sampah (kelompok)									DLH	DLH
Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.												
12.5.1.(a)Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.												
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1) Kerjasama pengelolaan persampahan. 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup										DLH	DLH
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.												
12.6.1.(a)Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.												
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan										DLH	

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
13.1.1*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.											
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana										
13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	jumlah pelatihan tanggap bencana									
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.											
13.2.1.(a)Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).											
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengkajian dampak lingkungan										

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
14.6.1.(a)Persentase kepatuhan pelaku usaha.											
Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan	perusahaan yang disosialisasi									Disnakertrans
Program Peningkatan Produksi Perikanan	Optimalisasi Perijinan Usaha Perikanan	Pelaku usaha yang disosialisasi							250		
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.											
14.b.1*Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.											
Program Peningkatan Produksi Perikanan	Optimalisasi Perijinan Usaha Perikanan	Peraturan perundang-undangan di bidang perikanan							50,000,000		Diperpautkan
14.b.1.(a)Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.											
Program Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan								1350000000		Diperpautkan

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARAT

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1.(a).Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.											
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Angka konsentrasi DO (*dissolved oxygen*) di Sungai Winongo (mg/L)									
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Cakupan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)									
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.											
15.2.1.(a).Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.											
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Koordinasi Pengelolaan konservasi Sumberdaya Alam	Cakupan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)							21111		DLH
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1.(a).Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.											
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan										DLH
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.											
15.7.1.(a).Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.											
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	Jumlah aduan yang terselesaikan									DLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	Jumlah aduan yang terselesaikan									DLH
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.											
15.c.1.(a).Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup		%								DLH

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun											
16.1.2.(a)Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk											
16.1.3.(a)Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat										
	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan										
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak											
16.2.1.(a)Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir											
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		persentase							Dinsos	
16.2.1.(b)Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan											
	Peningkatan SDM Forum Perlindung-an Korban Kekerasan dan Pencegah-an Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		persentase							Dinsos	
16.2.3.(a)Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun											
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		persentase							Dinsos	
Target 16.6 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan ransparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul									BKAD	
16.6.1.(b)Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS KELEMBAGAAN	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah									Adm. Pemerintahan	
16.6.1.(c)Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan											
Program layanan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering									Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering									Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
16.6.1.(d)Persentase instansi pemerintah yang memiiki Indeks Reformasi Birokrasi baik Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah									Bag. Organisasi	
Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)											
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK										KPU, Setwan	
16.7.1.(b)Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)											
Pengelolaan Kepegawaian Pindah /Purna Tugas PNS	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Persentase penempatan aparatur dalam jabatan								BKPP	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur											
16.9.1.(a)Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah											
16.9.1.(b)Persentase anak yang memiliki akta kelahiran											
Keserasian Kebijakan Kependudukan	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Kepemilika Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun							711.938	Disdukcapil	Disdukcapil
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan										
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu										
Target 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional											
16.10.1.(a)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM											
16.10.1.(b)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan											
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan										
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)										
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak										
16.10.2*Jumlah instansi yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi											
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pemberdayaan KID dan PPID	Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka								Kominfo	
16.10.2.(a)Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik											
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pemberdayaan KID dan PPID	Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka								Kominfo	
16.10.2.(b)Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi											
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pemberdayaan KID dan PPID	Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka								Kominfo	
16.10.2.(c)Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan											

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021			
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pemberdayaan KID dan PPID	Persentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka								Kominfo	

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.												
17.1.1*Total pendapatan pemerintah kabupaten sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.												
17.1.1.(a)Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.												
17.1.2*Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah												
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD										BKAD	
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD											
	Operasional pajak daerah											
	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah											
	Pengendalian PAD											
	Optimalisasi pendapatan daerah											
	Pelayanan pajak daerah											
	Pendataan dan penetapan wajib pajak											
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah											
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan											
	Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD											
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.												
17.6.2.(a)Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menghubungkan kecamatan.												
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa									Kominfo	
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.												
17.11.1.(a)Pertumbuhan ekspor produk non migas												

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Sumber Data	Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021				
Peningkatan dan pengembangan ekspor	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/ asosiasi/ pengusaha	Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan									DPMPT, Disdag	Dinas Perdagangan
		Publikasi melalui media cetak dan elektronik										
		Jumlah peserta monev.ijin usaha bidang perdagangan										
		Jumlah peserta sosialisasi bidang perdagangan										
		Terlaksananya publikasi melalui sosial media										
	Pengembangan pasar dan ekspor daerah	Jumlah pameran produk yang difasilitasi/ diikuti										
		Jumlah peserta pelatihan pemasaran/ distribusi/ kemasan										
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.												
17.17.1.(a)Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).												
Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah		Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti							325		Bag. Adm. Pemerintahan	Bag. Adm. Pemerintahan
Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah									1,419		Bag. Perekonomian	Bag. Adm. Perekonomian
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.												
17.19.1.(a)Jumlah pejabat fungsional pranata komputer pada Pemerintah Daerah												
Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS jabatan Fungsional yang ditempatkan sesuai formasi							0		BKPP	
17.19.1.(b)Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.												
Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Persentase penempatan aparatur dalam jabatan							0		BKPP	
17.19.1.(c)Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer OPD												
Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Persentase penempatan aparatur dalam jabatan							0		BKPP	
17.19.2.(c)Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.												
Program kerjasama informasi dengan mas media	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul									Kominfo	

TUJUAN 1. MENGHAPUS KEMISKINAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1.2. Peningkatan Rehabilitasi Sosial										
1.2.1	Persentase penyandang disabilitas yang terlayani	Dinas Sosial	%	2017	100	100	100	100	NA	Dinas Sosial
1.3.1	Persentase PMKS telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial	%	2017	75	80	85	90	NA	Dinas Sosial
1.4.1	Jumlah promosi pariwisata dan jumlah usaha pariwisata yang berizin	Dinas Pariwisata		2017	40 Promosi 25 TDUP	40 Promosi 25 TDUP	40 Promosi 25 TDUP	40 Promosi 25 TDUP	NA	Dinas Pariwisata
1.5.1	Jumlah destinasi wisata dengan prasarana dan sarana lengkap	Dinas Pariwisata		2017	48	52	56	60	NA	Dinas Pariwisata
1.6.1	Jumlah lembaga pariwisata yang memenuhi legalitas, usaha pariwisata dan pelaku usaha pariwisata yang memenuhi standar sertifikasi	Dinas Pariwisata		2017	4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Pariwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Pariwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Pariwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	4 Pokdarwis, 2 Desa Wisata, 2 Sertifikasi Usaha Pariwisata, 40 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata	NA	Dinas Pariwisata

TUJUAN 2. MENGHAKIRI KELAPARAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 15.2 Peningkatan Agribisnis Pertanian										
15.2.1	Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	1,556,608 ,500	2,135,882 ,500	1,127,203 ,000	1,151,284 ,155	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.3.1	Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita yang diterapkan	Dinas Pertanian dan Pangan	kelompok	2017	620,702 ,500	982,980 ,000	1,078,660 ,000	1,259,100 ,833	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.1	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	982,980 ,000	1,078,660 ,000	1,259,100 ,833	1,372,419 ,907	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.2	1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok)	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	5,100	5,150	5,200	5,250	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.3	2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	2017	8,100	8,200	8,300	8,400	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.4	3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	85.80	87.20	90.00	92.20	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.5	4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	91.30	92.70	95.00	95.70	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.1	Jumlah produksi hasil perkebunan dan hortikultura produk unggulan	Dinas Pertanian dan Pangan		2017					NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.2	Kakao	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	364,000	413,000	465,000	520,000	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.3	Mete	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	548,191	575,600	604,380	634,600	NA	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
15.5.4	Tembakau	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	468,157	491,565	516,143	541,950	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.5	Kelapa	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	21,732 ,480	22,819 ,104	23,960 ,059	25,158 ,062	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.6	Bawang Merah	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	463.60	470.56	477.61	484.78	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.7	Cabe	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	480.08	487.29	494.60	502.01	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.1	Jumlah Populasi ternak :	Dinas Pertanian dan Pangan		2017					NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.2	1. Sapi potong (ekor)	Dinas Pertanian dan Pangan	Ekor	2017	151,573	153,008	154,619	156,165	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.3	2. Kambing (ekor)	Dinas Pertanian dan Pangan	Ekor	2017	191,094	195,528	199,438	203,427	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.4	3. Ayam buras (ekor)	Dinas Pertanian dan Pangan	Ekor	2017	1,150,109	1,161,610	1,173,263	1,184,956	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.5	4. Daging	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	4,618,031	4,664,211	4,710,854	4,757,962	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.6	5. Telur	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	3,417,314	3,451,487	3,486,002	3,520,862	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.7.1	Jumlah produksi tamanan pangan			2017					NA	
15.7.2	Padi		ton	2017	290,817	291,195	291,572	292,488	NA	
15.7.3	Jagung		ton	2017	206,500	207,500	208,500	209,500	NA	
15.7.4	Kedelai		ton	2017	6,000	6,500	7,000	7,500	NA	
15.7.5	Ubi Kayu		ton	2017	878,510	880,706	882,908	891,737	NA	

TUJUAN 3. KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.2. Kesehatan Keluarga										
3.2.1	Jumlah Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	kasus	2017	5	5	4	4	NA	Dinas Kesehatan
3.2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan		2017	7.5	7.5	7,2	7	NA	Dinas Kesehatan
3.3.1	Presentasi balita wasting (kurus dan sangat kurus)	Dinas Kesehatan	%	2017	2.80	2.80	2.30	1.60	NA	Dinas Kesehatan
3.4.1	Angka keberhasilan pengobatan TBC	Dinas Kesehatan	%	2017	87	88	89	90	NA	Dinas Kesehatan
3.4.2	Prevalensi penderita Hipertensi yang berkunjung ke puskesmas	Dinas Kesehatan	%	2017	16.60	16.20	15.80	15	NA	Dinas Kesehatan
3.5.1	Persentase Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	%	2017	81	83	84	85	NA	Dinas Kesehatan
3.6.1	Persentase ketersediaan obat generik esensial dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	2017	92.40	92.50	92.60	92.70	NA	Dinas Kesehatan
3.7.1	Persentase Pelayanan Kesehatan masyarakat Peserta jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	2017	80.00	85.00	90.00	95.00	NA	Dinas Kesehatan
3.8.1	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	%	2017	100	100	100	100	NA	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
3.9.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan	indeks	2017	80,20	81,80	83,40	85	NA	Dinas Kesehatan
3.10.1	Persentase penyelesaian Pemeriksaan LAB sesuai standar waktu	Dinas Kesehatan	%	2017	76.00	84	92.00	100	NA	Dinas Kesehatan
3.11.1	Persentase IKS (Indikator Keluarga Sehat)	Dinas Kesehatan	%	2017	31	33	35	36	NA	Dinas Kesehatan
3.12.1	Indek kepuasan pelayanan kesehatan RSUD	RSUD Wonosari	indeks	2017	77.6	77.9	78	79	NA	RSUD Wonosari
3.12.2	Indeks Keselamatan pasien	RSUD Wonosari	indeks	2017	100	100	100	100	NA	RSUD Wonosari

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERMUTU

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 4.2. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pemasyarakatan olahraga										
4.2.1	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	prestasi	2017	10	10	10	10	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.3.1	Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional. yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	orang	2017	3	3	3	3	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.4.1	Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	2017	21%	24%	27%	29%	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.4.2	Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	2017	75%	83%	92%	100%	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.5.1	Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	2017	4.21	4.43	4.43	4.43	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		2017	90.6	90.7	90.8	90.9	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.6.1	Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	2017	14.41	17.12	18.92	21.62	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.6.2	Angka partisipasi murni (APM) usia SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		2017	80.05	80.1	80.15	80.2	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.7.1	Persentase guru PAUD yang Bersertifikat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	%	2017	68.77	69.46	71.25	73.03	NA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.8.1	Persentase PD yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik	%	2017	50%	60%	70%	80%	NA	Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik
4.9.1	Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik	Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik	%	2017	11.67	12.41%	13,29	14,59	NA	Persentase Perpustakaan dengan Kategori baik

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 5.2. Pengembangan Otonomi Desa										
5.2.1	Persentase Penyusunan LPP Desa Tepat Waktu	DP3AKBPMD	%	2017	60	65	70	80	NA	DP3AKBPMD
5.3.1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi	DP3AKBPMD	%	2017	88.00	88.50	89.00	90.00	NA	DP3AKBPMD
5.4.1	Cakupan PUS yang usia istrinya < 20 tahun	DP3AKBPMD	%	2017	72	73	74	75	NA	DP3AKBPMD
5.5.1	peningkatan jumlah alokasi APBDesa untuk pemberdayaan masyarakat	DP3AKBPMD	%	2017	72	73	74	75	NA	DP3AKBPMD

TUJUAN 6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup pemasyarakatan olahraga										
6.2.1	Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	%	2017	24%	26%	28%	30%	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.1	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup		2017	52 14 parameter	56 14 Parmeter	58 14 parameter	60 14 parameter	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup		2017	89 7 parameter	81 7 parameter	93 7 parameter	95 7 parameter	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.3	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	Dinas Lingkungan Hidup		2017	5 klp.	5 klp.	5 klp	5 klp.	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.4.1	Persentase Kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	2017	24	26	28	30	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.5.1	Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Mandiri pengelola sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	2017	16,67% 3 kec.	16,67% 3 kec.	16,67% 3 kec.	16,67% 3 kec.	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.6.1	Penurunan luasan lahan kritis	Dinas Lingkungan Hidup	%	2017	7800 ha	7700 ha	7600 ha	7500 ha	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.6.2	Persentase geosite yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	%	2017	30.77 (4 geosites)	46.15 (6 geosite)	61.54 (8 geosite)	69.23 (9 geosite)	NA	Dinas Lingkungan Hidup
6.7.1	Persentase RTH Publik Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	%	2017	1%	1%	1%	1%	NA	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 8.2. Pendidikan pelatihan tenaga kerja										
8.2.1	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang terserap di pasar kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2017	30%	32%	32%	33%	NA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2017	32%	33%	33%	34%	NA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.4.1	1,Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2017	100%	100%	100%	100%	NA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.4.2	2,persentase tenaga kerja yg mendapat jaminan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2017	2%	2%	3%	3%	NA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.1	Persentase Penempatan transmigrasi sesuai dengan Kesepakatan Kerja Antar Daerah (KSAD)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	2017	100%	100%	100%	100%	NA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6.1	Persentase UMKM dibina yang mampu mengimplementasika n pengelolaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	2017	21.91	23.41	24.75	25.46	NA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.7.1	Jumlah pertambahan koperasi sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		2017	2	3	3	4	NA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.8.1	Realisasi investasi nasional dan lokal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Rp	2017	110 M	147 M	195 M	261 M	NA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
8.9.1	Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	%	2017	80%	85%	90%	95%	NA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
8.10.1	Persentase ijin investasi yang tertindaklanjuti	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	%	2017	80%	80%	85%	90%	NA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
8.11.1	Nilai tambah sektor perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	2017	70,501,745,000	71,193,008,000	71,842,401,000	72,590,090,000	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.12.1	1.Nilai tambah pedagang pasar yang dibina	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	2017	46%	68%	85%	100%	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
8.12.2	2.Jumlah pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2017	8 pasar	10 pasar	12 pasar	14 pasar	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.13.1	Nilai tambah sektor Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2017	21,048	21,097	21,124	21,152	NA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TUJUAN 9. INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.2. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan										
9.2.1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	45	50	55	60	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.2.2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	96.51%	97.67%	98.83%	100%	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.3.1	Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	75%	100%	100%	100%	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.3.2	Persentase terlayani air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	83%	100%	100%	100%	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.4.1	Persentase luas kawasan kumuh tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017					NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	32.34	43.95	59.43	71.04	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.4.3	Persentase Kawasan Perumahan Formal yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	40 (6 unit)	60 (9 unit)	80 (12 unit)	100 (15 unit)	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Penghuni Rumah Susun	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Indeks	2017	72	74	76	80	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.5.2	Tingkat Hunian Rumah Susun	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	50%	75%	80%	100%	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.6.1	Persentase tertangani infrastruktur irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	74	76	78	80	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.7.1	Persentase kondisi peralatan berat dan Laboratorium berfungsi baik infrastruktur irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	75%	80%	85%	90	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.8.1	Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	%	2017	84	86	88	90	NA	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
9.9.1	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan, dan cermin tikungan) pada jalan Kabupaten	Dinas Perhubungan	%	2017	30%	35%	40	45	NA	Dinas Perhubungan
9.10.1	Persentase kendaraan wajib uji laik jalan	Dinas Perhubungan	%	2017	92	93	94	95	NA	Dinas Perhubungan
9.11.1	Jumlah pendapatan retribusi kawasan parkir	Dinas Perhubungan		2017					NA	Dinas Perhubungan
9.12.1	Jumlah kawasan rawan kecelakaan dan kejahatan	Dinas Perhubungan		2017	30	35	40	45	NA	Dinas Perhubungan
9.13.1	Pesentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum	Dinas Perhubungan	%	2017	61	66	71	76	NA	Dinas Perhubungan
9.14.1	Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	2017	32.60%	43.47%	54.34%	65.21%	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.15.1	Persentase layanan keamanan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		2017	50%	60%	70%	75%	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.16.1	Persentase data dasar yang tersedian untuk perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	2017	85%	90%	95%	95%	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.17.1	Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	2017	75%	80%	83%	87%	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.18.1	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	menit	2017	18	17	15	15	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
9.19.1	Persentase Desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	2017	71,90	78,51	85,20	91,31	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.20.1	Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	m2	2017	60,000	65,000	70,000	60,000	NA	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
9.21.1	Persentase kawasan memiliki dokumen rinci	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	%	2017	100%	100%	100%	100%	NA	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
9.22.1	Persentase Rekomendasi yang sesuai dengan tata ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	%	2017	100%	100%	100%	100%	NA	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

TUJUAN 10. MENGURANGI KETIMPANGAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 10.2 Pengelolaan Administrasi Kependudukan										
10.2.1	Cakupan penerbitan KTP, KK dan Surat Keterangan Mutasi Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	desa	2017	0	14 Desa	30 Desa	56 Desa	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.3.1	Persentase desa yang memiliki data base kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	2017	12,05% (18 Desa)	12,05% (18 Desa)	12,05% (18 Desa)	12,05% (18 Desa)	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.4.1	Cakupan penerbitan akta-akta catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	2017	39%	41%	43%	45%	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.5.1	Jumlah OPD yang memanfaatkan data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD	2017	6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN 14. MENJAGA EKOSISTEM LAUT

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 14.2 Pengembangan Agribisnis Perikanan										
14.2.1	Nilai pendapatan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp/Th	2017	4,380,033.00	4,403,906.00	4,469,136.00	4,534,103.00	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.3.1	Nilai pendapatan nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp/Th	2017	23,794,712	24,494,557	25,717,989	27,003,629	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.4.1	Produksi perikanan budidaya (kg)	Dinas Kelautan dan Perikanan	kg/th	2017	12,550,010.00	12,650,300.00	12,870,115.00	13,090,200.00	NA	Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN 15. MENJAGA EKOSISTEM DARAT

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 15.2 Peningkatan Agribisnis Pertanian										
15.2.1	Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	1,556,608 ,500	2,135,882 ,500	1,127,203 ,000	1,151,284 ,155	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.3.1	Persentase rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita yang diterapkan	Dinas Pertanian dan Pangan	kelompok	2017	620,702 ,500	982,980 ,000	1,078,660 ,000	1,259,100 ,833	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.1	Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	982,980 ,000	1,078,660 ,000	1,259,100 ,833	1,372,419 ,907	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.2	1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok)	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	5,100	5,150	5,200	5,250	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.3	2) Harga pangan yang terjangkau dan terkendali	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp	2017	8,100	8,200	8,300	8,400	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.4.4	3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan)	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	85.80	87.20	90.00	92.20	NA	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
15.4.5	4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)	Dinas Pertanian dan Pangan		2017	91.30	92.70	95.00	95.70	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.1	Jumlah produksi hasil perkebunan dan hortikultura produk unggulan	Dinas Pertanian dan Pangan		2017					NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.2	kakao	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	364,000	413,000	465,000	520,000	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.3	Mete	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	548,191	575,600	604,380	634,600	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.4	Tembakau	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	468,157	491,565	516,143	541,950	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.5	Kelapa	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	21,732,480	22,819,104	23,960,059	25,158,062	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.6	Bawang Merah	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	463.60	470.56	477.61	484.78	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.5.7	Cabe	Dinas Pertanian dan Pangan	ton	2017	480.08	487.29	494.60	502.01	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.1	Jumlah Populasi ternak :	Dinas Pertanian dan Pangan		2017					NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.2	1. Sapi potong (ekor)	Dinas Pertanian dan Pangan	Ekor	2017	151,573	153,008	154,619	156,165	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.3	2. Kambing (ekor)	Dinas Pertanian dan Pangan	Ekor	2017	191,094	195,528	199,438	203,427	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.4	3. Ayam buras (ekor)	Dinas Pertanian dan Pangan	Ekor	2017	1,150,109	1,161,610	1,173,263	1,184,956	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.5	4. Daging	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	4,618,031	4,664,211	4,710,854	4,757,962	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.6.6	5. Telur	Dinas Pertanian dan Pangan	Kg	2017	3,417,314	3,451,487	3,486,002	3,520,862	NA	Dinas Pertanian dan Pangan
15.7.1	Jumlah produksi tamanan pangan			2017					NA	
15.7.2	Padi		ton	2017	290,817	291,195	291,572	292,488	NA	
15.7.3	Jagung		ton	2017	206,500	207,500	208,500	209,500	NA	
15.7.4	Kedelai		ton	2017	6,000	6,500	7,000	7,500	NA	
15.7.5	Ubi Kayu		ton	2017	878,510	880,706	882,908	891,737	NA	

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 16.2. Penegakan Peraturan Daerah Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan										
16.2.1	Persentase penegakan peraturan perundangan yang mengandung sanksi Pidana	Satuan Polisi Pamong Praja	%	2017	65	70	75	80	NA	Satuan Polisi Pamong Praja
16.3.1	Persentase jumlah anggota satuan Linmas yang handal dan tangguh	Satuan Polisi Pamong Praja	%	2017	85	86	87	89	NA	Satuan Polisi Pamong Praja
16.4.1	Persentase gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	%	2017	92	93	94	95	NA	Satuan Polisi Pamong Praja
16.5.1	1,Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP	Inspektorat Daerah	Temuan	2017	0	0	0	0	NA	Inspektorat Daerah

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.5.2	2,Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama	Inspektorat Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Inspektorat Daerah
16.6.1	Persentase kesesuaianProgram dalam RKPD terhadap RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	2017	100%	100%	100%	100%	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.7.1	Persentase kesesuaian capaian dengan target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	2017	100%	100%	100%	100%	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.8.1	Persentase kesesuaianProgram dalam Renja PD Bidang Fisik dan Prasarana terhadap RKPD dan APBD, sertaProgram dalam Renstra PD terhadap RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	2017	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.9.1	Persentase kesesuaianProgram dalam Renja PD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terhadap RKPD dan APBD, sertaProgram dalam Renstra PD terhadap RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	2017	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.10.1	Persentase kesesuaianProgram dalam Renja PD Bidang Perekonomian terhadap RKPD dan APBD, sertaProgram dalam Renstra PD terhadap RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	2017	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	Renja/RKPD = 100% Renja/APBD = 100% Renstra/RPJMD = 100%	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.11.1	Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian	2017	6 penelitian	8 penelitian	10 penelitian	12 penelitian	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16.12.1	Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16.13.1	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya)	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16.14.1	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16.15.1	Persentase Aset yang dilaporkan ke neraca	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16.16.1	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	%	2017	10	10	10	10	NA	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16.17.1	Persentase desa di wilayah perkotaan yang memiliki data obyek pajak yang valid	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	%	2017	8	8	8	8	NA	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16.18.1	Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi.	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah
16.19.1	Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah
16.20.1	Persentase Pelanggaran dan Kasus PNS yang terselesaikan	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah	%	2017	100	100	100	100	NA	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah
16.21.1	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah		2017	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	NA	Sekretariat Daerah

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.22.1	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah		2017	B	BB	BB	BB	NA	Sekretariat Daerah
16.23.1	Persentase permasalahan Perbatasan yang tertangani	Sekretariat Daerah		2017	58%	62%	66%	70%	NA	Sekretariat Daerah
16.24.1	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah		2017	100%	100%	100%	100%	NA	Sekretariat Daerah
16.25.1	Persentase Produk Hukum daerah yang ditetapkan	Sekretariat Daerah		2017	90%	90%	90%	95%	NA	Sekretariat Daerah
16.26.1	Persentase ketugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan Baik	Sekretariat Daerah		2017	100%	100%	100%	100%	NA	Sekretariat Daerah
16.27.1	Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	Sekretariat Daerah		2017	15	15	15	15	NA	Sekretariat Daerah
16.28.1	Persentase PD Penyelenggara Pelayanan yang terbina	Sekretariat Daerah		2017	78.5	79	79.5	80	NA	Sekretariat Daerah
16.29.1	Persentase PD yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya	Sekretariat Daerah		2017	94%	96%	98%	100%	NA	Sekretariat Daerah
16.30.1	Jumlah rumusan kebijakan Pemda bidang perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sekretariat Daerah		2017	8	10 rumusan kebijakan	12 rumusan kebijakan	15 rumusan kebijakan	NA	Sekretariat Daerah
16.31.1	Persentase serapan anggaranProgram dan kegiatan	Sekretariat Daerah		2017	88%	90%	92%	94%	NA	Sekretariat Daerah
16.32.1	Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan administrasi dan keuangan	Sekretariat DPRD		2017	92%	93%	94%	95%	NA	Sekretariat DPRD
16.33.1	Persentase konflik sosial yang diselesaikan dalam wilayah			2017	76%	85%	87%	90%	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.34.1	Persentase ormas dan LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan			2017	50%	55%	60%	65%	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17.2. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi										
17.2.1	Jumlah rintisan desa budaya	Dinas Kebudayaan	desa	2017	2	2	2	2	NA	Dinas Kebudayaan
17.3.1	Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya	Dinas Kebudayaan	rekomendasi	2017	10	10	10	10	NA	Dinas Kebudayaan
17.4.1	Jumlah Desa yang telah memiliki dokumen sejarah desa dalam Bahasa Jawa.	Dinas Kebudayaan	desa	2017	25	25	25	25	NA	Dinas Kebudayaan

MatrikProgram Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gunungkidul

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan											
INDIKATOR TPB	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
PROGRAM 1:Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial											
Kegiatan 1: Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara ekonomi dan sosial	%	100	100	100	100	100	NA	13,653,834,500	APBD	Dinas Sosial Kab. Gunungkidul
PROGRAM 2 :Program Peningkatan rehabilitasi Sosial											
Kegiatan 1: Penyelenggaraan rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas	Meningkatnya Kemandirian masyarakat ekonomi dan sosial	%	100	100	100	100	100	NA	5,820,922,500	APBD	Dinas Sosial Kab. Gunungkidul
PROGRAM 3: Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata											
Kegiatan 1: Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pembinaan, sosialisasi pengukuhan Pokdarwis, Penetapan Desa Wisata Rekomendasi Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Desa, Bimtek, Pokdarwis, Sosialisasi, Orientasi Lapangan	-	2	2	2	2	NA	3,691,626,900	APBD	Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul
Keterangan											
Tujuan 14 : Menjaga Ekosistem Laut											
INDIKATOR SDG's	14.2.1* Melindungi Lingkungan Pantai dan Laut										
PROGRAM 1:Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengd. Sumberdaya Kelautan											
Kegiatan 1: Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan		%	100	100	100	100	100	NA	395,788,450	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Gunungkidul
Kegiatan 2 : Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Perikanan Tangkap dan Budidaya		%	100	100	100	100	100	NA	523,818,850	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Gunungkidul
PROGRAM 2:Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sdm kelautan											
Kegiatan 1: Penyuluh hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut		%	100	100	100	100	100	NA	233,578,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Gunungkidul
PROGRAM 3:Program Peningkatan mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan iklim Laut											
Kegiatan 1: Penyuluhan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut		%	100	100	100	100	100	NA	118,350,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Gunungkidul
Tujuan 15 : Menjaga Ekosistem Darat											
INDIKATOR SDG's	15.2.1* Melindungi Sumber Daya Alam dan Menjaga Keanekaragaman Hayati										
PROGRAM 1:Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan											
Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem		%	100	100	100	100	100	NA	501,502,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul
PROGRAM 2 :Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA											
Kegiatan 1: Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA		%	100	100	100	100	100	NA	2,180,480,500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul
PROGRAM 3:Program Peningkatan Pengendalian Polusi											
Kegiatan 1:Program : Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan		%	100	100	100	100	100	NA	108,565,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Koncervasi	%	100	100	100	100	100	NA	108,565,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gunungkidul
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat										
INDIKATOR SDG's 16.2.1* Menciptakan ruang damai bagi masyarakat, keadilan dan memastikan pemerintah bekerja secara efektif dan terbuka										
PROGRAM 1:Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan										
Kegiatan 1: Keg. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa	%	100	100	100	100	100	NA	470,336,845	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Gunungkidul
Kegiatan 2 : Keg. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	%	100	100	100	100	100	NA	2,600,884,359	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Gunungkidul
PROGRAM 2 :Program Pengembangan Otonomi Desa										
Kegiatan 1: Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	100	100	100	100	NA	475,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Gunungkidul

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kulon Progo

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
TUJUAN I Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.										
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1	Angka kemiskinan	BPS	%	20.03	18.25	17.25	16	14.75	13.25	Bappeda
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.3.1(a)	Cakupan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	%	77.04	84.38	91.17	97.97	97.97	99.46	Dinas Kesehatan
1.3.1(c)	Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	8,050	8,430	8,600	8,800	8,950	9,100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.3.1(d)	Jumlah PMKS yang menerima manfaat bantuan sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	52,250	52,750	53,250	53,800	54,500	55,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 1.4. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.4.1(c)	Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	70,19	71,07	71,09	71,10	71,11	71,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.4.1(d)	Cakupan rumah tangga berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	90.47	88.83	87.21	85.40	83.61	81.84	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1(e)	Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	43.13	45.74	48.12	50.29	52.26	54.03	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.4.1(f)	Persentase penanganan kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	4.64	4.64	4.81	4.81	4.98	4.98	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4.1(g)	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	99.49	99.54	99.59	99.64	99.69	99.74	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.4.1(h)	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	98.18	98.21	98.24	98.27	98.30	98.33	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.4.1(j)	Persentase Penduduk usia 0-18 tahun dengan Kepemilikan akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	92.22	92.77	93.32	93.88	94.44	95.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.2	Cakupan luas lahan bersertifikat	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	%	78.93	80.64	82.34	84.05	85.75	87.46	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1	Cakupan penanggulangan bencana	BPBD	%	70.88	71.41	74.61	77.55	80.48	86.83	BPBD
1.5.1.(a)	Desa Tangguh Bencana	BPBD	nilai	28	30	42	53	64	75	BPBD
1.5.1.(b)	Indeks Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	52.98	52.98	53.9	54.42	54.91	55.68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TUJUAN II Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan										
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1.(a)	indeks kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	nilai	58.35	64.40	67.16	69.93	72.70	74.80	Dinas Kesehatan
2.1.2	Jumlah desa yang tidak rawan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	nilai	81	82	83	84	85	86	Dinas Pertanian dan Pangan
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1	jumlah balita stunting	Dinas Kesehatan	anak balita	3670	3600	3500	3400	3100	2842	Dinas Kesehatan
2.2.2	jumlah balita Bawah Garis Merah	Dinas Kesehatan	anak balita	218	210	200	190	180	170	Dinas Kesehatan
	Jumlah balita kurus	Dinas Kesehatan	bayi	1321	1189	1057	925	793	657	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Jumlah ibu hamil dengn anemia	Dinas Kesehatan	ibu hamil	727	700	650	610	580	550	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	bayi	2807	2900	2950	3020	3050	3100	Dinas Kesehatan
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
2.4.1	Cetak sawah baru	Dinas Pertanian dan Pangan	ha	70	25 ha	50 ha	44 ha	35 ha	196 ha	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah Alat Mesin budidaya tanaman pangan	Dinas Pertanian dan Pangan.	unit	3,567	3,597	3,632	3,672	3,717	3,767	Dinas Pertanian dan Pangan
TUJUAN III Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia										
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1	Angka kematian ibu	BPS	nilai per 100.000 kelahiran hidup	56.26	55.8	55.35	54.92	54.74	54.55	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.										
3.2.2.(a)	Jumlah Kematian Bayi	BPS	BPS	8.86	8.79	8.52	8.46	7.84	7.5	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1	Kasus Baru Infeksi HIV	Dinas Kesehatan	Kasus	30	30	30	30	30	30	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Kasus	272	261	247	229	220	215	Dinas Kesehatan
3.3.3	Jumlah penderita DBD	Dinas Kesehatan	penderita	186	166	146	136	146	150	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi kusta	Dinas Kesehatan	desa/ kel	88	88	88	88	88	88	Dinas Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi filariasis	Dinas Kesehatan	desa/ kel	88	88	88	88	88	88	Dinas Kesehatan
	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Proporsi kasus filariasis yang ditemukan dan diobati	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(b)	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	Kasus	119,421	119,421	119,421	119,421	119,421	119,421	Dinas Kesehatan
	Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Puskesmas	21	21	21	21	21	21	Dinas Kesehatan
3.4.2.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Puskesmas	21	21	21	21	21	21	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
3.5.1.(a)	tersedianya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza	Dinas Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.										
3.6.1	Cakupan tertib lalu lintas	Dinas Perhubungan	%	33.77	41.84	47.69	52.43	59.39	65.25	Dinas Perhubungan
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional.										
3.7.1	Unmetneed KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	13,32	10,26	9,91	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7.1.(a)	Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	70,19	71,07	71,09	71,10	71,11	71,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7.1.(b)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	21.7	22.3	23.5	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	nilai	2.33	2.31	2.23	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional.										
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	BPJS	%	76	90	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
TUJUAN IV Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua										
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi A	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	18.36	19.78	22.2	23.7	25.2	26.7	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi A	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	67.5	75.32	76.2	77.1	78	78.9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.1.1.(d)	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	100.65	100.55	100.45	100.35	100.25	100.15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.1.1.(e)	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	98.71	98.8	98.9	99	99.1	99.2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.1.1.(g)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	BPS	tahun	8.56	8.65	8.73	8.8	8.88	8.96	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	57.05	58.79	60.58	62.43	64.34	66.16	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 4.4 pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki ketrampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan										
4.4.1	Jumlah peserta pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	orang	978	1008	1040	1040	1056	1088	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Angka melek huruf	BPS	%	96.62	97.48	98.33	99.19	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4.6.1.(b)	Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia 15-24 tahun dan usia 15-59 tahun	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	%	97.52	98.3	99.1	99.9	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
TUJUAN V Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan										
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.										
5.1.1	Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutama an gender	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	68.19	82.34	83.93	85.51	87.10	89.20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.2 Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kasus	109	100	105	110	115	120	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.1.(a)	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	30	30	30	30	30	30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III).	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	30	30	30	30	30	30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai denganProgramme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.										
5.6.1.(a)	Menurunnya unmetneed kebutuhan ber-KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	13,32	10,26	9,91	na	na	na	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.6.1.(b)	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis melalui sosialisai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kali	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUJUAN VI Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua										
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Cakupan rumah tangga berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	90.47	88.83	87.21	85.40	83.61	81.84	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.1.1.(b)	Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	liter/ tahun	446,758 ,896	448,392 ,130	450,045 ,068	451,718 ,398	453,412 ,836	455,129 ,118	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.1.1.(c)	jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	liter/ tahun	448,746 ,856	450,449 ,669	452,174 ,620	453,922 ,485	455,694 ,065	457,490 ,191	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(b)	Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	43.13	45.74	48.12	50.29	52.26	54.03	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.2.1.(c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	desa/ kel	4	10	20	30	40	50	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	desa/ kel	88	88	88	88	88	88	Dinas Kesehatan
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.2.(b)	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup	nilai	34.13	34.27	34.54	34.81	35.07	35.34	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah DAS	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kulon Progo Tahun 2012-2032	DAS	3	3	3	3	3	3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
6.5.1.(g)	Cakupan kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	persen	59.32	67.8	76.27	84.75	93.22	100	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.5.1.(h)	Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	%	47.38	51.4	55.02	58.24	59.43	60.63	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN VIII Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.										
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1	Pendapatan per kapita	Dinas Komunikasi dan Informatika	juta rupiah	16.39	16.87	17.39	17.9	18.41	18.92	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	71.56	72.10	72.45	72.89	73.06	73.61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3.1.(b)	Jumlah petani	Dinas Pertanian dan Pangan	orang	139,228	139,428	139,567	139,767	139,846	140,000	Dinas Pertanian dan Pangan
8.3.1.(c)	Jumlah modal UMKM dari kemitraan keuangan	Dinas Koperasi dan UKM	milyar rupiah	5.05	5.58	6.11	6.64	7.18	7.73	Dinas Koperasi dan UKM
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.2	Angka pengangguran terbuka	BPS	%	3.2	3.05	2.9	2.75	2.5	2.25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1	Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	71.56	72.10	72.45	72.89	73.06	73.61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	unit	50	176	185	190	195	200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisata	Dinas Pariwisata	orang	723 .302	935 .450	1.075 .450	1.265 .450	1.495 .450	1.779 .586	Dinas Pariwisata
8.9.2	Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM	Dinas Pariwisata	orang	38.12	43.71	46.81	49.83	51.98	52.46	Dinas Pariwisata
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
8.10.1	Cakupan BUMD dan lembaga keuangan berkinerja baik	Sekretariat Daerah	%	95.79	98.25	98.95	99.3	99.65	100	Sekretariat Daerah
8.10.1.(b)	Indeks permodalan KUMKM	Dinas Koperasi dan UMKM	nilai	46.92	48.14	49.51	50.96	51.71	53.91	Dinas Koperasi dan UMKM
TUJUAN IX Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.										
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	76.60	78.81	79.65	80.44	81.20	81.92	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1	Indeks Pertumbuhan Industri	Dinas Perdagangan	nilai	11.8	12.03	12.31	12.68	13.08	13.6	Dinas Perdagangan
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1	Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n	Dinas Perdagangan	milyar rupiah	864.5	1025	1186	1356	1531	1731	Dinas Perdagangan
9.3.2	Jumlah industri berizin	Dinas Perdagangan	IKM	718	808	908	1033	1183	1358	Dinas Perdagangan
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										
9.4.1.(a)	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	indeks	na	0.8855	0.8882	0.8909	0.8935	0.8962	Dinas Lingkungan Hidup
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1	AnggaranProgram Kerjasama Pengembangan IPTEK	Bappeda	juta rupiah	330.25	453.31	342.29	329.8	356.63	429.64	Bappeda
TUJUAN X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.										
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1	Gini ratio	BPS	Nilai	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.29	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.1.1.(a)	Angka kemiskinan	BPS	%	20.03	18.25	17.25	16	14.75	13.25	Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(b)	Tersedianya dokumen RANHAM	Sekretariat Daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(a)	Indeks Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	52.98	52.98	53.9	54.42	54.91	55.68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.										
10.7.2.(a)	Capaian penempatan transmigran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.7.2.(b)	Jumlah penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	orang	2,532	2,649	2,776	3,000	3,100	3,200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TUJUAN XI Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.										
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.										
11.1.1.(a)	Persentase rumah layak huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	79.24	79.37	79.49	79.62	79.74	79.87	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.2.1.(a)	Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan	%	63.82	67.84	77.39	80.64	89.54	92.23	Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Cakupan tertib lalu lintas jalan	Dinas Perhubungan	%	33.77	41.84	47.69	52.43	59.39	65.25	Dinas Perhubungan
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
11.3.1	Cakupan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	54.37	54.65	54.91	55.03	55.15	55.18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.4.1.(a)	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan	%	70,07	71,31	72,51	73,67	74,79	75,89	Dinas Kebudayaan
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan										
11.5.1.(b)	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD	desa/ kel	28	30	42	53	64	75	BPBD
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase Sampah yang Tertangani	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	62.39	68.94	69.17	68.15	70.07	73.91	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.6.1.(b)	Persentase Taman Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	72.5	67.35	67.35	67.35	75.51	87.76	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas										
11.7.1.(a)	Persentase Taman Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	72.5	67.35	67.35	67.35	75.51	87.76	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
11.b.1	Jumlah desa yang memiliki dokumen PRB	BPBD	dokumen	18	24	29	35	44	51	BPBD
11.b.2	Dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	BPBD	dokumen	1	1	1	1	1	1	BPBD
TUJUAN XII Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.										
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Persentase usaha atau kegiatan yang taat lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	%	31.45	31.75	31.96	32.13	32.26	33.98	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.2.(a)	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	%	59.38	60.27	60.27	60	60	60	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah sertifikasi produk pangan industri rumah tangga	Dinas Kesehatan	sertifikat	50	50	50	50	50	50	Dinas Kesehatan
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1.(a)	Pengembangan padi menuju beras premium organik	Dinas Pertanian dan Pangan	hektar		200	200	200	200	200	Dinas Perdagangan
TUJUAN XIII Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya										
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	BPBD	dokumen	1	1	1	1	1	1	BPBD
13.1.2	Cakupan penanggulangan bencana	BPBD	%	70.88	71.41	74.61	77.55	80.48	86.83	BPBD
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										
13.2.1	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Bappeda	dokumen	1	2	2	2	2	2	Bappeda
13.2.1.(a)	Jumlah Dokumen lingkungan yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	206	250	250	250	250	250	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN XIV Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.										
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.										
14.2.1.(a)	Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Pertaru	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
14.2.1.(b)	Target persentase sarana prasarana TPI kondisi baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	70	70	75	75	80	80	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya										

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	2022	Penanggungjawab Pelaksana
14.4.1	Jumlah operasi terpadu di perairan umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	kali	5	7	5	5	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
14.6.1.(a)	Jumlah anggota kelompok masyarakat pengawas yang paham tentang perlindungan sumberdaya ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	orang	na	30	30	30	30	30	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
14.b.1	Jumlah perijinan usaha perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	dokumen	1,003	2,500	5,000	7,500	10,000	11,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(a)	Peningkatan modal usaha perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	juta rupiah	213 ,173 .06	220 ,038 .47	226 ,180 .43	231 ,591 .29	238 ,669 .19	241 ,523 .67	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang teregistrasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	orang	1,843	1,867	1,891	1,916	1,940	2,042	Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN XV Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.										
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1.(a)	Indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup	%	65.34	65.48	65.75	66.02	66.28	66.55	Dinas Lingkungan Hidup
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.										
15.7.1.(a)	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	Dinas Lingkungan Hidup	laporan	10	10	10	12	14	15	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN XVI Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.										
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
	Capaian penanganan konflik sosial	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	%	76	80	80	80	80	80	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
	Cakupan penegakan hukum	Satuan Polisi Pamong Praja	%	85.11	97.06	97.22	97.89	98.42	98.00	Satuan Polisi Pamong Praja
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1.(a)	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Inspektorat Daerah	OPD	2	2	3	5	7	9	Inspektorat Daerah
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1.(a)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK)	BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
16.6.1.(b)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Kementerian PAN dan RB	nilai	BB	BB	BB	BB	A	A	Sekretariat Daerah
16.6.1.(d)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN dan RB	Nilai	64	67	70	72	73	74	Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo	nilai	77.15	77.65	78.15	78.65	79.35	79.65	Sekretariat Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	30	30	30	30	30	30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III).	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	30	30	30	30	30	30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1	Prosentnase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										

Kode Indikator	Indikator RAD	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD (Target OPD, BUMD& Pem Desa)	42	42	42	42	42	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.10.2.(b)	Persentase tindak lanjut penanganan sengketa informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID bersertifikat	23	23	28	33	38	42	Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN XVII Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.										
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BKAD	milyar rupiah	242 ,829	206 ,336	217 ,509	246 ,398	275 ,398	315 ,535	BKAD
17.1.1.(a)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah	BKAD	%	17	13	17	19	21	23	BKAD
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menghubungkan antar OPD dan Desa.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	0	40	80	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer	BKPP	orang	6	9	9	9	14	23	BKPP
17.19.1.(b)	Persentase perangkat Daerah yang memiliki jabatan fungsional pranata komputer.	BKPP	%	9.52	9.52	9.52	23.81	23.81	23.81	BKPP
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional pranata komputer	BKPP	%	21.43	32.14	32.14	16.36	25.45	41.82	BKPP
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(e)	Jumlah data statistik dasar BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	jenis data	10	10	10	10	10	10	Dinas Komunikasi dan Informatika

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kulon Progo

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
TUJUAN I : Tanpa Kemiskinan											
	Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
INDIKATOR SDG's	1.2.1. Angka kemiskinan										
1.Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi											
Kegiatan 1: Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	537.237	APBD	Bappeda
	Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0			
2.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Terbayarnya premi peserta JKN APBD	jiwa	0	37000	37000	37000	37000	37000	58,057 .790	APBD	Dinas Kesehatan
	Terbayarnya klaim peserta jamkesda	bulan	12	12	12	12	12	12			
3.Program Ketahanan Pangan Daerah											
Kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Penganekragaman Konsumsi Pangan	sertifikat produk pangan olahan	PIRT	8	4	4	4	4	4	1,897 .334	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	fasilitas dan pendampingan pemanfaatan pekarangan	kelompok	30	10	10	10	10	10			
	sosialisasi B2SA	kali	2	2	2	2	2	2			
	uji mutu dan keamanan pangan	sampel	500	500	200	200	300	400			
	penyediaan alat uji sampel hasil panen dan olahan pangan primer	unit	4	4	1	1	1	1			
	penyusunan pola panga harapan	dok	1	1	1	1	1	1			
4.Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan											
Kegiatan Peningkatan produksi peternakan	semen beku	dosis	2900	3590	3000	3000	3000	3000	7,538 .333	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	bantuan hibah sapi	ekor	120	55	45	50	60	60			
	bantuan hibah kambing	ekor	318	224	204	120	240	240			
	bantuan hibah domba	ekor	60	0	60	60	60	60			
	bantuan hibah unggas (itik)	ekor	990	2640	330	0	990	990			
	bantuan hibah unggas (ayam)	ekor	0	500	250	0	500	500			
	bantuan hibah bahan kandang	kelompok	13	0	0	0	0	0			
5.Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya											
Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya	Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana produksi (terpal, bibit, pakan)	kelompok	10	2	1	1	1	1	3,038 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan CPIB	0rang	50	25	100	100	100	100			
	Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket perbenihan ikan	kelompok	4	1	0	0	0	0			
6.Program Pengembangan Industri											
Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam Kimia dan Aneka	Pemberian bantuan peralatan industri	kelompok	3	9	10	10	10	10	2,634 .350	APBD	Dinas Perdagangan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
7.Program Pengembangan Dan Pelatihan Tenaga Kerja											
Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang dilatih	orang	64	272	272	272	272	272	4,548 .031	APBD	Dinas Tenaga Kerja
8.Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat											
penyediaan PSU lingkungan permukiman	sambungan listrik rumah bagi masyarakat miskin	titik	0	150	150	150	150	150	35,990 .750	APBD	Dinas PUPKP
	Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
INDIKATOR SDG's	1.3.1(a) Cakupan pelayanan kesehatan										
1.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Terbayarnya premi peserta JKN APBD	jiwa	0	37000	37000	37000	37000	37000	58,057.790	APBD	Dinas Kesehatan
	Terbayarnya klaim peserta jamkesda	bulan	12	12	12	12	12	12			
INDIKATOR SDG's	1.3.1(c) Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial										
1.Program Pemberdayaan Sosial											
Kegiatan peningkatan pelayanan distribusi rastra	Terlaksananya Koordinasi, Monev, lpaoran distribusi bantuan pangan (kali)	kali	12	12	12	12	12	12	1,935 .690	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	tersalurkannya bantuan pangan bagi keluarga miskin	kk	0	0	47323	47323	47323	47323			
Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang diberdayakan	kelompok	73	73	83	100	120	150	761 .260	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	jumlah PMKS yang terentaskan menjadi sejahtera	orang	0	0	500	600	700	800			
	Tersediannya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada PMKS	kelompok	73	73	83	100	120	150			
	Pelatihan KUBE	kali	1	1	4	6	10	14			
	Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi KUBE	kali	25	25	30	30	30	30			
	Tersusunnya database KUBE	dokumen	1	1	1	1	1	1			
Peningkatan pelayanan PKH	Buku data penerima bantuan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	dokumen	2	2	2	2	2	2	1,076 .490	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Upaya pemberdayaan kleuarga FDS (family deevelopment sesion)	kk	0	0	12000	20000	30000	40000			
	Terlaksannya sosialisasi PKH	kali	6	6	8	10	12	14			
	Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial	KK	28071	28071	33500	36000	38500	41000			
	Terlaksannya koordinasi PKH	kali	10	10	12	14	16	18			
INDIKATOR SDG's	1.3.1(d) Jumlah PMKS yang menerima manfaat bantuan sosial										
1.Program Perlindungan Sosial											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Terfasilitasinya pendampingan SLRT	orang	38	38	38	38	38	38	5,545 .410	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terfasilitasinya pendampingan KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	orang	88	88	88	88	88	88			
	Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan	kali	2	2	4	2	2	2			
	PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	orang	2000	4362	4362	4362	4362	4362			
	Tersedianya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS	orang	1357	1432	1489	1522	1552	1600			
	Target 1.4. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
INDIKATOR SDG's	1.4.1(c) Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)										
1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga											
Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon	Terkendalinya pengelolaam Alkon diklinik KB	puskesmas	0	21	21	21	21	21	62 .580	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya kualitas pelayanan KB	puskesmas	0	21	21	21	21	21			
	Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB	orang	0	300	300	300	300	300			
INDIKATOR SDG's	1.4.1(d) Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah										
1.Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi											
Penyediaan Sarana Air Bersih	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	107463	109213	110963	112463	113963	115463	6,507 .642	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar	Jumlah rumah tangga berakses air limbah	KK	51228	56228	61228	66228	71228	76228	2,334 .921	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	1.4.1(e) Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah										
1.Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah lokasi penyedotan lumpur tinja	lokasi	na	na	152	156	160	164	729 .000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Kebersihan kota	Kebersihan kawasan perkotaan	bulan	12	12	12	12	12	12	3,273 .121	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang teratangani	%	62.39	68.94	69.17	68.15	70.07	73.91	7,902 .741	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Pengelolaan Taman	Jumlah taman dalam kondisi baik	taman	29	33	33	33	37	43	9,266 .518	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	1.4.1(f) Persentase penanganan kawasan kumuh										
1.Program Lingkungan Sehat Permukiman dan Pengembangan Perumahan											
Penyediaan prasarana sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman	Kawasan kumuh tertangani prasarana dan sarana utilitasnya	Ha	13.644	13.644	14.144	14.144	14.644	14.644	8,862 .860	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas	Jumlah rumah layak Huni	unit	88777	89477	90177	90877	91577	92277	5,317 .710	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa	Infrastruktur Rusunawa terpelihara	bulan	12	12	12	12	12	12	3,545 .130	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	1.4.1(g) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat										
1.Program Pembinaan sekolah dasar											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pengadaan Sarana pendidikan SD	Peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (prestasi)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	18,756 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Tersedianya media pendidikan	Sekolah	4	4	1	1	1	1			
	Tersedianya Mebelair meja kursi	Sekolah	4	4	1	1	1	1			
	Tersedianya koleksi perpustakaan	Sekolah	5	5	2	2	2	2			
	Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) dan olahraga	Sekolah	4	4	1	1	1	1			
Penyediaan BiayaPendidikan SD	Tersedianya biaya operasional sekolah pendidikan SD	SD	337	334	334	334	334	334	72,391 .640	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD	Terbangunnya/ terehabnya bangunan SD	Sekolah	68	8	2	2	2	2+I25	30,044 .600	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terbangunnya/ terehabnya gedung gugus	Gedung		2	1	1	1	1			
Pengembangan Potensi Siswa SD	Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya	Kategori	10	10	10	10	10	10	1,041 .824	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Terlaksananya peningatan pemahaman terhadap pendidkan kepramukaan	Guru	350	200	200	200	200	200	1,555 .294	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya peningkatan pemahaman kurikulum 2013	Orang	168	168	168	168	168	168			
	Terlaksananya pendampingan sekolah piloting SD berkarakter	Sekolah	3	12	12	12	12	12			
PengembanganProgram pendidikan inklusif jenjang SD	Terfasilitasinya assesment siswa berkebutuhan khusus	Siswa	225	300	300	300	300	300	558 .120	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya Diklat penanganan anak berkebutuhan khusus bagi guru reguler, manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi kepala sekolah	Orang	120	120	120	120	120	120			
Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD	Terfasilitasinya bedah kisi kisi US/M, Diklat Penulisan Soal, Latihan US/M	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	4,427 .752	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap pendataan ujian sekolah	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang PPBD	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Terlaksananya peningkatan pemahaman EDS	Orang	400	400	400	400	400	400			
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SD	Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD	Sekolah	20	120	120	120	120	120	1,421 .346	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	Kali		4	4	4	4	4			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
INDIKATOR SDG's	1.4.1(h) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat										
1.Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama											
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Meningkatnya pemahaman terhadap implementasi K13, Terselenggaranya Diklat Teknis Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka, Meningkatnya kualitas pelayanan UKS	Sekolah	36	36	36	36	36	36	855 .784	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Potensi Siswa SMP	Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya	Sekolah	79	79	79	79	79	79	2,716 .184	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Biaya Pendidikan SMP	Terpenuhinya penyediaan biaya pendidikan SMP (36 sekolah negeri) dan fasilitasi penyediaan BBPD 43 SMP Swasta/MTs, terfasilitasinya operasional sekolah unggulan sains, olahraga dan seni budaya	Sekolah	79	79	79	79	79	79	47,513 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SMP	Terfasilitasinya ujian SMP/MTs, tersosialisasikannya POS ujian, tersusunnya Master Soal, terlaksananya bedah kisi-kisi ujian, terlaksananya PPDB Online, tersosialisasikannya SOP MOS	Sekolah	79	79	79	79	79	79	2,299 .272	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengadaan Sarana Pendidikan SMP	Sarana Pendidikan dan Media Pembelajaran Yang Lengkap dan Kondisi Baik	Sekolah	28	8	2	2	2	2	9,300 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP	Relokasi Sekolah	Sekolah		1	1	1	1	1	13,000 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan/ rehabilitasi Prasarana SMP	Sekolah	34	4	1	1	1	1			
PengembanganProgram Pendidikan Inklusif Jenjang SMP	Terlaksananya peningkatan pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi	Orang	108	140	140	140	140	140	654 .861	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP	Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 standar nasional pendidikan	Sekolah	20	18	18	18	18	18	878 .109	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	Kali		4	4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	1.4.1(j)Persentase Penduduk usia 0-18 tahun dengan Kepemilikan akte kelahiran										
1.Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
Pencatatan dan penerbitan Identitas Penduduk	Terbitnya KTP	Dokumen	7,000	4,000	4,000	1	1	1	1,427 .000	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Terbitnya KIA	Dokumen	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
	Terbitnya KK (DAK)	Dokumen	15,500	15,500	20,000	20,000	20,000	20,000			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Terekamnya KTP-El	Dokumen	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
	Terbitnya KK	Dokumen	4000	15500	16600	16600	16600	16600			
	Terbitnya KTP (DAK)	Dokumen	4,000	1,000	15,500	15,500	15,500	15,500			
Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Publikasi di pameran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	200 .000	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Sosialisasi kebijakan Adminduk	Dokumen	500	600	600	600	600	600			
	Publikasi pelayanan adminduk (DAK)	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
2.Program Administrasi Pencatatan Sipil											
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Akta Kelahiran (DAK)	Dokumen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	446 .000	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Akta Kelahiran	Dokumen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Akta Kematian	Dokumen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	332 .000	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Akta Kematian (DAK)	Dokumen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
INDIKATOR SDG's	1.4.2. Cakupan luas lahan bersertifikat										
1.Program Pengelolaan Pertanahan											
Pengelolaan Database Pertanahan	Luas lahan bersertifikat	m2	462,743 ,000	472,743 ,024	472,743 ,024	492,743 ,024	502,743 ,024	512,743 ,024	303 .712	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Sertifikasi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah	Luas aset pemda bersertifikat	m2	199 ,619	219 ,619	239 ,619	259 ,619	279 ,619	279 ,619	461 .835	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Sertifikasi Tanah Masyarakat	Luas tanah masyarakat bersertifikat	bidang	412	453	497	499	548	603	2,262 .278	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan	kasus	10	10	10	10	10	10	375 .000	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Identifikasi dan inventarisasi pertanahan	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi	dokumen	10	10	10	10	10	10	860 .000	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
INDIKATOR SDG's	1.5.1. Cakupan penanggulangan bencana										
1.Program Penanggulangan bencana											
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran	Terselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran	orang	400	250	150	150	150	200	182 .000	APBD	BPBD
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	Terbentuknya DesaTangguh Bencana	desa	4	2	2	1	1	1	1,088 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian)	Kegiatan	4	4%	3	3	3	3			
Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Terfasilitasinya upah harian 8 orang tenaga PBK non PNS	bulan	12	12	12	12	12	12	1,975 .000	APBD	BPBD
	Tertanganinya kejadian bencana, kebakaran dan tersedianya alat bantu penanganan bencana dan	bulan	12	12	12	12	12	12			
	Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan bencana	bulan	12	12	12	12	12	12			
Penyelenggaraan PUSDALOPS	Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengarah)	bulan	12	12	12	12	12	12	1,719 .000	APBD	BPBD
Penyelenggaraan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	bulan	12	12	12	12	12	12	14,239 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	1.5.1(a) Desa Tangguh Bencana										
1.Program Penanggulangan bencana											
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	Terbentuknya DesaTangguh Bencana		4	2	2	1	1	1	1,088 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian		4	4%	3	3	3	3			
INDIKATOR SDG's	1.5.1(b) Indeks Perlindungan Sosial										
1.Program Perlindungan Sosial											
Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Dibantu	KK	150	250	400	250	250	250	620 .710	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah jejaring kemitraan yang dilaksanakan	kemitraan	4	4	5	4	4	4			
	Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat yang tersedia	paket	1	1	1	1	1	1			
	Terselenggarannya apel siaga tagana	kali	1	1	2	2	1	1			
	Jumlah tagana yang aktif	orang	150	150	150	150	150	150			
	Operasional posko siaga bencana	bulan	12	12	12	12	12	12			
TUJUAN II Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
INDIKATOR SDG's	2.2.1.indeks kesehatan masyarakat										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi	puskesmas	21	21	21	21	21	21	948 .407	APBD	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) (balita)	balita	10	10	10	10	10	10			
	Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK	bumil	12	90	90	90	90	90			
	Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus	balita	40	110	40	40	40	40			
INDIKATOR SDG's	2.1.2. Jumlah desa yang tidak rawan pangan										
1.Program Ketahanan Pangan Daerah											
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Tumbuhnya dan terlatihnya kelompok afinitas	kelompok	1	1	1	1	1	1	457 .603	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	Koordinasinya dewan ketahanan pangan	kali	2	2	2	2	2	2			
	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan dan Peta Rawan Pangan	dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Terpantaunya Gapoktan LDPM dan Toko Tani Indonesia (TTI)	gapoktan	20	20	20	20	20	20			
	Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
INDIKATOR SDG's	2.2.1. jumlah balita stunting										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi	puskesmas	21	21	21	21	21	21	948 .407	APBD	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC)	balita	10	10	10	10	10	10			
	Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK	bumil	12	90	90	90	90	90			
	Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus	balita	40	110	40	40	40	40			
INDIKATOR SDG's	2.2.2. jumlah balita Bawah Garis Merah, jumlah balita kurus										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi	puskesmas	21	21	21	21	21	21	948 .407	APBD	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC)	balita	10	10	10	10	10	10			
	Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK	bumil	12	90	90	90	90	90			
	Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus	balita	40	110	40	40	40	40			
INDIKATOR SDG's	2.2.2(a) Jumlah ibu hamil dengn anemia										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknisProgram gizi dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi	puskesmas	21	21	21	21	21	21	948 .407	APBD	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC)	balita	10	10	10	10	10	10			
	Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu hamil KEK	bumil	12	90	90	90	90	90			
	Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus	balita	40	110	40	40	40	40			
INDIKATOR SDG's	2.2.2(b) Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Pelayanan kesehatan keluarga	Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja di Puskesmas	puskesmas	21	21	21	21	21	21		APBD	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
INDIKATOR SDG's	2.4.1.Cetak sawah baru, Jumlah Alat Mesin budidaya tanaman pangan										
1.Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan											
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	cetak sawah	Ha	0	25	50	44	35	196	5,589 .429	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Mendukung Produksi Tanaman Pangan	Fasilitasi alat dan mesin pertanian	kelompok	0	14	5	5	5	5	6,948 .848	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
TUJUAN III Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia											
	Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
INDIKATOR SDG's	3.1.1. Angka kematian ibu										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Keselamatan ibu dan bayi	tersedianya rumah tunggu kelahiran untuk jampersal	lokasi	0	1	1	1	1	1	1,351 .268	APBD	Dinas Kesehatan
	terbayarnya klaim pelayanan persalinan	bulan	0	12	12	12	12	12			
	Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.										
INDIKATOR SDG's	3.2.2(a) Jumlah Kematian Bayi										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Keselamatan ibu dan bayi	tersedianya rumah tunggu kelahiran untuk jampersal	lokasi	0	1	1	1	1	1	1,351 .268	APBD	Dinas Kesehatan
	terbayarnya klaim pelayanan persalinan	bulan	0	12	12	12	12	12			
INDIKATOR SDG's	3.2.2(b) Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang imunisasi dasar lengkap pada bayi										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus	terbinanyaProgram PD3I	puskesmas	21	21	21	21	21	21	175 .932	APBD	Dinas Kesehatan
	Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
INDIKATOR SDG's	3.3.1. Kasus Baru Infeksi HIV										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung	kecamatan	12	12	12	12	12	12	562 .869	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDG's	3.3.2(a) prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung	kecamatan	12	12	12	12	12	12	562 .869	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDG's	3.3.3. Jumlah penderita DBD										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik	bulan	12	12	12	12	12	12	2,490 .643	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDG's	3.3.5(a) Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi kusta										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung	kecamatan	12	12	12	12	12	12	562 .869	APBD	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
INDIKATOR SDG's	3.3.5(b) Jumlah desa/ kelurahan dengan eliminasi filariasis ; Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati; Proporsi kasus filariasis yang ditemukan dan diobati										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung	kecamatan	12	12	12	12	12	12	562 .869	APBD	Dinas Kesehatan
	Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
INDIKATOR SDG's	3.4.1b Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi ; Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor risiko kesehatan jiwa										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM	dokumen	1	1	1	1	1	1	246 .636	APBD	Dinas Kesehatan
	Tersedianya data kasus PTM	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	3.4.2(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan Napza	Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza	Dokumen	1	1	1	1	1	1	151 .598	APBD	Dinas Kesehatan
	Terbinanya TPKJM	kecamatan	4	4	2	2	2	2			
	Tersedianya media KIE kesehatan jiwa	paket	0	2	2	2	2	2			
	Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
INDIKATOR SDG's	3.5.1(a) tersedianya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza										
1.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan Napza	Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza	Dokumen	1	1	1	1	1	1	151 .598	APBD	Dinas Kesehatan
	Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.										
INDIKATOR SDG's	3.6.1(a) Cakupan tertib lalu lintas										
1.Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan											
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Usaha pengendalian pengamanan lalu litas	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	2,384 .300	APBD	Dinas Perhubungan
Peningkatatan keselamatan LLAJ	Usaha peningkatan keselamatan LLAJ	kegiatan	5	5	5	5	5	5	1,887 .550	APBD	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan fasilitas LLAJ	Perlengkapan jalan dalam kondisi baik	bulan	12	12	12	12	12	12	1,828 .419	APBD	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU dalam konsisi baik	titik	1682	1807	2000	2200	2500	2700	2,623 .621	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan jalan	jenis	6	6	6	6	6	6	6,274 .420	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan LPJU	Lampu Penerangan Jalan Umum	titik	278	193	450	490	520	530	22,750 .442	APBD	Dinas Perhubungan
Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Dokumen evaluasi Andalalin, Survey Lalu lintas & Saksi Ahli	dokumen	3	3	3	3	3	3	1,055 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Pengelolaan database	Database perhubungan	dokumen	1	1	1	1	1	1	190 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Perencanaan lalu lintas	Dokumen rencana induk & analisa	dokumen	na	0	0	1	1	1	710 .000	APBD	Dinas Perhubungan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
2. Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan											
Pengelolalaan terminal	Terminal	unit	5	5	5	6	6	6	1,155 .340	APBD	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan terminal	Fasilitas Terminal	unit	5	5	5	6	6	6	1,667 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Pengelolaan perparkiran	kendaraan parkir	unit	245933	260000	270000	280000	290000	300000	2,318 .345	APBD	Dinas Perhubungan
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan PKB	peralatan Pengujian	unit	1	1	1	1	2	6	4,735 .031	APBD	Dinas Perhubungan
Pembinaan dan pengawasan angkutan	Kegiatan penyuluhan & data	kali	2	3	3	3	3	3	1,170 .940	APBD	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan pengujian kendaran bermotor	Kendaraan wajib uji	unit	7200	7500	7800	8100	8500	9000	2,365 .822	APBD	Dinas Perhubungan
Analisa pemanfaatan terminal	dokumen	dokumen	3	3	0	0	0	0	100 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Kajian prasarana perhubungan	dokumen kajian	dokumen	0	0	1	1	0	1	940 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan terminal/halte	Kegiatan pembangunan	jenis	0	5	5	2	0	0	5,955 .000	APBD	Dinas Perhubungan
	Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional.										
INDIKATOR SDG's	3.7.1. Unmetneed KB										
1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga											
Pembinaan masyarakat peduli KB	Terbinanya kelompok masyarakat peduli KB	kelompk	0	7	7	7	7	7	417 .440	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terlaksananya sosialisasi unmet need	kali	0	3	3	3	3	3			
	Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB	kali	0	3	3	3	3	3			
INDIKATOR SDG's	3.7.1(a) Meningkatnya cakupan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)										
1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga											
Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon	Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB	orang	0	300	300	300	300	300	421 .090	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
INDIKATOR SDG's	3.7.1(b)Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Monev pelayanan KB dan pengelolaan Alkon	Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB	orang	0	300	300	300	300	300	421 .090	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
INDIKATOR SDG's	3.7.2(a)Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun)										
1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga											
Pembinaan masyarakat peduli KB	Terbinanya kelompok masyarakat peduli KB	kelompk	0	7	7	7	7	7	417 .440	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terlaksananya sosialisasi unmet need	kali	0	3	3	3	3	3			
	Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB	kali	0	3	3	3	3	3			
	Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional.										
INDIKATOR SDG's	3.8.2.(a)Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
1.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	Terbayarnya premi peserta JKN APBD	jiwa	0	37000	37000	37000	37000	37000	58,057 .790	APBD	Dinas Kesehatan
	Terbayarnya klaim peserta jamkesda	bulan	12	12	12	12	12	12			
TUJUAN IV Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua											
	Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
INDIKATOR SDG's	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi A										
1.Program Pembinaan sekolah dasar											
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SD	Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD	Sekolah	20	120	120	120	120	120	1,421 .346	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	Kali		4	4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi A										
2.Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama											
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP	Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 standar nasional pendidikan	Sekolah	20	18	18	18	18	18	878 .109	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	Kali		4	4	4	4	4			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
INDIKATOR SDG's	4.1.1.(d) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat										
3.Program Pembinaan sekolah dasar											
Pengadaan Sarana pendidikan SD	Peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (prestasi)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	18,756 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Tersedianya media pendidikan	Sekolah	4	4	1	1	1	1			
	Tersedianya Mebelair meja kursi	Sekolah	4	4	1	1	1	1			
	Tersedianya koleksi perpustakaan	Sekolah	5	5	2	2	2	2			
	Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) dan olahraga	Sekolah	4	4	1	1	1	1			
Penyediaan Biaya Pendidikan SD	Tersedianya biaya operasional sekolah pendidikan SD	SD	337	334	334	334	334	334	72,391 .640	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD	Terbangunnya/ terehabnya bangunan SD	Sekolah	68	8	2	2	2	2+l25	30,044 .600	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terbangunnya/ terehabnya gedung gugus	Gedung		2	1	1	1	1			
Pengembangan Potensi Siswa SD	Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya	Kategori	10	10	10	10	10	10	1,041 .824	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Peningkatan MutuPendidikan SD	Terlaksananya peningatan pemahaman terhadap pendidkan kepramukaan	Guru	350	200	200	200	200	200	1,555 .294	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya peningkatan pemahaman kurikulum 2013	Orang	168	168	168	168	168	168			
	Terlaksananya pendampingan sekolah piloting SD berkarakter	Sekolah	3	12	12	12	12	12			
PengembanganProgram pendidikan inklusif jenjang SD	Terfasilitasinya assesment siswa berkebutuhan khusus	Siswa	225	300	300	300	300	300	558 .120	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya Diklat penanganan anak berkebutuhan khusus bagi guru reguler, manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi kepala sekolah	Orang	120	120	120	120	120	120			
Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD	Terfasilitasinya bedah kisi kisi US/M, Diklat Penulisan Soal, Latihan US/M	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	4,427 .752	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap pendataan ujian sekolah	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang PPBD	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Terlaksananya peningkatan pemahaman EDS	Orang	400	400	400	400	400	400			
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SD	Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD	Sekolah	20	120	120	120	120	120	1,421 .346	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	Kali		4	4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	4.1.1.(e) Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat										
1.Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama											
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Meningkatnya pemahaman terhadap implementasi K13, Terselenggaranya Diklat Teknis Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka, Meningkatnya kualitas pelayanan UKS	Sekolah	36	36	36	36	36	36	855 .784	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Potensi Siswa SMP	Terselenggaranya lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya	Sekolah	79	79	79	79	79	79	2,716 .184	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Biaya Pendidikan SMP	Terpenuhinya penyediaan biaya pendidikan SMP (36 sekolah negeri) dan fasilitasi penyediaan BBPD 43 SMP Swasta/MTs, terfasilitasinya operasional sekolah unggulan sains, olahraga dan seni budaya	Sekolah	79	79	79	79	79	79	47,513 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SMP	Terfasilitasinya ujian SMP/MTs, tersosialisasikannya POS ujian, tersusunnya Master Soal, terlaksananya bedah kisi-kisi ujian, terlaksananya PPDB Online, tersosialisasikannya SOP MOS	Sekolah	79	79	79	79	79	79	2,299 .272	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengadaan SaranaPendidikan SMP	Sarana Pendidikan dan Media Pembelajaran Yang Lengkap dan Kondisi Baik	Sekolah	28	8	2	2	2	2	9,300 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembangunan/RehabilitasiPrasarana SMP	Relokasi Sekolah	Sekolah		1	1	1	1	1	13,000 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan/ rehabilitasi Prasarana SMP	Sekolah	34	4	1	1	1	1			
PengembanganProgram Pendidikan Inklusif Jenjang SMP	Terlaksananya peningkatan pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi	Orang	108	140	140	140	140	140	654 .861	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP	Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 standar nasional pendidikan	Sekolah	20	18	18	18	18	18	878 .109	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	Kali		4	4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	4.1.1.(g) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun										
1.Program Pembinaan PAUD dan PNF											
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan	Warga Belajar	140	140	140	140	140	140	1,553 .400	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C	Warga Belajar	343	343	343	343	343	343			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar										
INDIKATOR SDG's	4.2.2.(a) Angka Partisipasi PAUD										
1.Program Pembinaan PAUD dan PNF											
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana PAUD dan PNF	Terbangunnya/terpeliharanya prasarana PAUD dan PNF	Lembaga	4	4	4	4	4	4	992 .200	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pengadaan Sarana PAUD dan PNF	Tersedianya sarana PAUD dan PNF	Lembaga	64	64	64	64	64	64	621 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Kelembagaan PAUD dan PNF	Terlaksananya pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF	Lembaga	845	845	845	845	845	845	416 .400	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan PAUD dan PNF	Terlaksananya gebyar PAUD	Orang	500	500	500	500	500	500	3,056 .600	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya peningkatan pemahaman pendidikan karakter	Lembaga	845	845	845	845	845	845			
	Tersedianya data peserta didik PAUD dan PNF	Lembaga	914	914	914	914	914	914			
	Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang BOP	Lembaga	845	845	845	845	845	845			
	Terlaksananya peningkatan pemahaman tentang APBS/RKAS	Lembaga	327	327	327	327	327	327			
	Terlaksananya lomba sekolah sehat dan lomba kreatifitas anak	Lembaga	2	2	2	2	2	2			
	TerselenggaranyaProgram paket A,B,C dan kursus ketrampilan di SKB	Lembaga	1	1	1	1	1	1			
	Tersalurnya dana BOP sekolah negeri	Lembaga	13	13	13	13	13	13			
Pemberdayaan Anak Putus Sekolah	Terlaksananya peningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah	Warga Belajar	60	60	60	60	60	60	456 .200	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan	Warga Belajar	140	140	140	140	140	140	1,553 .400	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C	Warga Belajar	343	343	343	343	343	343			
Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Satuan PAUD dan PNF	Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan PAUD dan PNF	Lembaga	60	60	60	60	60	60	303 .520	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikukulum PAUD dan PNF	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kurikulum PAUD dan PNF	Lembaga	300	300	300	300	300	300	1,321 .000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar (EHB) dan Ujian KesetaraanProgram Paket A, Paket B dan Paket C	Paket	8	8	8	8	8	8			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Terlaksananya pelatihan implementasi Kurikulum Satuan PAUD dan PNF, Lomba kesetaraan, LKP, PKBM, TBM	Orang	300	300	300	300	300	300			
	Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
INDIKATOR SDG's	4.6.1.(a) Angka melek huruf										
1.Program Pembinaan PAUD dan PNF											
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan	Warga Belajar	140	140	140	140	140	140	1,553 .400	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C	Warga Belajar	343	343	343	343	343	343			
INDIKATOR SDG's	4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia 15-24 tahun dan usia 15-59 tahun										
1.Program Pembinaan PAUD dan PNF											
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Tersalurnya dana operasional pendidikan keaksaraan	Warga Belajar	140	140	140	140	140	140	1,553 .400	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Tersalurnya dana operasionalProgram paket B dan Paket C	Warga Belajar	343	343	343	343	343	343			
TUJUAN V Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan											
	Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.										
INDIKATOR SDG's	5.1.1. Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender										
1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender											
Pemberdayaan lembaga berbasis Gender	Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender	dok	1	1	1	1	1	1	266 .810	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	terkoordinasinya lembaga berbasis gender	kali	3	3	3	3	3	3			
	Terfasilitasinya koordinasi GOW	kali	12	12	12	12	12	12			
Peningkatan Peran Wanita	Terbinanya kewirausahaan bagi perempuan miskin	desa	10	10	10	10	10	10	286 .160	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terbinanya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan	kali	1	1	12	12	12	12			
Penguatan Pengarustamaan Gender	Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten	dok	1	1	1	1	1	1	247 .520	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA	laporan	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG	kali	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG	kali	0	0	48	48	48	48			
	Target 5.2 Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
INDIKATOR SDG's	5.2.1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak										
1.Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak											
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	36	36	36	36	36	36	494.760	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	orang	0	100	105	110	115	120			
	Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO	kel	0	0	0	13	37	61			
Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan	forum	13	13	13	13	13	13	430 .480	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	kecamatan	12	12	12	12	12	12			
	Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Perbup	1	1	1	1	1	1			
	Terlatihnya kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	orang	220	220	220	220	220	220			
INDIKATOR SDG's	5.2.1(a) Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak										
1.Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak											
Pembinaan Kabupaten Layak Anak	Terkoordinasikannya forum anak kulon progo dan forum anak kecamatan	kali	1	1	13	13	13	13	264 .190	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terkoordinasikannya gugus tugas kabupaten layak anak	kali	3	3	4	4	4	4			
	Terlaksananya pembinaan kabupaten layak anak	kali	9	9	9	9	9	9			
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	36	36	36	36	36	36	494 .760	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	orang	0	100	105	110	115	120			
	Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO	kel	0	0	0	13	37	61			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan	forum	13	13	13	13	13	13	430 .480	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	kecamatan	12	12	12	12	12	12			
	Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Perbup	1	1	1	1	1	1			
	Terlatihnya kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	orang	220	220	220	220	220	220			
	Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
INDIKATOR SDG's	5.5.1.Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender											
Penguatan Pengarustamaan Gender	Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten	dok	1	1	1	1	1	1	247 .520	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA	laporan	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG	kali	1	1	1	1	1	1			
	Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG	kali	0	0	48	48	48	48			
INDIKATOR SDG's	5.5.2.Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III).										
1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender											
Penguatan Pengarustamaan Gender	Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten	dok	1	1	1	1	1	1	247 .520	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA	laporan	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG	kali	1	1	1	1	1	1			
	Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG	kali	0	0	48	48	48	48			
	Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai denganProgramme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.										
INDIKATOR SDG's	5.6.1(a) Menurunnya unmetneed kebutuhan ber-KB										
1.Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga											
Pembinaan masyarakat peduli KB	Terbinanya kelompok masyarakat peduli KB	kelompk	0	7	7	7	7	7	417 .440	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Terlaksananya sosialisasi unmet need	kali	0	3	3	3	3	3			
	Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB	kali	0	3	3	3	3	3			
INDIKATOR SDG's	5.6.1(b) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis melalui sosialisai										
1.Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk											
Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Tersosialisasinya dan teradvokasinyaProgram KKBPK dengan metode KIE	Kali	0	3	3	3	3	3	664 .980	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	TerpromosikannyaProgram KKBPK melalui Harganas	Kali	0	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh KB	kali	0	3	3	3	3	3			
TUJUAN VI Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua											
	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
INDIKATOR SDG's	6.1.1(a) Cakupan rumah tangga berakses air bersih										
1.Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi											
Penyediaan Sarana Air Bersih	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	107463	109213	110963	112463	113963	115463	6,507 .642	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	6.1.1(b) Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani										
1.Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi											
Penyediaan Sarana Air Bersih	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	107463	109213	110963	112463	113963	115463	6,507 .642	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	6.1.1(c) jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)										
1.Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi											
Penyediaan Sarana Air Bersih	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	107463	109213	110963	112463	113963	115463	6,507 .642	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
INDIKATOR SDG's	6.2.1(b) Cakupan rumah tangga dengan layanan air limbah										
1.Program Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar	Jumlah rumah tangga berakses air limbah	KK	51228	56228	61228	66228	71228	76228	2,334 .921	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	6.2.1(c) Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Penyehatan Sanitasi Lingkungan	Terfasilitasinya desa STBM	desa	88	88	88	88	88	88	545 .645	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDG's	6.2.1(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).										
1.Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat											
Penyehatan Sanitasi Lingkungan	Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi stop BABs/ STBM	DEsa	9	9	9	9	9	9	545 .645	APBD	Dinas Kesehatan
	Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
INDIKATOR SDG's	6.5.1.(a) Jumlah DAS										
1.Program Perencanaan Penataan Ruang											
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci	Jumlah substansi dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	4	5	13	15	18	18	3,134 .381	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
INDIKATOR SDG's	6.5.1.(g) Cakupan kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan										
1.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air											
Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif	Pendampingan / Pemberdayaan P3A/GP3A	GP3A	16	16	16	16	16	16	9,228 .520	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan										
1.Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup											
Peningkatan konservasi lingkungan hidup	Pohon perindang jalan	batang	200	150	150	200	200	200	2,219 .800	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Sumur resapan	unit	30	20	20	20	25	25			
	Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai	batang	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
TUJUAN VIII : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.											
	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
INDIKATOR SDG's	8.1.1 Pendapatan per kapita										
1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik											
Penyusunan Data Statistik Daerah	analisis ekonomi makro	dokumen	1	1	1	1	1	1	867 .875	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
INDIKATOR SDG's	8.3.1 Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja										
1. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja											
Pelayanan penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	2500	2500	2500	2500	2500	2500	943 .107	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencaker yang dilatih	Orang	64	272	272	272	272	272	4,548 .031	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDG's	8.3.1(b) Jumlah petani										
1.Program Pemberdayaan Peyuluhan											
Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Peningkatan kelas kelompok	kelompok	60	64	70	76	82	90	611 .225	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
INDIKATOR SDG's	8.3.1(c) Jumlah modal UMKM dari kemitraan keuangan										
1. Pengembangan Permodalan KUMKM											
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM.	Sosialisasi/ koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD	KUMKM	0	0	0	90	90	90	282 .010	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
	Bantuan penguatan modal	KUMKM	0	0	0	90	90	90	343 .640	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
INDIKATOR SDG's	8.5.2 Angka pengangguran terbuka										
1. Perlindungan Ketenagakerjaan											
Penyusunan Kebijakan Pengupahan	Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan UMK	dokumen	2	2	2	2	2	2	332 .871	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja											
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Jumlah dokumen PTKD	dokumen	1	1	1	1	1	1	42 .515	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
INDIKATOR SDG's	8.6.1 Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja										
1. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja											
Pelayanan penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	2500	2500	2500	2500	2500	2500	943 .107	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencaker yang dilatih	Orang	64	272	272	272	272	272	4,548 .031	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
INDIKATOR SDG's	8.9.1(a) Jumlah kunjungan wisata										
1. Peningkatan Pemasaran Wisata											
Pengembangan Jaringan Kerjasama Pemasaran, Promosi dan Edukasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah jaringan kerja sama pemasaran promosi dan edukasi pariwisata	%	33	34	30	28	34	34	658 .615	APBD	Dinas Pariwisata
Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata	%	33	31	34	31	32	32	712 .091	APBD	Dinas Pariwisata

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pengelolaan Atraksi Wisata	Meningkatnya pengelolaan atraksi wisata	%	33	34	35	40	34	34	812 .210	APBD	Dinas Pariwisata
INDIKATOR SDG's	8.9.2 Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM										
1. Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata											
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kwalitas Kelembagaan Pariwisata	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas kelembagaan pariwisata	%	20	18	37	38	22	27	1,086 .311	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa Pariwisata	Meningkatnya kualitas jasa usaha pariwisata	%	8	16	9	11	19	25	518 .251	APBD	Dinas Pariwisata
	Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
INDIKATOR SDG's	8.10.1. Cakupan BUMD dan lembaga keuangan berkinerja baik										
1. Peningkatan BUMD dan Lembaga Keuangan											
Monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan	Dokumen monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan	dokumen	88	2	2	2	2	2	235 .790	APBD	Sekretariat Daerah
Monev BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah (LKD)	Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang BUMD, laporan hasil monev BUKP, laporan hasil pelaksanaan kegiatan TSP/CSR	dokumen	2	3	3	3	3	3	665 .970	APBD	Sekretariat Daerah
	Kajian tentang BUMD/BUKP/CSR	dokumen	0	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	8.10.1.(b) Indeks permodalan KUMKM										
1. Pengembangan Permodalan KUMKM											
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM.	Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD	KUMKM	90	30	30	30	30	30	84 .640	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
Pemantauan pengelolaan penggunaaan dana pemerintah bagi KUMKM	Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaaan dana pemerintah bagi KUMKM	KUMKM	30	30	30		30	30	94 .140	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemantauan penyaluran modal bagi KUMKM	KUMKM		30	25		20	30			
PROGRAM : Pengembangan Permodalan KUMKM											
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM.	Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD	KUMKM	90	30	30	30	30	30	84,640 .000	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
	Pembentukan jaringan kerja sama TOMIRA	jaringan	0	0	1	0	0	0			
TUJUAN 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.											
	Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
INDIKATOR SDG's	9.1.1(a) Capaian panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik										
	Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
INDIKATOR SDG's	9.2.1(a) Indeks Pertumbuhan Industri										
1. Pengembangan Industri											
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang,Kulit dan Kerajinan	Pendampingan/ Peningkatan Kapasitas Sentra	bulan/ sentra	-	10	2	2	2	2	2,550 .240	APBD	Dinas Perdagangan
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro,Makanan dan Minuman	Pendampingan/ Peningkatan Kapasitas Sentra	bulan/ sentra	10	10	2	2	2	2	4,259 .300	APBD	Dinas Perdagangan
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka	Pendampingan/ Peningkatan Kapasitas Sentra	bulan/ sentra	10	10	2	2	2	2	2,634 .350	APBD	Dinas Perdagangan
	Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
INDIKATOR SDG's	9.3.1 Jumlah nilai usaha industri tahun ke-n										
1 Pengembangan dan permodalan KUMKM											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha KUMKM.	Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/ BUMD	KUMKM	0	0	0	90	90	90	282 .010	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
	Bantuan penguatan modal	KUMKM	0	0	0	90	90	90	343 .640	APBD	Dinas Koperasi dan UKM
2. Pengembangan Industri											
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang,Kulit dan Kerajinan	Pengembangan jaringan usaha/temu usaha	orang	0	20	20	20	20	20	2,550 .240	APBD	Dinas Perdagangan
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro,Makanan dan Minuman	Pengembangan jaringan usaha/temu usaha	orang	0	0	20	20	20	20	4,259 .300	APBD	Dinas Perdagangan
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka	Pengembangan jaringan usaha/temu usaha	orang	0	0	15	20	20	20	2,634 .350	APBD	Dinas Perdagangan
INDIKATOR SDG's	9.3.2 Jumlah industri berizin										
1. Pengembangan Industri											
Penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	Pembinaan manajemen produksi	orang	30	25	25	25	25	25	2,550 .240	APBD	Dinas Perdagangan
	Sosialisasi legalitas usaha	orang	0	60	60	90	90	90			
	Pengembangan jaringan usaha/temu usaha	orang	0	20	20	20	20	20			
Penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis agro makanan dan minuman	Pembinaan manajemen produksi	orang	28	25	20	20	20	20	4,259 .300	APBD II	Dinas Perdagangan
	Sosialisasi legalitas usaha	orang	-	60	60	90	90	90			
	Pengembangan jaringan usaha/temu usaha	orang	-	-	20	20	20	20			
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka	Pembinaan manajemen produksi	orang	3	-	-	-	-	-	2,634 .350	APBD	Dinas Perdagangan
	Sosialisasi legalitas usaha	orang	90	60	60	60	60	60			
	Pengembangan jaringan usaha/temu usaha	orang	-	-	15	20	20	20			
TUJUAN X Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.											
	Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
INDIKATOR SDG's	10.1.1 Gini ratio										
1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik											
Penyusunan Data Statistik Daerah	analisis ekonomi makro	dokumen	1	1	1	1	1	1	867 .875	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
INDIKATOR SDG's	10.1.1(a) Angka kemiskinan										
1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik											
Penyusunan Data Statistik Daerah	analisis ekonomi makro	dokumen	1	1	1	1	1	1	867 .875	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi											
Kegiatan 1: Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	537 .237	APBD	Bappeda
	Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
INDIKATOR SDG's	10.3.1(b) Tersedianya dokumen RANHAM										
1.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum											
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil evaluasi	dokumen	0	2	2	2	2	2	114 .004	APBD	Sekretariat Daerah
	Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
INDIKATOR SDG's	10.4.1(a) Indeks Perlindungan Sosial										
1.Program Perlindungan Sosial											
Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Terfasilitasinya pendampingan SLRT	orang	38	38	38	38	38	38	5,545 .410	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terfasilitasinya pendampingan KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	orang	88	88	88	88	88	88			
	Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan	kali	2	2	4	2	2	2			
	PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	orang	2000	4362	4362	4362	4362	4362			
	Tersedianya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS	orang	1357	1432	1489	1522	1552	1600			
	Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.										
INDIKATOR SDG's	10.7.2(a) Capaian penempatan transmigran										
1.Program Penempatan Transmigrasi											
Penyiapan Transmigran	Jumlah sosialisasiProgram transmigrasi	Kelompok	8	8	8	8	8	8	412 .553	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah calon transmigran yang dibina		50	50	50	50	50	50			
Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi	Jumlah KSAD bidang transmigrasi	Lokasi	6	6	6	6	6	6	203 .661	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penempatan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	18	30	30	35	40	45	591 .743	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDG's	10.7.2(b) Jumlah penempatan tenaga kerja										
2. Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja											
Pelayanan penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	2500	2500	2500	2500	2500	2500	943 .107	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencaker yang dilatih	Orang	64	272	272	272	272	272	4,548 .031	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
TUJUAN XI : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.											
	Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.										
INDIKATOR SDG's	11.1.1.(a).Persentase rumah layak huni										
1.Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas	Jumlah rumah layak Huni	unit	88 ,777	89 ,477	90 ,177	90 ,877	91 ,577	92 ,277	5,317 .710	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
INDIKATOR SDG's	11.2.1.(a).Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan										
1. Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan											
Pengelolalaan terminal	Terminal	unit	5	5	5	6	6	6	1,155 .340	APBD	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan terminal	Fasilitas Terminal	unit	5	5	5	6	6	6	1,667 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Pengelolaan perparkiran	kendaraan parkir	unit	245933	260000	270000	280000	290000	300000	2,318 .345	APBD	Dinas Perhubungan
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan PKB	peralatan Pengujian	unit	1	1	1	1	2	6	4,735 .031	APBD	Dinas Perhubungan
Pembinaan dan pengawasan angkutan	Kegiatan penyuluhan & data	kali	2	3	3	3	3	3	1,170 .940	APBD	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan pengujian kendaran bermotor	Kendaraan wajib uji	unit	7200	7500	7800	8100	8500	9000	2,365 .822	APBD	Dinas Perhubungan
Analisa pemanfaatan terminal	dokumen	dokumen	3	3	0	0	0	0	100 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Kajian prasarana perhubungan	dokumen kajian	dokumen	0	0	1	1	0	1	940 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan terminal/halte	Kegiatan pembangunan	jenis	0	5	5	2	0	0	5,955 .000	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDG's	11.2.1.(b).Cakupan tertib lalu lintas jalan										
1.Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan											
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Usaha pengendalian pengamanan lalu litas	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	2,384 .300	APBD	Dinas Perhubungan
Peningkatatan keselamatan LLAJ	Usaha peningkatan keselamatan LLAJ	kegiatan	5	5	5	5	5	5	1,887 .550	APBD	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan fasilitas LLAJ	Perlengkapan jalan dalam kondisi baik	bulan	12	12	12	12	12	12	1,828 .419	APBD	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU dalam konsisi baik	titik	1682	1807	2000	2200	2500	2700	2,623 .621	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan jalan	jenis	6	6	6	6	6	6	6,274 .420	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan LPJU	Lampu Penerangan Jalan Umum	titik	278	193	450	490	520	530	22,750 .442	APBD	Dinas Perhubungan
Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Dokumen evaluasi Andalalin, Survey Lalu lintas & Saksi Ahli	dokumen	3	3	3	3	3	3	1,055 .000	APBD	Dinas Perhubungan
Pengelolaan database	Database perhubungan	dokumen	1	1	1	1	1	1	190 .000	APBD	Dinas Perhubungan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Perencanaan lalu lintas	Dokumen rencana induk & analisa	dokumen	na	0	0	1	1	1	710 .000	APBD	Dinas Perhubungan
	Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
INDIKATOR SDG's	11.3.1.Cakupan lingkungan sehat permukiman dan perumahan										
1.Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat											
Penyediaan prasarana sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman	Kawasan kumuh tertangani prasarana dan sarana utilitasnya	Ha	13.644	13.644	14.144	14.144	14.644	14.644	8,862 .860	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemberdayaan peningkatan infrastruktur oleh komunitas	Jumlah rumah layak Huni	unit	88,777	89,477	90,177	90,877	91,577	92,277	5,317 .710	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan fasilitas lingkungan rusunawa	Infrastruktur Rusunawa terpelihara	bulan	12	12	12	12	12	12	3,545 .130	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
INDIKATOR SDG's	11.4.1.(a).Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya										
1.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya											
Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepurbakalaan/ cagar budaya/ warisan budaya	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang cagar budaya	Event	1	1	1	1	1	1	659 .986	APBD	Dinas Kebudayaan
	Terdokumentasikannya cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo	Buku	1	0	0	0	0	0			
Revitalisasi kearifan budaya lokal	Peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi pekerti	Event	1	1	1	1	1	1	343 .405	APBD	Dinas Kebudayaan
Pelestarian, pemberdayaan dan promosi budaya	Terselenggaranya Sermo Art Festival	Event	1	1	1	1	1	1	4,301 .523	APBD	Dinas Kebudayaan
	Terselenggaranya Pesona Budaya di TMII	Event	0	1	0	0	0	0			
	Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan										
INDIKATOR SDG's	11.5.1(b). Jumlah Desa Tangguh Bencana										
1.Program Penanggulangan Bencana											
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	Terbentuknya DesaTangguh Bencana	desa	4	2	2	1	1	1	1,088 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian)	Kegiatan	4	4	3	3	3	3			
	Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
INDIKATOR SDG's	11.6.1(a). Persentase Sampah yang Tertangani										
1.Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pengelolaan Persampahan	Sampah yang tertangani	%	62.39	68.94	69.17	68.15	70.07	73.91	7,902 .741	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
INDIKATOR SDG's	11.6.1(b). Persentase Taman Kondisi Baik										
1.Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan											
Pembangunan dan Pengelolaan Taman	Taman dalam kondisi baik	lokasi	29	33	33	33	37	43	9,266 .518	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas										
INDIKATOR SDG's	11.7.1(a). Persentase Taman Kondisi Baik										
1.Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan											
Pembangunan dan Pengelolaan Taman	Taman dalam kondisi baik	lokasi	29	33	33	33	37	43	9,266 .518	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
INDIKATOR SDG's	11.b.1.Jumlah desa yang memiliki dokumen PRB										
1.Program Penanggulangan Bencana											
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	Terbentuknya DesaTangguh Bencana	desa	4	2	2	1	1	1	1,088 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian)	Kegiatan	4	4	3	3	3	3			
INDIKATOR SDG's	11.b.2.*Dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi										
1.Program Penanggulangan Bencana											
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	dokumen	1	1	1	1	1	1	14,420 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	bulan	12	12	12	12	12	12			
Tujuan XII : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.											
	Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
INDIKATOR SDG's	12.4.1(a) Persentase usaha atau kegiatan yang taat lingkungan										
1.Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran											
Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha / kegiatan yang dilakukan pengawasan	unit usaha/ kegiatan	50	40	70	80	90	105	493 .520	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
INDIKATOR SDG's	12.4.2(a) Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan										
1.Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran											
Pengawasan Kebijakan Pemantauan &Pemulihan Kualitas Lingkungan	Jenis kegiatan yang dilakukan	kegiatan	6	6	6	6	6	6	1,843 .860	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
INDIKATOR SDG's	12.6.1(a) Jumlah sertifikasi produk pangan industri rumah tangga										
1.Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan											
Pengawasan dan pemantauan peredaran OMKABA	Terlaksananya sertifikasi pangan industri rumah tangga (PIRT)	lokasi	50	50	50	50	50	50	216 .045	APBD	Dinas Kesehatan
	Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
INDIKATOR SDG's	12.7.1(a) Pengembangan padi menuju beras premium organik										
1.Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan											
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pengembangan padi menuju beras premium organik	Ha	0	200	200	200	200	200	5,589 .429	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	Sertifikasi organik	paket	0	0	0	1	0	0			
TUJUAN XIII : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya											
	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
INDIKATOR SDG's	13.1.1.Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana										
1.Program Penanggulangan Bencana											
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	Terbentuknya DesaTangguh Bencana	desa	4	2	2	1	1	1	1,088 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian)	Kegiatan	4	4	3	3	3	3			
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	dokumen	1	1	1	1	1	1	14,420 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	bulan	12	12	12	12	12	12			
INDIKATOR SDG's	13.1.2.*Cakupan penanggulangan bencana										
1.Program Penanggulangan Bencana											
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat	Terbentuknya DesaTangguh Bencana	desa	4	2	2	1	1	1	1,088 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian	Kegiatan	4	4	3	3	3	3			
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	dokumen	1	1	1	1	1	1	14,420 .000	APBD	BPBD
	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi	bulan	12	12	12	12	12	12			
Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemadaman kebakaran	Terselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran	orang	400	250	150	150	150	200	182 .000	APBD	BPBD
Penanganan kedaruratan dan logistik	Terfasilitasinya upah harian tenaga PBK non PNS	bulan	12	12	12	12	12	12	1,975 .000	APBD	BPBD
	Tertanganinya kejadian bencana, kebakaran dan tersedianya alat bantu penanganan bencana	bulan	12	12	12	12	12	12			
	Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan bencana	bulan	12	12	12	12	12	12			
Penyelenggaraan PUSDALOPS	Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengarah)	bulan	12	12	12	12	12	12	1,719.000	APBD	BPBD

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										
INDIKATOR SDG's	13.2.1.*Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis										
1.Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah											
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA serta KLHS	dokumen	0	0	10	0	0	0	414 .733	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
INDIKATOR SDG's	13.2.1(a) Jumlah Dokumen lingkungan yang diterbitkan										
1.Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran											
Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha / kegiatan yang dilakukan pengawasan	unit usaha/ kegiatan	50	40	70	80	90	105	493 .520	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengkajian Lingkungan	Dokumen lingkungan	dokumen	250	250	250	250	250	250	528 .360	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN XIV Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.											
	Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.										
INDIKATOR SDG's	14.2.1(a) Tersedianya dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
1.Program Perencanaan Penataan Ruang											
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci	Jumlah substansi dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	4	5	13	15	18	18	3,134 .381	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
INDIKATOR SDG's	14.2.1(b) Target persentase sarana prasarana TPI kondisi baik										
1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan											
Pengembangan sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan	Terlaksananya pembangunan/rehab TPI (bugel, karangwuni, trisik, congot)	unit	1	1	1	1	0	0	1,833 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tersedia dan tersalurkannya peralatan TPI	unit	0	0	0	4	4	4			
	Terlaksananya penyampaian sistem informasi pelelangan ikan	dokumen	0	0	1	1	1	1			
	Penataan TPI dan kawasan sentra nelayan (DED, FS, dll)	dokumen	0	0	1	0	0	1			
	Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya										
INDIKATOR SDG's	14.4.1.Jumlah operasi terpadu di perairan umum										
1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan											
Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan	Operasi terpadu di perairan umum	kali	5	7	5	5	5	5	5,150 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
INDIKATOR SDG's	14.6.1(a) Jumlah anggota kelompok masyarakat pengawas yang paham tentang perlindungan sumberdaya ikan yang										
1.Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan	Bimtek pokmaswas	orang	0	30	30	30	30	30	5,150 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
INDIKATOR SDG's	14.b.1.Jumlah perijinan usaha perikanan										
1.Program Peningkatan daya saing produk kelautan perikanan											
Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan	Terbitnya perijinan usaha perikanan	unit	750	1500	2500	2500	2500	1000	764 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDG's	14.b.1(a) Peningkatan modal usaha perikanan										
1.Program Peningkatan daya saing produk kelautan perikanan											
Pengembangan Usaha Perikanan	erlaksananya pengembangan kulon progo fish centre	paket	1	0	1	1	1	1	1,306 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDG's	14.b.1b.*Jumlah nelayan yang teregistrasi										
PROGRAM :Program Peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan											
Pemberdayaan Nelayan Kecil	Terselenggaranya pembinaan kelompok nelayan kecil	kelompok	7	7	7	7	7	7	627 .000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN XV Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.											
	Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
INDIKATOR SDG's	15.1.1(a) Indeks tutupan hutan										
1.Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup											
Peningkatan konservasi lingkungan hidup	Pohon perindang jalan	batang	200	150	150	200	200	200	1,843 .540	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.										
INDIKATOR SDG's	15.7.1(a) Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP										
PROGRAM :Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran											
Penanganan kasus lingkungan Hidup	Kasus lingkungan hidup yang ditangani	kasus	10	10	10	12	14	15	278 .130	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN XVI Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.											
	Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
INDIKATOR SDG's	Capaian penanganan konflik sosial										
1.Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat											
Pembinaan keamanan daerah	Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan pertahanan wilayah, komunikasi sosial, bakti sosial, karya bakti, FKDM, Kominda, PKS, Forkompimda, PKBN	fasilitasi	8	8	8	8	8	8	3,004 .687	APBD	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
INDIKATOR SDG's	16.2.1 Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak										
1.Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	36	36	36	36	36	36	494 .760	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	orang	0	100	105	110	115	120			
	Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO	kel	0	0	0	13	37	61			
Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan	forum	13	13	13	13	13	13	430 .480	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	kecamatan	12	12	12	12	12	12			
	Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Perbup	1	1	1	1	1	1			
	Terlatihnya kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	orang	220	220	220	220	220	220			
	Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
INDIKATOR SDG's	Cakupan penegakan hukum										
1.Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah											
Pengawasan penertiban dan operasi non yustisi	Terselenggaranya monitoring, pengawasan, penegakan KTR dan cukai rokok	kali	50	55	60	65	70	70	1,474 .110	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terbinanya dusun sapta tertib	dusun	12	12	12	12	12	12			
	Terselenggaranya operasi non yustisi	kali	100	110	115	120	125	125			
Penyidikan dan penindakan pelanggaran perda dan ketentuan perundang-undangan	Penyidikan dan penindakan pro yustisia kasus pelanggaran perda	kasus	525	550	575	575	600	600	1,878 .280	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
	Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
INDIKATOR SDG's	16.5.1.(a).*Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)										
1.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal											
Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	OPD	42	42	42	42	42	42	1,614 .000	APBD	Inspektorat Daerah
	Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	OPD	4	4	4	4	4	4			
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP	OPD	42	42	42	42	42	42			
	Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP	OPD	42	42	42	42	42	42			
	Tersedianya Laporan Saber Pungli	Dokumen	4	4	4	4	4	4			
	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
INDIKATOR SDG's	16.6.1.(a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK)										
1.Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	dokumen	2	2	2	2	2	2	461 .889	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis.	dokumen	5	23	23	23	23	23	81 .714	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sinkronisasi data realisasi APBD	Teridentifikasi dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD serta terselenggaranya koordinasi antar SKPD dan SKPKD	SKPD	45	45	45	45	45	45	69 .742	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan SIMDA	Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat.	SKPD	45	45	45	45	45	45	541 .346	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
INDIKATOR SDG's	16.6.1.(b) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah										
1.Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan Kelembagaan											
Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM	Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev Penerapan SPM	dokumen	2	2	2	2	2	2	224 .443	APBD	Sekretariat Daerah
2.Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah											
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran/Akhir Masa Jabatan	dokumen	1	1	1	1	1	2	451 .404	APBD	Sekretariat Daerah
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	dokumen	2	2	2	2	2	2	434 .602	APBD	Sekretariat Daerah
3.Program Pengendalian Pembangunan Daerah											
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah	dokumen	5	5	5	5	5	5	540 .104	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
INDIKATOR SDG's	16.6.1.(d) Indeks Reformasi Birokrasi										
1.Program Perumusan dan pengendalian kebijakan penguatan kelembagaan											
Monev Pelaksanaan RB dan SOP	Dokumen monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SOP	dokumen	0	1	2	2	2	2	97 .452	APBD	Sekretariat Daerah
INDIKATOR SDG's	16.6.2.(a) Nilai indeks kepuasan masyarakat										
1.Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik											
Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Dokumen pedoman pelayanan publik	dokumen	1	1	1	1	1	1	491 .499	APBD	Sekretariat Daerah
	Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK BLUD	dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi inovasi pelayanan publik	dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	unit	42	42	42	42	42	42			
2.Program Peningkatan Pelayanan Perizinan											
Pelayanan administrasi perizinan	Terbitnya izin	bulan	12	12	12	12	12	12	1,042 .434	APBD	Sekretariat Daerah
	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
INDIKATOR SDG's	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender											
Penguatan Pengarustamaan Gender	Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten	dokumen	1	1	1	1	1	1	247 .520	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA	laporan	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG	kali	1	1	1	1	1	1			
	Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG	kali	0	0	48	48	48	48			
INDIKATOR SDG's	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III).										
1.Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender											
Penguatan Pengarustamaan Gender	Tersusunnya profil pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten	dokumen	1	1	1	1	1	1	247 .520	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA	laporan	1	1	1	1	1	1			
	Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG	kali	1	1	1	1	1	1			
	Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG	kali	0	0	48	48	48	48			
	Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
INDIKATOR SDG's	16.9.1.Prosentnase anak yang memiliki akta kelahiran										
1.Program Pelayanan Pencatatan Sipil											
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Akta Kelahiran	Dokumen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	446 .000	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Akta Kelahiran		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
	Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
INDIKATOR SDG's	16.10.2.(a).Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.										
1.Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik											
Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi	Laporan informasi dan pengaduan masyarakat	bulan	12	12	12	12	12	12	643 .657	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
INDIKATOR SDG's	16.10.2.(b).*Persentase tindak lanjut penanganan sengketa informasi publik										
1.Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik											
Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi	Laporan informasi dan pengaduan masyarakat	bulan	12	12	12	12	12	12	643 .657	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
INDIKATOR SDG's	16.10.2.(c)*Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.										
1.Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi	Laporan informasi dan pengaduan masyarakat	bulan	12	12	12	12	12	12	643 .657	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
TUJUAN XVII Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.											
	Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
INDIKATOR SDG's	17.1.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)										
1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah											
Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya database potensi pajak/retribusi	dokumen	1	1	1	1	1	1	707 .225	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersusunnya target pendapatan daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Forkom pendapatan se-DIY	kali	-	2	2	2	2	2			
Evaluasi Pendapatan Daerah	Terverifikasinya laporan pendapatan OPD	OPD	17	17	17	17	17	17	173 .006	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan	dokumen	-	12	12	12	12	12			
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah	bulan	-	12	12	12	12	12	331 .321	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengembangan Pendapatan Daerah	Sosialisasi pendapatan daerah	kali	-	16	16	16	16	16	1,121 .825	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah	dokumen	-	4	4	4	4	4			
2.Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah											
Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah	kecamatan	-	3	3	3	3	3	544 .076	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah	Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan Terlegalisasinya SPPT PBB	jenis pajak	10	10	10	10	10	10	1,844 .747	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah	wajib pajak	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	2,700	4,122 .400	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pembaharuan Basis Data PBB P2	Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018	dokumen	8	8	8	8	8	8	999 .263	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pelayanan dan Validasi Data BPHTB	Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB	bulan	12	12	12	12	12	12	1,001 .642	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Data Subyek Pajak	wajib pajak	400	400	400	400	400	400	16,972 .339	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Data Obyek Pajak	wajib pajak	-	860	1,200	1,200	1,300	1,400			
Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017	desa	88	88	88	88	88	88	670 .035	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2	bulan	12	12	12	12	12	12			
	Terlaksananya intensifikasi pajak daerah	jenis pajak	10	10	10	10	10	10			
INDIKATOR SDG's	17.1.1.(a) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah										
1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah											
Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya database potensi pajak/retribusi	dokumen	1	1	1	1	1	1	707 .225	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersusunnya target pendapatan daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Forkom pendapatan se-DIY	kali	-	2	2	2	2	2			
Evaluasi Pendapatan Daerah	Terverifikasinya laporan pendapatan OPD	OPD	17	17	17	17	17	17	173 .006	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan	dokumen	-	12	12	12	12	12			
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah	bulan	-	12	12	12	12	12	331 .321	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pengembangan Pendapatan Daerah	Sosialisasi pendapatan daerah	kali	-	16	16	16	16	16	1,121 .825	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah	dokumen	-	4	4	4	4	4			
2.Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah											
Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah	kecamatan	-	3	3	3	3	3	544 .076	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah	Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan Terlegalisasinya SPPT PBB	jenis pajak	10	10	10	10	10	10	1,844 .747	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah	wajib pajak	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	2,700	4,122 .400	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pembaharuan Basis Data PBB P2	Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018	dokumen	8	8	8	8	8	8	999 .263	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pelayanan dan Validasi Data BPHTB	Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB	bulan	12	12	12	12	12	12	1,001 .642	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Data Subyek Pajak	wajib pajak	400	400	400	400	400	400	16,972 .339	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Data Obyek Pajak	wajib pajak	-	860	1,200	1,200	1,300	1,400			
Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017	desa	88	88	88	88	88	88	670 .035	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2	bulan	12	12	12	12	12	12			
	Terlaksananya intensifikasi pajak daerah	jenis pajak	10	10	10	10	10	10			
	Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
INDIKATOR SDG's	17.6.2.(a) Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menghubungkan antar OPD dan Desa.										
1.Program Pengembangan Aplikasi Informatika											
Pengelolaan Jaringan Komputer, Server dan Koneksi Internet	Terkelolanya ruang server, layanan koneksi internet untuk 42 Perangkat Daerah dan 2 ruang publik, koneksi antar Perangkat Daerah (Local Loop)	bulan	12	12	12	12	12	12	11,812 .076	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan Jaringan Komputer Fiber Optic (FO)	paket	-	1	1	-	-	-			
	Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
INDIKATOR SDG's	17.9.1.(a) Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer										
1.Program Pendayagunaan Aparatur											
Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu	Terselenggaranya alih fungsi JFT	orang JFT	865	100	100	100	100	100	344 .465	APBD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah	orang	57	30	30	30	30	30			
2.Program Pengembangan Aparatur											
Penyusunan formasi dan pengadaan PNS	Tersusunnya formasi pegawai PNS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4,370 .166	APBD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terselenggaranya seleksi CPNS	orang CPNS	500	500	500	500	500	500			
INDIKATOR SDG's	17.9.1.(b) Persentase perangkat Daerah yang memiliki jabatan fungsional pranata komputer.										
1.Program Pendayagunaan Aparatur											
Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu	Terselenggaranya alih fungsi JFT	orang JFT	865	100	100	100	100	100	344 .465	APBD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah	orang	57	30	30	30	30	30			
2.Program Pengembangan Aparatur											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Penyusunan formasi dan pengadaan PNS	Tersusunnya formasi pegawai PNS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4,370 .166	APBD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terselenggaranya seleksi CPNS	orang CPNS	500	500	500	500	500	500			
INDIKATOR SDG's	17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional pranata komputer										
1.Program Pendayagunaan Aparatur											
Mutasi dan Alih Jabatan Fungsional Tertentu	Terselenggaranya alih fungsi JFT	orang JFT	865	100	100	100	100	100	344 .465	APBD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah	orang	57	30	30	30	30	30			
2.Program Pengembangan Aparatur											
Penyusunan formasi dan pengadaan PNS	Tersusunnya formasi pegawai PNS	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4,370 .166	APBD	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Terselenggaranya seleksi CPNS	orang CPNS	500	500	500	500	500	500			
INDIKATOR SDG's	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)										
1.Program Pelayanan Pencatatan Sipil											
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran	Dokumen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	159 .100	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen)	Dokumen	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	170 .400	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen)	Dokumen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen)	Dokumen	11	2	2	11	2	2			
INDIKATOR SDG's	17.19.2.(e) Jumlah data statistik dasar BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah										
1. Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data Informasi Statistik											
Penyusunan Data Statistik Daerah	analisis ekonomi makro	dokumen	1	1	1	1	1	1	867 .875	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's Kabupaten Sleman

TUJUAN 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
Target 1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.1	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Persentase KK miskin	Dinas Sosial	%	2017	9.35%	8.68%	8.50%	8.00%	Dinas Sosial
2.1	2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	%		79	82	85	88	Dinas Kesehatan
2.2	2.2 Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	orang	2017	-	-	-	-	Dinas Sosial
2.3	2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial	orang	2017	-	-	-	-	Dinas Sosial
3.1	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas Kesehatan	%		97	98	99	99.5	Dinas Kesehatan
3.2	3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan	Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	Dinas Kesehatan	%		100	100	100	100	Dinas kesehatan

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%									
3.3	3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun	Dinas P3AP2KB	%	2017	79,30	79,35	79,40	79,50	Dinas P3AP2KB
3.6	3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	DPUPKP	%	2017	97,87	100	100	100	DPUPKP
3.7	3.7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat	Dinas Pendidikan	%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	Dinas Pendidikan
3.8	3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat	Dinas Pendidikan	%	≤83,98%	≤83,99%	≤84%	≤84,01%	≤84,50%	Dinas Pendidikan
3.10	3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak)	Dinas Dukcapil	akte kelahiran		90	92,5	95	97,5	Dinas Dukcapil
		Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan)	Dinas Dukcapil	akte kelahiran		90	91	91,6	93	Dinas Dukcapil
4.1	4.1 Meningkatnya jumlah lokasi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD	desa	34 Destana	37 Destana	45 Destana	53 Destana	61 Destana	BPBD

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi	Dinas Sosial							Dinas Sosial
4.4	4.4 Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Jumlah sistem peringatan dini (EWS) kebencanaan	BPBD	sistem	20	20	20	20	20	BPBD
4.5	4.5 Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	4.5.a. Jumlah lembaga tangguh bencana	BPBD	Desa dan Sekolah	34 Destana dan 46 SSB	37 Destana dan 52 SSB	45 Destana dan 60 SSB	53 Destana dan 68 SSB	61 Destana dan 76 SSB	BPBD
		4.5.b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	BPBD	Orang	7,918	8,548	9,408	10,268	11,128	BPBD
TUJUAN GLOBAL 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN										
1.1	1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Cakupan status balita gizi buruk	Dinas kesehatan	%		0.43	0.42	0.41	0.4	Dinas Kesehatan
2.1	2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Cakupan balita pendek dan sangat pendek	Dinas kesehatan	%	2017	12	11.5	11.2	11	Dinas kesehatan
2.3	2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas kesehatan	%		9	8.5	8	7.5	Dinas kesehatan
2.4	2.4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Dinas kesehatan	%		83	84	85	86	Dinas kesehatan

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
2.5	2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Jumlah produksi ikan konsumsi	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	kg	2017	52,529,920	61,460,100	71,908,320	84,132,750	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
3.1	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Luas sawah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	ha	2017	19,071	19,012	18,952	18,890	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
		luas lahan bukan sawah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	ha	2017	20,008	20,003	20,068	20,096	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
1.1	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Dinas kesehatan	per 100.000 KH		55.42	55.04	47.83	47.51	Dinas kesehatan
1.2	1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas kesehatan	%		97	98	99	99.5	Dinas kesehatan
1.3	1.3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Dinas kesehatan	%		97	98	99	99.5	Dinas kesehatan
2.1	2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Dinas kesehatan	per 1.000 KH		4.23	4.13	4.03	3.94	Dinas kesehatan
2.2	2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar	Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	Dinas kesehatan	%		100	100	100	100	Dinas kesehatan

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).									
3.1	3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	Dinas kesehatan	%		<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	Dinas kesehatan
3.2	3.2 Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Angka penemuan penderita TB Paru (CDR)	Dinas kesehatan	%		30	32	35	40	Dinas kesehatan
3.3	3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Angka kesakitan Malaria/ 1000 penduduk (API)	Dinas kesehatan	(0/00)		<1	<1	<1	<1	Dinas kesehatan
3.5	3.5 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	Dinas kesehatan	rate		≥3	≥3	≥3	≥3	Dinas kesehatan
4.1	4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun	Dinas kesehatan	%		6.5	5.4	5.3	5.2	Dinas kesehatan
4.2	4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Pelayanan Penderita Hipertensi	Dinas kesehatan	%		100	100	100	100	Dinas kesehatan
4.4	4.4 Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di puskesmas	Dinas kesehatan							Dinas kesehatan

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
5.1	5.1 Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).	Penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan	BNNK, Dinas Kesehatan							BNNK, Dinas Kesehatan
6.1	6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.	Jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas	POLRES	JML	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	POLRES
				MD	161	161	161	161	161	
				LB	3	3	3	3	3	
				LR	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	
7.1	7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas P3AP2KB	%	2017	2	2	2	2	Dinas P3AP2KB
7.2	7.2 Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara	Dinas P3AP2KB	%	2017	79,30	79,35	79,40	79,50	Dinas P3AP2KB
7.3	7.3 Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas P3AP2KB	%	2017					Dinas P3AP2KB
8.2	8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	%		79	82	85	88	Dinas Kesehatan
TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
1.4	1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Dinas Pendidikan	%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	menjadi 114,09% (2015: 108%).									
1.5	1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	APK SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	Dinas Pendidikan
1.7	1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan	tahun	10.36	10.39	10.42	10.45	10.48	Dinas Pendidikan
2.1	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	%	78.23	78.26	78.29	78.32	78.35	Dinas Pendidikan
4.1	4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	Dinas Pendidikan	.		.	.			Dinas Pendidikan
4.2	4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	Dinas Pendidikan	.		.	.			Dinas Pendidikan
TUJUAN GLOBAL 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN										
1.1	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas P3AP2KB	Perda , Perbub, SK Bupati		.	.	.	.	Dinas P3AP2KB
2.1	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Dinas P3AP2KB	anak		.	.	.	.	Dinas P3AP2KB

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
2.2	2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas P3AP2KB	%	2017	100	100	100	100	Dinas P3AP2KB
4.1	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Persentae keterwakilan perempuan di DPR	Dinas P3AP2KB	%	2017	30	30	30	30	Dinas P3AP2KB
4.2	4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKPP	%		.	.			BKPP
5.1	5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	unmeet need kebutuhan ber-KB	Dinas P3AP2KB	%	2017	.	.	.	.	Dinas P3AP2KB
TUJUAN GLOBAL 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
1.2	1.2 Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	kondisi prasarana penyediaan air baku (jumlah prasarana penyediaan air baku yang terkelola dengan baik dibagi dengan total jumlah prasarana penyediaan air baku)	Dinas DPUPKP	%	2017	75	80	85	85	Dinas DPUPKP
2.1	2.1 Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Cakupan bangunan (rumah dan institusi) yang bebas jentik nyamuk	Dinas kesehatan	%		.				Dinas kesehatan
2.2	2.2 Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM	Dinas kesehatan	%		15	20	25	30	Dinas kesehatan

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).									
3.1	3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (IPAL komunal)	DLH	SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	DLH
				SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	
				lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiyata 1 lokasi	
				unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	
3.2	3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	tersedianya sarana prasana pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH	-	pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja 1 unit	Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali	Pelaksanaan pelatihan sedot lumpur tinja IPAL Komunal 4 kali ; Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali; Pelaksanaan FGD pengelolaan IPAL Komunal 6 kali	Pengelolaan IPLT selama 12 bulan	Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali	DLH
3.3	3.3 Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	Terkelolanya kualitas air bersih, mata air, badan air, air hujan, tanah pertanian, air embung, air limbah (Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup)	DLH	titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	DLH
				titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	
				titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	
				lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	
				titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan 30 titik	
				titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	
				usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	
		Embung dan Sungai Terkelola Dengan Baik	DPUPKP	%	2017	78	79	80	82	DPUPKP
3.4	3.4 Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku	Terlaksananya gerakan Kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai	DLH	kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	DLH
				lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi	

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	mutu rata-rata air sungai kelas II.			sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	
				kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai 2 kali	
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	DPUPKP	%	2017	87	88	89	90	DPUPKP
4.2	4.2 Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser- ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian (Jumlah debit yang tersedia dibagi debit yang dibutuhkan x 100 %)	DPUPKP	%	2017	78	78	79	80	DPUPKP
5.7	5.7 Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang- ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke- mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar- wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan	Embung dan Sungai Terkelola Dengan Baik	DPUPKP	%	2017	78	79	80	82	DPUPKP

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.									
6.4	6.4 Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.	pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH	DLH	batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 1.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 1.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 1.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 1.000 batang	Pada kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan Kegiatan Konservasi SDA dan Pengendalian kerusakan Sumber-sumber Air dan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
TUJUAN GLOBAL 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA										
TUJUAN GLOBAL 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										
4.1	4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.	Jumlah penganggur	Dinas Tenaga Kerja	%	5.78	5.8	5.6	5.5	5.4	Dinas Tenaga Kerja
8.2	8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	orang		4,323,000	4,561,000	4,834,000	5,149,000	Dinas Pariwisata
TUJUAN GLOBAL 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
1.1	1.1. Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	Cakupan Pembangunan Jalan dan Jembatan	DPUPKP	%	2017	27.735	28,180	29,400	30,800	DPUPKP
		Proporsi Drainase dan Gorong-Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	DPUPKP	%	2017	48.9	49	50	52	DPUPKP
		Cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPUPKP	%	2017	35.86	36.53	37.75	38.42	DPUPKP
		Cakupan Ketersediaan Data Base Jalan dan Jembatan	DPUPKP	%	2017	100	100	100	100	DPUPKP
		Proporsi Sarana Prasarana Kebinamargaan Dalam Kondisi Baik	DPUPKP	%	2017	96	98	98	98	DPUPKP
3.1			DLH	kali/kendaraan	lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali	lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali	lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali	lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali	lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali	DLH

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	3.1. Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.	Jumlah kendaraan yang lulus melakukan uji emisi kendaraan bermotor			dengan 80 kendaraan dinas	dengan 80 kendaraan dinas	dengan 80 kendaraan dinas	dengan 80 kendaraan dinas	dengan 80 kendaraan dinas	
				kali/kendaraan	uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	
TUJUAN GLOBAL 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA										
1.2	1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Persentase KK miskin	Dinas Sosial	%	2017	9.35%	8.68%	8.50%	8.00%	Dinas Sosial
TUJUAN GLOBAL 11. MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN										
1.1	1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.	Ketersediaan Rumah Layak Huni	DPUPKP	%	2017	98.5	98.75	99	99.25	DPUPKP
2.1	2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan	%		26	24	25	27	Dinas Perhubungan
5.1	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	5.1.a. Jumlah lembaga tangguh bencana	BPBD	Desa dan Sekolah	34 Destana dan 46 SSB	37 Destana dan 52 SSB	45 Destana dan 60 SSB	53 Destana dan 68 SSB	61 Destana dan 76 SSB	BPBD
		5.1.b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	BPBD	Orang	7,918	8,548	9,408	10,268	11,128	BPBD
5.2	5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).	5.2 Jumlah lembaga tangguh bencana	BPBD	Desa dan Sekolah	34 Destana dan 46 SSB	37 Destana dan 52 SSB	45 Destana dan 60 SSB	53 Destana dan 68 SSB	61 Destana dan 76 SSB	BPBD
5.3	5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	5.3 Prosentase sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi baik	BPBD	%	90	67	71	75	78	BPBD
6.1	6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada	Pelayanan sampah perumahan dan niaga	DLH	m3/hari	Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	DLH

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	tahun 2019 (2013: 46%).									
7.1	7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Persentase luasan RTH	DLH	m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan)	Penataan Lapangan Denggung seluas 6.000 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sumberejo seluas 2.000 m2			Pada pencapaian Tahun 2017 diperoleh data penataan RTH yang dikelola oleh DLH sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah 12.343 m2 dan Sleman bukan kota metropolitan
				m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan) seluas 1.450 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo seluas 500 m2	Penataan RTH seluas 18.000 m2	Penataan RTH seluas 18.000 m2	
				m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul	Pembangunan Taman Selokan Mataran seluas 450 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Lap. Raden Ronggo Kalasan seluas 2.182 m2			
				m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping	Pembangunan Taman Kencana Desa Kalitirto seluas 250 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto seluas 300 m2			
				m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi		Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur 450 m2			
				m2	Pembangunan Taman Seturan		Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah 1.000 m2			
				m2	Pembangunan Taman Ngancar		Penataan Taman Denggung 2.500 m2			
				m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan		Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan 2) seluas 1.450 m2			
				m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda		Penataan RTH Lingkungan Kecamatan Depok 2.000 m2			
				m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon		Penataan Embung Ketingan 22.150 m2			
				m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon		Pembangunan Taman Colombo 130 m2			
							Pembangunan Taman Beran - Ngancar 265 m2			
TUJUAN GLOBAL 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
Tujuan Global 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										
1.1	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat	1.1.a. Jumlah lembaga tangguh bencana	BPBD	Desa dan Sekolah	34 Destana dan 46 SSB	37 Destana dan 52 SSB	45 Destana dan 60 SSB	53 Destana dan 68 SSB	61 Destana dan 76 SSB	BPBD
		1.1.b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	BPBD	Orang	7,918	8,548	9,408	10,268	11,128	BPBD

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian 2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab Pelaksana
	nasional dan daerah hingga tahun 2019.									
2.1	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3	DLH	usaha/ kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usha/kegiatan	DLH
				kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	
				kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	
				prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	
				batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	
TUJUAN GLOBAL 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
TUJUAN GLOBAL 15. MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI										
1.1	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.	Cakupan RTH yang terpelihara	DLH	lokasi	taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	DLH
				m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	
				m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	
				m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	
				m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	
				m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	
				m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	
				m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	
				m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
				m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	
				m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	
3.1	3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	bibit tanaman untuk pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas	DLH	batang	Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 2.000 batang	Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang	Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang	Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang	Bibit tanaman sekitar sumber air sebanyak 1.000 batang	DLH
TUJUAN GLOBAL 16. MENGUATKAN MASY YG INKLUSIF & DAMAI UTK PEMB. BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UTK SEMUA & MEMBANGUN KELEMBAGAAN YG EFEKTIF, AKUNTABEL & INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN										
1.1	1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Dinas P3AP2KB	%	2017	0,96	0,94	0,92	0,90	Dinas P3AP2KB
2.1	2.1 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Jumlah kekerasan terhadap Anak	Dinas P3AP2KB	anak	2017	.-	.-	.-	.-	Dinas P3AP2KB
3.1	3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang	Jumlah pelayanan bantuan hukum	Bagian Hukum	pelayanan bantuan hukum		-	-	-	-	Bagian Hukum

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.									
5.1	5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga : 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	BKAD	Opini B{K	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
5.2	5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga : 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Predikat Lakip Kabupaten	Bagian Organisasi	predikat	A	A	A	A	A	Bagian Organisasi
5.3	5.3 Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	BLP	%	100	100	100	100	100	BLP
5.4	5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Indeks Reformasi Birokrasi	Organisasi	predikat	B	B	B	B	A	Organisasi

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
5.5	5.5 Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	Organisasi	%	67.33	.				Organisasi
6.1	6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Persentase keterwakilan Perempuan di DPR	Dinas P3AP2KB	%	2017	30	30	30	30	Dinas P3AP2KB
6.2	6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	BKPP	%		.				BKPP
7.1	7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Jumlah akte lahir bagi Gakin	Dukcapil	akte kelahiran		400	300	150	100	Dukcapil
7.2	7.2 Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak)	Dinas Dukcapil	akte kelahiran		90	92,5	95	97,5	Dinas Dukcapil
		Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan)	Dinas Dukcapil	akte kelahiran		90	91	91,6	93	Dinas Dukcapil
8.1	8.1 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan	Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat/ pengaduan pelanggaran HAM	Bag. Hukum	jumlah aduan		.				Bag. Hukum

Kode Indikator	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	Indikator RAD (yang disepakati)	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	
	dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.									
8.3	8.3 Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.	Jumlah proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dat/ atau non ligitasi	Bag. Hukum	sengketa	1	.				Bag. Hukum
TUJUAN GLOBAL 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
9.1	9.1 Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga	Bagian Pemerintaha	Dokumen	2017	25	25	25	25	Bagian Pemerintahan

Matrik Program Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's Kabupaten Sleman

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
TUJUAN 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN										
INDIKATOR SDG's	**Persentase KK miskin**									
PROGRAM 1: Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1: Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE	kelompok	3	-	-	-	-	151.54	APBD	Dinas Sosial
	Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE	kelompok	6	-	-	-	-			
Kegiatan 2: Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi Keluarga Miskin Non Potensial (kesrakat) dan Lansia Rentan Sosial Ekonomi	Bimbingan Sosial bagi KK miskin non potensial	orang	90	90	60	60	60	388.23	APBD	Dinas Sosial
	Bimbingan Sosial bagi kelg. Lansia rentan sosial ekonomi	orang	300	300	300	300	300			
Kegiatan 3: Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP/KUBE)	Bimbingan teknis USEP-KUBE	orang	200	100	200	200	200	1,650.34	APBD	Dinas Sosial
	Evaluasi kelompok USEP-KUBE	kelompok	15	15	15	15	15			
	Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE	orang	-	80	140	160	180			
	Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE	kelompok	-	10	8	8	8			
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin	Pendistribusian beras RTS-PM	RTS-PM	-	66,534	66,534	66,534	66,534	2,161.91	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 5: Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial	Verifikasi dan validasi permohonan JPS	permohonan	-	500	500	500	500	580.83	APBD	Dinas Sosial
	Penyaluran bantuan JPS	permohonan	-	500	500	500	500			
PROGRAM 2: PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	KPM	50,862	50,862	48,807	48,807	48,807	1,695.70	APBD	Dinas Sosial
	Forum PKH tingkat kabupaten	kali	12	12	12	12	12			
	Forum PKH tingkat kecamatan	kali	17	51	51	51	51			
Kegiatan 2: Penanganan dan Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat	Identifikasi/penertiban anjal	kali	51	47	47	47	47	1,874.45	APBD	Dinas Sosial
	Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jateng)	kali	24	20	20	20	20			
	Keamanan/penjagaan diperempatan/ pertigaan	kali	15	-	-	-	-			
	Bantuan orang terlantar/ ke-habisan bekal di wilayah DIY	orang	15	-	-	-	-			
	Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di luar Wilayah DIY	orang	60	-	-	-	-			
	Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal	orang	-	60	60	60	60			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3: Penyediaan Beras Penyangga (Buffer Stock)	Bantuan perawatan/ pengiriman ke RS	orang	10	10	15	15	15	1,406.34	APBD	Dinas Sosial
	Pengiriman orang terlantar ke RS/PS/PA	orang	10	10	20	20	20			
	Pemakaman bagi orang terlantar	orang	1	10	10	10	10			
	Pembelian pakaian lapangan	unit	20	-	-	-	-			
	Beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana	ton	8	-	8	8	8			
	Lokasi sarana dapur umum	lokasi	2	-	2	2	2			
	Bantuan Korban bencana meninggal dunia	orang	38	-	-	-	-			
	Bantuan Korban bencana rawat inap	orang	36	-	-	-	-			
	Bantuan Korban bencana rawat jalan	orang	30	-	-	-	-			
	Operasional gudang logistik	orang	6	-	6	6	6			
	Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana	KK	100	-	100	100	100			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	kali	2	-	2	2	2			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	orang	50	-	50	50	50			
	Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana	lokasi	2	-	2	2	2			
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin	Pendistribusian beras RTS-PM	RTS-PM	66,534	-	-	-	-	426.97	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 3: Pembinaan Anak Terlantar										
Kegiatan 1: Penanganan Penyelesaian Bayi/Anak Terlantar	Penanganan kasus bayi/anak terlantar/ABH	kasus	20	40	25	30	30	288.07	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 4: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma										
Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Pelatihan kerja non Institusi-onal sub kejuruan Tata Boga	orang	10	10	10	10	10	1,980.25	APBD	Dinas Sosial
	Pelatihan kerja non Institusi-onal sub kejuruan bordir	orang	10	10	10	10	10			
	Pelatihan kerja non Institusi-onal sub kejuruan teknisi HP	orang	10	10	10	10	10			
	Pendampingan usaha bagi penyandang cacat	orang	-	100	110	120	130			
	Pelatihan kerja non Institusi-onal sub kejuruan pranata cara boso jawa	orang	-	10	10	10	10			
	Pelatihan sablon (PUPM Kec. Pakem)	orang	-	20	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Bimtek Rajut (PUPM Desa Condongcatur Kec. Depok)	orang	-	20	-	-	-			
Kegiatan 2: Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Bantuan bagi penyandang cacat berat	orang	110	110	110	110	110	1,308.54	APBD	Dinas Sosial
	Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI	kali	-	25	30	30	30			
	Pengadaan & penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat	unit	24	13	24	24	24			
	Verifikasi data penca	kali	1	1	1	1	1			
	Operasional jamkesus	kali	1	-	-	-	-			
	Pembinaan disabilitas Kec. Minggir (PUPM)	kali	-	4	-	-	-			
	Pembinaan disabilitas Kec. Moyudan (PUPM)	kali	-	7	-	-	-			
PROGRAM 5: Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo										
Kegiatan 1: Pelayanan Dasar bagi Anak Asuh Panti Sosial	Pembinaan panti	kali	3	4	3	3	3	177.79	APBD	Dinas Sosial
	Penyaluran sebagian kebutuhan dasar anak panti di LKSA	LKSA	38	34	38	38	38			
PROGRAM 6: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1: Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pemilihan PSKS berprestasi (KT,PSM,LKS,TKSK,WKSBM)	kali	1	1	1	1	1	3,058.67	APBD	Dinas Sosial
	Jejaring karang taruna	kali	19	40	19	19	19			
	Jejaring IPSM&Panitia HKSN	kali	11	12	12	12	12			
	Jejaring Komda lansia	kali	6	12	12	12	12			
	Jejaring LK3	kali	12	12	12	12	12			
	Jejaring LK3	lembaga	3	3	3	3	3			
	Jejaring WKSBM	kali	17	34	34	34	34			
	Jejaring TKSK	kali	12	12	12	12	12			
	Jejaring LKKS	kali	12	12	12	12	12			
	Jejaring Komite PRS ABH	kasus	12	-	12	12	12			
	Jejaring PPDI Kab.Sleman	kali	12	-	12	12	12			
	Jejaring FKKADK Sleman	kali	6	-	12	12	12			
	Pengelolaan tetenger	lokasi	-	7	7	7	7			
	Bimtek sablon (PUPM Kec. Turi)	orang KT Bangunkerto	-	20	-	-	-			
	Pelatihan kerajinan fiber (PUPM Kec. Seyegan)	orang KT Margokaton	-	20	-	-	-			
PROGRAM 7: Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa										
Kegiatan 1: Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Penguatan kelembagaan TPK	desa	86	-	-	-	-	37.25	APBD	Dinas Sosial
	TPK award	kali	1	-	-	-	-			
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Penyelenggaraan sekretariat TKPKD dan forum	forum	1	-	-	-	-	125.62	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 3: Penyelenggaraan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)	Penguatan kelembagaan TPK	desa	-	86	86	86	86	1,238.95	APBD	Dinas Sosial
	TPK award	kali	-	1	1	1	1			
	Forum TPKD	bulan	-	12	12	12	12			
	Laporan monev pronangkis	dokumen	-	1	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pembinaan TPKD Kec. Depok	TPK Maguwoharjo	-	1	-	-	-			
	Penguatan kelembagaan TPK Kec. Cangkringan (PUPM)	desa	-	5	-	-	-			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	bulan		12	12	12	12	40,090.59	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	Jiwa		108.765	108.765	108.765	108.765			
	Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU – Pe-kerja Bukan Pnerima Upah)	jiwa		21.421	21.421	21.421	21.421			
	Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	kali		7	7	7	7			
	Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes	kali		5	5	5	5			
	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	puskesmas		25	25	25	25			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**									
PROGRAM 1: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma										
Kegiatan 1: Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Bantuan bagi penyandang cacat berat	orang	110	110	110	110	110	1,308.54	APBD	Dinas Sosial
	Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI	kali	-	25	30	30	30			
	Pengadaan & penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat	unit	24	13	24	24	24			
	Verifikasi data penca	kali	1	1	1	1	1			
	Operasional jamkesus	kali	1	-	-	-	-			
	Pembinaan disabilitas Kec. Minggir (PUPM)	kali	-	4	-	-	-			
	Pembinaan disabilitas Kec. Moyudan (PUPM)	kali	-	7	-	-	-			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat**									
PROGRAM 1: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	KPM	50,862	50,862	48,807	48,807	48,807	1,695.70	APBD	Dinas Sosial
	Forum PKH tingkat kabupaten	kali	12	12	12	12	12			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Forum PKH tingkat kecamatan	kali	17	51	51	51	51			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	bulan		12	12	12	12	40,090.59	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	Jiwa		108.765	108.765	108.765	108.765			
	Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU – Pe-kerja Bukan Pnerima Upah)	jiwa		21.421	21.421	21.421	21.421			
	Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	kali		7	7	7	7			
	Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes	kali		5	5	5	5			
	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	puskesmas		25	25	25	25			
Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat	Data PWS KIA	bl		12	12	12	12	15,394.06	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Audit Maternal Perinatal	kl		6	6	6	6			
	Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	kl		3	3	3	3			
	Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga	Pusk		25	25	25	25			
	FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu	Faskes		30	30	30	30			
	Evaluasi Manual Rujukan	kl		2	2	2	2			
	Faskes yg menyelenggarakan kelas ibu hamil	Faskes		45	45	45	45			
	Sosialisasi program-program KIA	kl		2	2	2	2			
	Kecamatan yg melaksanakan program PKK KB Kes	kec.		17	17	17	17			
	Peringatan Hari Lansia Nasional	kl		1	1	1	1			
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Pusk		25	25	25	25			
	Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan)	Desa		4	4	4	4			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani)	Desa		1	1	1	1			
	Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani)	Desa		1	1	1	1			
	Data PWS KB	bulan		12	12	12	12			
	Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Kec.		1	1	1	1			
	Buku Raport Kesehatanku	Buku		10000	10000	10000	10000			
	Anak Usia Pendidikan Dasar (Kelas I dan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar	per tahun		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization)**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										
Kegiatan 1: Peningkatan Imunisasi	Pelayanan Imunisasi bayi	orang		14	14	14	14	130.32	APBD	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Imunisasi batita	orang		12	12	12	12			
	Pelayanan Anak Sekolah	SD		556	556	556	556			
	Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin	orang		5	5	5	5			
	Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	orang		15	15	15	15			
INDIKATOR SDG's	**pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun**									
1. Program Pelayanan Kontrasepsi										
Kegiatan : Pelayanan KB medis Operasi	Penjaringan peserta KB	orang	80	Penjaringan KB MOW dan MOP (160 orang)	Penjaringan KB MOW dan MOP (160 orang)	Penjaringan KB MOW dan MOP (160 orang)	Penjaringan KB MOW dan MOP (160 orang)	398.71	APBD	Dinas P3AP2KB
	Rakor Peningkatan Partisipasi Pria dalam berKB MOP melalui forum motivator KB Pria tkt Kecamatan	orang	510	Penjaringan peserta Kb Paska persalinan dan Paska keguguran (225 orang)	Penjaringan peserta Kb Paska persalinan dan Paska keguguran (225 orang)	Penjaringan peserta Kb Paska persalinan dan Paska keguguran (225 orang)	Penjaringan peserta Kb Paska persalinan dan Paska keguguran (225 orang)			
INDIKATOR SDG's	**Persentase kawasan kumuh yang tertangani**									
PROGRAM 1: LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN										
Kegiatan 1: Penataan Kawasan Kumuh	Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luasan kawasan kumuh yang ada dikalikan 100 %	%	2017	97.87	100	100	100	110,708	APBD	DPUPKP
INDIKATOR SDG's	**Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat**									
PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN										
Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	siswa	2017	65000	65000	65000	65000	160,838	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)	pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	SD/ SMP Negeri/Swasta	616	616	616	616	616	1,012	APBD	Dinas Pendidikan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	dokumen	1	1	1	1	1	1,111	APBD	Dinas Pendidikan
	bantuan pendidikan bagi sis-wa miskin dan rentan miskin	siswa	3500	3500	3500	3500	3500			
	pembentukan satgas putus sekolah	tim	1	1	1	1	1			
	beasiswa retrieval	siswa	50	50	50	50	50			
Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SD	pengadaan buku induk SD	buku		1000	1000	1000	1000	23,605	APBD, DAK	Dinas Pendidikan
	pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD	unit		14	14	14	14			
	pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka-an, ruang guru, ruang UKS	paket		21	21	21	21			
	pengadaan peralatan pendi-dikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK	paket		65	65	65	65			
	pengadaan buku kepustakaan	paket		66	66	66	66			
INDIKATOR SDG's	**Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat**									
PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN										
Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	siswa	2017	65000	65000	65000	65000	160,838	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)	pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	SD/ SMP Negeri/Swasta	616	616	616	616	616	1,012	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	dokumen	1	1	1	1	1	1,111	APBD	Dinas Pendidikan
	bantuan pendidikan bagi sis-wa miskin dan rentan miskin	siswa	3500	3500	3500	3500	3500			
	pembentukan satgas putus sekolah	tim	1	1	1	1	1			
	beasiswa retrieval	siswa	50	50	50	50	50			
Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SMP	pengadaan buku induk SMP	buku		600	600	600	600	29,384	APBD, DAK	Dinas Pendidikan
	pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD	unit		169	169	169	169			
	pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka-an, ruang guru, ruang UKS	paket		9	9	9	9			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK	paket		7	7	7	7			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak)**									
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil	Akta Kelahiran	Dokumen	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000	1.831,897	APBD, DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin	Akta Kelahiran Bagi Gakin	Dokumen	150	400	300	150	100	1.406,182	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
INDIKATOR SDG's	**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan)**									
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil	Akta Kelahiran	Dokumen	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000	1.831,897	APBD, DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin	Akta Kelahiran Bagi Gakin	Dokumen	150	400	300	150	100	1.406,182	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
INDIKATOR SDG's	**Jumlah Desa Tangguh Bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perungangan Risiko Bencana	Desa tangguh bencana	desa	34 Destana	37 Destana	45 Destana	53 Destana	61 Destana	4,095	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi**									
PROGRAM 1: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1: Penyediaan Beras Penyangga (Buffer Stock)	Beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana	ton	8	-	8	8	8	1,406.34	APBD	Dinas Sosial
	Lokasi sarana dapur umum	lokasi	2	-	2	2	2			
	Bantuan Korban bencana meninggal dunia	orang	38	-	-	-	-			
	Bantuan Korban bencana rawat inap	orang	36	-	-	-	-			
	Bantuan Korban bencana rawat jalan	orang	30	-	-	-	-			
	Operasional gudang logistik	orang	6	-	6	6	6			
	Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana	KK	100	-	100	100	100			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	kali	2	-	2	2	2			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	orang	50	-	50	50	50			
	Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana	lokasi	2	-	2	2	2			
PROGRAM 2: Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	Sosialisasi penanganan akibat bencana	orang	100	-	-	-	-	366.52	APBD	Dinas Sosial
	Pelatihan ketrampilan bagi satgassos 3 lok @ 40 org	orang	120	-	-	-	-			
	Beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana	ton	-	4.5	-	-	-			
	Lokasi sarana dapur umum	lokasi	-	2	-	-	-			
	Operasional gudang logistik	orang	-	6	-	-	-			
	Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana	KK	-	100	-	-	-			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	kali	-	2	-	-	-			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	orang	-	100	-	-	-			
	Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana	lokasi	-	2	-	-	-			
	Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgassos	lokasi	-	2	-	-	-			
	Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgassos	orang	-	100	-	-	-			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah sistem peringatan dini (EWS) kebencanaan**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 2: Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan	Jumlah system peringatan dini (EWS) Kebencanaan	System	20	20	20	20	20	1,769	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**a. Jumlah lembaga tangguh bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perungangan Risiko Bencana	Desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana	desa dan sekolah	34 destana dan 46 ssb	37 destana dan 52 ssb	45 destana dan 60 ssb	53 destana dan 68 ssb	61 destana dan 76 ssb	4,095	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**b. Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Stimulasi dan sosialisasi penggunana sarpras pengurangan risiko bencana	Gladi lapang penanggulangan bencana	Orang	6,860	630	630	630	630	3,044		
Kegiatan 2: Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi	Pelatihan pengelolaan barak pengungsi dan pelatihan pengelolaan dapur umum	Orang	1,000	200	200	200	200	2,577		

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 3: Peningkatan kapsitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon paska bencana	Pelatihan pertukangan	Orang	58	30	30	30	30	1,096	-	-
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN										
INDIKATOR SDG's	**Cakupan status balita gizi buruk**									
PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1: Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Status Gizi (PSG)	kali		1	1	1	1	511.74	APBD	Dinas Kesehatan
	Desiminasi hasil PSG	kali		1	1	1	1			
	Monev Penerapan PMBA di wilayah Puskesmas	Puskesmas		25	25	25	25			
	Bimtek Perencanaan Program Percepatan penanganan Masalah Gizi	kali		2	2	2	2			
	Seminar Suplementasi Gizi	kali		1	1	1	1			
	Workshop Pemberian Makan Bayi dan Anak Balita (PMBA)	kali		2	2	2	2			
	Bimtek tatalaksana gizi buruk	kali		1	1	1	1			
	Bimtek surveilans gizi	kali		1	1	1	1			
	Bimtek pemantauan pertumbuhan	kali		2	2	2	2			
	Screening Anemia Remaja	remaja putri		500	500	500	500			
	Monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia	Puskesmas		25	25	25	25			
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bumil dan balita (PUPM Minggir)	orang		50	50	50	50			
	Pelatihan kader PMBA (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pemeriksaan Hb remaja Putri Anemia setelah pemberian TTD	pemeriksaan		100	100	100	100			
	Pengadaan Bahan Makanan Utk Pasien di TFC	Paket		20	20	20	20			
Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Bimtek Konselor ASI	kali		3	3	3	3	108.85	APBD	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	kali		1	1	1	1			
	Lomba Posyandu	kali		1	1	1	1			
	Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia	kali		1	1	1	1			
	Monev Program -program kesehatan KIA & Gizi	faskes		20	20	20	20			
	Lomba balita sehat (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan balita pendek dan sangat pendek**									

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1: Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Status Gizi (PSG)	kali		1	1	1	1	511.74	APBD	Dinas Kesehatan
	Desiminasi hasil PSG	kali		1	1	1	1			
	Monev Penerapan PMBA di wilayah Puskesmas	Puskesmas		25	25	25	25			
	Bimtek Perencanaan Program Percepatan penanganan Masalah Gizi	kali		2	2	2	2			
	Seminar Suplementasi Gizi	kali		1	1	1	1			
	Workshop Pemberian Makan Bayi dan Anak Balita (PMBA)	kali		2	2	2	2			
	Bimtek tatalaksana gizi buruk	kali		1	1	1	1			
	Bimtek surveilans gizi	kali		1	1	1	1			
	Bimtek pemantauan pertumbuhan	kali		2	2	2	2			
	Screening Anemia Remaja	remaja putri		500	500	500	500			
	Monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia	Puskesmas		25	25	25	25			
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bumil dan balita (PUPM Minggir)	orang		50	50	50	50			
	Pelatihan kader PMBA (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pemeriksaan Hb remaja Putri Anemia setelah pemberian TTD	pemeriksaan		100	100	100	100			
	Pengadaan Bahan Makanan Utk Pasien di TFC	Paket		20	20	20	20			
Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Bimtek Konselor ASI	kali		3	3	3	3	108.85	APBD	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	kali		1	1	1	1			
	Lomba Posyandu	kali		1	1	1	1			
	Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia	kali		1	1	1	1			
	Monev Program -program kesehatan KIA & Gizi	faskes		20	20	20	20			
	Lomba balita sehat (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	**prevalensi anemia pada ibu hamil**									
PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1: Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang	Sosialisasi Dalam Rangka Pemantauan Status Gizi (PSG)	kali		1	1	1	1	511.74	APBD	Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Desiminasi hasil PSG	kali		1	1	1	1			
	Monev Penerapan PMBA di wilayah Puskesmas	Puskesmas		25	25	25	25			
	Bimtek Perencanaan Program Percepatan penanganan Masalah Gizi	kali		2	2	2	2			
	Seminar Suplementasi Gizi	kali		1	1	1	1			
	Workshop Pemberian Makan Bayi dan Anak Balita (PMBA)	kali		2	2	2	2			
	Bimtek tatalaksana gizi buruk	kali		1	1	1	1			
	Bimtek surveilans gizi	kali		1	1	1	1			
	Bimtek pemantauan pertumbuhan	kali		2	2	2	2			
	Screening Anemia Remaja	remaja putri		500	500	500	500			
	Monev pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri anemia	Puskesmas		25	25	25	25			
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bumil dan balita (PUPM Minggir)	orang		50	50	50	50			
	Pelatihan kader PMBA (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pemeriksaan Hb remaja Putri Anemia setelah pemberian TTD	pemeriksaan		100	100	100	100			
	Pengadaan Bahan Makanan Utk Pasien di TFC	Paket		20	20	20	20			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif**									
PROGRAM 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Bimtek Konselor ASI	kali		3	3	3	3	108.85	APBD	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	kali		1	1	1	1			
	Lomba Posyandu	kali		1	1	1	1			
	Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia	kali		1	1	1	1			
	Monev Program -program kesehatan KIA & Gizi	faskes		20	20	20	20			
	Lomba balita sehat (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah produksi ikan konsumsi**									
Program Pengembangan Budidaya Perikanan										
Kegiatan 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	- Pembelian benih calon induk Lele	ekor	3700	7000	10000	3700	3700	675.00	APBD	Dinas Pertanian, pangan dan perikanan
	- Pembelian pakan ikan Lele	sak	100	200	135	100	100			
	- Pembelian benih calon induk Nila	kg	100	300	200	100	100			
	- Pembelian pakan ikan Nila	sak	100	300	175	100	100			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	- Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	angkatan	2	2	6	2	2	2,000.00	APBD	Dinas Pertanian, pangan dan perikanan
	- Demfarm Minapadi Kolam Dalam	Ha	1	2	2	1	1			
	- Magang Pembudidaya Ikan dan Petugas Perikanan	angkatan	1							
	- Demonstrasi minapadi PUPM Sendangsari dan Sendangrejo, Minggir	unit	2							
	Demplot pembesaran nila	m2		1000						
	Demplot pembesaran gurami sistem bosster	bak		10						
	benih ikan nila	kg		1200						
	Pakan ikan	zak		440						
	Demfarm udang galah padi	ha			1					
	Demfarm pembesaran nila dengan kincir	m2			500					
	Demplot minapadi	ha			1					
	Demplot budidaya ugadi	m2			5000					
	Demplot mina mendong	m2			5000					
	pelatihan pembibitan benih ikan	angkatan			1					
	pembinaan budidaya ikan	kg			280					
Kegiatan 3. Pengembangan Usaha dan Agribisnis Perikanan	- Pengelolaan administrasi usaha perikanan	bulan	12	12	12	12	12	500.00	APBD	Dinas Pertanian, pangan dan perikanan
	- Pembuatan buletin tiga bulanan OVA	eks	2000	2000	2000	2000	2000			
	- Temu usaha UPP	kali	1	1	1	1	1			
	Workshop pemasaran perikanan	kali			1					
Kegiatan 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	- Kolam penampungan hasil panen	buah	1					10,000.00	DAK dan APBD	Dinas Pertanian, pangan dan perikanan
	- Sarana prasarana perikanan	paket	1		1	1	1			
	- Perencanaan pembangunan /rehabilitasi BBI	paket	1							
	- Perencanaan pembangunan/rehabilitasi kolam, UPI , Pasar	paket	1							
	.- Perencanaan pembangunan kolam penampungan	paket	1							
	Budidaya ikan dengan padi (minapadi)	Ha		20						
	Budidaya patin di kolam	paket		4						
	Pembangunan unit pengolah ikan	paket		1						
	Bak percontohan budidaya gurami	paket		4						

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	pasar ikan	paket		1						
	Paket percontohan budidaya gurami	paket		4						
	perluasan dan pendalaman kolam budidaya	m2			5000					
	Pembangunan/rehabilitasi BBI	paket			1					
INDIKATOR SDG's	**Luas lahan Sawah dan luas lahan bukan sawah**									
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
Kegiatan 1. Pengelolaan Lahan dan Air	- Adminstrasi WISMP	Paket	1					10,000.00	APBD	Dinas Pertanian, pangan dan perikanan
	- Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT menuju pertanian ramah lingkungan) WISMP LOAN	angkatan	1							
	- Adminsitrasi Kegiatan	Paket	1							
	- Revitalisasi P3A	unit	4	3	3	3	3			
	- Badan Hukum P3A	P3A	5	3	3	3	3			
	- Data kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air	Dokumen	1	1	1	1	1			
	- Sertifikasi lahan Pertanian	Bidang	200	200						
	- Bak penampung air	Unit	5	5	10	10	10			
	- Traktor Roda 2 (rotari)	unit	6	5	5	5	5			
	- Traktor Roda 2 singkal	unit	5	15	5	5	5			
	- Kultivator	unit	5							
	- Sosialisasi LP2B	UPT BP3K	8							
	- pengawasan jaringan irigasi	Kecamatan	27							
	- peta detail lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Dokumen	1							
	Sekolah lapang tata guna air	angkatan		2	2	2	2			
	pompa semprot hama elektrik	unit		50						
	power threser	unit		6	6	6	6			
	evaluasi P3A	kali		1	1	1	1			
	Koordinasi keberlanjutan LP2B	kali		12	6	6	6			
	Verifikasi proposal infrastruktur PLA	dokumen		1	1	1	1			
	rice transplanter	unit			3	3	3			
	traktor dangir	unit			10	10	10			
	chopper	unit			10	10	10			
	pompa	unit		2	2	2	2			
	demplot reklamasi lahan tanaman kopi	ha		2	1					
	demplot reklamasi lahan tanaman kakao	ha		2	1					

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	data inventarisir alsin hortibun	paket		1						
	embung mini	unit		2						
	sumur ladang	unit		2						
	traktor dangir	unit		7						
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
INDIKATOR SDG's	**angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	bulan		12	12	12	12	40,090.59	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	Jiwa		108.765	108.765	108.765	108.765			
	Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU - Pekerja Bukan Pnerima Upah)	jiwa		21.421	21.421	21.421	21.421			
	Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	kali		7	7	7	7			
	Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes	kali		5	5	5	5			
	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	puskesmas		25	25	25	25			
Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat	Data PWS KIA	bl		12	12	12	12	15,394.06	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Audit Maternal Perinatal	kl		6	6	6	6			
	Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	kl		3	3	3	3			
	Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga	Pusk		25	25	25	25			
	FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu	Faskes		30	30	30	30			
	Evaluasi Manual Rujukan	kl		2	2	2	2			
	Faskes yg menyelenggarakan kelas ibu hamil	Faskes		45	45	45	45			
	Sosialisasi program-program KIA	kl		2	2	2	2			
	Kecamatan yg melaksanakan program PKK KB Kes	kec.		17	17	17	17			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Peringatan Hari Lansia Nasional	kl		1	1	1	1			
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Pusk		25	25	25	25			
	Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan)	Desa		4	4	4	4			
	Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani)	Desa		1	1	1	1			
	Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani)	Desa		1	1	1	1			
	Data PWS KB	bulan		12	12	12	12			
	Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Kec.		1	1	1	1			
	Buku Raport Kesehatanku	Buku		10000	10000	10000	10000			
	Anak Usia Pendidikan Dasar (Kelas I dan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar	per tahun		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	bulan		12	12	12	12	40,090.59	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	Jiwa		108.765	108.765	108.765	108.765			
	Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU - Pekerja Bukan Pnerima Upah)	jiwa		21.421	21.421	21.421	21.421			
	Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	kali		7	7	7	7			
	Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes	kali		5	5	5	5			
	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	puskesmas		25	25	25	25			
Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat	Data PWS KIA	bl		12	12	12	12	15,394.06	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Audit Maternal Perinatal	kl		6	6	6	6			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	kl		3	3	3	3			
	Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga	Pusk		25	25	25	25			
	FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu	Faskes		30	30	30	30			
	Evaluasi Manual Rujukan	kl		2	2	2	2			
	Faskes yg menyelenggarakan kelas ibu hamil	Faskes		45	45	45	45			
	Sosialisasi program-program KIA	kl		2	2	2	2			
	Kecamatan yg melaksanakan program PKK KB Kes	kec.		17	17	17	17			
	Peringatan Hari Lansia Nasional	kl		1	1	1	1			
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Pusk		25	25	25	25			
	Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan)	Desa		4	4	4	4			
	Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani)	Desa		1	1	1	1			
	Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani)	Desa		1	1	1	1			
	Data PWS KB	bulan		12	12	12	12			
	Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Kec.		1	1	1	1			
	Buku Raport Kesehatanku	Buku		10000	10000	10000	10000			
	Anak Usia Pendidikan Dasar (Kelas I dan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar	per tahun		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
INDIKATOR SDG's	**angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	bulan		12	12	12	12	40,090.59	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	Jiwa		108.765	108.765	108.765	108.765			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU - Pekerja Bukan Pnerima Upah)	jiwa		21.421	21.421	21.421	21.421			
	Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	kali		7	7	7	7			
	Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes	kali		5	5	5	5			
	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	puskesmas		25	25	25	25			
Kegiatan 2: Peningkatan kesehatan masyarakat	Data PWS KIA	bl		12	12	12	12	15,394.06	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Audit Maternal Perinatal	kl		6	6	6	6			
	Sosialisasi rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	kl		3	3	3	3			
	Bimtek Sistem pencatatan pelaporan data kesga	Pusk		25	25	25	25			
	FKTP mampu memberikan pelayanan ANC Terpadu	Faskes		30	30	30	30			
	Evaluasi Manual Rujukan	kl		2	2	2	2			
	Faskes yg menyelenggarakan kelas ibu hamil	Faskes		45	45	45	45			
	Sosialisasi program-program KIA	kl		2	2	2	2			
	Kecamatan yg melaksanakan program PKK KB Kes	kec.		17	17	17	17			
	Peringatan Hari Lansia Nasional	kl		1	1	1	1			
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Pusk		25	25	25	25			
	Kelas Ibu Hamil (PUPM Kalasan)	Desa		4	4	4	4			
	Pelatihan Pijat Bayi dan Syaraf (PUPM Kalasan Desa Taman Martani)	Desa		1	1	1	1			
	Pelatihan Baby Sitter dan Perawatan orang jompo (PUPM Kalasan Desa Tamanmartani)	Desa		1	1	1	1			
	Data PWS KB	bulan		12	12	12	12			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Kec.		1	1	1	1			
	Buku Raport Kesehatanku	Buku		10000	10000	10000	10000			
	Anak Usia Pendidikan Dasar (Kelas I dan VII) mendapat screening kesehatan sesuai standar	per tahun		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization)**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										
Kegiatan 1: Peningkatan Imunisasi	Pelayanan Imunisasi bayi	orang		14	14	14	14	130.32	APBD	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Imunisasi batita	orang		12	12	12	12			
	Pelayanan Anak Sekolah	SD		556	556	556	556			
	Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin	orang		5	5	5	5			
	Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	orang		15	15	15	15			
INDIKATOR SDG's	**Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dusun yang dipantau angka bebas jentik	lokasi		12	12	12	12	2,426.69	APBD	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan serologi Antraks dan pes,	sample		200	200	200	200			
	Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	lokasi		6	6	6	6			
	Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes	Lokasi, Lokasi		1 ,1	1 ,1	1 ,1	1 ,1			
	Audit kematian	kasus		6	6	6	6			
	Cetak Leaflet	leaflet		2000	2000	2000	2000			
	format laporan	rim		8	8	8	8			
	kartu PJB perumahan	lmbr		3000	3000	3000	3000			
	Form PJB 1	rim		8	8	8	8			
	Form PJB 2	rim		15	15	15	15			
	Pemantauan jentik oleh kader	kader		420	420	420	420			
	Pembelian perangkap	bh		400	400	400	400			
	Kantong tikus	bh		600	600	600	600			
	Umpan tikus	bh		1200	1200	1200	1200			
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	desa, anak		5 , 200	5 , 200	5 , 200	5 , 200			
	Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di lokasi penderita DBD	focus		380	380	380	380			
	Pengadaan Larvasida	botol		1250	1250	1250	1250			
	Pengadaan insektisida untuk focus DBD	liter		325	325	325	325			
	Pengadaan pakaian kerja lapangan(penyemprot)	buah		30	30	30	30			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	pengadaan mesin fogging	buah		6	6	6	6			
	Pengadaan Mikroskup Binokuler	bh		2	2	2	2			
	Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	kl		2	2	2	2			
	Workshop Petugas TB	angkatan		2	2	2	2			
	Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk	sasaran		250	250	250	250			
	Worshop Ispa Pneumonia	Angkatan		2	2	2	2			
	Bimtek Kolaborasi TB - HIV	angkatan		2	2	2	2			
	Uji cacingan	sampel , lokasi		100, 5	100, 5	100, 5	100, 5			
	Cetak TB 01,	lb		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 Anak	lb		500	500	500	500			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 02 Kartu berobat TB	lbr		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 03 Fasyankes	bk		50	50	50	50			
	TB 05	bk		100	100	100	100			
	TB 06	bk		100	100	100	100			
	Buku Pedoman TB,	bk		50	50	50	50			
	TB 04	bk		100	100	100	100			
	Backdrop	3								
	Reward Penemuan/ kesembuhan penderita TB	Orang		200	200	200	200			
	Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1	kali,		4	4	4	4			
	Pelatihan kader tanggap bo-cah (TABO) (PUPM Sleman)	orang		200	200	200	200			
	Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pokjanal Kecamatan, Pemberdayaan kader	Kec, Lokasi		10 , 6	10 , 6	10 , 6	10 , 6			
	Update knowledge Kusta	kali		1	1	1	1			
Kegiatan 2: Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulanagn KLB/wabah	Pelacakan kasus dari investi-gasi wabah dan analisanya	%		100	100	100	100	621.92	APBD	Dinas Kesehatan
	Pencatatan Pelaporan Kasus-kasus epidemiologi (KLB)	bulan		12	12	12	12			
	Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (kasus baru)	bulan		12	12	12	12			
	Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji	jamaah haji		965	965	965	965			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Data HIV AIDS dan PIMS	bulan		12	12	12	12			
	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat ttg HIV dan AIDS	lokasi		3	3	3	3			
	Jumlah Pertemuan LKB	kali		4	4	4	4			
	KolaborasiTB HIV	kali		1	1	1	1			
	VCT dan IMS Mobile	lokasi		6	6	6	6			
	Sosialisasi HIV dan AIDS	kali		9	9	9	9			
	Pertemuan LKB	puskesmas		25	25	25	25			
	Lokakarya WPA	Desa		5	5	5	5			
	Lokakarya Harm Reduction	kali		3	3	3	3			
	Lokakarya PMTS	kali		3	3	3	3			
	Penyuluhan Narkoba HIV dan AIDS (PUPM Depok)	desa		3	3	3	3			
	Penyuluhan Narkoba HIV dan AIDS (PUPM Moyudan desa Sumberrahayu)	desa		1	1	1	1			
	Penyuluhan Narkoba HIV dan AIDS (PUPM Pakem)	desa		5	5	5	5			
	Sosialisasi HIV/IMS (PUPM Ngaglik)	desa		6	6	6	6			
	Penyuluhan HIV dan AIDS (PUPM Cangkringan)	desa		5	5	5	5			
INDIKATOR SDG's	**Angka penemuan penderita TB Paru (CDR)**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dusun yang dipantau angka bebas jentik	lokasi		12	12	12	12	2,426.69	APBD	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan serologi Antraks dan pes,	sample		200	200	200	200			
	Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	lokasi		6	6	6	6			
	Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes	Lokasi, Lokasi		1 ,1	1 ,1	1 ,1	1 ,1			
	Audit kematian	kasus		6	6	6	6			
	Cetak Leaflet	leaflet		2000	2000	2000	2000			
	format laporan	rim		8	8	8	8			
	kartu PJB perumahan	lmbr		3000	3000	3000	3000			
	Form PJB 1	rim		8	8	8	8			
	Form PJB 2	rim		15	15	15	15			
	Pemantauan jentik oleh kader	kader		420	420	420	420			
	Pembelian perangkap	bh		400	400	400	400			
	Kantong tikus	bh		600	600	600	600			
	Umpan tikus	bh		1200	1200	1200	1200			
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	desa, anak		5 , 200	5 , 200	5 , 200	5 , 200			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di lokasi penderita DBD	focus		380	380	380	380			
	Pengadaan Larvasida	botol		1250	1250	1250	1250			
	Pengadaan insektisida untuk focus DBD	liter		325	325	325	325			
	Pengadaan pakaian kerja lapangan(penyemprot)	buah		30	30	30	30			
	pengadaan mesin fogging	buah		6	6	6	6			
	Pengadaan Mikroskup Binokuler	bh		2	2	2	2			
	Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	kl		2	2	2	2			
	Workshop Petugas TB	angkatan		2	2	2	2			
	Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk	sasaran		250	250	250	250			
	Worshop Ispa Pneumonia	Angkatan		2	2	2	2			
	Bimtek Kolaborasi TB - HIV	angkatan		2	2	2	2			
	Uji cacingan	sampel , lokasi		100, 5	100, 5	100, 5	100, 5			
	Cetak TB 01,	lb		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 Anak	lb		500	500	500	500			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 02 Kartu berobat TB	lbr		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 03 Fasyankes	bk		50	50	50	50			
	TB 05	bk		100	100	100	100			
	TB 06	bk		100	100	100	100			
	Buku Pedoman TB,	bk		50	50	50	50			
	TB 04	bk		100	100	100	100			
	Backdrop	3								
	Reward Penemuan/ kesembuhan penderita TB	Orang		200	200	200	200			
	Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1	kali,		4	4	4	4			
	Pelatihan kader tanggap bo-cah (TABO) (PUPM Sleman)	orang		200	200	200	200			
	Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pokjanal Kecamatan, Pemberdayaan kader	Kec, Lokasi		10 , 6	10 , 6	10 , 6	10 , 6			
	Update knowledge Kusta	kali		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Angka kesakitan Malaria/ 1000 penduduk (API)**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dusun yang dipantau angka bebas jentik	lokasi		12	12	12	12	2,426.69	APBD	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan serologi Antraks dan pes,	sample		200	200	200	200			
	Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	lokasi		6	6	6	6			
	Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes	Lokasi, Lokasi		1 ,1	1 ,1	1 ,1	1 ,1			
	Audit kematian	kasus		6	6	6	6			
	Cetak Leaflet	leaflet		2000	2000	2000	2000			
	format laporan	rim		8	8	8	8			
	kartu PJB perumahan	lmbr		3000	3000	3000	3000			
	Form PJB 1	rim		8	8	8	8			
	Form PJB 2	rim		15	15	15	15			
	Pemantauan jentik oleh kader	kader		420	420	420	420			
	Pembelian perangkap	bh		400	400	400	400			
	Kantong tikus	bh		600	600	600	600			
	Umpan tikus	bh		1200	1200	1200	1200			
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	desa, anak		5 , 200	5 , 200	5 , 200	5 , 200			
	Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di lokasi penderita DBD	focus		380	380	380	380			
	Pengadaan Larvasida	botol		1250	1250	1250	1250			
	Pengadaan insektisida untuk focus DBD	liter		325	325	325	325			
	Pengadaan pakaian kerja lapangan(penyemprot)	buah		30	30	30	30			
	pengadaan mesin fogging	buah		6	6	6	6			
	Pengadaan Mikroskup Binokuler	bh		2	2	2	2			
	Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	kl		2	2	2	2			
	Workshop Petugas TB	angkatan		2	2	2	2			
	Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk	sasaran		250	250	250	250			
	Worshop Ispa Pneumonia	Angkatan		2	2	2	2			
	Bimtek Kolaborasi TB - HIV	angkatan		2	2	2	2			
	Uji cacingan	sampel , lokasi		100, 5	100, 5	100, 5	100, 5			
	Cetak TB 01,	lb		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 Anak	lb		500	500	500	500			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	TB 02 Kartu berobat TB	lbr		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 03 Fasyankes	bk		50	50	50	50			
	TB 05	bk		100	100	100	100			
	TB 06	bk		100	100	100	100			
	Buku Pedoman TB,	bk		50	50	50	50			
	TB 04	bk		100	100	100	100			
	Backdrop	3								
	Reward Penemuan/ kesembuhan penderita TB	Orang		200	200	200	200			
	Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1	kali,		4	4	4	4			
	Pelatihan kader tanggap bo-cah (TABO) (PUPM Sleman)	orang		200	200	200	200			
	Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pokjanal Kecamatan, Pemberdayaan kader	Kec, Lokasi		10 , 6	10 , 6	10 , 6	10 , 6			
	Update knowledge Kusta	kali		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG'S	**CAKUPAN ACUTE FLACID PARALYSIS (AFP) RATE PER 100.000 PENDUDUK < 15 TAHUN**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dusun yang dipantau angka bebas jentik	lokasi		12	12	12	12	2,426.69	APBD	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan serologi Antraks dan pes,	sample		200	200	200	200			
	Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	lokasi		6	6	6	6			
	Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes	Lokasi, Lokasi		1 ,1	1 ,1	1 ,1	1 ,1			
	Audit kematian	kasus		6	6	6	6			
	Cetak Leaflet	leaflet		2000	2000	2000	2000			
	format laporan	rim		8	8	8	8			
	kartu PJB perumahan	lmbr		3000	3000	3000	3000			
	Form PJB 1	rim		8	8	8	8			
	Form PJB 2	rim		15	15	15	15			
	Pemantauan jentik oleh kader	kader		420	420	420	420			
	Pembelian perangkap	bh		400	400	400	400			
	Kantong tikus	bh		600	600	600	600			
	Umpan tikus	bh		1200	1200	1200	1200			
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	desa, anak		5 , 200	5 , 200	5 , 200	5 , 200			
	Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di lokasi penderita DBD	focus		380	380	380	380			
	Pengadaan Larvasida	botol		1250	1250	1250	1250			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pengadaan insektisida untuk focus DBD	liter		325	325	325	325			
	Pengadaan pakaian kerja lapangan(penyemprot)	buah		30	30	30	30			
	pengadaan mesin fogging	buah		6	6	6	6			
	Pengadaan Mikroskup Binokuler	bh		2	2	2	2			
	Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	kl		2	2	2	2			
	Workshop Petugas TB	angkatan		2	2	2	2			
	Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk	sasaran		250	250	250	250			
	Worshop Ispa Pneumonia	Angkatan		2	2	2	2			
	Bimtek Kolaborasi TB - HIV	angkatan		2	2	2	2			
	Uji cacingan	sampel , lokasi		100, 5	100, 5	100, 5	100, 5			
	Cetak TB 01,	lb		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 Anak	lb		500	500	500	500			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 02 Kartu berobat TB	lbr		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 03 Fasyankes	bk		50	50	50	50			
	TB 05	bk		100	100	100	100			
	TB 06	bk		100	100	100	100			
	Buku Pedoman TB,	bk		50	50	50	50			
	TB 04	bk		100	100	100	100			
	Backdrop	3								
	Reward Penemuan/ kesembuhan penderita TB	Orang		200	200	200	200			
	Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1	kali,		4	4	4	4			
	Pelatihan kader tanggap bo-cah (TABO) (PUPM Sleman)	orang		200	200	200	200			
	Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pokjanal Kecamatan, Pemberdayaan kader	Kec, Lokasi		10 , 6	10 , 6	10 , 6	10 , 6			
	Update knowledge Kusta	kali		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun**									
PROGRAM 1: Pencegahan dan Penanggulanagan penyakit tidak menular										
Kegiatan 1: Pencegahan resiko dan pengendalian penyakit tidak menular	Bimtek/Up date Knowledge PTM	kali		3	3	3	3	187.64	APBD	Dinas Kesehatan
	Validasi data P2 PTM	kali		4	4	4	4			
	Jambore Posbindu	kali		1	1	1	1			
	Bimtek Kader Posbindu	kali		1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Sosialisasi PTM dan Posbindu PTM	kali		5	5	5	5			
	Pelayanan Posbindu Dinas Kesehatan & Institusi	kali		15	15	15	15			
	Monitoring dan pembinaan P2PTM dan Posbindu	kali		20	20	20	20			
	Pelatihan Posbindu (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	**Pelayanan Penderita Hipertensi**									
PROGRAM 1: Pencegahan dan Penanggulanagan penyakit tidak menular										
Kegiatan 1: Pencegahan resiko dan pengendalian penyakit tidak menular	Bimtek/Up date Knowledge PTM	kali		3	3	3	3	187.64	APBD	Dinas Kesehatan
	Validasi data P2 PTM	kali		4	4	4	4			
	Jambore Posbindu	kali		1	1	1	1			
	Bimtek Kader Posbindu	kali		1	1	1	1			
	Sosialisasi PTM dan Posbindu PTM	kali		5	5	5	5			
	Pelayanan Posbindu Dinas Kesehatan & Institusi	kali		15	15	15	15			
	Monitoring dan pembinaan P2PTM dan Posbindu	kali		20	20	20	20			
	Pelatihan Posbindu (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di puskesmas**									
PROGRAM 3: Pencegahan dan Penanggulanagan penyakit tidak menular										
Kegiatan 1: Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan napza	Monitoring penanganan gangguan jiwa, napza dan kesehatan jiwa	kali		25	25	25	25	264.34	APBD	Dinas Kesehatan
	Bimtek Kesehatan Jiwa bagi Dokter, Psikolog dan Perawat	kali		3	3	3	3			
	Bimtek Kader DSSJ	kali		2	2	2	2			
	Bimtek TPKJM	kali		1	1	1	1			
	Bimtek Kader Sekolah Sehat Jiwa	kali		2	2	2	2			
	Sarasehan dalam rangka peringatan hari kesehatan mental sedunia	kali		1	1	1	1			
	Bimtek Pengelolaan Stress bagi karyawan	kali		2	2	2	2			
	Family gathering keluarga penderita gangguan jiwa	kali		1	1	1	1			
	Penanggulangan Penyalah-gunaan Napza & Penggalang-an Komitmen Kesehatan Jiwa	kali		1	1	1	1			
	Bimtek pengembangan pelayanan psikolog puskesmas	kali		4	4	4	4			
	Sosialisasi NAPZA	kl		10	10	10	10			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Sarasehan dalam rangka peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional)	kali		1	1	1	1			
	Bimtek bagi pengelola program Napza	kali		1	1	1	1			
	Penyuluhan Napza bagi anak sekolah	kali		2	2	2	2			
	Sosialisasi penanggulangan Napza (PUPM Ngaglik)	desa		6	6	6	6			
	Sosialisasi penanggulangan Napza (PUPM Minggir Desa Sendangmulyo)	desa		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan**									
PROGRAM 3: Pencegahan dan Penanggulanagan penyakit tidak menular										
Kegiatan 1: Peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dan pengendalian penyalahgunaan napza	Monitoring penanganan gangguan jiwa, napza dan kesehatan jiwa	kali		25	25	25	25	264.34	APBD	Dinas Kesehatan
	Bimtek Kesehatan Jiwa bagi Dokter, Psikolog dan Perawat	kali		3	3	3	3			
	Bimtek Kader DSSJ	kali		2	2	2	2			
	Bimtek TPKJM	kali		1	1	1	1			
	Bimtek Kader Sekolah Sehat Jiwa	kali		2	2	2	2			
	Sarasehan dalam rangka peringatan hari kesehatan mental sedunia	kali		1	1	1	1			
	Bimtek Pengelolaan Stress bagi karyawan	kali		2	2	2	2			
	Family gathering keluarga penderita gangguan jiwa	kali		1	1	1	1			
	Penanggulangan Penyalah-gunaan Napza & Penggalang-an Komitmen Kesehatan Jiwa	kali		1	1	1	1			
	Bimtek pengembangan pelayanan psikolog puskesmas	kali		4	4	4	4			
	Sosialisasi NAPZA	kl		10	10	10	10			
	Sarasehan dalam rangka peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional)	kali		1	1	1	1			
	Bimtek bagi pengelola program Napza	kali		1	1	1	1			
	Penyuluhan Napza bagi anak sekolah	kali		2	2	2	2			
	Sosialisasi penanggulangan Napza (PUPM Ngaglik)	desa		6	6	6	6			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Sosialisasi penanggulangan Napza (PUPM Minggir Desa Sendangmulyo)	desa		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas**									
PROGRAM 1 : PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT										
Kegiatan 3133: Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	Pelayanan Penegakan Hukum Lalu Lintas	Lalu Lintas	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,952,006	PNBP	Polres Sleman
INDIKATOR SDG's	**Total Fertility Rate (TFR), angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara, angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern**									
1. Program Keluarga Berencana										
Kegiatan 1 : Pembinaan Keluarga Berencana	Binkab (pembinaan PKB)	kali	6	Pembinaan Pelayanan KB lintas sektor 35 orang	Pembinaan Pelayanan KB lintas sektor 35 orang	Pembinaan Pelayanan KB lintas sektor 35 orang	Pembinaan Pelayanan KB lintas sektor 35 orang	2,127.40	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pembekalan Calon manten	kali	2	Rakor Tri Komponen 25 faskes	Rakor Tri Komponen 25 faskes	Rakor Tri Komponen 25 faskes	Rakor Tri Komponen 25 faskes			
	Konsolidasi dan Koordinasi program KB dengan institusi KB/Kader dan PKB	kali	1	Updating data KB 86 desa	Updating data KB 86 desa	Updating data KB 86 desa	Updating data KB 86 desa			
				Sofware pengembangan pendataan Keluarga 1 Paket	Sofware pengembangan pendataan Keluarga 1 Paket	Sofware pengembangan pendataan Keluarga 1 Paket	Sofware pengembangan pendataan Keluarga 1 Paket			
				Sofware rekap statistik rutin 1 paket	Sofware rekap statistik rutin 1 paket	Sofware rekap statistik rutin 1 paket	Sofware rekap statistik rutin 1 paket			
				Rakor Program KKBPK 17 Kec	Rakor Program KKBPK 17 Kec	Rakor Program KKBPK 17 Kec	Rakor Program KKBPK 17 Kec			
				Refitalisasi RR bagi petugas klinik KB penyuluh KB dan Kader 1 kali	Refitalisasi RR bagi petugas klinik KB penyuluh KB dan Kader 1 kali	Refitalisasi RR bagi petugas klinik KB penyuluh KB dan Kader 1 kali	Refitalisasi RR bagi petugas klinik KB penyuluh KB dan Kader 1 kali			
Kegiatan 2 : Peningkatan sarana dan Prasarana KB	Pemangunan Balai Penyuluh KB	Unit	4	Penjaringan peserta KB Bakti sosial 680 orang	Penjaringan peserta KB Bakti sosial 680 orang	Penjaringan peserta KB Bakti sosial 680 orang	Penjaringan peserta KB Bakti sosial 680 orang	21,499.08	APBD dan DAK	Dinas P3AP2KB
	Sarana Prasarana Balai Penyuluh	Paket	4	Bhakti sosial Pelayanan KB di non Puskesmas (840 orang)	Bhakti sosial Pelayanan KB di non Puskesmas (840 orang)	Bhakti sosial Pelayanan KB di non Puskesmas (840 orang)	Bhakti sosial Pelayanan KB di non Puskesmas (840 orang)			
	Biaya Operasional Balai Penyuluh KB	Balai	8	Bakti sosial pelayanan KB IUD di Puskesmas (160 orang)	Bakti sosial pelayanan KB IUD di Puskesmas (160 orang)	Bakti sosial pelayanan KB IUD di Puskesmas (160 orang)	Bakti sosial pelayanan KB IUD di Puskesmas (160 orang)			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
				Bakti sosial pelayanan KB Implant di Puskesmas (160 orang)	Bakti sosial pelayanan KB Implant di Puskesmas (160 orang)	Bakti sosial pelayanan KB Implant di Puskesmas (160 orang)	Bakti sosial pelayanan KB Implant di Puskesmas (160 orang)			
				Pembangunan balai Penyuluh KB (5 Unit)						
				Peningkatan sarana dan Prasarana balai Penyuluh KB 5 Paket	Peningkatan sarana dan Prasarana balai Penyuluh KB 5 Paket	Peningkatan sarana dan Prasarana balai Penyuluh KB 5 Paket	Peningkatan sarana dan Prasarana balai Penyuluh KB 5 Paket			
				BOKB Distribusi Alkon	BOKB Distribusi Alkon	BOKB Distribusi Alkon	BOKB Distribusi Alkon			
				BOKB Balai Penyuluh KB						
Kegiatan 3: Pelayanan KB-KR dan Pengembangan Jaringan Kerja	Pembinaan Pelayanan KB bagi lintas sektor	orang	68	Rakor kelembagaan dengan mitra kerja 5 kali	Rakor kelembagaan dengan mitra kerja 5 kali	Rakor kelembagaan dengan mitra kerja 5 kali	Rakor kelembagaan dengan mitra kerja 5 kali	1,930.90	APBD	Dinas P3AP2KB
	Rapat Koordinasi Klinik KB	orang	100	Bimbingan lengkap bagi PKB 6 kali	Bimbingan lengkap bagi PKB 6 kali	Bimbingan lengkap bagi PKB 6 kali	Bimbingan lengkap bagi PKB 6 kali			
	Rakor Trikomponen	orang	1100	Pembinaan Kader IMP 17 Kec	Pembinaan Kader IMP 17 Kec	Pembinaan Kader IMP 17 Kec	Pembinaan Kader IMP 17 Kec			
	Rakor BPS/BPM	orang	30	Pembinaa KB Pria 17 Kec	Pembinaa KB Pria 17 Kec	Pembinaa KB Pria 17 Kec	Pembinaa KB Pria 17 Kec			
	Evaluasi Bidan Praktek Mandiri	orang	50	Pembinaan Kampung KB 17 Kec	Pembinaan Kampung KB 17 Kec	Pembinaan Kampung KB 17 Kec	Pembinaan Kampung KB 17 Kec			
	Rakor Pelayanan KB KR	orang	170							
	Evaluasi Pelayanan KB MKJP kategori Puskesmas	orang	50							
INDIKATOR SDG's	**Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Pelayanan Ambulance Jenazah bagi masyarakat miskin di kabupaten Sleman	bulan		12	12	12	12	40,090.59	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan Penduduk miskin dan rentan miskin (PBI APBD)	Jiwa		108.765	108.765	108.765	108.765			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pelayanan kesehatan bagi : perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, Linmas/hansip, GTT, Kader LKM/NKM, Kader Sosial, Kader Posyandu, Kader KB/IMP, Bayi Baru Lahir, Mandiri (PBPU - Pekerja Bukan Pnerima Upah)	jiwa		21.421	21.421	21.421	21.421			
	Pembinaan pelayanan jaminan kesehatan	kali		7	7	7	7			
	Pembinaan dan evaluasi laporan Jamkes	kali		5	5	5	5			
	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	puskesmas		25	25	25	25			
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
INDIKATOR SDG's	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat**									
PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN										
Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	siswa	2017	65000	65000	65000	65000	160,838	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)	pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	SD/ SMP Negeri/Swasta	616	616	616	616	616	1,012	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	dokumen	1	1	1	1	1	1,111	APBD	Dinas Pendidikan
	bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	siswa	3500	3500	3500	3500	3500			
	pembentukan satgas putus sekolah	tim	1	1	1	1	1			
	beasiswa retrieval	siswa	50	50	50	50	50			
Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SD	pengadaan buku induk SD	buku		1000	1000	1000	1000	23,605	APBD, DAK	Dinas Pendidikan
	pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD	unit		14	14	14	14			
	pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang UKS	paket		21	21	21	21			
	pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK	paket		65	65	65	65			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	pengadaan buku kepustakaan	paket		66	66	66	66			
INDIKATOR SDG's	**APK SMP/MTs/ sederajat**									
PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN										
Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	siswa	2017	65000	65000	65000	65000	160,838	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)	pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	SD/ SMP Negeri/Swasta	616	616	616	616	616	1,012	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	dokumen	1	1	1	1	1	1,111	APBD	Dinas Pendidikan
	bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	siswa	3500	3500	3500	3500	3500			
	pembentukan satgas putus sekolah	tim	1	1	1	1	1			
	beasiswa retrieval	siswa	50	50	50	50	50			
Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SMP	pengadaan buku induk SMP	buku		600	600	600	600	29,384	APBD, DAK	Dinas Pendidikan
	pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD	unit		169	169	169	169			
	pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka-an, ruang guru, ruang UKS	paket		9	9	9	9			
	pengadaan peralatan pendidikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK	paket		7	7	7	7			
INDIKATOR SDG's	**APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**									
PROGRAM 1: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	lomba lembaga PAUD	lembaga	170	170	170	170	170	2,360.45	APBD	Dinas Pendidikan
	pembinaan dan evaluasi lembaga PAUD	lembaga	168	168	168	168	168			
	pembinaan PAUD model	lembaga	4	4	4	4	4			
	penerbitan buletin PAUD dan Dikmas	eksemplar		600	600	600	600			
	gelar kreativitas anak usia dini	anak	1000	1000	1000	1000	1000			
Kegiatan 2 : Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini	workshop penyusunan bahan ajar PAUD	orang		51	51	51	51	533.52	APBD	Dinas Pendidikan
	pendampingan kurikulum TK	guru		100	100	100	100			
	pembinaan kurikulum satuan pendidikan anak usia dini	guru		100	100	100	100			
INDIKATOR SDG's	**Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender**									
PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	siswa	2017	65000	65000	65000	65000	160,838	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)	pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	SD/ SMP Negeri/Swasta	616	616	616	616	616	1,012	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	dokumen	1	1	1	1	1	1,111	APBD	Dinas Pendidikan
	bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	siswa	3500	3500	3500	3500	3500			
	pembentukan satgas putus sekolah	tim	1	1	1	1	1			
	beasiswa retrieval	siswa	50	50	50	50	50			
Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SD	pengadaan buku induk SD	buku		1000	1000	1000	1000	23,605	APBD, DAK	Dinas Pendidikan
	pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD	unit		14	14	14	14			
	pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka-an, ruang guru, ruang UKS	paket		21	21	21	21			
	pengadaan peralatan pendi-dikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK	paket		65	65	65	65			
	pengadaan buku kepustakaan	paket		66	66	66	66			
INDIKATOR SDG's	**Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender**									
PROGRAM 1: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN										
Kegiatan 1: Penyediaan bantuan operasional BOSDA	Bantuan operasional SD dan SMP dan data terpilah gender	siswa	2017	65000	65000	65000	65000	160,838	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)	pendampingan pengelolaan bantuan operasional sekolah	SD/ SMP Negeri/Swasta	616	616	616	616	616	1,012	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3 : Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	pendataan calon penerima bantuan pendidikan bagi siswa miskin	dokumen	1	1	1	1	1	1,111	APBD	Dinas Pendidikan
	bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	siswa	3500	3500	3500	3500	3500			
	pembentukan satgas putus sekolah	tim	1	1	1	1	1			
	beasiswa retrieval	siswa	50	50	50	50	50			
Kegiatan 4 : Pengadaan sarana dan sarana sekolah SMP	pengadaan buku induk SMP	buku		600	600	600	600	29,384	APBD, DAK	Dinas Pendidikan

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	pengadaan komputer, laptop, printer, kamera, handycam, LCD	unit		169	169	169	169			
	pengadaan meubeleir ruang kelas SD, ruang perpustaka-an, ruang guru, ruang UKS	paket		9	9	9	9			
	pengadaan peralatan pendi-dikan matematika, IPA, IPS, bahasa indonesia, jasmani, OR, kesehatan, kesenian, TIK	paket		7	7	7	7			
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN										
INDIKATOR SDG's	**jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, kasus kekerasan terhadap anak perempuan, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, Persentae keterwakilan perempuan di DPR, unmeet need kebutuhan ber-KB**									
1. Program Keluarga Berencana										
Kegitan : Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pelayanan KIE lewat Multi media (Vidio tron , radio, leaflet, stiker, brosur, spanduk, umbul-umbul, roteks, baliho	3 jenis media elektronik, 6 jenis media cetak, 1 baliho	1 jenis media elektronik, 4 jenis media cetak, sosialisasi program KKBPK	1 jenis media elektronik, 4 jenis media cetak, sosialisasi program KKBPK	1 jenis media elektronik, 4 jenis media cetak, sosialisasi program KKBPK	1 jenis media elektronik, 4 jenis media cetak, sosialisasi program KKBPK	1 jenis media elektronik, 4 jenis media cetak, sosialisasi program KKBPK	1,527.95	APBD	Dinas P3AP2KB
Kegiatan 2 : Evaluasi keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga	kali	8	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga 8 Kali	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga 8 Kali	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga 8 Kali	Pelaksanaan lomba dalam rangka hari keluarga 8 Kali	2,095.86	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pendampingan prestator			Bakti TNI kesehatan Terpadu 1 kali	Bakti TNI kesehatan Terpadu 1 kali	Bakti TNI kesehatan Terpadu 1 kali	Bakti TNI kesehatan Terpadu 1 kali			
				Kesatuan Gerak KB Kesehatan 1 kali	Kesatuan Gerak KB Kesehatan 1 kali	Kesatuan Gerak KB Kesehatan 1 kali	Kesatuan Gerak KB Kesehatan 1 kali			
2. Program keserasian peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi										
Kegiatan : Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Pembuatan Pusat Informasi bagi perempuan	kab	1	Koordinasi Forum Pening-katan informasi Perempuan (Kab)	Koordinasi Forum Pening-katan informasi Perempuan (Kab)	Koordinasi Forum Pening-katan informasi Perempuan (Kab)	Koordinasi Forum Pening-katan informasi Perempuan (Kab)	1,284.71	APBD	Dinas P3AP2KB
	Bintek peningkatan kualitas hidup perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi	orang	35	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (35 orang)	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (35 orang)	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (35 orang)	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (35 orang)			
				Pendidikan Politik dan Pengembangan Kapasitas Perem-puan (3 kali)	Pendidikan Politik dan Pengembangan Kapasitas Perem-puan (3 kali)	Pendidikan Politik dan Pengembangan Kapasitas Perem-puan (3 kali)	Pendidikan Politik dan Pengembangan Kapasitas Perem-puan (3 kali)			
				Sasialisasi three ends (1 kali)	Sasialisasi three ends (1 kali)	Sasialisasi three ends (1 kali)	Sasialisasi three ends (1 kali)			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaam Gender dan Anak										
Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan PUG	Revitalisasi PUG	kab	1	APE kategori utama (Kab)	APE kategori utama (Kab)	APE kategori utama (Kab)	APE kategori utama (Kab)	1,004.26	APBD	Dinas P3AP2KB
	Evaluasi PUG			Pengembangan kapasitas PUG (10 driver PUG)	Pengembangan kapasitas PUG (10 driver PUG)	Pengembangan kapasitas PUG (10 driver PUG)	Pengembangan kapasitas PUG (10 driver PUG)			
4. Program : Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan										
Kegiatan 1 : Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan lembaga organisasi perempuan termasuk darmawanita	kali	1	12	12	12	12	1,152.79	APBD	Dinas P3AP2KB
	Peringatan Hari Kartini	kali	1	1	1	1	1			
	Peringatan Hari Ibu	kali	1	1	1	1	1			
	Peningkatan Kapasitas Tim PUG	kali		6	6	6	6			
Kegiatan 2 : Pendidikan dan Pelatihan peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender	Bintek PPRG	orang	86	110	110	110	110	2,825.74	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pedidikan bagi perempuan calon BPD dan musrenbang bagi perempuan	orang		40	40	40	40			
	Pengembangan Kapasitas Tim PUG	kali		1	1	1	1			
Kegiatan 3 : Pelatihan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Pembinaan, pelatihan dan monev	Desa Prima	15	15	15	15	15	1,942.18	APBD	Dinas P3AP2KB
				Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), 2 kali	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), 2 kali	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), 2 kali	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), 2 kali			
				Industri rumahan 6 Desa	Industri rumahan 6 Desa	Industri rumahan 6 Desa	Industri rumahan 6 Desa			
				sekolah ibu/sekolah jumat 1 kali	sekolah ibu/sekolah jumat 1 kali	sekolah ibu/sekolah jumat 1 kali	sekolah ibu/sekolah jumat 1 kali			
				PUPM 7 Kec						
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan										
Kegiatan :Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	orang	40	koordinasi forum peningkatan informasi perempuan , 1 Kabupaten	koordinasi forum peningkatan informasi perempuan , 1 Kabupaten	koordinasi forum peningkatan informasi perempuan , 1 Kabupaten	koordinasi forum peningkatan informasi perempuan , 1 Kabupaten	1,284.71	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pelatihan Politik bagi Perempuan	orang	40	sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan 35 orang	sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan 35 orang	sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan 35 orang	sosialisasi peningkatan kualitas hidup perempuan 35 orang			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
				Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 kali	Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 kali	Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 kali	Pendidikan Politik dan Pengembangan kapasitas Perempuan 3 kali			
				sosialisasi Three ends 1 kali	sosialisasi Three ends 1 kali	sosialisasi Three ends 1 kali	sosialisasi Three ends 1 kali			
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
INDIKATOR SDG's	**kondisi prasarana penyediaan air baku (jumlah prasarana penyediaan air baku yang terkelola dengan baik dibagi dengan total jumlah prasarana penyediaan air baku)**									
PROGRAM 1: PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU										
Kegiatan 1: Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Kegiatan 2: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Kegiatan 3: Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Partisi Kawasan Rawan Kekeringan	Jumlah Prasarana Penyedia-an Air Baku Yang Terkelola dengan baik dibanding de-ngan total jumlah prasarana penyediaan air baku di Kab Sleman dikalikan 100 %	%	2017	75	80	85	85	1,394	APBD	DPUPKP
INDIKATOR SDG's	**Cakupan bangunan (rumah dan institusi) yang bebas jentik nyamuk**									
PROGRAM 1: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular										
Kegiatan 1: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dusun yang dipantau angka bebas jentik	lokasi		12	12	12	12	2,426.69	APBD	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan serologi Antraks dan pes,	sample		200	200	200	200			
	Penyuluhan penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	lokasi		6	6	6	6			
	Penyuluhan Antraks dan Penyuluhan Pes	Lokasi, Lokasi		1 ,1	1 ,1	1 ,1	1 ,1			
	Audit kematian	kasus		6	6	6	6			
	Cetak Leaflet	leaflet		2000	2000	2000	2000			
	format laporan	rim		8	8	8	8			
	kartu PJB perumahan	lmbr		3000	3000	3000	3000			
	Form PJB 1	rim		8	8	8	8			
	Form PJB 2	rim		15	15	15	15			
	Pemantauan jentik oleh kader	kader		420	420	420	420			
	Pembelian perangkap	bh		400	400	400	400			
	Kantong tikus	bh		600	600	600	600			
	Umpan tikus	bh		1200	1200	1200	1200			
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	desa, anak		5 , 200	5 , 200	5 , 200	5 , 200			
	Penyemprotan Insektisida/ Fogging Sarang Nyamuk di lokasi penderita DBD	focus		380	380	380	380			
	Pengadaan Larvasida	botol		1250	1250	1250	1250			
	Pengadaan insektisida untuk focus DBD	liter		325	325	325	325			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pengadaan pakaian kerja lapangan(penyemprot)	buah		30	30	30	30			
	pengadaan mesin fogging	buah		6	6	6	6			
	Pengadaan Mikroskup Binokuler	bh		2	2	2	2			
	Konsultasi klinis TB, Validasi data TB dengan aplikasi SITT online-offline, Pertemuan jejaring PPM, pertemuan lintas sektor TB	kl		2	2	2	2			
	Workshop Petugas TB	angkatan		2	2	2	2			
	Aksi simpatik dan Sarasehan TB Day dengan screening batuk	sasaran		250	250	250	250			
	Worshop Ispa Pneumonia	Angkatan		2	2	2	2			
	Bimtek Kolaborasi TB - HIV	angkatan		2	2	2	2			
	Uji cacingan	sampel , lokasi		100, 5	100, 5	100, 5	100, 5			
	Cetak TB 01,	lb		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 Anak	lb		500	500	500	500			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 02 Kartu berobat TB	lbr		1000	1000	1000	1000			
	TB 01 PP INH	lb		500	500	500	500			
	TB 03 Fasyankes	bk		50	50	50	50			
	TB 05	bk		100	100	100	100			
	TB 06	bk		100	100	100	100			
	Buku Pedoman TB,	bk		50	50	50	50			
	TB 04	bk		100	100	100	100			
	Backdrop	3								
	Reward Penemuan/ kesembuhan penderita TB	Orang		200	200	200	200			
	Uji cross chek TB ke BLK & RUS 1	kali,		4	4	4	4			
	Pelatihan kader tanggap bo-cah (TABO) (PUPM Sleman)	orang		200	200	200	200			
	Penanganan DBD (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
	Pokjanal Kecamatan, Pemberdayaan kader	Kec, Lokasi		10 , 6	10 , 6	10 , 6	10 , 6			
	Update knowledge Kusta	kali		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM**									
PROGRAM 1:Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Pemantauan jentik berkala bagi institusi	puskesmas		25	25	25	25	1,374.80	APBD	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan Air bersih (Bakteri dan Kimia)	sampel		200	200	200	200			
	Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis	sampel		300	300	300	300			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Pemeriksaan Air Minum Kimia	sampel		300	300	300	300			
	Pemeriksaan Rujukan ke BTKL	sampel		25	25	25	25			
	Pembinaan penyehatan air	kali		2	2	2	2			
	Bimtek kualitas air minum pedesaan	Kali		2	2	2	2			
	Pembinaan kesehatan kerja	kali		4	4	4	4			
	Pembinaan lingkungan Fasyankes	kali		2	2	2	2			
	Monev limbah medis bagi Pasyankes	Kali		4	4	4	4			
	Pengadaan Chlorindefuser	bh		500	500	500	500			
	Pengadaan Safetybok	bh		1000	1000	1000	1000			
	Desa STBM	ds		5	5	5	5			
	pemeriksaan cholinesterase	kali		1	1	1	1			
	Monev Klinik Sanitasi	Kali		2	2	2	2			
	Pembinaan kabupaten sehat	kabupaten, kec		1, 17	1, 17	1, 17	1, 17			
	Jejaring Pengembangan Kabupaten Sehat	kali		2	2	2	2			
	Evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	Lokasi		17	17	17	17			
	Tes Kebugaran	Orang		200	200	200	200			
	Pembinaan POS UKK	Lokasi		25	25	25	25			
	Pelatihan penguatan kelembagaan PAMDES (PUPM Turi)	desa		4	4	4	4			
	Pemicuan STBM (PUPM Kalasan)	desa		1	1	1	1			
	Pemeriksaan rumah sehat (PUPM Kalasan)	desa		4	4	4	4			
INDIKATOR SDG's	**jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (IPAL komunal)**									
PROGRAM 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah										
Kegiatan 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Pembangunan jaringan servis dan SR, Pembangunan jaringan servis dan SR Kawasan Berbah, Pembangunan IPAL komunal sekolah, Pembangunan IPAL komunal, Pembangunan IPAL individu)	SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	Pembangunan Sambungan rumah (SR) 200 SR	88,314.13	APBD dan DAK	DLH
		SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR	Pembangunan SR IPAL komunal 35 SR			
		lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya-ta 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya-ta 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya-ta 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya-ta 1 lokasi	Pembangunan IPAL komunal sekolah Adiwiya-ta 1 lokasi			
		unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit	Pembangunan IPAL individual 50 unit			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR SDG's	**TERSEDIANYA SARANA PRASANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PERKOTAAN DAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)**									
PROGRAM 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah										
Kegiatan 1: Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	tersedianya sarana prasana pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SR	pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja 1 unit	Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali	Pelaksanaan pelatihan sedot lumpur tinja IPAL Komunal 4 kali ; Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali; Pelaksanaan FGD pengelolaan IPAL Komunal 6 kali	Pengelolaan IPLT selama 12 bulan	Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang teknik pengelolaan jaringan 1 kali	2,861.25	APBD	DLH
INDIKATOR SDG's	**Terkelolanya kualitas air bersih, mata air, badan air, air hujan, tanah pertanian, air embung, air limbah (Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup)**									
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA										
Kegiatan 1: Pemantauan kualitas lingkungan	Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup (Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih, Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air, Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air, Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan, Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan, Pengujian/pemeriksaan kualitas udara ambien, Pengujian/pemeriksaan kualitas emisi cerobong, Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung, Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah)	titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	Pengujian/pemeriksaan kualitas air bersih	1,221.88	APBD	DLH
		titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air			
		titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas badan air 50 titik			
		lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi	Pengujian/pemeriksaan kualitas air hujan 60 lokasi			
		titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanah-an 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanah-an 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanah-an 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanah-an 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanah-an 30 titik			
		titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas air embung 25 titik			
		usaha/ kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan	Pengujian/pemeriksaan kualitas air limbah 25 usaha/kegiatan			
INDIKATOR SDG's	**EMBUNG DAN SUNGAI TERKELOLA DENGAN BAIK**									
PROGRAM : PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA										
Kegiatan 1: Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya		%	2017	78	79	80	82	68,639	APBD	DPUPKP

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 2 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lannya	Jumlah embung terkelola baik dibagi jumlah embung dikalikan 100 %									
Kegiatan 3 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya										
Kegiatan 4 : Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya										
Kegiatan 5 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak air										
Kegiatan 6 : Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air										
Kegiatan 7 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Barat										
Kegiatan 8 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Tengah										
Kegiatan 9 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Timur										
INDIKATOR SDG's	**Terlaksananya gerakan Kebersihan Sungai, lokasi bersih sungai**									
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA										
Kegiatan 1: Pengelolaan PROKASIH/ SUPERKASIH	Pengendalian kualitas dan kuantitas air sungai PROKASIH. (Pembinaan masyarakat sepanjang sungai., Gerakan kebersihan sungai, Merti sungai, Penyisiran sungai, Pertemuan masyarakat peduli sungai)	kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	Pembinaan masyarakat sepanjang sungai 1 kali	593,750,000	APBD	DLH
		lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi dan merti sungai di 1 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi dan merti sungai di 1 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi dan merti sungai di 1 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi dan merti sungai di 1 lokasi	Gerakan kebersihan sungai 17 lokasi dan merti sungai di 1 lokasi			
		sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai	Penyisiran sungai 3 sungai			
		kali	Pertemuan ma-syarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan ma-syarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan ma-syarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan ma-syarakat peduli sungai 2 kali	Pertemuan ma-syarakat peduli sungai 2 kali			
INDIKATOR SDG's	**PERSENTASE JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI**									
PROGRAM 1 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
Kegiatan 1: Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Pengaduan masyara-kat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang diterima oleh instansi lingku-ngan hidup dalam satu tahun dikalikan 100 %	%	2017	87	88	89	90	1,918	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2 : Penilaian Kota Sehat/Adipura										
INDIKATOR SDG's	**Cakupan ketersediaan air untuk pertanian**									
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah debit yang tersedia dibagi dengan debit yang dibutuhkan dikalikan 100 %	%	2017	78	78	79	80	184,756	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi										
Kegiatan 3 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air										
Kegiatan 4 : Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi										
Kegiatan 5 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi										
Kegiatan 6 : Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif										
Kegiatan 7 : Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi										
Kegiatan 8 : Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi										
Kegiatan 9 : Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi										
Kegiatan 10 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Barat										
Kegiatan 11 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Tengah										
Kegiatan 12 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Timur										
INDIKATOR SDG's	**EMBUNG DAN SUNGAI TERKELOLA DENGAN BAIK**									
PROGRAM : PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA										
Kegiatan 1: Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah embung terkelola baik dibagi jumlah embung dikalikan 100 %	%	2017	78	79	80	82	68,639	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lannya										
Kegiatan 3 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya										
Kegiatan 4 : Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya										
Kegiatan 5 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak air										
Kegiatan 6 : Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air										
Kegiatan 7 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Barat										
Kegiatan 8 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Tengah										
Kegiatan 9 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Wilayah Timur										
INDIKATOR SDG's	**PENGURANGAN LUASAN LAHAN KRITIS MELALUI REHABILITASI DI DALAM KPH**									
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Konservasi SDA dan Pengendalian kerusakan Sumber-sumber Air	Meningkatny kualitas dan kuantitas SDA (Bibit tanaman sekitar sumber air dan Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat)	batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 4.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	3,825.97	APBD	DLH
TUJUAN GLOBAL 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA										
TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										
INDIKATOR SDG's	**Jumlah penganggur**									
PROGRAM 1: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas										
Kegiatan 1: Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pelatihan kerja 14 sub kejuruan	paket	3	35	35	35	35	14,270.44	APBD	Disnaker
Kegiatan 2: Pendidikan dan pelatihan bagi pen-cari kerja melalui sistem non institusional/ MTU (mobile training unit)	Pelatihan kerja non institusional 7 kejuruan	paket	23	46	46	46	46	23,583.67		
Kegiatan 3: Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui sistem swadana	Pelatihan kerja 14 sub kejuruan	orang	10	7 pelatihan, 40 orang	7 pelatihan, 40 orang	7 pelatihan, 40 orang	7 pelatihan, 40 orang	495.08		
Kegiatan 4: Uji kompetensi & sertifikasi	Terlaksananya uji kompetensi sub kejuruan	orang	48	16 orang, 3 paket	16 orang, 3 paket	16 orang, 3 paket	16 orang, 3 paket	475.68		
Kegiatan 5: Pelayanan produktivitas kerja	Penyuluhan produktivitas bagi masyarakat dan perusahaan kecil; Bimbingan teknis peningkatan produktivitas bagi perusahaan kecil	kali	2	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	238.21		
Kegiatan 5: Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Pelatihan kerja non institusional sub kejuruan	paket	2	5	5	5	5	1,121.77		
Kegiatan 6: Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja penerima upah di perusahaan; Pengurusan premi dan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan	perusahaan; orang	40 perusahaan; 129orang	pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk 1 hari @50 orang ; 131 orang	pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk 1 hari @50 orang ; 131 orang	pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk 1 hari @50 orang ; 131 orang	pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk 1 hari @50 orang ; 131 orang	1,663.50		
Kegiatan 7 : Pengembangan padat karya	Sosialisasi dan pelaksanaan padat karya produktif	lokasi	4	3 lokasi @ 44 orang, padat karya 132 orang	3 lokasi @ 44 orang, padat karya 132 orang	3 lokasi @ 44 orang, padat karya 132 orang	3 lokasi @ 44 orang, padat karya 132 orang	3,330.60		
INDIKATOR SDG's	**jumlah wisatawan mancanegara**									
PROGRAM 1: Pengembangan Kemitraan										
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Kerjasama Desa Wisata	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Desa Wisata	desa wisata	8	8	9	10	11	1,530.00	APBD	Dinas Pariwisata
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI										
INDIKATOR SDG's	**CAKUPAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**									
PROGRAM 1: PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah jalan dan jembatan yang dibangun dibagi jumlah jalan dan jembatan yang seharusnya dibangun dikalikan 100 %	%	2017	27,735	28,180	29,400	30,800	964,182	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2: Perencanaan pembangunan jembatan										
Kegiatan 3: Peningkatan jalan										
Kegiatan 4: Peningkatan jembatan dan gorong-gorong										
INDIKATOR SDG's	**PROPORSI DRAINASE DAN GORONG-GORONG KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP**									
PROGRAM 1: PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG										
Kegiatan 1: Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah saluran drainase baik dibagi jumlah total saluran dikalikan 100 %	%	2017	48.9	49	50	52	113,471	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2: Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong										
Kegiatan 3: Pemeliharaan Rutin saluran drainase										
INDIKATOR SDG's	**CAKUPAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**									
PROGRAM : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN										
Kegiatan 1: Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah jalan dan jembatan yang direhabilitasi dibagi jumlah jalan dan jembatan yang seharusnya direhabilitasi dikalikan 100 %	%	2017	35.86	36.53	37.75	38.42	499,884	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan										
Kegiatan 3: Pemeliharaan Rutin jalan										
Kegiatan 4: Pemeliharaan Rutin Jembatan										
Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan										
INDIKATOR SDG's	**CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DASE JALAN DAN JEMBATAN**									
PROGRAM : PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN										
Kegiatan 1: Penyusunan Sistem Informasi Data Base jalan	Jumlah dokumen ketersediaan data yang dihasilkan dibagi jumlah dokumen yang direncanakan dikalikan 100 %	%	2017	100	100	100	100	5,488	APBD	DPUPKP
INDIKATOR SDG's	**PROPORSI SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN DALAM KONDISI BAIK**									
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN										
Kegiatan 1: Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Jumlah sarana prasarana kebinamargaan baik dibagi jumlah total alat dikalikan 100 %	%	2017	96	98	98	98	30,853	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2: Pemeliharaan sarana prasarana kebinamargaan										
INDIKATOR SDG's	**JUMLAH KENDARAAN YANG LULUS MELAKUKAN UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR**									
PROGRAM 1: Peningkatan Pengendalian Polusi										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	Jumlah kendaraan yang lulus melakukan uji emisi kendara-an bermotor (Lomba emisi kendaraan bermotor, Uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor, Pemeriksaan Pb dalam darah, Workshop hasil uji emisi)	kali/ kendaraan	Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas	Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas	Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas	Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas	Terlaksananya lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan 80 kendaraan dinas	497.87	APBD	DLH
		kali/ kendaraan	Terlaksananya uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	Terlaksananya uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	Terlaksananya uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	Terlaksananya uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan	Terlaksananya uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor 1 kali dengan target 520 kendaraan			

TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA

INDIKATOR SDG's	**PERSENTASE KK MISKIN**									
PROGRAM 1: Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1: Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE	kelompok	3	-	-	-	-	151.54	APBD	Dinas Sosial
	Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE	kelompok	6	-	-	-	-			
Kegiatan 2: Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi Keluarga Miskin Non Potensial (kesrakat) dan Lansia Rentan Sosial Ekonomi	Bimbingan Sosial bagi KK miskin non potensial	orang	90	90	60	60	60	388.23	APBD	Dinas Sosial
	Bimbingan Sosial bagi kelg. Lansia rentan sosial ekonomi	orang	300	300	300	300	300			
Kegiatan 3: Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP/KUBE)	Bimbingan teknis USEP-KUBE	orang	200	100	200	200	200	1,650.34	APBD	Dinas Sosial
	Evaluasi kelompok USEP-KUBE	kelompok	15	15	15	15	15			
	Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan calon warga binaan PRSE	orang	-	80	140	160	180			
	Pembinaan lanjut bagi kelompok PRSE	kelompok	-	10	8	8	8			
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin	Pendistribusian beras RTS-PM	RTS-PM	-	66,534	66,534	66,534	66,534	2,161.91	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 5: Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial	Verifikasi dan validasi permohonan JPS	permohonan	-	500	500	500	500	580.83	APBD	Dinas Sosial
	Penyaluran bantuan JPS	permohonan	-	500	500	500	500			
PROGRAM 2: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	KPM	50,862	50,862	48,807	48,807	48,807	1,695.70	APBD	Dinas Sosial
	Forum PKH tingkat kabupaten	kali	12	12	12	12	12			
	Forum PKH tingkat kecamatan	kali	17	51	51	51	51			
	Identifikasi/penertiban anjal	kali	51	47	47	47	47	1,874.45	APBD	Dinas Sosial

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 2: Penanganan dan Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat	Pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jateng)	kali	24	20	20	20	20			
	Keamanan/penjagaan diperempatan/ pertigaan	kali	15	-	-	-	-			
	Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di wilayah DIY	orang	15	-	-	-	-			
	Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal di luar Wilayah DIY	orang	60	-	-	-	-			
	Bantuan orang terlantar/ kehabisan bekal	orang	-	60	60	60	60			
	Bantuan perawatan/ pengiriman ke RS	orang	10	10	15	15	15			
	Pengiriman orang terlantar ke RS/PS/PA	orang	10	10	20	20	20			
	Pemakaman bagi orang terlantar	orang	1	10	10	10	10			
	Pembelian pakaian lapangan	unit	20	-	-	-	-			
Kegiatan 3: Penyediaan Beras Penyangga (*Buffer Stock*)	Beras untuk tanggap darurat dan antisipasi bencana	ton	8	-	8	8	8	1,406.34	APBD	Dinas Sosial
	Lokasi sarana dapur umum	lokasi	2	-	2	2	2			
	Bantuan Korban bencana meninggal dunia	orang	38	-	-	-	-			
	Bantuan Korban bencana rawat inap	orang	36	-	-	-	-			
	Bantuan Korban bencana rawat jalan	orang	30	-	-	-	-			
	Operasional gudang logistik	orang	6	-	6	6	6			
	Bantuan Lauk-pauk bagi korban bencana	KK	100	-	100	100	100			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	kali	2	-	2	2	2			
	Peningkatan kapasitas Tagana dalam antisipasi bencana	orang	50	-	50	50	50			
	Peningkatan kapasitas Rintisan Kampung Siaga Bencana	lokasi	2	-	2	2	2			
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Distribusi Raskin	Pendistribusian beras RTS-PM	RTS-PM	66,534	-	-	-	-	426.97	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 3: Pembinaan Anak Terlantar										
Kegiatan 1: Penanganan Penyelesaian Bayi/Anak Terlantar	Penanganan kasus bayi/anak terlantar/ABH	kasus	20	40	25	30	30	288.07	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 4: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan Tata Boga	orang	10	10	10	10	10	1,980.25	APBD	Dinas Sosial
	Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan bordir	orang	10	10	10	10	10			
	Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan teknisi HP	orang	10	10	10	10	10			
	Pendampingan usaha bagi penyandang cacat	orang	-	100	110	120	130			
	Pelatihan kerja non Institusional sub kejuruan pranata cara boso jawa	orang	-	10	10	10	10			
	Pelatihan sablon (PUPM Kec. Pakem)	orang	-	20	-	-	-			
	Bimtek Rajut (PUPM Desa Condongcatur Kec. Depok)	orang	-	20	-	-	-			
Kegiatan 2: Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Bantuan bagi penyandang cacat berat	orang	110	110	110	110	110	1,308.54	APBD	Dinas Sosial
	Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI	kali	-	25	30	30	30			
	Pengadaan & penyerahan alat bantu bagi penyandang cacat	unit	24	13	24	24	24			
	Verifikasi data penca	kali	1	1	1	1	1			
	Operasional jamkesus	kali	1	-	-	-	-			
	Pembinaan disabilitas Kec. Minggir (PUPM)	kali	-	4	-	-	-			
	Pembinaan disabilitas Kec. Moyudan (PUPM)	kali	-	7	-	-	-			
PROGRAM 5: Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo										
Kegiatan 1: Pelayanan Dasar bagi Anak Asuh Panti Sosial	Pembinaan panti	kali	3	4	3	3	3	177.79	APBD	Dinas Sosial
	Penyaluran sebagian kebutuhan dasar anak panti di LKSA	LKSA	38	34	38	38	38			
PROGRAM 6: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Kegiatan 1: Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pemilihan PSKS berprestasi (KT,PSM,LKS,TKSK,WKSBM)	kali	1	1	1	1	1	3,058.67	APBD	Dinas Sosial
	Jejaring karang taruna	kali	19	40	19	19	19			
	Jejaring IPSM&Panitia HKSN	kali	11	12	12	12	12			
	Jejaring Komda lansia	kali	6	12	12	12	12			
	Jejaring LK3	kali	12	12	12	12	12			
	Jejaring LK3	lembaga	3	3	3	3	3			
	Jejaring WKSBM	kali	17	34	34	34	34			
	Jejaring TKSK	kali	12	12	12	12	12			
	Jejaring LKKS	kali	12	12	12	12	12			
	Jejaring Komite PRS ABH	kasus	12	-	12	12	12			
	Jejaring PPDI Kab.Sleman	kali	12	-	12	12	12			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
	Jejaring FKKADK Sleman	kali	6	-	12	12	12			
	Pengelolaan tetenger	lokasi	-	7	7	7	7			
	Bimtek sablon (PUPM Kec. Turi)	orang KT Bangunkerto	-	20	-	-	-			
	Pelatihan kerajinan fiber (PUPM Kec. Seyegan)	orang KT Margokaton	-	20	-	-	-			
PROGRAM 7: Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa										
Kegiatan 1: Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Penguatan kelembagaan TPK	desa	86	-	-	-	-	37.25	APBD	Dinas Sosial
	TPK award	kali	1	-	-	-	-			
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Penyelenggaraan sekretariat TKPKD dan forum	forum	1	-	-	-	-	125.62	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 3: Penyelenggaraan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)	Penguatan kelembagaan TPK	desa	-	86	86	86	86	1,238.95	APBD	Dinas Sosial
	TPK award	kali	-	1	1	1	1			
	Forum TPKD	bulan	-	12	12	12	12			
	Laporan monev pronangkis	dokumen	-	1	-	-	-			
	Pembinaan TPKD Kec. Depok	TPK Maguwoharjo	-	1	-	-	-			
	Penguatan kelembagaan TPK Kec. Cangkringan (PUPM)	desa	-	5	-	-	-			
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN										
INDIKATOR SDG's	**KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI**									
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
Kegiatan 1: Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Jumlah rumah layak huni KK Miskin dibagi jumlah rumah KK miskin dikalikan 100 %	%	2017	98.5	98.75	99	99.25	74,650	APBD	DPUPKP
Kegiatan 2 : Pembangunan sarana dan prsarana Rusunawa/Rusunami										
Kegiatan 3: Pengelolaan Rusunawa/Rusunami										
Kegiatan 4: Penataan Kawasan Land Consoludation										
Kegiatan 5: Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu										
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu										
INDIKATOR SDG's	**Jumlah lembaga tangguh bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perungangan Risiko Bencana	Desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana	desa dan sekolah	34 destana dan 46 ssb	37 destana dan 52 ssb	45 destana dan 60 ssb	53 destana dan 68 ssb	61 destana dan 76 ssb	4,095.00	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Stimulasi dan sosialisasi penggunana sarpras pengurangan risiko bencana	Gladi lapang penanggulangan bencana	Orang	6,860	630	630	630	630	3,044.00	APBD	BPBD
Kegiatan 2: Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi	Pelatihan pengelolaan barak pengungsi dan pelatihan pengelolaan dapur umum	Orang	1,000	200	200	200	200	2,577.00	APBD	BPBD
Kegiatan 3: Peningkatan kapsitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon paska bencana	Pelatihan pertukangan	Orang	58	30	30	30	30	1,096.00	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**Prosentase sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi baik**									

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 2: Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan	Jumlah system peringatan dini (EWS)	System	20	20	20	20	20	1,769.00	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**Pelayanan sampah perumahan dan niaga**									
PROGRAM 1: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
Kegiatan 1: Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pelayanan sampah perumahan dan Niaga 4 m3/hari, Penyapuan jalan protokol 28 lokasi, Pemeliharaan transfer depo 4 lokasi	m3/hari	Terlaksananya Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Terlaksananya Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Terlaksananya Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Terlaksananya Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	Terlaksananya Pelayanan Sampah Perumahan dan Niaga 4 m3/hari	41,147.70	APBD	DLH
INDIKATOR SDG's	**Persentase luasan RTH**									
PROGRAM 1: Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau										
Kegiatan 1: Penataan ruang terbuka hijau	Pembangunan Taman dan pentaan RTH	m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan) seluas 1.450 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo seluas 500 m2	Penataan RTH seluas 18.000 m2	Penataan RTH seluas 18.000 m2	16,897.05	APBD	DLH
			Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan) seluas 1.450 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo seluas 500 m2					
			Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul	Pembangunan Taman Selokan Mataran seluas 450 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Lap. Raden Ronggo Kalasan seluas 2.182 m2					
			Pembangunan Taman depan SDN Gamping	Pembangunan Taman Kencana Desa Kalitirto seluas 250 m2	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto seluas 300 m2					
			Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi		Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur 450 m2					
			Pembangunan Taman Seturan		Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Berbah 1.000 m2					
			Pembangunan Taman Ngancar		Penataan Taman Denggung 2.500 m2					

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
			Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan		Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul (lanjutan 2) seluas 1.450 m2					
			Penyempurnaan Lapangan Pemda		Penataan RTH Lingkungan Kecamatan Depok 2.000 m2					
			Pembangunan Taman Pasar Ngijon		Penataan Em-bung Ketingan 22.150 m2					
			Pembangunan Taman Pasar Ngijon		Pembangunan Taman Colombo 130 m2					
					Pembangunan Taman Beran - Ngancar 265 m2					
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN										
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
INDIKATOR SDG's	**Jumlah lembaga tangguh bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perungangan Risiko Bencana	Desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana	desa dan sekolah	34 destana dan 46 ssb	37 destana dan 52 ssb	45 destana dan 60 ssb	53 destana dan 68 ssb	61 destana dan 76 ssb	4,095.00	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**									
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Kegiatan 1: Stimulasi dan sosialisasi penggunana sarpras pengurangan risiko bencana	Gladi lapang penanggulangan bencana	Orang	6,860	630	630	630	630	3,044.00	APBD	BPBD
Kegiatan 2: Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi	Pelatihan pengelolaan barak pengungsi dan pelatihan pengelolaan dapur umum	Orang	1,000	200	200	200	200	2,577.00	APBD	BPBD
Kegiatan 3: Peningkatan kapsitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon paska bencana	Pelatihan pertukangan	Orang	58	30	30	30	30	1,096.00	APBD	BPBD
INDIKATOR SDG's	**inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3**									
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA										
Kegiatan 1: Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon terhadap 25 usaha/ kegiatan, Inventarisasi gas rumah kaca 25 buku, Pembi-naan usaha/kegiatan peng-guna bahan perusak ozon., Pembinaan Kampung Iklim., Lomba Kampung Iklim., Penghijauan lingkungan	usaha/ kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usaha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usaha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usaha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usaha/kegiatan	Pemantauan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon pada 25 usaha/kegiatan	800.05	APBD	DLH
		kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali	Pembinaan usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon selama 1 kali			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
		kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali	Pembinaan Kampung Iklim 2 kali			
		prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator	Lomba Kampung Iklim dengan 3 prestator			
		batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang	Penghijauan lingkungan dengan 2.000 batang			
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										
TUJUAN 15. MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI										
INDIKATOR SDG's	**Cakupan RTH yang terpelihara**									
PROGRAM 1: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau										
Kegiatan 1: Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan taman dan lahan terbuka hijau dan Pemeliharaan tanaman perindang jalan	lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau sebanyak 70 lokasi	22,752.53	APBD	DLH
		m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2	Pembangunan Taman Jl. Akses Stadion (lanjutan) seluas 1.600 m2			
		m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2	Pembangunan Taman Batas Kota Prambanan seluas 3.800 m2			
		m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2	Pembangunan Taman Terasering Beran Kidul seluas 4.187 m2			
		m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2	Pembangunan Taman depan SDN Gamping seluas 250m2			
		m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2	Pembangunan Taman depan Kantor Imigrasi seluas 500 m2			
		m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2	Pembangunan Taman Seturan seluas 800 m2			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
		m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2	Pembangunan Taman Ngancar seluas 178 m2			
		m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2	Penataan lingkungan kantor Kecamatan Kalasan seluas 500 m2			
		m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2	Penyempurnaan Lapangan Pemda seluas 500 m2			
		m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2	Pembangunan Taman Pasar Ngijon seluas 28 m2			
INDIKATOR SDG's	**pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas**									
PROGRAM 1: Perlindungan dan Konservasi SDA										
Kegiatan 1: Konservasi SDA dan Pengendalian kerusakan Sumber-sumber Air	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDA (Bibit tanaman sekitar sumber air dan Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat)	batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 4.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat 2.000 batang	3,825.97	APBD	DLH
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASY YG INKLUSIF & DAMAI UTK PEMB. BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UTK SEMUA & MEMBANGUN KELEMBAGAAN YG EFEKTIF, AKUNTABEL & INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN										
INDIKATOR SDG's	**Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Jumlah kekerasan terhadap Anak**									
1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Kegiatan : Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penyelenggaraan kegiatan UPT P2TP2A	Kab, Kec	1kab, 17 kec	Layanan pengaduan 12 bln	Layanan pengaduan 12 bln	Layanan pengaduan 12 bln	Layanan pengaduan 12 bln	3,637,844,200	APBD	Dinas P3AP2KB
	sosialisasi lewat media	kali	1	Layanan kesehatan dan psikologi 12 bln	Layanan kesehatan dan psikologi 12 bln	Layanan kesehatan dan psikologi 12 bln	Layanan kesehatan dan psikologi 12 bln			
	Temu FPK2PA kecamatan	kali	17	Layanan Bantuan Hukum 12 bln	Layanan Bantuan Hukum 12 bln	Layanan Bantuan Hukum 12 bln	Layanan Bantuan Hukum 12 bln			
	Temu FPK2PA dan temu gugus tugas traficking	kec/kab	17kec, 1 kab	Layanan Reintegrasi sosial 12 bln	Layanan Reintegrasi sosial 12 bln	Layanan Reintegrasi sosial 12 bln	Layanan Reintegrasi sosial 12 bln			
	home visit	kali	30	surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali	surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali	surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali	surveilance ISO 9001 : 2015, 1kali			
	pemulangan korban	kali	10							
	case conferrence	orang	750							
	surveilance ISO 9001 : 2015	UPT								
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 1: Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Pembekalan Teknis pencatatan dan pelaporan, validasi data KDRT	orang	115	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	299,860,500	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pelatihan aplikasi pencatatan dan pelaporan	orang	25							
	Validasi Data KDRT	orang	25	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			
Kegiatan 2: Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Psikoedukasi	orang	55x6	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	489,114,000	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pelatihan komunikasi efektif	orang	25	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pembekalan teknis pendamping korban kekerasan	orang	110	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pelatihan Paralegal	orang	45							
Kegiatan 3: Pelatihan Pendampingan korban KDRT	Pelatihan Konseling untuk Kader PKDRT Kecamatan	kali		1	1	1	1	320.12	APBD	Dinas P3AP2KB
	Pelatihan assesment korban kekerasan Unit PPA Polres dan Polsek	kali		1	1	1	1			
	Pelatihan paralegal untuk kader PKDRT Desa	kali		2	2	2	2			
	Pelatihan konseling untuk kader PKDRT Desa	kali		2	2	2	2			
	Pelatihan assesment korban kekerasan untuk kader PKDRT	kali		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah pelayanan bantuan hukum**									
PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM										
Kegiatan 1 : Pelayanan Bantuan Hukum	Penanganan permasalahan hukum non ligitasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa	jenis bantuan hukum		20	20	20	20	530.2	APBD	Bagian Hukum
Kegiatan 2 : Penyelesaian sengketa perdata/ Tata Usaha Negara	kasus sengketa perdata, TUN, sengketa informasi yang ditangani	perkara		7	7	7	7	2499.845	APBD	Bagian Hukum
INDIKATOR SDG's	**Predikat Lakip Kabupaten**									
PROGRAM 1: PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman	dokumen	1	1	1	1	1	1003.00	APBD	Bagian Organisasi
	Perjanjian Kinerja Pemkab Sleman	dokumen	1	1	1	1	1			
	Pembinaan penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	PD		48	48	48	48			
	Pembinaan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	PD		48	48	48	48			
	Pembinaan Entry Data e-SAKIP Perangkat Daerah	PD		48	48	48	48			
INDIKATOR SDG's	**penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan**									

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
PROGRAM 1: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										
Kegiatan 1: Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui bagian layanan pengadaan	pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	paket	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	11448.51	APBD	BLP
	draft raperbup pengadaan langsung	draft		1.000						
INDIKATOR SDG's	**Indeks Reformasi Birokrasi**									
PROGRAM 1: PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										
Kegiatan 1: Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	dokumen	1	1	1	1	1	681.04	APBD	Bagian Organisasi
	dokumen laporan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi	dokumen	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik**									
PROGRAM 1: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										
Kegiatan 1: Pembinaan pelayanan publik	buku laporan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik	buku		1	1	1	1	1558.70	APBD	Bagian Organisasi
	Pembinaan role model pelayanan publik	kali		2	2	2	2			
	buku laporan penerapan dan pencapaian SPM Pemkab Sleman	dokumen		1	1	1	1			
	pembinaan inovasi pelayanan publik	kali		1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	**Jumlah akte lahir bagi Gakin**									
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil	Akta Kelahiran	Dokumen	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000	1.831,897	APBD, DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin	Akta Kelahiran Bagi Gakin	Dokumen	150	400	300	150	100	1.406,182	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
INDIKATOR SDG's	**Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak (Usia 0-18 tahun) (Jumlah usia anak yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah usia anak)**									
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil	Akta Kelahiran	Dokumen	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000	1.831,897	APBD, DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021			
Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin	Akta Kelahiran Bagi Gakin	Dokumen	150	400	300	150	100	1.406,182	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
INDIKATOR SDG's	**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran (jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di tahun bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan)**									
PROGRAM 1: PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
Kegiatan 1: Pelayanan Publik Bidang Catatan Sipil	Akta Kelahiran	Dokumen	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000	1.831,897	APBD, DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kegiatan 2: Pelayanan Akta Pencatatan Sipil bagi Keluarga Miskin	Akta Kelahiran Bagi Gakin	Dokumen	150	400	300	150	100	1.406,182	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
INDIKATOR SDG's	**Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat/ pengaduan pelanggaran HAM**									
PROGRAM 1: PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM										
Kegiatan 1: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	RANHAM	Dokumen	4	4	4	4	4	153.05	APBD	Bagian Hukum
INDIKATOR SDG's	**Jumlah proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dat/ atau non ligitasi**									
PROGRAM 1: PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM										
Kegiatan 1 : Pelayanan Bantuan Hukum	Penanganan permasalahan hukum non ligitasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa	jenis bantuan hukum		20	20	20	20	530.2	APBD	Bagian Hukum

TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp. Juta)	Sumber Pendan-aan	Instansi Pelaksana
INDIKATOR SDG's	**Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga**									
PROGRAM 1: KERJASAMA PEMBANGUNAN										
Kegiatan 1 : Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak ketiga	laporan hasil koordinasi dengan pihak ketiga (lembaga pemerintah/ badan hukum/swasta)	dokumen		1	1	1	1	275.00	APBD	Bagian Pemerintahan
	draft kerjasama dengan pihak ketiga	dokumen		25	25	25	25			
	dokumen kerjasama dengan pihak ketiga	dokumen		20	20	20	20			
	dokumen hasil evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga	dokumen		1	1	1	1			

Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Yogyakarta

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Indikator	Indikator TPB Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka kemiskinan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	7.70	7.58	7.35	7.34	7.29	7.10	Dinas Sosial
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerimaProgram perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuh-an khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	80	80	80	80	85	85	Dinas Sosial
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	73.66	73.72	73.77	73.83	73.94	74	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	85.2	85.4	85.6	85.8	86	86.2	Dinas Kesehatan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	128.98	129	129.02	129.04	129.06	129.06	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	141.11	141.17	141.22	141.31	141.39	141.5	Dinas Pendidikan
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana											
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Persentase kampung tangguh bencana	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	40	44	49	53	58	62	BPBD

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	8.81	8.61	8.41	8.21	8.01	7.82	Dinas Kesehatan
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	13	12.8	12.6	12.4	12.2	12	Dinas Kesehatan
2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		85.00	85.20	85.40	85.60	85.80	86.00	Dinas Pertanian dan Pangan

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Jumlah kematian ibu	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	Orang	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.											
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka kematian bayi	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	per 1.000 kelahiran hidup	7.52	7.39	7.26	7.13	7	6.88	Dinas Kesehatan
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ trans-gender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persentase penderita hipertensi mendapat-kan pelayanan kesehatan sesuai standar	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi danProgram nasional.											
3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	73.66	73.72	73.77	73.83	73.94	74	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		1.92	1.91	1.9	1.89	1.88	1.86	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	80	82	84	86	88	90	Dinas Kesehatan
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	11.4	11.34	11.28	11.22	11.16	11.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	88	94	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.											
3.9.1	Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien	Indeks Kualitas Udara	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		66.85	67.05	67.25	67.45	67.65	67.85	Dinas Lingkungan Hidup
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	Indeks Kualitas Air	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		50.2	50.4	50.6	50.8	51	51.2	Dinas Lingkungan Hidup
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	85	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif											
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD terakreditasi A	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	82	83	84	85	86	86	Dinas Pendidikan
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP akreditasi A	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	74	74	74.5	74.5	75	75	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Angka partisipasi kasar SD	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	142.61	142.64	142.67	142.7	142.73	142.76	Dinas Pendidikan
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Angka partisipasi kasar SMP	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	141.11	141.17	141.22	141.31	141.39	141.5	Dinas Pendidikan
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Angka Rata-rata lama sekolah	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	tahun	11.42	11.43	11.43	11.44	11.44	11.45	Dinas Pendidikan
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi.		RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	APM SD (%)	128.98	129	129.02	129.04	129.06	129.06	Dinas Pendidikan
				APM SMP (%)	141.11	141.17	141.22	141.31	141.39	141.5	Dinas Pendidikan
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Persentase guru sesuai kualifikasi	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	92.37	92.47	92.57	92.67	92.77	92.87	Dinas Pendidikan

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	Persen	74	76	78	80	82	84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai denganProgramme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.											
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	11.4	11.34	11.28	11.22	11.16	11.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	85.2	85.4	85.6	85.8	86	86.2	Dinas Kesehatan
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	83.22	84	84.06	85.09	86.21	87.62	Dinas PUPKP

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
8.1.1. (a)	PDB per kapita	PDRB perkapita	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		58,533,947	60,955,762	63,377,577	65,799,392	68,221,207	70,643,023	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	2	4	6	7	8	9	Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Persentase peningkatan upah minimum kota	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	5	5.5	6	6.5	7	7.5	Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase jumlah penganggur	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	5.08	5.03	4.98	4.94	4.9	4.86	Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.											
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	80	85	90	95	98	100	Satpol PP
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1.(b)		Jumlah kunjungan wisatawan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	Kunjungan	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	3,646,519	3,828,845	Dinas Pariwisata

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	82	84	86	88	90	92	Dinas PUPKP

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Koefisien Gini	Rasio gini	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		0.42	0.414	0.408	0.402	0.396	0.39	Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka kemiskinan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	7.70	7.58	7.35	7.34	7.29	7.10	Dinas Sosial

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Angka pertumbuhan ekonomi	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	5.13	5.16	5.19	5.2	5.21	5.23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	Persen	74	76	78	80	82	84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

TUJUAN 11. KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.											
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Persentase rintisan keluarahan budaya yang aktif	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	44	50	56	61	67	72	Dinas Kebudayaan
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	75	77	79	81	83	85	BPBD
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Persentase kampung tangguh bencana	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	40	44	49	53	58	62	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Persentase edukasi proteksi kebakaran	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	95	96	96	97	97	98	Dinas Kebakaran
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	83.22	84	84.06	85.09	86.21	87, 62	Dinas PUPKP
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentasse pengangkutan sampah	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	91.26	92.17	93.99	95.82	97.65	99.47	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	29.19	29.51	29.68	29.85	30.02	30.19	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	5.65	7.98	10.08	11.98	13.7	15.28	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	12	13	14	15	16	17	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.											
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	23.62	27.58	31.36	34.98	38.45	41.77	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	Indeks kualitas atraksi pariwisata	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		80	81.59	83.18	84.77	86.36	87.95	Dinas Pariwisata

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	75	77	79	81	83	85	BPBD

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	29.19	29.51	29.68	29.85	30.02	30.19	Dinas Lingkungan Hidup
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	41.58	41.92	42.25	42.57	42.9	43.22	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Angka kriminalitas	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	Kejadian	1,660	1,628	1,596	1,564	1,532	1,500	Kantor Kesbang
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	0.74	0.73	0.72	0.71	0.7	0.69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	74	76	78	80	82	84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	70	70	75	75	80	80	Dinas Sosial
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		89.37	90.44	91.54	92.63	93.72	94.81	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		BB	BB	BB	BB	BB	A	Sekretariat Daerah
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		69.85	70.28	70.71	71.14	71.57	72	Sekretariat Daerah
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indeks pelayanan publik	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		79.75	80	80.25	80.5	80.75	81	Sekretariat Daerah
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Indeks Layanan Informasi Publik	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93	Dinas Kominfo dan Persandian

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	7.74	0.44	2.15	2.11	2.12	2.08	BPKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	59	59	59	59	59	59	BPKAD
Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.											
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Persentase peningkatan nilai investasi	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	1.04	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.											
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indeks pelaksanaan pembangunan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		86.1	87.2	88.3	89.4	90.5	91.6	Sekretariat Daerah
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.											
17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.	Indeks perencanaan pembangunan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022		91	91.2	91.4	91.6	91.8	92	Bappeda

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Penanggungjawab Pelaksana
						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	19	28	38	48	57	76	Dinas Kominfo dan Persandian
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo dan Persandian

MatrikProgram Kegiatan, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Yogyakarta

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan											
INDIKATOR TPB	1.2.1*Angka kemiskinan										
PROGRAM 1:Program PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											Dinas Sosial
Kegiatan 1: Kegiatan Perlindungan Sosial									4,181,905,037		
	1. Frekuensi Gelar Potensi Anak Panti	Kali	1	1	1	1	1	1			
	2. Laporan Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	3. Jasa Piket Tagana	Orang	56	56	56	56	56	56			
	4. Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan	Kelompok	8	8	8	8	8	8			
	5. Frekuensi Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	Kali	2	2	2	2	2	2			
	6. Frekuensi Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	Kali	1	1	1	1	1	1			
	7. Frekuensi Workshop Komisi Daerah Lansia	Kali	15	15	15	15	15	15			
	8.Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	Kali	3	3	3	3	3	3			
	9. Laporan Seleksi Penghuni RPLU dan RPA	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	10. Laporan Workshop Pelopor Perdamaian	Laporan	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial									4,872,356,780		
	1. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	Kali	3	3	3	3	3	3			
	2. Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kali	12	12	12	12	12	12			
	3. Frekuensi fasilitasi penyaluran BantuanProgram Keluarga Harapan (PKH)	Kali	4	4	4	4	4	4			
	4. Laporan Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	6. Laporan Jenazah Terlantar yang Dimakamkan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	7. Laporan fasilitasi pengaduan subsidi listrik	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	8. Laporan Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	Laporan	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 3 : Kegiatan Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Anak terlantar yang dilayani	Bulan	12	12	12	12	12	12	6,173,932,256		
Kegiatan 4 : Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	Lanjut usia yang dilayani	Bulan	12	12	12	12	12	12	9,714,018,386		
INDIKATOR SDG's	1.3.1 Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial										
PROGRAM 1:Program ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL											Dinas Sosial
Kegiatan 1 : Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)									2,668,034,791		
	1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	Orang	40	55	55	55	55	55			
	2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ	Orang	75	85	85	85	85	85			
	3. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	Orang	40	40	40	40	40	40			
	4. Korban tindak kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	Orang	20	40	40	40	40	40			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	5. Anak rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	Orang	20	20	20	20	20	20			
	6. Laporan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	7. Perempuan rawan sosial eknomi yang mengikuti pelatihan	Orang	20	20	20	20	20	20			
	8. ODHA yang mengikuti penguatan sosial psikologis	Orang	0	20	20	20	20	20			
Kegiatan 2 : Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)									7,612,274,051		
	1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	5. Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	6. Frekuensi Peringatan HDI	Kali	1	1	1	1	1	1			
	7.Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	8. Buku Profil KUBE yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0			
INDIKATOR SDG's	1.4.1. (a) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar										
	1.4.1. (d) Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat									7,274,437,407		
	Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi	Orang	491	491	491	491	491	491			
	Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi	Orang	318	318	318	318	318	318			
	Laporan Surveilans KIA Gizi	Laporan	15	15	15	15	15	15			
	Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	Dokumen	7	7	7	7	7	7			
	Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	Faskes	24	24	24	24	24	24			
	Dokumen Perencanaan KIA Gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk	Kali	2	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan									9,703,503,719		
	Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Institusi	20	20	20	20	20	20			
	Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Sekolah	300	300	300	300	300	300			
	Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Lokasi (Masjid)	200	200	200	200	200	200			
	Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Kali	18	18	18	18	18	18			
	Frekwensi PublikasiProgram kesehatan melalui kegiatan massal	Kegiat-an (Pa-meran Sekaten)	1	1	1	1	1	1			
	Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Profil PHBS	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data layanan lansia di rumah sehat lansia	Dokumen	12	12	12	12	12	12			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3			
Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja									4,973,303,882		
	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	Sampel	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
	Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	Sekolah	50	50	50	50	50	50			
	Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Data pengelolaan limbah medis cair	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM	Kali	6	6	6	6	6	6			
	Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	Puskesmas	5	5	5	5	5	5			
	Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Dokumen kajian review EHRA	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	1.4.1 (c) CPR (Contraceptive Prevalence Rate)										
PROGRAM 1:Program KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA									11,447,017,898		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana											
	Pus yang Terlayani KB	PUS/ Jenis	1210 PUS	8 jenis	7	6	6	6			
	Kampung KB	Kegiatan/ kampung KB	1 kegiatan	14 kampung KB	14	14	14	14			
	Pembinaan dan EvaluasiProgram KB	Pertemuan/ Jenis	16 Perte-muan tingkat Kota, 62 pertemuan tingkat Kecamatan	6 jenis	7	7	7	7			
	Pembinaan Kelompok KB Pria	Kegiatan/ Jenis	32 kegiatan	2 jenis	2	2	2	2			
	Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya	Orang	50	60	60	60	60	60			
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak	Eksemplar	0	500	100	100	100	100			
	Pertemuan Sosialisasi Kespro	Pertemuan/ Jenis	26 pertemuan	3 jenis	4	4	3	2			
	Lomba PIK R	Jenis	0	2	2	2	2	2			
	Dialog Remaja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB	Kegiatan	13	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R	Pertemuan	204	0	0	0	0	0			
	Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R	Kegiatan	3	0	0	0	0	0			
	Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah	Draft	1	0	0	0	0	0			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga											
	Pembinaan Kegiatan Pembangunan Keluarga	Pertemuan/ Jenis	71 pertemuan	3 jenis	3	3	3	3			
	Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS	Kelompok	0	4	4	4	4	4			
	Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS	Jenis	0	1	3	3	3	3			
	Penguatan Jejaring Kegiatan Pembangunan Keluarga	Jenis	0	5	3	3	3	3			
	Pelatihan Kader BKS dan UPPKS	Pertemuan/ Jenis	19 pertemuan	2	3	3	3	3			
	Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi keluarga) --> keluarga muda (<5 tahun), anggota BKB, komunitas	Jenis	0	1	1	1	1	1			
	Promosi hasil kelp. UPPKS	Kegiatan	3	3	3	3	3	3			
	Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1			
	Jumlah pertemuan kelompok BKS	Pertemuan BKB, BKR, BKL	890	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS	Kecamatan	14	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan	Pertemuan	16	0	0	0	0	0			
	Jumlah Family Gathering BKL	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah draft buku peganganProgram KKBPK	Draft	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS	Pertemuan	460	0	0	0	0	0			
	Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta	Event	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja	Pertemuan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota	Pertemuan	17	0	0	0	0	0			
	Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
INDIKATOR SDG's	1.4.1. (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat										
	1.4.1. (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL											Dinas Pendidikan
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan									10,963,981,391		
	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	Kali	3	3	3	3	3	3			
	Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	Kali	3	3	3	3	3	3			
	Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	Kali	2	2	2	2	2	2			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP)	MTMP	10	10	10	10	10	10			
	Pengelolaan insentif Tutor Kesetaraan	Orang	100	70							
	Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	Lembaga	5	4	5	5	6	6			
	Bimbingan Teknis Pengelola TBM	Lembaga	20	20	20	20	20	20			
	Bimbingan TeknisProgram JBM	Kelurahan	45								
	Jumlah rombel Yang mendapat BOSDA SPNF SKB	Rombel	11	16	16	16	16	16			
	Jumlah Pembentukan Kampung Sains	Kampung		1	1	1	1	1			
	Jumlah Pembentukan Kampung Literasi	Kampung		1	1	1	1	1			
	Jumlah Peserta Diksar Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	Orang		350	100	100	100	100			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini									13,107,606,031		
	Pembinaan Layanan Lembaga PAUD	Jenis layanan	4	4	4	4	4	4			
	Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi	Juara	15								
	Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD	Orang	949	850	875	900	918	918			
	Pelatihan Pengelola PAUD	Orang	80	80	80	80	80	80			
	Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	Orang tersertifikasi	220	165	165	165	165	165			
	Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS	Orang tersertifikasi	50	50	50	50	50	50			
	Pengelolaan BOP PAUD	Lembaga	647	450	450	450	450	450			
	Pendataan PAUD	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Gebyar PAUD	Peserta	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
	Bimbingan uji kompetensi pendidik PAUD	Orang	100								
	Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD	Lembaga	50	50	50	50	50	50			
	Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum	Kali	8	8	8	8	8	8			
Kegiatan 3 : Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan									3,444,911,448		
	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	Lembaga	10	10	15	20	25	30			
	Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	Lembaga	30	7	10	15	20	25			
	Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	Dokumen	7	7	7	7	7	7			
	Pendidikan Vokasional	Orang	60	60	60	60	60	60			
	Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	Orang	20	20	20	20	20	20			
	Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas	Cabang Lomba	16								
	Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Lembaga kursus Berprestasi	Kejuaraan	2	2	2	2	2	2			
	Jumlah Kampung Kompeten	Kecamatan		2	3	4	5	6			
	Lomba Rencana Bisnis	Juara			3	3	3	3			
INDIKATOR SDG's	1.5.1 (d) Persentase kampung tangguh bencana										
PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM									12,929,012,192		BPBD

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 1 : Pencegahan Bahaya Bencana Alam											
	Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	Kampung	15	15	10	10	10	10			
	Pelatihan Penanggulangan bencana	Kali	10	15	10	10	10	10			
	Apel Siaga Bencana	Kali	1	1	1	1	1	1			
	Kerja bakti kesiapsiagaan bencana	Kali	0	20	20	20	20	20			
Kegiatan 2 : Penanganan Bencana Alam											
	Operasional Pusdalops PB	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Manajemen Logistik	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Pelatihan Kedaruratan Bencana	Kali	7	4	4	4	4	4			
	Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana											
	Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Monitoring daerah rawan bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Kerja bakti pasca kejadian bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan											
INDIKATOR SDG's	2.1.1. (a) Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang										
	2.2.1. Prevalensi stunting										
PROGRAM 1:Program PELAYANAN KESEHATAN DASAR											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I									5,244,392,560		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 2 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II									3,529,528,533		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 3 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen									7,103,793,951		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 4 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I									7,729,972,976		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 5 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II									4,636,534,740		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 6 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan									5,136,493,980		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 7 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis									10,093,522,710		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 8 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I									8,755,450,550		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 9 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II									5,288,579,425		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 10 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton									6,187,499,136		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 11 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron									10,751,265,472		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 12 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan									10,564,786,839		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 13 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan									4,758,671,214		
	Operasional Pelayanaf Kesehatan Perorangan Puskesmas NG	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 14 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman									4,489,121,702		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 15 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo									14,929,151,860		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 16 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I									13,338,948,885		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 17 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II									7,747,011,337		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 18 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan									9,434,661,196		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 19 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I									5,585,854,075		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 20 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II									3,928,810,920		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 21 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtenge									5,237,710,520		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 22 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I									4,571,022, 586		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 23 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II									6,636,749, 269		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 24 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan									3,708,903, 346		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 25 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis									5,755,710, 865		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 26 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I									2,246,487, 340		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 27 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II									3,801,674,287		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 28 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton									4,245,784,130		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 29 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron									8,582,109,200		
	Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 30 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan									7,021,729,656		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 31 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan									5,004,691,104		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 32 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman									3,244,675,787		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 33 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo									4,177,297,605		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 34 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I									3,042,973,663		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 35 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II									4,003,711,163		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 36 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan									4,793,306,906		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 2 :Program PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"									25,328,351,547		
	Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 2 : Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"									127,168,102,647		
	Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	Dokumen	9	9	9	9	9	9			
PROGRAM 3 :Program UPAYA PELAYANAN KESEHATAN											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan									64,605,302,641		

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakanProgram pelayanan kesehatan dasar	Orang	600	600	600	600	600	600			
	Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankes Primer dan Rujukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data hasil Penilaian kinepja puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Data hasil ASPAK	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Rumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	Rumah Sakit	12	12	12	12	12	12			
	Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK	Laporan	2	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Pelayanan Kesehatan Khusus									2,289,766, 788		
	Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankesus	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3			
	Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer	Kegiatan	4	4	4	4	4	4			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan									114,255,6 31,546		
	Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan persalinan. Petugas Kesehatan. Lintas Sektor dan masyarakat	Kali	31	31	31	31	31	31			
	Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta keluarga Inti serta persalinan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Laporan sosialisasi. monev dan pendampingan akreditasi puskesmas	Laporan	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 4 : Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119									8,211,048, 972		
	Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
PROGRAM 4 :Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat									7,274,437, 407		
	Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi	Orang	491	491	491	491	491	491			
	Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi	Orang	318	318	318	318	318	318			
	Laporan Surveilans KIA Gizi	Laporan	15	15	15	15	15	15			
	Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	Dokumen	7	7	7	7	7	7			
	Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	Faskes	24	24	24	24	24	24			
	Dokumen Perencanaan KIA Gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk	Kali	2	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan									9,703,503, 719		
	Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Institusi	20	20	20	20	20	20			
	Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Sekolah	300	300	300	300	300	300			
	Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Lokasi (Masjid)	200	200	200	200	200	200			
	Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Kali	18	18	18	18	18	18			
	Frekwensi PublikasiProgram kesehatan melalui kegiatan massal	Kegiatan (Pameran Sekaten)	1	1	1	1	1	1			
	Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Profil PHBS	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data layanan lansia di rumah sehat lansia	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3			
Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja									4,973,303, 882		
	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	Sampel	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
	Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	Sekolah	50	50	50	50	50	50			
	Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Data pengelolaan limbah medis cair	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM	Kali	6	6	6	6	6	6			
	Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	Puskesmas	5	5	5	5	5	5			
	Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Dokumen kajian review EHRA	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 5 :Program REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan									3,179,867, 601		
	Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogyakarta	Orang	1200	1200	1200	1200	1200	1200			
	Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan. Pengelola jasa boga dan rumah makan. Pengelola Depot Air Minum dalam kesmasan. pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta	Orang	200	200	200	200	200	200			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Orang	600	600	600	600	600	600			
	Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT	Orang	200	200	200	200	200	200			
	Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan	Kali	14	14	14	14	14	14			
	Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)									3,256,632,395		
	Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	Orang	5	5	5	5	5	5			
	Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	Bulan	10	10	10	10	10	10			
	Dokumen perencanaan SDMK	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi pembinaan SDMK	Kali	17	17	17	17	17	17			
	Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS	Orang	19	19	19	19	19	19			
	Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS	Orang	10	10	10	10	10	10			
	Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan	Orang	52	52	52	52	52	52			
	Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Peserta seminar/kursus/workshop	Orang	220	220	220	220	220	220			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman									56,273,960,771		
	Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Data Monitoring penggunaan obat rasional	Dokumen	4	4	4	4	4	4			
	Data ketersediaan obat dan vaksin	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian	Orang	250	250	250	250	250	250			
	Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar	Orang	50	50	50	50	50	50			
	Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1			
	Data penghapusan obat. vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standar	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina	Orang	1200	1200	1200	1200	1200	1200			
	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan anak sekolah	Sekolah	100	100	100	100	100	100			
	Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa	Sampel	100	100	100	100	100	100			
	Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah	Kali	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Mobil distribusi farmasi tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1			
	Sarana pengolah data kefarmasian tersedia	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Mobil sampling makanan tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 5 :Program PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan									1,431,615, 797		
	Laporan survailens epidemiologi	Laporan	3	3	3	3	3	3			
	Laporan penyelidikan epidemiologi	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Edisi	52	52	52	52	52	52			
	Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan penyebab kematian (couse of death)	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT)	Laporan	17	17	17	17	17	17			
	Laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	2	2	2	2	2	2			
	Data Profil kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal	Sistem	18	18	18	18	18	18			
	Websit kesehatan berjalan optimal	Sistem	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi									15,738,11 2,374		
	Data DBD (Demam Berdarah Dengue)	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	Fokus	400	400	400	400	400	400			
	Laporan survei angka bebas jentik kelurahan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Laporan pengendalian DBD	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis)	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	Orang	200	200	200	200	200	200			
	Data Permasalahan TB-HIV	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS	Orang	120	120	120	120	120	120			
	Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training	Orang	30	30	30	30	30	30			
	Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR	Fasyankes	4	4	4	4	4	4			
	Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare	Dokumen	24	24	24	24	24	24			
	Laporan pelacakan kasus kusta	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	Data	320	320	320	320	320	320			
	Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	Dokumen	4	4	4	4	4	4			
	Jumlah laporan Peningkatan kapasitas layanan HIV	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Data imunisasi. pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	Sekolah	177	177	177	177	177	177			
	Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta	Orang	70	70	70	70	70	70			
	Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas	Dokumen	6	6	6	6	6	6			
	Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular	Kali	25	25	25	25	25	25			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	Orang	270	270	270	270	270	270			
Kegiatan 3 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa									984,484,091		
	Jumlah peserta Workshop Pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA	Orang	900	900	900	900	900	900			
	jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th	Orang	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
	Masyarakat lintasProgram. petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM	Orang	100	100	100	100	100	100			
	Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular	Orang	84	84	84	84	84	84			
	Peningkatan kapasitas POSBINDU	Orang	175	175	175	175	175	175			
INDIKATOR SDG's	2.2.2. (c) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)										
PROGRAM 1:Program PEMBINAAN KETAHANAN PANGAN											Dinas Pertanian dan Pangan
Kegiatan 1 : Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan									2,845,536,432		
	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	dokumen	1	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)			
	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			
	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan	kali	3	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan	Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)	kali	7	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)	Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman)			
	Lomba Bidang Ketahanan Pangan	kali	3	Lomba Bidang Ketahanan Pangan	Lomba Bidang Ketahanan Pangan	Lomba Bidang Ketahanan Pangan	Lomba Bidang Ketahanan Pangan	Lomba Bidang Ketahanan Pangan			
	Bimtek Kampung Pangan Lestari	kali	14	Bimtek Kampung Pangan Lestari	Bimtek Kampung Pangan Lestari	Bimtek Kampung Pangan Lestari	Bimtek Kampung Pangan Lestari	Bimtek Kampung Pangan Lestari			
	Penyuluhan Ketahanan Pangan	jenis	3	Penyuluhan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Ketahanan Pangan			
Kegiatan 2 : Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan									672,248,749		
	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	dokumen	1	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan			
	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			
	Sosialisasi Distribusi beras baru	kali	5	Sosialisasi Distribusi beras baru	Sosialisasi Distribusi beras baru	Sosialisasi Distribusi beras baru	Sosialisasi Distribusi beras baru	Sosialisasi Distribusi beras baru			
PROGRAM 2 :Program PEMBINAAN KEHEWANAN DAN PERIKANAN									11,021,803,913		Dinas Pertanian dan Pangan
Kegiatan 1 : Pembinaan Usaha dan Budidaya Kehewanan dan Perikanan											
	Pelayanan Poliklinik Hewan	bulan	12	Pelayanan Poliklinik Hewan	Pelayanan Poliklinik Hewan	Pelayanan Poliklinik Hewan	Pelayanan Poliklinik Hewan	Pelayanan Poliklinik Hewan			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa	persen	100	Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa	Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa	Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa	Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa	Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa			
Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	lokasi	2	Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik	Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik			
Penguatan jejaring komunitas	kl	5	Penguatan jejaring komunitas	Penguatan jejaring komunitas	Penguatan jejaring komunitas	Penguatan jejaring komunitas	Penguatan jejaring komunitas			
Dokumen Updating Data Peternakan	dokumen	1	Dokumen Updating Data Peternakan	Dokumen Updating Data Peternakan	Dokumen Updating Data Peternakan	Dokumen Updating Data Peternakan	Dokumen Updating Data Peternakan			
Dokumen Updating Data Perikanan	dokumen	1	Dokumen Updating Data Perikanan	Dokumen Updating Data Perikanan	Dokumen Updating Data Perikanan	Dokumen Updating Data Perikanan	Dokumen Updating Data Perikanan			
Restocking Ikan	bibit	20,000	Restocking Ikan	Restocking Ikan	Restocking Ikan	Restocking Ikan	Restocking Ikan			
Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan	kelompok	2	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan			
Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan	klp	11	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan	Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	TPH	415	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban			
	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	kl	7	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan			
	Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu dan keamanan pangannya	unit	149	Jumlah unit usa-ha yang dipantau, dibina & diawasi mutu dan keaman-an panga-nnya	Jumlah unit usa-ha yang dipantau, dibina & diawasi mutu dan keaman-an pang-annya	Jumlah unit usa-ha yang dipantau, dibina & diawasi mutu dan keaman-an pang-annya	Jumlah unit usa-ha yang dipantau, dibina & diawasi mutu dan keaman-an pan-gannya	Jumlah unit usa-ha yang dipantau, dibina & diawasi mutu dan keaman-an pang-annya			
	Pelayanan Rumah Potong Hewan	bulan	12	Pelayanan Rumah Potong Hewan	Pelayanan Rumah Potong Hewan	Pelayanan Rumah Potong Hewan	Pelayanan Rumah Potong Hewan	Pelayanan Rumah Potong Hewan			
	Uji Mutu Laboratoris	sampel	2200	Uji Mutu Laboratoris	Uji Mutu Laboratoris	Uji Mutu Laboratoris	Uji Mutu Laboratoris	Uji Mutu Laboratoris			
	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	kali	9	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan			
PROGRAM 3:Program PEMBINAAN PERTANIAN											Dinas Pertanian dan Pangan
Kegiatan 1 : Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian									3,323,488,490		
	Kebun yang terkelola dengan baik	lokasi	4	Kebun yang terkelola dengan baik	Kebun yang terkelola dengan baik	Kebun yang terkelola dengan baik	Kebun yang terkelola dengan baik	Kebun yang terkelola dengan baik			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Kelompok tani /Gapoktan yang dibina	poktan/ gapoktan	153/45	Kelompok tani/ Gapoktan yang dibina	Kelompok tani/ Gapoktan yang dibina	Kelompok tani/ Gapoktan yang dibina	Kelompok tani/ Gapoktan yang dibina	Kelompok tani/ Gapoktan yang dibina			
	Kontes tanaman hias	kl	1	Kontes tanaman hias	Kontes tanaman hias	Kontes tanaman hias	Kontes tanaman hias	Kontes tanaman hias			
	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	kl	4	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida			
	Dokumen data statistik pertanian	dokumen	1	Dokumen data statistik pertanian	Dokumen data statistik pertanian	Dokumen data statistik pertanian	Dokumen data statistik pertanian	Dokumen data statistik pertanian			
	Kampung Agro Rejowinangun	lokasi	1	Kampung Agro Rejowinangun	Kampung Agro Rejowinangun	Kampung Agro Rejowinangun	Kampung Agro Rejowinangun	Kampung Agro Rejowinangun			
	Gelar Potensi Pertanian	kali	1	Gelar Potensi Pertanian	Gelar Potensi Pertanian	Gelar Potensi Pertanian	Gelar Potensi Pertanian	Gelar Potensi Pertanian			
Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian									547,384,750		
	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	bulan	12	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan	Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan			
	Uji mutu bahan pangan	sampel	250	Uji mutu bahan pangan	Uji mutu bahan pangan	Uji mutu bahan pangan	Uji mutu bahan pangan	Uji mutu bahan pangan			
Tujuan 3 : Kehidupan sehat dan sejahteraan											
INDIKATOR SDG's	3.1.1* Jumlah kematian ibu										
	3.1.2* Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar										
	3.2.2. (a) Angka kematian bayi										
	3.2.2 (b) Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)										
	3.3.1. (a) Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	3.3.2 Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar										
	3.4.1 Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
	3.4.1. (b) Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										
	3.4.2. (a) Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart										
	3.8.1 Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar										
	3.8.2. (a) Persentase penduduk yang mempunyai JKN										
	3.b.1. (a) Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas										
PROGRAM 1:Program PELAYANAN KESEHATAN DASAR											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I									5,244,392, 560		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 2 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II									3,529,528, 533		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 3 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen									7,103,793, 951		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 4 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I									7,729,972, 976		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 5 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II									4,636,534, 740		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 6 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan									5,136,493, 980		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 7 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis									10,093,52 2,710		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 8 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I									8,755,450, 550		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 9 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II									5,288,579, 425		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 10 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton									6,187,499, 136		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 11 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron									10,751,26 5,472		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 12 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan									10,564,78 6,839		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 13 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan									4,758,671, 214		

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Operasional Pelayanaf Kesehatan Perorangan Puskesmas NG	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 14 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman									4,489,121,702		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 15 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo									14,929,151,860		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 16 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I									13,338,948,885		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 17 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II									7,747,011,337		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 18 : Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan									9,434,661,196		
	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 19 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I									5,585,854,075		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 20 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II									3,928,810,920		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 21 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen									5,237,710,520		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 22 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I									4,571,022,586		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 23 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II									6,636,749,269		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 24 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan									3,708,903,346		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 25 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis									5,755,710,865		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 26 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I									2,246,487,340		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 27 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II									3,801,674,287		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 28 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton									4,245,784,130		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 29 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron									8,582,109,200		
	Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 30 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan									7,021,729,656		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 31 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan									5,004,691,104		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 32 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman									3,244,675,787		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 33 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo									4,177,297,605		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 34 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I									3,042,973,663		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 35 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II									4,003,711,163		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 36 : Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan									4,793,306,906		
	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 2 :Program PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"									25,328,351,547		
	Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 2 : Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"									127,168,102,647		
	Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	Dokumen	9	9	9	9	9	9			
PROGRAM 3 :Program UPAYA PELAYANAN KESEHATAN											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan									64,605,302,641		
	Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakanProgram pelayanan kesehatan dasar	Orang	600	600	600	600	600	600			
	Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankes Primer dan Rujukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data hasil Penilaian kinepja puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Data hasil ASPAK	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Rumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	Rumah Sakit	12	12	12	12	12	12			
	Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK	Laporan	2	2	2	2	2	2			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Pelayanan Kesehatan Khusus									2,289,766,788		
	Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Laporan hasil koordinasi & Evaluasi PelayananProgram Yankesus	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3			
	Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer	Kegiatan	4	4	4	4	4	4			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan									114,255,631,546		
	Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan persalinan. Petugas Kesehatan. Lintas Sektor dan masyarakat	Kali	31	31	31	31	31	31			
	Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan. pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan. pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta keluarga Inti serta persalinan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Laporan sosialisasi. monev dan pendampingan akreditasi puskesmas	Laporan	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 4 : Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119									8,211,048,972		
	Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
PROGRAM 4 :Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat									7,274,437,407		
	Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi	Orang	491	491	491	491	491	491			
	Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi	Orang	318	318	318	318	318	318			
	Laporan Surveilans KIA Gizi	Laporan	15	15	15	15	15	15			
	Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	Dokumen	7	7	7	7	7	7			
	Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	Faskes	24	24	24	24	24	24			
	Dokumen Perencanaan KIA Gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk	Kali	2	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan									9,703,503,719		
	Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Institusi	20	20	20	20	20	20			
	Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Sekolah	300	300	300	300	300	300			
	Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Lokasi (Masjid)	200	200	200	200	200	200			
	Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Kali	18	18	18	18	18	18			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Frekwensi PublikasiProgram kesehatan melalui kegiatan massal	Kegiatan (Pameran Seka-ten)	1	1	1	1	1	1			
	Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Profil PHBS	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data layanan lansia di rumah sehat lansia	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3			
Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja									4,973,303,882		
	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	Sampel	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
	Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	Sekolah	50	50	50	50	50	50			
	Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Data pengelolaan limbah medis cair	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM	Kali	6	6	6	6	6	6			
	Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	Puskesmas	5	5	5	5	5	5			
	Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Dokumen kajian review EHRA	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 5 :Program REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan									3,179,867,601		
	Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogyakarta	Orang	1200	1200	1200	1200	1200	1200			
	Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan. Pengelola jasa boga dan rumah makan. Pengelola Depot Air Minum dalam kesmasan. pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta	Orang	200	200	200	200	200	200			
	Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Orang	600	600	600	600	600	600			
	Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT	Orang	200	200	200	200	200	200			
	Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan	Kali	14	14	14	14	14	14			
	Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)									3,256,632,395		
	Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	Orang	5	5	5	5	5	5			
	Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	Bulan	10	10	10	10	10	10			
	Dokumen perencanaan SDMK	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi pembinaan SDMK	Kali	17	17	17	17	17	17			
	Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS	Orang	19	19	19	19	19	19			
	Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS	Orang	10	10	10	10	10	10			
	Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan	Orang	52	52	52	52	52	52			
	Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Peserta seminar/kursus/workshop	Orang	220	220	220	220	220	220			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman									56,273,960,771		
	Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Data Monitoring penggunaan obat rasional	Dokumen	4	4	4	4	4	4			
	Data ketersediaan obat dan vaksin	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian	Orang	250	250	250	250	250	250			
	Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar	Orang	50	50	50	50	50	50			
	Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1			
	Data penghapusan obat. vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standar	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina	Orang	1200	1200	1200	1200	1200	1200			
	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan anak sekolah	Sekolah	100	100	100	100	100	100			
	Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa	Sampel	100	100	100	100	100	100			
	Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah	Kali	1	1	1	1	1	1			
	Mobil distribusi farmasi tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1			
	Sarana pengolah data kefarmasian tersedia	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Mobil sampling makanan tersedia	Unit	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 5 :Program PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan									1,431,615,797		
	Laporan survailens epidemiologi	Laporan	3	3	3	3	3	3			
	Laporan penyelidikan epidemiologi	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Laporan	12	12	12	12	12	12			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Edisi	52	52	52	52	52	52			
	Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan penyebab kematian (couse of death)	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT)	Laporan	17	17	17	17	17	17			
	Laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	2	2	2	2	2	2			
	Data Profil kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal	Sistem	18	18	18	18	18	18			
	Websit kesehatan berjalan optimal	Sistem	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi									15,738,112,374		
	Data DBD (Demam Berdarah Dengue)	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	Fokus	400	400	400	400	400	400			
	Laporan survei angka bebas jentik kelurahan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Laporan pengendalian DBD	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis)	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	Orang	200	200	200	200	200	200			
	Data Permasalahan TB-HIV	Dokumen	2	2	2	2	2	2			
	Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS	Orang	120	120	120	120	120	120			
	Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training	Orang	30	30	30	30	30	30			
	Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR	Fasyankes	4	4	4	4	4	4			
	Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare	Dokumen	24	24	24	24	24	24			
	Laporan pelacakan kasus kusta	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	Data	320	320	320	320	320	320			
	Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	Dokumen	4	4	4	4	4	4			
	Jumlah laporan Peningkatan kapasitas layanan HIV	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Data imunisasi. pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	Sekolah	177	177	177	177	177	177			
	Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta	Orang	70	70	70	70	70	70			
	Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas	Dokumen	6	6	6	6	6	6			
	Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular	Kali	25	25	25	25	25	25			
	Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	Orang	270	270	270	270	270	270			
Kegiatan 3 : Pencegahan. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa									984,484,091		
	Jumlah peserta Workshop Pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Orang	400	400	400	400	400	400			
	Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA	Orang	900	900	900	900	900	900			
	jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th	Orang	1800	1800	1800	1800	1800	1800			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Masyarakat lintasProgram. petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM	Orang	100	100	100	100	100	100			
	Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular	Orang	84	84	84	84	84	84			
	Peningkatan kapasitas POSBINDU	Orang	175	175	175	175	175	175			
INDIKATOR SDG's	3.7.1. (a) CPR (Contraceptive Prevalence Rate)										
	3.7.2. (a) Total Fertility Rate (TFR).										
	3.8.1. (a) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)										
PROGRAM 1:Program PENGENDALIAN PENDUDUK									8,199,253,081		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengendalian Penduduk											
	Jumlah penyusunan grand design kependudukan	Buku/ Kali	1	0	4	5	6	6			
	Pertemuan FAPSEDU	Pertemuan	18	4	4	5	5	5			
	Pertemuan FAPSEDU Kecamatan	Kecamatan	0	0	7	0	0	0			
	Peningkatan Kapasitas Anggota Fapsedu Kecamatan	Kecamatan	0	7	0	0	0	0			
	Penyusunan Modul Edukasi Pengendalian Penduduk	Dokumen	0	1	0	0	0	0			
	Penyusunan Parameter Kebijakan Kependudukan	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
	Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan	Dokumen	0	0	1	0	0	0			
	Penyusunan SOP Pengendalian Penduduk	Laporan	0	0	0	1	0	1			
	Penyusunan Evaluasi Kependudukan	Dokumen	0	0	1	1	0	0			
	Penyusunan Modul FAPSEDU		0	0	0	0	0	0			
	Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Kader IMP	Orang	0	65	75	0	75	0			
	Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi PKK	Orang	0	0	0	75	0	0			
	Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi LPMK	Orang	0	0	0	0	75	0			
	Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Karang Taruna	Orang	0	0	0	0	0	75			
	Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Mitra Keluarga	Orang	0	0	0	0	60	0			
	Sosialisasi Isu-isu Strategis Kependudukan bagi Pengurus Fapsedu	Orang	0	0	0	70	70	70			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Aparatur	Orang	0	70	0	0	0	0			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi PKK dan BP 4	Orang	0	90	0	0	0	85			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Remaja	Orang	0	85	85	0	0	0			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKB	Orang	0	0	0	75	0	0			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKR	Orang	0	0	0		85	0			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKL	Orang	0	0	0	100	0	0			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi PPKBD	Orang	0	0	0	0	624	624			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Sub PPKBD	Orang	0	0	0	0	65	65			
	Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Tenaga Pengajar	Orang	0	0	0	0	0	0			
	Pembuatan Display Pojok Kependudukan	Paket	0	1	0	0	0	0			
	Jumlah cetak modul kependudukan SMP	Buku	100	0	0	0	0	0			
	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan bagi Camat, Lurah dan PKB	Orang	85	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas FAPSEDU	Kegiatan	2	0	0	0	0	0			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah pertemuan seleksi pembinaan KB KS tingkat Kota	Lomba	12	0	0	0	0	0			
	Jumlah peringatan Hari Keluarga tingkat Propinsi	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
	Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan	Kegiatan	63	2	2	2	2	2			
	Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga)	Jenis	0	3	3	3	3	3			
	Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)Program KKBPK (media cetak, radio, televisi, Mobil Unit Penerangan, PMPS)	Jenis/ Media	10	5	5	5	5	5			
	Frekuensi pembinaan IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana)	Kali	0	1	1	1	1	1			
	Pembinaan Paguyuban Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	Kegiatan	0	2	2	2	2	2			
	Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi	Lembaga	0	1	1	1	1	1			
	Frekuensi penguatan jejaringProgram KKBPK	Kali	0	2	2	2	2	2			
	Jumlah hari KIE melalui Mupen	Hari	36	0	0	0	0	0			
	Jumlah hari promosiProgram KB KS melalui PMPS	Hari	45	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan)	Pertemuan	15	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan KKG PKK KB Kesehatan	Pertemuan	15	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan rakercab IPeKB	Pertemuan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan Operasional IMP	IMP	3192	0	0	0	0	0			
	Jumlah pembinaan paguyuban IMP	Kegiatan	2	0	0	0	0	0			
PROGRAM 2:Program KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA									11,447,017,898		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana	Pus yang Terlayani KB	PUS/ Jenis	1210 PUS	8 jenis	7	6	6	6			
	Kampung KB	Kegiatan/ kampung KB	1 kegiatan	14 kampung KB	14	14	14	14			
	Pembinaan dan EvaluasiProgram KB	Pertemuan/ Jenis	16 Perte-muan ting-kat Kota, 62 pert-emuan tingkat Kecamatan	6 jenis	7	7	7	7			
	Pembinaan Kelompok KB Pria	Kegiatan/ Jenis	32 kegiatan	2 jenis	2	2	2	2			
	Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya	Orang	50	60	60	60	60	60			
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak	Eksemplar	0	500	100	100	100	100			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Pertemuan Sosialisasi Kespro	Pertemuan/ Jenis	26 pertemuan	3 jenis	4	4	3	2			
	Lomba PIK R	Jenis	0	2	2	2	2	2			
	Dialog Remaja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB	Kegiatan	13	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R	Pertemuan	204	0	0	0	0	0			
	Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R	Kegiatan	3	0	0	0	0	0			
	Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah	Draft	1	0	0	0	0	0			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga											
	Pembinaan Kegiatan Pembangunan Keluarga	Pertemuan/ Jenis	71 pertemuan	3 jenis	3	3	3	3			
	Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS	Kelompok	0	4	4	4	4	4			
	Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS	Jenis	0	1	3	3	3	3			
	Penguatan Jejaring Kegiatan Pembangunan Keluarga	Jenis	0	5	3	3	3	3			
	Pelatihan Kader BKS dan UPPKS	Pertemuan/ Jenis	19 pertemuan	2	3	3	3	3			
	Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi keluarga) --> keluarga muda (< 5 tahun), anggota BKB, komunitas	Jenis	0	1	1	1	1	1			
	Promosi hasil kelp. UPPKS	Kegiatan	3	3	3	3	3	3			
	Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1			
	Jumlah pertemuan kelompok BKS	Pertemuan BKB, BKR, BKL	890	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS	Kecamatan	14	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan	Pertemuan	16	0	0	0	0	0			
	Jumlah Family Gathering BKL	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah draft buku peganganProgram KKBPK	Draft	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS	Pertemuan	460	0	0	0	0	0			
	Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta	Event	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja	Pertemuan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota	Pertemuan	17	0	0	0	0	0			
	Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
INDIKATOR SDG's	3.9.1. Indeks Kualitas Udara										
PROGRAM 1:Program PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN									9,237,000,000		

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Kegiatan 1 : Kajian Dampak Lingkungan											Dinas Lingkungan Hidup
	Kajian lingkungan hidup yang tersusun.	Dokumen	4	2	4	4	3	3			
	Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan.	Dokumen	850	850	850	850	850	850			
	Kebijakan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan.	Regulasi	1	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3											
	Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun.	Unit	100	75	50	50	50	50			
	Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan.	Izin	25	25	25	25	25	25			
	Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dipantau.	Usaha/ Kegiatan	40	40	50	50	60	60			
INDIKATOR SDG's	3.9.2. Indeks Kualitas Air										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP									13,151,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup											
	Sekolah dan PP yang dibina menjadi sekolah berwawasan lingkungan.	Sekolah/ PP	254	271	284	297	310	322			
	Jumlah Kampung rintisan Kampung Iklim.	RW	65	79	93	107	121	135			
	Penyuluhan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup.	Jenis media publikasi	6	7	8	9	9	9			
Kegiatan 2 : Penaatan dan Pemantauan Lingkungan											
	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara.	Laporan	4	4	4	4	4	4			
	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air.	Laporan	3	3	3	3	3	3			
	Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau.	Usaha	80	115	120	125	130	135			
Kegiatan 3 : Pengujian Kualitas Lingkungan											
	Layanan pengujian parameter kualitas air.	Parameter	17	19	21	23	25	28			
	Layanan pengujian parameter kualitas udara.	Parameter	6	7	8	9	10	11			
Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas											
INDIKATOR SDG's	4.1.1. (a) Persentase SD terakreditasi A										
	4.1.1. (b) Persentase SMP akreditasi A										
	4.1.1. (d) Angka partisipasi kasar SD										
	4.1.1. (e) Angka partisipasi kasar SMP										
	4.1.1. (g) Angka Rata-rata lama sekolah										
	4.5.1* Angka partisipasi murni SD dan SMP										
	4.c.1* Persentase guru sesuai kualifikasi										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR											Dinas Pendidikan
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD									8,001,099,144		
	Pendalaman Materi Ujian Sekolah Dasar (USDA)	Kali	30	30	30	30	30	30			
	Workshop penyusunan dok kurikulum 2013	Dokumen	21	165	164	164	164	164			
	Pelatihan penulisan soal ujian	Guru	30	30	30	30	60	60			
	Pengembangan Literasi Sekolah	Sekolah		30	30	40	50	60			
	Test Pendalaman Materi USDA	Kali	2	2	2	2	2	2			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas 3	Kali	1								
	Ujian Sekolah IPS dan PKN	Mapel	1								
	ujian Sekolah Daerah 3 mapel	Kali	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	Guru		30	30	30	30	30			
	Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA	Guru		60	60	60	60	60			
	Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	Sekolah		165	165	165	165	165			
	Frekuensi Pendalaman Materi	Kali		60	60	60	60	60			
	Frekuensi tes Pendalaman Materi USDA	Kali		2	1	1	1	1			
	Frekuensi Peningkatan dan Pembelajaran Kurikulum										
Kegiatan 2 : Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD									118,572,4 72,426		
	Jumlah Sekolah peserta Workshop manajemen sekolah	Sekolah	165	166	164	164	164	164			
	Jumlah Sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah	Sekolah	15	40	40	40	40	40			
	Jumlah Sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian penataan, dan penutupan sekolah	Sekolah	5	5	4	4	4	4			
	Lomba Sekolah sehat dan kantin sehat	Kejuaraan	4								
	Lomba gugus depan unggul SD	Kejuaraan	2	1	1	1	1	1			
	Pemetaan Ketercapaian SNP	SD	165								
	Sister School										
	Pengembangan Budaya Lingkungan Sekolah										
	Pengadaan Media Pembelajaran										
	Pengadaan Mebelair Perpustakaan	Ruang	8								
	Pengadaan Meubelair Ruang guru	Jenis	3								
	Pengadaan Meja Kursi siswa	Buah	800	1000	1000	1000	1000	1000			
	Pengadaan Sarpras ABK										
	Pembangunan Green Room ABK	Sekolah	4								
	Pengadaan Sarpras Green Room ABK	Sekolah	5								
	Rehab Sekolah	Paket	4	8							
	Up-grade Mobil Pusat Sumber Inklusi	Mobil	1								
	BOS SD Negeri	Sekolah	90	90	89	88	88	88			
	Jumlah kejuaraan lomba PPK	Kejuaraan	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Unit Pengadaan sarpras Sekolah	Sekolah	20	20	20	20	20	20			
	Lomba budaya mutu	Kejuaraan	1	1	1	1	1	1			
	Pengadaan Almari kelas	Buah	100	100	100	100	100	100			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Kesiswaan SD									9,903,237, 209		
	Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	Kejuaraan	6								
	FLSSN Sekolah Dasar (SD)	Kejuaraan	69	9	9	9	9	9			
	Olimpiade Sain Nasional (OSN)	Kejuaraan	6	2	2	2	2	2			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	Kejuaraan	6	11	11	11	11	11			
	Gebyar Seni SD	Kali	1								
	MTQ SD	Kejuaraan	24	9	14	14	14	14			
	Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	Kejuaraan		1	1	1	1	1			
	Kegiatan Klinik saint	Kegiatan		1	1	1	1	1			
	Jumlah Kejuaraan Lomba sekolah sehat	Kejuaraan	3	3	3	3	3	3			
PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA											Dinas Pendidikan
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP									10,155,187,558		
	Pendalaman materi UN SMP	Mapel	4		4	4	4	4			
	Frekuensi Pendalaman Materi Ujian nasional (Bimbel)	Kali		100	108	116	124	132			
	Tes Pendalaman Materi UN SMP	Sekolah/ Kali	66	2	2	2	2	2			
	Bedah SKL UN SMP	Mapel	4	4	4	4	4	4			
	Workshp penyusunan dok Kurikulum	Dokumen	16	65							
	Pelatihan penulisan soal ujian	Guru	20	90	120	150	160	180			
	Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	Sekolah	16	58	58	58	58	58			
	Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester)	Sekolah	7	4	5	6	7	8			
	Penilaian akhir semester	Sekolah		58	58	58	58	58			
	Jumlah sekolah pelaksana tes pendalaman materi UNBK SMP	Sekolah		65	65	65	65	65			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP									102,501,069,427		
	Workshop Manajemen SNP										
	Diklat Penguatan Manajemen Sekolah	Sekolah	59	58	58	58	58	58			
	Pendampingan Akreditasi Sekolah	Sekolah	2	30	16	7	3	3			
	Pemetaan Ketercapaian SNP	Sekolah	16								
	Workshop EDS	Sekolah	59	58	58	58	58	58			
	Verifikasi Pendirian dan Penutupan Sekolah	Sekolah	3	4	3	3	3	3			
	Pengadaan Sarpras Kids Atletik, Media Pembelajaran dan Meubelair Perpustakaan Sekolah	Paket	7								
	Rehab Sekolah	Paket	4								
	Pengadaan Komputer SMP	Unit	288	396							
	BOS SMP Negeri	Sekolah	16	16	16	16	16	16			
	Jumlah Pengadaan Meubelair Ruang Kelas										
	Jumlah Pengadaan Mesin RISO	Sekolah		7	9						
	Jumlah Unit Pengadaan Sarpras Sekolah	Sekolah		16	8	8	8	8			
	Jumlah Pemeliharaan Gedung Sekolah	Sekolah		2	2	2	3	3			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Kesiswaan SMP									7,749,603,523		
	OSN SMP	Medali	5	5	5	5	5	5			
	OOSN SMP	Medali	5	5	5	5	5	5			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	FLSN	Medali	5	5	5	5	5	5			
	Jelajah Museum	Kali									
	MTQ SMP	Medali	2								
	Lomba Karya Tulis SMP	Medali	5	14	14	14	14	14			
	Pekan Budaya Jawa	Medali	4								
	Liga Pelajar Indonesia	Medali	4	7	7	7	7	7			
	Gelar Pelajar Jogja	Kali	2	1	1	1	1	1			
	Pameran Pendidikan	Kali	10	10	10	10	10	10			
	Pameran Sekaten	Kali	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	Kejuaraan		4	4	4	4	4			
	Pengembangan Minat Bakat Siswa	Siswa		25	26	26	26	26			
	Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	Siswa		200	200	200	200	200			
	Jumlah Siswa SMP Peserta Soft Skill KMS	Siswa		1000	1000	1000	1000	1000			
PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL											Dinas Pendidikan
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan									10,963,981,391		
	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	Kali	3	3	3	3	3	3			
	Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	Kali	3	3	3	3	3	3			
	Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP)	MTMP	10	10	10	10	10	10			
	Pengelolaan insentif Tutor Kesetaraan	Orang	100	70							
	Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	Lembaga	5	4	5	5	6	6			
	Bimbingan Teknis Pengelola TBM	Lembaga	20	20	20	20	20	20			
	Bimbingan TeknisProgram JBM	Kelurahan	45								
	Jumlah rombel Yang mendapat BOSDA SPNF SKB	Rombel	11	16	16	16	16	16			
	Jumlah Pembentukan Kampung Sains	Kampung		1	1	1	1	1			
	Jumlah Pembentukan Kampung Literasi	Kampung		1	1	1	1	1			
	Jumlah Peserta Diksar Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	Orang		350	100	100	100	100			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini									13,107,606,031		
	Pembinaan Layanan Lembaga PAUD	Jenis layanan	4	4	4	4	4	4			
	Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi	Juara	15								
	Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD	Orang	949	850	875	900	918	918			
	Pelatihan Pengelola PAUD	Orang	80	80	80	80	80	80			
	Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	Orang tersertifikasi	220	165	165	165	165	165			
	Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS	Orang tersertifikasi	50	50	50	50	50	50			
	Pengelolaan BOP PAUD	Lembaga	647	450	450	450	450	450			
	Pendataan PAUD	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Gebyar PAUD	Peserta	1000	1000	1000	1000	1000	1000			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Bimbingan uji kompetensi pendidik PAUD	Orang	100								
	Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD	Lembaga	50	50	50	50	50	50			
	Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum	Kali	8	8	8	8	8	8			
Kegiatan 3 : Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan									3,444,911,448		
	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	Lembaga	10	10	15	20	25	30			
	Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	Lembaga	30	7	10	15	20	25			
	Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	Dokumen	7	7	7	7	7	7			
	Pendidikan Vokasional	Orang	60	60	60	60	60	60			
	Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	Orang	20	20	20	20	20	20			
	Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas	Cabang Lomba	16								
	Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Lembaga kursus Berprestasi	Kejuaraan	2	2	2	2	2	2			
	Jumlah Kampung Kompeten	Kecamatan		2	3	4	5	6			
	Lomba Rencana Bisnis	Juara			3	3	3	3			
PROGRAM 3 :Program PENGEMBANGAN PENDIDIKAN											Dinas Pendidikan
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan									10,624,238,664		
	Pengembangan Kompetensi Guru	Orang	60 orang	400 orang	250 orang	250 orang	250 orang	225 orang			
	Workshop MGMP/KKG	Orang	40 orang								
	Kualifikasi Guru S1 dan S2	Guru	35 guru								
	Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi	Juara	4 juara								
	Diklat Calon kepala sekolah			50 orang			50 orang				
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Orang	35 orang	40 kasek	40 kasek	40 kasek	40 kasek	40 kasek			
	Pelatihan PTK	Guru	40 guru								
	Pelatihan Administrasi Sekolah	Orang	40 orang	120 orang	100 orang	90 orang	70 orang	60 orang			
	Pelatihan Guru UKS	Orang	60 orang								
	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	Orang	50 orang								
	Diklat Asesor PKG	Orang	30 orang								
	Diklat Penilai Angka Kredit	Orang	15 orang								
	Seminar Karya Guru	Guru	100 Guru								
	Guru Pembelajar	Guru	28 Guru	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang			
	Jumlah peserta Workshop Lesson Studi	Guru		30 guru	35 guru	40 guru	45 guru	50 guru			
	Jumlah Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi dan OSN Guru	Kejuaraan		4 kejuaraan	13 kejuaraan	13 kejuaraan	13 kejuaraan	13 kejuaraan			
	Jumlah peserta kualifikasi tenaga Pendidik S2	Guru		5 guru	10 guru	10 guru	10 guru	10 guru			
	Jumlah peserta Pembinaan Pegawai/ guru	Orang		500 orang	400 orang	500 orang	500 orang	550 orang			
	Jumlah Peserta Pelatihan Karya Tulis ilmiah	Guru		60 guru	65 guru	70 guru	75 guru	80 guru			
	Jumlah Peserta guru Pembelajar	Guru		600 guru	500 guru	450 guru	300 guru	300 guru			
	Jumlah peserta mengusulkan Angka Kredit	Orang		115 orang	120 orang	125 orang	130 orang	150 orang			
	Kualifikasi Guru S1	Guru		50 guru	45 guru	30 guru					
Kegiatan 2 : Pengelolaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan									56,126,325,586		

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pengelolaan Insentif PTT Kota dan DIY	Guru	3059 Guru								
	Pengelolaan Sertifikasi Guru	Orang	178 orang	100 orang	105 orang	110 orang	115 orang	117 orang			
	Pengelolaan TPG dan TAMSIL PNSD	Orang	3045 orang								
	Pengelolaan dan Penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban	Orang	329 Orang	328 orang							
	Pengelolaan dan penyaluran TPP	Orang	2750 Orang	2750 orang	2750 orang	2740 orang	2780 orang	2785 orang			
	Penyaluran Tunjangan Profesi	Orang	1838 orang								
	Penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban	Orang	329 orang								
	Penyusunan Perwal Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY	Dokumen	1 dokumen								
	Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikelola	Orang		3000 orang	3010 orang	3015 orang	3020 orang	3025 orang			
	Pengelolaan TAMSIL PNSD	Orang		110 orang	112 orang	114 orang	116 orang	118 orang			
	Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	Orang		3000 orang	3000 orang	3010 orang	3015 orang	3020 orang			
	Jumlah penerima Insentif GTT Pusat yang dikelola	Orang		160 orang	161 orang	162 orang	163 orang	164 orang			
	Jumlah penerima Gaji Naban yang dikelola	Orang		328 orang	327 orang	327 orang	326 orang	326 orang			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan									17,616,359,164		
	KBS Online	Kali	216 kali	216 kali	216 kali	216 kali	216 kali	216 kali			
	Rangkuman data Pendidikan	Dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
	Pengelolaan DAPODIK	Sekolah	443 SP	443 sekolah	443 sekolah	443 sekolah	443 sekolah	443 sekolah			
	Penyusunan Buku Informasi	Eksemplar	400 eks	400 eks	400 eks	400 eks	400 eks	400 eks			
	Penyusunan Liflet Dinas Pendidikan	Eksemplar	500 eks	500 eks	500 eks	500 eks	500 eks	500 eks			
	Penyusunan kalender Pendidikan	Eksemplar	650 eks	650 eks	650 eks	650 eks	650 eks	650 eks			
	Pengelolaan Wabsite Dinas	Bulan	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl			
	Pendaftaran PPDB	Sekolah	45 sekolah	60 sekolah	60 sekolah	60 sekolah	60 sekolah	60 sekolah			
	Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	Aplikasi	2 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi			
	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	Aplikasi		10 aplikasi	10 aplikasi	20 aplikasi	30 aplikasi	40 aplikasi			
Kegiatan 4 : Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah									175,259,688,865		
	Pengelolaan dana JPD	Siswa	14.500 siswa	15689 siswa	15499 siswa	15532 siswa	15530 asiswa	15415 asiswa			
	Pengelolaan Beasiswa dan PIP	Siswa	2000 siswa	12500 siswa	11000 siswa	11500 siswa	12000 siswa	12500 siswa			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pengelolaan Dana Tunggakan	Siswa	150 siswa	90 siswa	75 siswa	60 siswa	45 siswa	30 siswa			
	Pengelolaan PKH	Siswa	1500 siswa								
	Pengelolaan Retrivel	Siswa	15 siswa	15 siswa	15 siswa	15 siswa	15 siswa	15 siswa			
Kegiatan 5 : Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA									228,444,739,515		
	Pengelolaan APBS	Sekolah	318 sekolah	318 sekolah	318 sekolah	318 sekolah	318 sekolah	318 sekolah			
	Pengelolaan BOS	Sekolah	318 sekolah								
	Pengelolaan BOSDA Negeri	Sekolah	129 sekolah	109 sekolah	109 sekolah	109 sekolah	109 sekolah	109 sekolah			
	Pengelolaan BOSDA Swasta	Sekolah	189 sekolah	349 sekolah	349 sekolah	349 sekolah	349 sekolah	349 sekolah			
	Pengelolaan Dana Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	Sekolah	318 sekolah	231 sekolah	231 sekolah	231 sekolah	231 sekolah	231 sekolah			
	Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	Sekolah	318 sekolah	109 sekolah	109 sekolah	109 sekolah	109 sekolah	109 sekolah			
Kegiatan 6 : Pengelolaan Pendidikan Inklusi									6,605,533,693		
	Workshop Kurikulum ABK	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			
	Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi	Sekolah	45 sek	45 sek	50 sek	55 sek	60 sek	65 sek			
	AMT GPK	GPK	110 GPK								
	Pengelolaan Insentif GPK	GPK	110 GPK	110 GPK	115 GPK	120 GPK	125 GPK	130 GPK			
	Pendataan ABK di SPPI	Siswa	150 siswa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	Guru	100 guru	100 guru	150 guru	160 guru	170 guru	180 guru			
	Pelatihan pendidikan inklusi Tk lanjut untuk guru/GPK	Guru			150 guru	160 guru	170 guru	180 guru			
	Assesmen siswa	Siswa	150 siswa	150 siswa	150 siswa	160 siswa	170 siswa	180 siswa			
	Diklat vokasi membuat kue	Orang	35 orang	15 orang							
	Diklat vokasi melukis kaca	Orang	35 orang								
	Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	Orang	106 orang	35 orang							
	Diklat vokasi	Orang			90 orang	90 orang	90 orang	90 orang			
Tujuan 5 : Kesetaraan gender											
INDIKATOR SDG's	5.2.1. (a) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan										
	5.2.2. (a) Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani										
PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN									6,666,935,242		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengarusutamaan Gender											
Kegiatan 2 : Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak											Perlindungan Anak
INDIKATOR SDG's	5.6.1. (a) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)										
PROGRAM 1 :Program KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA									11,447,017,898		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana											
	Pus yang Terlayani KB	PUS/ Jenis	1210 PUS	8 jenis	7	6	6	6			
	Kampung KB	Kegiatan/ kampung KB	1 kegiatan	14 kampung KB	14	14	14	14			
	Pembinaan dan EvaluasiProgram KB	Pertemuan/ Jenis	16 Pertemuan tingkat Kota, 62 pertemuan tingkat Kecamatan	6 jenis	7	7	7	7			
	Pembinaan Kelompok KB Pria	Kegiatan/ Jenis	32 kegiatan	2 jenis	2	2	2	2			
	Pelatihan Konseling bagi Pendidik dan Konselor Sebaya	Orang	50	60	60	60	60	60			
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi melalui Media Cetak	Eksemplar	0	500	100	100	100	100			
	Pertemuan Sosialisasi Kespro	Pertemuan/Jenis	26 pertemuan	3 jenis	4	4	3	2			
	Lomba PIK R	Jenis	0	2	2	2	2	2			
	Dialog Remaja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB	Kegiatan	13	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R	Pertemuan	204	0	0	0	0	0			
	Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R	Kegiatan	3	0	0	0	0	0			
	Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah	Draft	1	0	0	0	0	0			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan Pembangunan Keluarga											
	Pembinaan Kegiatan Pembangunan Keluarga	Pertemuan/ Jenis	71 perte-muan	3 jenis	3	3	3	3			
	Penguatan Kelompok BKS dan UPPKS	Kelompok	0	4	4	4	4	4			
	Pendampingan Kelompok BKS dan UPPKS	Jenis	0	1	3	3	3	3			
	Penguatan Jejaring Kegiatan Pembangunan Keluarga	Jenis	0	5	3	3	3	3			
	Pelatihan Kader BKS dan UPPKS	Pertemuan/ Jenis	19 perte-muan	2	3	3	3	3			
	Sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (penerapan 8 fungsi keluarga) --> keluarga muda (< 5 tahun), anggota BKB, komunitas	Jenis	0	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Promosi hasil kelp. UPPKS	Kegiatan	3	3	3	3	3	3			
	Pembinaan dan seleksi bidang Pembangunan Keluarga	Kegiatan	0	1	1	1	1	1			
	Jumlah pertemuan kelompok BKS	Pertemuan BKB, BKR, BKL	890	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS	Kecamatan	14	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan	Pertemuan	16	0	0	0	0	0			
	Jumlah Family Gathering BKL	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah draft buku peganganProgram KKBPK	Draft	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS	Pertemuan	460	0	0	0	0	0			
	Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta	Event	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja	Pertemuan	1	0	0	0	0	0			
	Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota	Pertemuan	17	0	0	0	0	0			
	Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS	Kegiatan	1	0	0	0	0	0			
Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi yang layak											
INDIKATOR SDG's	6.1.1 Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT											Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 : Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat									7,274,437,407		
	Petugas mendapatakan update knowladge dalam pelayanan KIA Gizi	Orang	491	491	491	491	491	491			
	Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi	Orang	318	318	318	318	318	318			
	Laporan Surveilans KIA Gizi	Laporan	15	15	15	15	15	15			
	Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	Dokumen	7	7	7	7	7	7			
	Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	Faskes	24	24	24	24	24	24			
	Dokumen Perencanaan KIA Gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat Kota Yk	Kali	2	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan									9,703,503,719		
	Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Institusi	20	20	20	20	20	20			
	Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Sekolah	300	300	300	300	300	300			
	Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	Lokasi (Masjid)	200	200	200	200	200	200			
	Frekwensi Siaran Radio. TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Kali	18	18	18	18	18	18			
	Frekwensi PublikasiProgram kesehatan melalui kegiatan massal	Kegiatan (Pameran Sekaten)	1	1	1	1	1	1			
	Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Profil PHBS	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data layanan lansia di rumah sehat lansia	Dokumen	12	12	12	12	12	12			
	Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3			
Kegiatan 3 : Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja									4,973,303,882		
	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	Sampel	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
	Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	Sekolah	50	50	50	50	50	50			
	Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Data Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Data pengelolaan limbah medis cair	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM	Kali	6	6	6	6	6	6			
	Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya	Puskesmas	18	18	18	18	18	18			
	Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	Puskesmas	5	5	5	5	5	5			
	Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja	Kali	2	2	2	2	2	2			
	Dokumen kajian review EHRA	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	6.2.1. (e) Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai										
PROGRAM 1:Program PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN											Dinas PUPKP
Kegiatan 1 : Peningkatan kualitas sarana prasarana dasar permukiman									73,394,375,538		
	Pembangunan Sambungan Rumah	SR	262 SR	262 SR	262 SR	262 SR	262 SR	262 SR			
	Penanganan Talud Permukiman	meter	82,6 m	90 m	90 m	90 m	90 m	90 m			
	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	%	83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%			
Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi											
INDIKATOR SDG's	8.3.1. (c) Persentase peningkatan omset UKM yang dibina										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MIKRO											Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Kegiatan 1 : Kemitraan dan Pembiayaan UMK									5,456,633,919		
	Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK		9 kali	-	-	-	-	-			
	UMK Promo dan peluang investasi		4 kali	-	-	-	-	-			
	Gebyar UMK		1 kali	-	-	-	-	-			
	Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK		2 kali	-	-	-	-	-			
	Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK		2 kali	-	-	-	-	-			
	Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM)		-	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan			
	Pameran dan Promosi Produk UMK		-	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali			
	Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak		-	7 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali			
	Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK		-	6 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali			
	Penyusunan Mekanisme Tentang UMK		-	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Fasilitasi Legalitas bagi UMK		-	0	10 pelaku UMK	10 pelaku UMK	10 pelaku UMK	10 pelaku UMK			
	Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi		-	2 draft	-	-	-	-			
	Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta		-	-	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft			
	Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi		-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
Kegiatan 2 : Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK									6,653,515, 482		
	Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp) IV"		1 kali/ paket	-	-	-	-	-			
	"Pengembangan wawasan Dekranasda"		0 Kali	-	-	-	-	-			
	Gathering kemitraan member dekranas		1 kali	-	-	-	-	-			
	"Ajang promosi dekranas pameran"		2 kali	-	-	-	-	-			
	"Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas"		4 orang,2 lokasi	-	-	-	-	-			
	"Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja"		250 ek-semplar	-	-	-	-	-			
	"Cetak Buku batikwarna alam"		250 ek-semplar	-	-	-	-	-			
	Pendampingan IUM		14 Kec	-	-	-	-	-			
	"Operasional Pusat Pengembangan UMKM"		5 org/11bln	-	-	-	-	-			
	"Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM"		3 org x 11 bln	-	-	-	-	-			
	Pengembangan produk UMKM di luar Daerah"		3 kali	-	-	-	-	-			
	Indonesia Fashion Week (IFW)		3 paket	-	-	-	-	-			
	Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil		0 paket	-	-	-	-	-			
	Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM		1 paket	-	-	-	-	-			
	Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM		3 kali	-	-	-	-	-			
	Studi Komparasi Kajian		3 kali	-	-	-	-	-			
	Penumbuhan Wirausaha Baru		-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda		-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Promosi Produk UMK		-	6 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi			
	Kajian Promosi Usaha Mikro		-	1 kali	-	-	-	-			
	Pelatihan Manajemen Pemasaran		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Updating Database UMK		1 paket	-	-	-	-	-			
INDIKATOR SDG's	**8.5.1* Persentase peningkatan upah minimum kota**										
PROGRAM 1:Program PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA											
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan									1,568,159, 456		Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
	FGD Jaminan Sosial	Kali	2	0	0	0	0	0			
	Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	Bulan	11	0	0	0	0	0			
	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Laporan	0	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial	perusahaan	40	24	24	24	24	24			
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	perusahaan	40	24	24	24	24	24			
	Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	kali/ per-usahaan	3	24	24	24	24	24			
	Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis	kali/ per-usahaan	1	24	24	24	24	24			
	Sosialisasi Penetapan UMK 2019	kali/ per-usahaan	1	200	200	200	200	200			
Kegiatan 2 : Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja									2,267,523,000		
	Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .	Siswa	2100	0	0	0	0	0			
	Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh	Buah	1	0	0	0	0	0			
	Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Buah	1	0	0	0	0	0			
	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	perusahaan	0	50	50	50	50	50			
	Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	0	30	30	30	30	30			
	Deteksi Dini Ketenagakerjaan	Perusahaan	0	24	24	24	24	24			
	Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	perusahaan	0	40	40	40	40	40			
	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Kesepakatan	0	3	3	3	3	3			
	Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	Bulan	0	3	3	3	3	3			
	Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
	Verifikasi SP/SB	Kali	0	1	1	1	1	1			
	Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	8.5.2* Persentase jumlah penganggur										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
Kegiatan 1 : Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja									12,739,254,242		Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
	Pencari Kerja yang dilatih melalui:										
	Pelatihan MTU:										
	Pelatihan Teknisi HP		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Sablon/Percetakan		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Bengkel Mobil		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen)		-	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede)		-	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo)		-	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Institusional :				-	-	-	-			
	Pelatihan Akupresur Lanjutan		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Teknik Pendingin		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Cleaning Service		20 orang	-	-	-	-	-			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelayanan Perdagangan Retail		20 orang	-	-	-	-	-			
	peserta sertifikasi kompetensi Akupresur		20 orang	-	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK		20 orang	-	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK		20 orang	-	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK		20 orang	-	-	-	-	-			
	Satpam		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Stir Mobil dan SIM A		120 orang	120 orang	-	-	-	-			
	Perhotelan		25 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Front Office		40 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Travel Agent		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Pembuatan Kue Roti		40 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Boga		40 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Rias Kecantikan		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Rias Pengantin		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Rias Pengantin Paes Ageng		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Menjahit Dasar		20 orang	25 orang	-	-	-	-			
	Menjahit Mahir		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Menjahit kebaya dan Surjan		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Spa Terapis		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan untuk Difabel		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website		-	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Calon Peserta Pelatihan yang mendapat SosialisasiProgram Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		50 orang	100 orang	-	-	-	-			
	Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya		30 orang	30 orang	-	-	-	-			
	Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK		-	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK		-	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK		-	20 orang	-	-	-	-			
	LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi		5 LPK	5 LPK	5 LPK	5 LPK	5 LPK	5 LPK			
	LPK yang memperoleh penilaian Kinerja		20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK			
	LPK yang memperoleh pembinaan		20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK			
	Pelatihan Institusional		-	-	700 orang	720 orang	720 orang	700 orang			
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R		-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			
	Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan		-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			
	SosialisasiProgram Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		-	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang			
	Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya		-	-	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang			
	Sertifikasi Kompetensi Perhotelan		-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			
	Sertifikasi Kompetensi Komputer		-	-	20 orang	20 orang	-	20 orang			
	Bimtek dan Pelatihan bagi LPK		-	-	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang			
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja									6,517,579, 415		
	Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja		350 orang	-	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Data penganggur Kota YK yang tersedia		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online		15 sekolah	-	-	-	-	-			
	Calon tenaga kerja terseleksi		500 orang	500 orang	1100 orang	1200 orang	1300 orang	1400 orang			
	Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN		-	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang			
	Job Canvasing		7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi			
	Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk		7 angkat-an @16 orang	7 angkat-an	6 angkat-an	6 angkat-an	6 angkat-an	6 angkat-an			
	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN		14 kec	300 org	300 org	300 org	300 org	300 org			
	Data penganggur Kota YK yang tersedia		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)		100 perusahaan	50 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan			
	Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK		-	2200org/ 15BKK	15 BKK	15 BKK	15 BKK	15 BKK			
	Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015		1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Bursa kerja (Job Fair)		1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Data IPK Kota Yk yang tersedia		-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA		-	30 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan			
	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Padat Karya Infrastruktur		48 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
INDIKATOR SDG's	8.8.1. (a) Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)										
PROGRAM 1:Program PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN											Satpol PP
Kegiatan 1 : Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi									2,296,846,191		
	Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi	Tersangka	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
	Sidang pelanggaran perda di pengadilan	Dokumen	700	700	700	700	700	700			
	Penyidikan kasusu dengan berita acara singkat/ biasa	Kasus	8	8	8	8	8	8			
	Penegakan hukum terhadap saksi/ tersangka yang berdomisili di luar daerah	Kasus	7	7	7	7	7	7			
	Penjemputan tersangka dalam daerah	Kasus	24	24	24	24	24	24			
Kegiatan 2 : Operasi Ketertiban Umum									19,357,545,538		
	Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan	Laporan	20	20	20	20	20	20			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan	Laporan	80	80	80	80	80	80			
	Operasi Jogobaran terlaporkan	Laporan	28	28	28	28	28	28			
	Operasi penertiban gabungan terlaporkan	Laporan	96	96	96	96	96	96			
	Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah	Orang	20	20	20	20	20	20			
	Operasi Penertiban Mandiri di Kawasan Jogja Utara dan Jogja Selatan terlaporkan	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	Operasi Jogja Tertib Rokok terlaporkan	Laporan	0	10	10	10	10	10			
INDIKATOR SDG's	8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA											Dinas Pariwisata
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata									5,013,549,143		
	Pengembangan ODTW unggulan	Kali	-	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali			
	Pengembangan jenis dan pemaketan ODTW	Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Sadar wisata	Kali	-	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			
	Monitoring dan inventarisasi ODTW	Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pengembangan kampung wisata	Kali	1 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali			
	Calender event mingguan	Kali	52 kali	-	-	-	-	-			
	Calender event tahunan	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Gelar potensi	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Kampung Wisata/Pokdarwis	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Workshop Kampung Wisata	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
Kegiatan 2 : Kegiatan Promosi dan Pemasaran Wisata									14,527,599,589		
	Analisa pasar wisatawan	Dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	Kali	-	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali			
	Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Kali	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali			
	Event pariwisata unggulan	Kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pelayanan informasi pariwisata	Laporan	2 jenis	21 laporan	21 laporan	21 laporan	21 laporan	21 laporan			
	Pameran pariwisata	Kali	3 kali	-	-	-	-	-			
	Travel dialog	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Jogja Night Carnival (Pawai Budaya Jogja)	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Famtrip	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Jogja Day	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembuatan materi pariwisata	Jenis	6 jenis	-	-	-	-	-			
	Promosi media massa	Kali	3 kali	-	-	-	-	-			
	Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pameran Pariwiswata Luar Negeri	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Promosi media massa Luar Negeri	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	TPO	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Java Promo	Kali	3 kali	-	-	-	-	-			
	Pengiriman Misi Promosi Pariwisata	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Perikatan kerjasama Pariwisata	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Penjajagan Pariwisata	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Workshop dan Seminar Pariwisata	Kali	7 kali	-	-	-	-	-			
	Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Jogja Kreatif	Kali	11 kali	-	-	-	-	-			
Kegiatan 3 : Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro									24,668,666,328		
	Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro	Orang	80 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Pengawasan CCTV	Laporan	12 bendel laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA	Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Penyemprotan Jalan dan trotoar	Kali	300 kali	225 kali	225 kali	225 kali	225 kali	225 kali			
	Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro	Paket	1 paket	222 titik	222 titik	222 titik	222 titik	222 titik			
	Pemeliharaan CCTV	Ruang Kendali dan cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv			
	Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah	Studio dan jar-ingannya	1 studio dan ja-ringannya	1 studio dan jar-ingannya	1 studio dan ja-ringannya	1 studio dan jar-ingannya	1 studio dan jar-ingannya	1 studio dan jar-ingannya			
	Prunning	Kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro	Dokumen	12 bulan/laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	TIC dan Layanan Pengaduan dan Perijinan	Bulan	1 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Cetak blanko	Cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak			
	Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2	Dokumen	12 bulan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Pengurus Frekuensi Radio Pancar ulang/HT	Ijin	1 kali ijin	-	-	-	-	-			
	Pemeliharaan Taman dan Pergola	Paket	1 paket	-	-	-	-	-			
	Pemeliharaan Panggung mobile	Buah	1 buah	-	-	-	-	-			
	Pembinaan PKL	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan Angkutan Non mesin	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan Lesehan	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan seniman Malioboro	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan guide kawasan Malioboro	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/promosi	Undangan	4 laporan konsultasi / undangan	-	-	-	-	-			
Tujuan 9 : Industri, inovasi dan infrastruktur											
INDIKATOR SDG's	9.1.1. (a) Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN									234,035,576,399		Dinas PUPKP
Kegiatan 1 : Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	m2	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Pemeliharaan Jalan dan	Peningkatan Jembatan	Buah	1	1	1	1	1	1			
Jembatan	Penanganan Trotoar	m2	5370	5470	5570	5670	5770	5870			
Kegiatan 3 : Pengelolaan Penerangan											
Jalan Umum	PJU Kampung	Titik	830	830	830	830	830	830			
	PJU Lingkungan	Titik	1276	1276	1276	1276	1276	1276			
	PJU Jl Protokol (pemeliharaan)	Titik	700	700	700	700	700	700			
Tujuan 10 : Berkurangnya kesenjangan											
INDIKATOR SDG's	10.1.1* Rasio Gini										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Kegiatan 1 : Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja									12,739,25 4,242		
	Pencari Kerja yang dilatih melalui:										
	Pelatihan MTU:										
	Pelatihan Teknisi HP		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Sablon/Percetakan		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Bengkel Mobil		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen)		-	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede)		-	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo)		-	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Institusional :				-	-	-	-			
	Pelatihan Akupresur Lanjutan		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Teknik Pendingin		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Cleaning Service		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon		20 orang	-	-	-	-	-			
	Pelayanan Perdagangan Retail		20 orang	-	-	-	-	-			
	peserta sertifikasi kompetensi Akupresur		20 orang	-	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK		20 orang	-	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK		20 orang	-	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK		20 orang	-	-	-	-	-			
	Satpam		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Stir Mobil dan SIM A		120 orang	120 orang	-	-	-	-			
	Perhotelan		25 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Front Office		40 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Travel Agent		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Pembuatan Kue Roti		40 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Boga		40 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Rias Kecantikan		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Rias Pengantin		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Tata Rias Pengantin Paes Ageng		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan Menjahit Dasar		20 orang	25 orang	-	-	-	-			
	Menjahit Mahir		20 orang	40 orang	-	-	-	-			
	Menjahit kebaya dan Surjan		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Spa Terapis		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Pelatihan untuk Difabel		20 orang	20 orang	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website		-	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Calon Peserta Pelatihan yang mendapat SosialisasiProgram Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		50 orang	100 orang	-	-	-	-			
	Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya		30 orang	30 orang	-	-	-	-			
	Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan		20 orang	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK		-	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK		-	20 orang	-	-	-	-			
	Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK		-	20 orang	-	-	-	-			
	LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi		5 LPK	5 LPK	5 LPK	5 LPK	5 LPK	5 LPK			
	LPK yang memperoleh penilaian Kinerja		20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK			
	LPK yang memperoleh pembinaan		20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK	20 LPK			
	Pelatihan Institusional		-	-	700 orang	720 orang	720 orang	700 orang			
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R		-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			
	Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan		-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			
	SosialisasiProgram Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		-	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang			
	Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya		-	-	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang			
	Sertifikasi Kompetensi Perhotelan		-	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			
	Sertifikasi Kompetensi Komputer		-	-	20 orang	20 orang	-	20 orang			
	Bimtek dan Pelatihan bagi LPK		-	-	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang			
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja									6,517,579, 415		
	Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja		350 orang	-	-	-	-	-			
	Data penganggur Kota YK yang tersedia		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online		15 sekolah	-	-	-	-	-			
	Calon tenaga kerja terseleksi		500 orang	500 orang	1100 orang	1200 orang	1300 orang	1400 orang			
	Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN		-	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang			
	Job Canvasing		7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi			
	Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk		7 angkat-an @16 orang	7 angkat-an	6 angkat-an	6 angkat-an	6 angkat-an	6 angkat-an			
	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN		14 kec	300 org	300 org	300 org	300 org	300 org			
	Data penganggur Kota YK yang tersedia		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)		100 perusaha an	50 perusaha an	40 perusaha an	40 perusaha an	40 perusaha an	40 perusaha an			
	Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK		-	2200org/ 15BKK	15 BKK	15 BKK	15 BKK	15 BKK			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015		1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Bursa kerja (Job Fair)		1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Data IPK Kota Yk yang tersedia		-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA		-	30 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan			
	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Padat Karya Infrastruktur		48 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
PROGRAM 2 :Program PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA											Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan									1,568,159,456		
	FGD Jaminan Sosial	Kali	2	0	0	0	0	0			
	Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	Bulan	11	0	0	0	0	0			
	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Laporan	0	1	1	1	1	1			
	Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial	perusahaan	40	24	24	24	24	24			
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	perusahaan	40	24	24	24	24	24			
	Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	kali/ pe-rusahaan	3	24	24	24	24	24			
	Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis	kali/ pe-rusahaan	1	24	24	24	24	24			
	Sosialisasi Penetapan UMK 2019	kali/ pe-rusahaan	1	200	200	200	200	200			
Kegiatan 2 : Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja									2,267,523,000		
	Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .	Siswa	2100	0	0	0	0	0			
	Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh	Buah	1	0	0	0	0	0			
	Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Buah	1	0	0	0	0	0			
	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	perusahaan	0	50	50	50	50	50			
	Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	0	30	30	30	30	30			
	Deteksi Dini Ketenagakerjaan	Perusahaan	0	24	24	24	24	24			
	Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	perusahaan	0	40	40	40	40	40			
	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Kesepakatan	0	3	3	3	3	3			
	Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	Bulan	0	3	3	3	3	3			
	Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
	Verifikasi SP/SB	Kali	0	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
PROGRAM 3 :Program PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI											Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Kegiatan 1 : Pembinaan Kelembagaan Koperasi									1,718,685, 610		
	- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi		25 koperasi	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah		20 kopsyah	-	-	-	-	-			
	- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP		25 koperasi	-	-	-	-	-			
	- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi		25 koperasi	-	-	-	-	-			
	Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah		20 kopsyah	-	-	-	-	-			
	Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah		20 kopsyah	-	-	-	-	-			
	Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi syariah		20 kopsyah	-	-	-	-	-			
	Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif		10 koperasi	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi BPJS dan Perpajakan		30 orang	-	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang			
	Bimbingan Kelembagaan Koperasi		20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi			
	Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi		10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok			
	Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan		-	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok			
	Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional		-	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi			
	Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah		-	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi			
	Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional		-	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi			
	Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah		-	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi			
	Sosialisasi Perkoperasian		14 kecamatan	7 kec	-	-	-	-			
	Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok		5 kopera-si 4 jenis	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi			
	Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas		2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian		15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT	15 SMP, 15 SMA, 5 PT	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis			
	Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop		50 orang	250 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang			
	Monev Koperasi Syariah		15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi			
	Monev Koperasi yang belum RAT		30 koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi			
	Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi		-	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi			
Kegiatan 2 : Pembinaan dan Pengembangan Koperasi									2,278,692,284		
	Monitoring dan Evaluasi :		17 macam :								
	1.Program Dana Bergulir APBD		11 LKM	-	-	-	-	-			
	2.Program BBM		21 LKM/ Kop	-	-	-	-	-			
	3.Program MAP		2 LKM/ Kop	-	-	-	-	-			
	4.Program Agribisnis		2 LKM/kop	-	-	-	-	-			
	5.Program P3KUM		21 LKM/kop	-	-	-	-	-			
	6.Program DB Syariah		5 Kop	-	-	-	-	-			
	7.Program Mitigasi		7 LKM/ Kop	-	-	-	-	-			
	8.Program PERKASA		1 LKM/kop	-	-	-	-	-			
	9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan		72 LKM/ Kop	-	-	-	-	-			
	10. Pinjaman Daerah MKPL		5 Kop	-	-	-	-	-			
	11.Program Dana Bergulir DIY		30 Kop	-	-	-	-	-			
	12.Program Pinjaman Tendanisasi PKL		8 Kec	-	-	-	-	-			
	13. UED SP		25 UED SP	-	-	-	-	-			
	14. BUKP		14 BUKP	-	-	-	-	-			
	15.Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan		20 Kop	-	-	-	-	-			
	16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU		5 Kop	-	-	-	-	-			
	17. Penerima LPDB		9 Kop	-	-	-	-	-			
	Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM		5 Kegiatan	-	-	-	-	-			
	Pengawasan Koperasi :			-	-	-	-	-			
	- Pengawasan Koperasi dilapangan		20 Koperasi	-	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	- Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head		5 Koperasi	-	-	-	-	-			
	- Forum updating data KKS		100 koperasi	-	-	-	-	-			
	- Penyusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas		1 paket	-	-	-	-	-			
	- Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi		4 kali	-	-	-	-	-			
	Monitoring dan Evaluasi		-	17 macam	17 macam	17 macam	17 macam	17 macam			
	Penilaian Kesehatan Koperasi		75 koperasi	75 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi			
	Pengawasan Koperasi			30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi			
	Forum Pembina Koperasi			2 kali							
	Klinik Koperasi Sehat (KKS)		1 Kegiatan	2 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali			
	Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP		1 Kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Cooperative Fair		6 Koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi			
	Gelar Produk Koperasi dan UKM		8 Koperasi	6 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi	4 Koperasi			
	Jogja Expo		4 Koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi			
	Pemeringkatan Koperasi		-	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi			
PROGRAM 4 :Program PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MIKRO											Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans
Kegiatan 1 : Kemitraan dan Pembiayaan UMK									5,456,633,919		
	Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK		9 kali	-	-	-	-	-			
	UMK Promo dan peluang investasi		4 kali	-	-	-	-	-			
	Gebyar UMK		1 kali	-	-	-	-	-			
	Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK		2 kali	-	-	-	-	-			
	Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK		2 kali	-	-	-	-	-			
	Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM)		-	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan			
	Pameran dan Promosi Produk UMK		-	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali			
	Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak		-	7 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali			
	Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK		-	6 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali			
	Penyusunan Mekanisme Tentang UMK		-	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft			
	Fasilitasi Legalitas bagi UMK		-	0	10 pelaku UMK	10 pelaku UMK	10 pelaku UMK	10 pelaku UMK			
	Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi		-	2 draft	-	-	-	-			
	Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta		-	-	1 draft	1 draft	1 draft	1 draft			
	Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi		-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 2 : Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK									6,653,515,482		
	Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp) IV"		1 kali/ paket	-	-	-	-	-			
	"Pengembangan wawasan Dekranasda"		0 Kali	-	-	-	-	-			
	Gathering kemitraan member dekranas		1 kali	-	-	-	-	-			
	"Ajang promosi dekranas pameran"		2 kali	-	-	-	-	-			
	"Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas"		4 orang,2 lokasi	-	-	-	-	-			
	"Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja"		250 ek-semplar	-	-	-	-	-			
	"Cetak Buku batikwarna alam"		250 ek-semplar	-	-	-	-	-			
	Pendampingan IUM		14 Kec	-	-	-	-	-			
	"Operasional Pusat Pengembangan UMKM"		5 org/ 11bln	-	-	-	-	-			
	"Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM"		3 org x 11 bln	-	-	-	-	-			
	Pengembangan produk UMKM di luar Daerah"		3 kali	-	-	-	-	-			
	Indonesia Fashion Week (IFW)		3 paket	-	-	-	-	-			
	Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil		0 paket	-	-	-	-	-			
	Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM		1 paket	-	-	-	-	-			
	Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM		3 kali	-	-	-	-	-			
	Studi Komparasi Kajian		3 kali	-	-	-	-	-			
	Penumbuhan Wirausaha Baru		-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda		-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Promosi Produk UMK		-	6 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi			
	Kajian Promosi Usaha Mikro		-	1 kali	-	-	-	-			
	Pelatihan Manajemen Pemasaran		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Updating Database UMK		1 paket	-	-	-	-	-			
INDIKATOR SDG's	10.1.1. (a) Angka kemiskinan										
PROGRAM 1:Program PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											Dinas Sosial
Kegiatan 1: Kegiatan Perlindungan Sosial									4,181,905,037		
	1. Frekuensi Gelar Potensi Anak Panti	Kali	1	1	1	1	1	1			
	2. Laporan Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Laporan	12	12	12	12	12	12			
	3. Jasa Piket Tagana	Orang	56	56	56	56	56	56			
	4. Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mendapat pembinaan	Kelompok	8	8	8	8	8	8			
	5. Frekuensi Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	Kali	2	2	2	2	2	2			
	6. Frekuensi Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	Kali	1	1	1	1	1	1			
	7. Frekuensi Workshop Komisi Daerah Lansia	Kali	15	15	15	15	15	15			
	8.Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	Kali	3	3	3	3	3	3			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	9. Laporan Seleksi Penghuni RPLU dan RPA	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	10. Laporan Workshop Pelopor Perdamaian	Laporan	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial									4,872,356,780		
	1. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar	Kali	3	3	3	3	3	3			
	2. Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kali	12	12	12	12	12	12			
	3. Frekuensi fasilitasi penyaluran BantuanProgram Keluarga Harapan (PKH)	Kali	4	4	4	4	4	4			
	4. Laporan Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	6. Laporan Jenazah Terlantar yang Dimakamkan	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	7. Laporan fasilitasi pengaduan subsidi listrik	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	8. Laporan Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	Laporan	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 3 : Kegiatan Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Anak terlantar yang dilayani	Bulan	12	12	12	12	12	12	6,173,932,256		
Kegiatan 4 : Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	Lanjut usia yang dilayani	Bulan	12	12	12	12	12	12	9,714,018,386		
INDIKATOR SDG's	10.1.1. (e) Angka pertumbuhan ekonomi										
PROGRAM 1:Program PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN PASAR											Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 1 : Pengelolaan Kebersihan Pasar									29,480,378,409		
	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	Pasar	31	30	30	30	30	30			
	Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya	Pasar	31	30	30	30	30	30			
	Jumlah pasar yang dipelihara tamannya	Pasar	16	9	9	9	9	9			
	Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan	paket	2	1	1	1	1	1			
	Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola	pasar	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar									13,246,160,268		
	Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	kali	15	15	15	15	15	15			
	Pengamanan dan penertiban pasar	pasar	31	30	30	30	30	30			
	Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya			15	15	15	15	15			
	Pengetahuan pengamanan dan penertiban pasar bagi pedagang yang ditingkatkan	kegiatan	27								
	Tenaga teknis pengamanan dan penertiban pasar yang direkrut	orang	80								
Kegiatan 3 : Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta									9,106,671,297		
	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	pasar	11	30	30	30	30	30			
	Instalasi air dan listrik yang dipelihara	pasar	21	21	21	21	21	21			
	Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan	paket	1	1	1	1	1	1			
	Genset pasar yang dipelihara	pasar	2	2	2	2	2	2			
PROGRAM 2 :Program PENATAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENDAPATAN PASAR											Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendapatan Pasar									1,242,284,690		
	Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	pasar	31	30	30	30	30	30			
	Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dikoordinasikan	kali	40	44	44	44	44	44			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Cetak sarana administrasi pedagang	kali	1	1	1	1	1	1			
	Pakaian Juru Parkir			1	1	1	1	1			
	Pelayanan administrasi pedagang pasar yang dikelola	pasar	31								
Kegiatan 2 : Penataan Lahan dan Pedagang									4,795,161,025		
	Penataan Fasilitas Penunjang Pasar	kali		10	10	10	10	10			
	Pemutakhiran data pedagang pasar	pasar	31	30	30	30	30	30			
	Sosialisasi pedagang pasar	pasar	3	15	15	15	15	15			
	Pelayanan Administrasi Pedagang	kali		88	88	88	88	88			
	Workshop Peningkatan SDM	orang 2 Keg	60	1	1	1	1	1			
	Sewa Tanah Pasar	pasar	4	3	3	3	3	3			
	Pra Revitalisasi pasar tradisional			1	1	1	1	1			
	Penataan lahan dan pedagang pasar yang dikelola	pasar	31								
	Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar yang dikelola	pasar	20								
Kegiatan 3 : Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I									6,130,709,709		
	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	pasar	1	16	16	16	16				
	Petugas pungut yang dibina	orang	36	55	55	55	55				
	Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	pasar	1	16	16	16	16				
	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	jenis	3	4	4	4	4				
	Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	pasar		2	2	2	2				
Kegiatan 4 : Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II									4,699,090,623		
	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	pasar	7	16	16	16	16	16			
	Petugas pungut yang dibina	orang	37	60	60	60	60	60			
	Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	pasar	7	16	16	16	16	16			
	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	jenis	2	3	3	3	3	3			
	Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	pasar		2	2	2	2	2			
Kegiatan 5 : Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III											
	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	pasar	12								
	Petugas pungut yang dibina	orang	31								
	Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	pasar	12								
	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	jenis	2								
Kegiatan 6 : Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV											
	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	pasar	10								
	Petugas pungut yang dibina	orang	48								
	Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	pasar	10								
	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	jenis	2								
Kegiatan 7 : Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta									6,754,734,917		
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	kegiatan	8	6	6	6	6	6			
	Pelatihan dan Pembinaan Pedagang PASTY	pedagang	160	360	360	360	360	360			
	Pelayanan dan Promosi Pasar			2	2	2	2	2			
	Pendapatan Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	pedagang	420	420	420	420	420	420			
	Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	jenis	2	2	2	2	2	2			

Program/ Kegiatan	Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	pasar		1	1	1	1	1			
	Instalasi pasar yang dipelihara	kegiatan	7								
Kegiatan 8 : Pengembangan Pasar Tradisional									8,582,609,920		
	Promosi melalui berbagai kegiatan	kegiatan	9	7	7	7	7	7			
	Kajian pasar tradisional	kegiatan	3	6	6	6	6	6			
	Pengelolaan data pedagang menggunakan SIM Pasar	pasar	3	30	30	30	30	30			
	Pengelolaan radio pasar	pasar	3	3	3	3	3	3			
	Sarasehan pedagang pasar	keg	12	7	7	7	7	7			
	Pelatihan bisnis bagi pedagang	keg	5	2	2	2	2	2			
	FGD Pedagang Pasar Tradisional	Keg	1	1	1	1	1	1			
	Grand desain Pengembangan Pasty	Dokumen		1	1	1	1	1			
	Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	pasar		5	5	5	5	5			
PROGRAM 3 :Program PENGEMBANGAN PUSAT BISNIS											Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 1 : Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	31,032,395,219		
PROGRAM 4 :Program PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN											Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 1 : Pembinaan Usaha Perdagangan									11,106,702,558		
	Pameran dan gelar potensi di 12 lokasi	Pengusaha	123	132	132	132	132	132			
	Kontak Dagang Potensi Bisnis bagi UMKM	UMKM	5	5	5	5	5	5			
	Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	hari	45	45	45	45	45	45			
	Pemanfaatan lahan di area PMPS	zona	5	5	5	5	5	5			
	Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan Distributor/Toko Modern	kali	6	6	6	6	6	6			
	Operasi pasar	kecamatan	14	14	14	14	14	14			
	Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern	kali	2	2	2	2	2	2			
	Sosialisasi Konsumen Cerdas	kali	4	4	4	4	4	4			
	Pasar Rakyat	kali		1	1	1	1	1			
	Pelatihan usaha perdagangan				3	3	3	3			
	Pelatihan Tata Cara Ekspor	kali		1							
	Pelatihan Pemasaran Online	kali		1							
	Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong	kali		2							
	Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang	kali	6								
	Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong	hari	2								
	Sosialisasi Hasil Kajian	kali	1								
	Penyusunan Perubahan Perwal	Dokumen	1								
Kegiatan 2 : Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri									1,791,337,463		
	Monitoring harga bahan pokok	pasar	8	8	8	8	8	8			
	Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	kali	1	1	1	1	1	1			
	Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	kali	2	2	2	2	2	2			
	Monitoring Penggunaan BTM/P	kali	4	4	4	4	4	4			

Program/ Kegiatan/	Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Monitoring LPG 3 Kg dan BBM		12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU			
	Monitoring Distributor dan Pergudangan		12 distributor, 30 gudang	12 distributor, 30 gudang	12 distributor, 30 gudang	12 distributor, 30 gudang	12 distributor, 30 gudang	12 distributor, 30 gudang			
	Pengendalian Harga		Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali	Data Harga Sembilan Bahan Pokok Terkendali			
	Pengawasan UTTP		Pasar, Perorangan, Lembaga	Pasar, Perorangan, Lembaga	Pasar, Perorangan, Lembaga	Pasar, Perorangan, Lembaga	Pasar, Perorangan, Lembaga	Pasar, Perorangan, Lembaga			
	Sosialisasi Penataan PKL	kali	4	4	4	4	4	4			
	Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta	SIM PKL	1	1	1	1	1	1			
	Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yk	kali	1	1	1	1	1	1			
	Updating Pendataan PKL	kecamatan	14								
	Penyusunan draft Raperwal tentang Penataan PKL	Dokumen	1								
	Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kawasan Alun-alun utara	Paket	1								
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Metrologi Legal									3,645,697,074		
	Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian	kali	20	32	32	32	32	32			
	Pengawasan UTT dan BDKT	kali	47	30	30	30	30	30			
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	kali	47	60	60	60	60	60			
	Ketertelusuran standar untuk jaminan mutu standar	jenis		12	12	12	12	12			
	Updating Data Potensi UTTP	Dokumen		1	1	1	1	1			
	Penyusunan Draft Raperda Pelayanan Metrologi	Dokumen	1								
PROGRAM 5 :Program PEMBINAAN PEMBINAAN PERINDUSTRIAN											Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 1 : Pembinaan Teknis Perindustrian									6,719,325,901		
	Pelatihan teknis industri bagi IKM	jenis		15	15	15	15	15			
	Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk	orang	30 orang 3 hr 2 kali	90	90	90	90	90			
	Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	IMK		6	6	6	6	6			
	Pendataan Industri Mikro Kecil	IMK		1300	1300	1300	1300	1300			
	Pengembangan Teknis Industri Bagi IKM				6	6	6	6			
	Pengembangan Sentra produksi Batik	Sentra		1							

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022			
Pengembangan Sentra Produksi Kulit	Sentra		1							
Pengembangan OVOP Produk Batik	OVOP		1							
Pengembangan OVOP Produk Kulit	OVOP		1							
Pengembangan Produk Unggulan Batik	PUD		1							
Pengembangan Produk Unggulan Kulit	PUD		1							
Pelatihan teknik membatik di kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Sorosutan		40 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan pengemasan produk olahan makanan di Kelurahan Notoprajan		20 orang 3 hr 1 kali								
Pelatihan Membuat Tas Rajut di Kelurahan Purbayan		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Produk Keraj Kulit di Kel Keparakan (RW 8)		20 orang 6 hr 1 kali								
Pelatihan Membatik di Kelurahan Pringgokusuman		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan jumputan di Kelurahan Suryatmajan		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan jumputan di Kelurahan Purbayan RW 11		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan sablon di Kelurahan Suryatmajan		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan Dasar Pembuatan Desain Grafis		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan Industri di Kecamatan Jetis		20 orang 5 hr 1 kali								
Pelatihan menjahit busana Jawa Surjan Gagrak Yogyakarta		20 orang 6 hr 1 kali								
Pameran Industri Kreatif Berbasis Budaya		4 IKM 3 Kali								
Pembentukan Sentra Baru di Kelurahan Warungboto (shuttle cock)		1 sentra baru 1 kali								
Pemberdaayan Sentra Produksi Batik		1 Sentra 1 kali								
Pemberdaayan Sentra Produksi Kulit		1 Sentra 1 kali								
Pemberdaayan dan Pengembangan OVOP Produk Batik		1 OVOP 1 kali								
Pemberdaayan dan Pengembangan OVOP Produk Kulit		1 OVOP 1 kali								
Pengembangan Produk Unggulan Batik		1 PUD 1 kali								
Pengembangan Produk Unggulan Kulit		1 PUD 1 kali								
Expo Produk Sentra Produksi Batik		4 IKM 1 kali								

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Expo Produk Sentra Produksi Kulit		4 IKM 1 kali								
	Pelatihan sablon di Kelurahan Purwokinanti		20 orang								
Kegiatan 2 : Pembinaan Sarana Produksi									12,916,045,424		
	Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator	dokumen	19 orang, 11 bulan	4	4	4	4	4			
	KoordinasiProgram dan Pengembangan PEW di Kecamatan	kali	30 orang, 1 hari, 14 kali	14	14	14	14	14			
	Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	alat		4	4	4	4	4			
	Penyuluhan Penerapan Gemba Kaizen IKM Aluminium	IKM		10	10	10	10	10			
	Kajian Analisa Kebangkrutan IKM Aluminium Kota Yogyakarta berdasar Siklus Hidup Produk dan Trend Pasar	dokumen		1	1	1	1	1			
	Kajian Pengembangan Kelompok PEW menjadi Koperasi Induk berbasis Kelompok	dokumen		1	1	1	1	1			
	Kajian Benchmarking Produktivitas IKM Fashion dan Konveksi Jogja, Solo dan Pekalongan	dokumen		1	1	1	1	1			
	Pelatihan Sarana Produksi Bagi IKM				5	5	5	5			
	Pameran/Expo Industri Kreatif				2	2	2	2			
	Pelatihan E-Commerce	IKM	20 orang, 3 hari, 3 kali	80							
	Pelatihan Managemen Resiko Bencana Bagi IKM	IKM	30 orang, 2 hari, 3 kali	90							
	Pelatihan Kewirausahaan Lanjut	IKM	30 orang, 3 hari, 3 kali	90							
	Pelatihan Pengolahan Makanan	IKM	30 org, 3 hr, 5 angkatan	120							
	Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi	Orang	20 orang, 30 hari,1 kali	30							
	Pameran/Expo Industri Kreatif TI (Animasi, Film, DKV)	IKM	4 IKM, 1 Kali	4							
	Pameran/Expo Industri Kreatif Fesyen dan Kerajinan	IKM	4 IKM, 4 kali	16							
	Bimbingan Teknis dan Administrasi Pembukuan Kelompok PEW		30 orang, 1 hari, 3 angkatan								
	SosialisasiProgram dan Pengembangan Kelompok PEW di Kelurahan		45 kali								
	Pilot Project 5 Kelompok PEW Untuk Menjadi Koperasi		5 kelompok, 20 orang								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Pengembangan Wawasan Kemasan Produk ke Luar Daerah dalam Jawa		30 org, 3 hr, 1 kali								
	Pengembangan Wawasan Produk Olahan Makanan dan Kerajinan ke Luar Daerah luar Jawa		30 org, 3 hr, 1 kali								
	Pelatihan Total Motivation Training (TMT)		30 orang, 3 hari, 3 kali								
	Penyusunan Perda Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)		1 Paket								
	Penyusunan Naskah Akademik RIPIDA		1 Paket								
	Festival Animasi "ANIMPIADE 2017"		1 Paket								
PROGRAM 6 :Program PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM											Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kegiatan 1 : Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam									7,488,468, 000		
	Operasional Pelayanan UPT Logam	bulan	12	12	12	12	12	12			
	Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam	mesin	9	25	25	25	25	25			
	Pendampingan tenaga ahli untuk revitalisasi pelayanan UPT Logam	bulan	0	6	6	6	6	6			
	Pengadaan Komputer	kali		1	1	1	1	1			
	Pengadaan Furniture	kali		1	1	1	1	1			
	Pengadaan Projector dan kelengkapannya	kali		1	1	1	1	1			
	Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam		1 paket								
	Pelatihan Inovasi Produk rumah tangga		10 orang, 1 angkat-an								
	Penelitian Peralatan Kerja Tepat Guna		2 penelitian								
	Sewindu UPT Logam		1 paket								
	Pameran INAPA 2017		2 IKM								
	Sosialisasi dan promosi dalam rangka meningkatkan pendapatan UPT Logam		12 bulan								
	Pendampingan Klasikal IKM Logam		10 IKM 6 kali								
	Pendampingan Lapangan IKM Logam		10 IKM 5 kali								
Kegiatan 2 : Optimalisasi Pelayanan UPT Logam									8,749,522, 813		
	Pameran INAPA 2018	IKM		3	3	3	3	3			
	MOU Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	MOU		5	5	5	5	5			
	Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam	IKM		20	20	20	20	20			
	Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam	kali		1	1	1	1	1			
PROGRAM 7:Program PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA											Dinas Pariwisata
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata									5,013,549, 143		
	Pengembangan ODTW unggulan	Kali	-	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali			
	Pengembangan jenis dan pemaketan ODTW	Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Sadar wisata	Kali	-	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Monitoring dan inventarisasi ODTW	Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pengembangan kampung wisata	Kali	1 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali			
	Calender event mingguan	Kali	52 kali	-	-	-	-	-			
	Calender event tahunan	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Gelar potensi	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Kampung Wisata/Pokdarwis	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Workshop Kampung Wisata	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
Kegiatan 2 : Kegiatan Promosi dan Pemasaran Wisata									14,527,599,589		
	Analisa pasar wisatawan	Dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	Kali	-	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali			
	Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Kali	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali			
	Event pariwisata unggulan	Kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pelayanan informasi pariwisata	Laporan	2 jenis	21 laporan	21 laporan	21 laporan	21 laporan	21 laporan			
	Pameran pariwisata	Kali	3 kali	-	-	-	-	-			
	Travel dialog	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Jogja Night Carnival (Pawai Budaya Jogja)	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Famtrip	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Jogja Day	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembuatan materi pariwisata	Jenis	6 jenis	-	-	-	-	-			
	Promosi media massa	Kali	3 kali	-	-	-	-	-			
	Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pameran Pariwiswata Luar Negeri	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Promosi media massa Luar Negeri	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	TPO	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Java Promo	Kali	3 kali	-	-	-	-	-			
	Pengiriman Misi Promosi Pariwisata	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Perikatan kerjasama Pariwisata	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Penjajagan Pariwisata	Kali	2 kali	-	-	-	-	-			
	Workshop dan Seminar Pariwisata	Kali	7 kali	-	-	-	-	-			
	Perhitungan jumlah kunjungan wisatawan	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Jogja Kreatif	Kali	11 kali	-	-	-	-	-			
Kegiatan 3 : Kegiatan Pengelolaan Kawasan Malioboro									24,668,666,328		
	Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro	Orang	80 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Pengawasan CCTV	Laporan	12 bendel laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA	Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Penyemprotan Jalan dan trotoar	Kali	300 kali	225 kali	225 kali	225 kali	225 kali	225 kali			
	Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro	Paket	1 paket	222 titik	222 titik	222 titik	222 titik	222 titik			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Pemeliharaan CCTV	Ruang Kendali dan cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv			
	Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah	Studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya			
	Prunning	Kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro	Dokumen	12 bulan/ laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	TIC dan Layanan Pengaduan dan Perijinan	Bulan	1 paket	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Cetak blanko	Cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak	8 jenis cetak			
	Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2	Dokumen	12 bulan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Pengurus Frekuensi Radio Pancar ulang/HT	Ijin	1 kali ijin	-	-	-	-	-			
	Pemeliharaan Taman dan Pergola	Paket	1 paket	-	-	-	-	-			
	Pemeliharaan Panggung mobile	Buah	1 buah	-	-	-	-	-			
	Pembinaan PKL	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan Angkutan Non mesin	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan Lesehan	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan seniman Malioboro	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Pembinaan guide kawasan Malioboro	Kali	1 kali	-	-	-	-	-			
	Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/promosi	Undangan	4 laporan konsultasi / undangan	-	-	-	-	-			
PROGRAM 8 :Program PENGEMBANGAN TAMAN PINTAR											Dinas Pariwisata
Kegiatan 1 : Kegiatan Operasional Layanan BLUD Taman Pintar											
	Terlaksananya layanan kepada pengunjung Taman Pintar	Bulan	12	12	12	12	12	12	76,982,469,245		
PROGRAM 9 :Program PENINGKATAN KUALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											Dinas Pariwisata
Kegiatan 1 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif									3,611,438,761		
	Pembinaan Usaha Pariwisata		40 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali			
	Survey Kepuasan Wisatawan		1 Dokumen Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata		40 kali		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Jogja Kreatif		-	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali			
	Festival Ekonomi Kreatif		-		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Gelar potensi ekonomi kreatif		3 kali	2 kali	-	-	-	-			
	Kajian Ekonomi Kreatif		1 kali	-	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Perhitungan lama tinggal wisatawan		1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	-			
	Penyusunan Dossier Jogja Kreatif City		1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	-			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata									8,007,546,771		
	Pentas Kangen Jogja		10 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali			
	PMPS		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pentas Kawasan		7 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	Event Khusus		40 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali			
	Pengiriman misi kesenian luar DIY		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pengiriman misi kesenian dalam DIY		1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata		-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata		14 kali	-	-	-	-	-			
	FGD Atraksi Wisata		1 kali	-	-	-	-	-			
INDIKATOR SDG's	10.3.1.(c) Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani										
PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN									6,666,935,242		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengarusutamaan Gender											
Kegiatan 2 : Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan											
Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak											
Tujuan 11 : Kota dan komunitas berkelanjutan											
INDIKATOR SDG's	11.4.1.(a) Persentase rintisan keluarahan budaya yang aktif										
PROGRAM 1:Program PELESTARIAAN WARISAN DAN NILAI BUDAYA									4,010,956,965		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi											
	1. Frequensi Updating Data Kebudayaan	Kali	1	1	1	1	1	1			
	2. Dokumen Kajian Budaya	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	3. Frequensi Kemitraan Kebudayaan	Kali	1	1	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pelestarian Tata Nilai Budaya											
	1. Laporan Pelestarian Tata Nilai Budaya	Laporan	1	4	1	1	1	1			
	2. Dokumen Potensi Tata Nilai Budaya	Dokumen		1	1	1	1	1			
	3. Workshop Tata Nilai Budaya	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	4. Frequensi Melukis Bersama	Kali	1	0	0	0	0	0			
	5. Pameran Seni	Kali	1	0	0	0	0	0			
	6. Aktualisasi Tata Nilai Budaya	Laporan	0	1	1	1	1	1			
	7. Desiminasi Tata Nilai Budaya	Laporan	0	1	1	1	1	1			
Kegiatan 3 : Kegiatan Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman											
	1. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB / bangunan	Laporan	1	1	1	1	1	1			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	2. Jumlah Penghargaan Pelestari Bangunan Heritage	Orang	10	10	10	10	10	10			
	3. Perencanaan Revitalisasi Lingkungan Kawasan Cagar Budaya	Dokumen	0	0	1	1	1	1			
	4. Pelestarian BCB	BCB	0	0	1	1	1	1			
	5. Penyusunan Road map Pelestarian Herittage	Dokumen	0	0	1	1	1	1			
	6. Kajian Permuseuman	Dokumen	0	0	1	1	1	1			
	7. Publikasi Budaya	Laporan	0	0	1	1	1	1			
PROGRAM 2 :Program PELESTARIAAN WARISAN DAN NILAI BUDAYA									2,218,225,747		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Sejarah											
	1. Jumlah Kajian Sejarah	Dokumen	1	1	2	3	3	3			
	2. Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah dan Budaya	Laporan	0	0	1	1	1	1			
	3. Inventarisasi Data Kesejarahan	Dokumen	0	1	1	1	1	1			
	4. Lomba Kesejarahan	Laporan	1	0	1	1	1	1			
	5. Pameran Kesejarahan	Laporan	0	0	1	1	1	1			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra											
	1. Lomba/Festival Bahasa dan Sastra	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	2. Frequensi Gelar Macapat	Kali	14	14	14	14	14	14			
	3. Publikasi Bahasa dan Sastra	Media	1	1	1	1	1	1			
	4. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan	0	5	0	0	0	0			
	5. Event Bahasa dan Sastra	Event	0	0	1	1	1	1			
PROGRAM 3 :Program PELESTARIAAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN TRADISI									5,603,665,428		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 1 : Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film											
	2. Dialog Budaya	Kali	18	0	1	1	1	1			
	3. Aktualisasi Seni Budaya	Laporan	1	0	0	0	0	0			
	4.Pembuatan Fiture Seni Budaya	Film	1	0	1	0	1	0			
	5. Gelar Seni Budaya	Kali	5	0	1	1	1	1			
	6. Workshop Seni dan Film	Kali	2	0	1	1	1	1			
	7. Jumlah Film Dokumenter	Film	0	1	1	1	1	1			
	8. Jumlah Data Seni dan Film	Dokumen	1	1	1	1	1	1			
	9. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	Laporan	0	1	0	0	0	0			
	10. Jumlah Kajian Seni	Dokumen	0	0	1	0	1	1			
	11. Pembinaan Seni Tradisi	Laporan	0	1	1	1	1	1			
	12. Partisipasi Event Seni dan Film	Laporan	0	1	1	1	1	1			
	13. Lomba/Festival Seni dan Film	Laporan	0	0	0	1	1	1			
Kegiatan 2 : Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi											
	1. Laporan Pelestarian Upacara Adat dan Tradisi	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	2. Laporan Pelestarian Busana Adat	Laporan			1	1	1	1			
	3. Laporan Revitaliisasi Budaya	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	4. Laporan Kampanye Sadar Budaya	Laporan	1	2	1	1	1	1			
	5. Festival Seni Budaya	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	6. Kajian Adat dan Tradisi	Dokumen			1	1	1	1			
	7. Partisipasi Event Adat dan Tradisi	Event		1	1	1	1	1			
	8. Publikasi Seni Adat dan Tradisi	Media	1	1	1	1	1	1			
	9. Gelar Adat Tradisi	Laporan	1	1	1	1	1	1			
INDIKATOR SDG's	11.5.1* Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap										

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	11.5.1.(b) Persentase kampung tangguh bencana										
PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM									12,929,01 2,192		BPBD
Kegiatan 1 : Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	Kampung	15	15	10	10	10	10			
	Pelatihan Penanggulangan bencana	Kali	10	15	10	10	10	10			
	Apel Siaga Bencana	Kali	1	1	1	1	1	1			
	Kerja bakti kesiapsiagaan bencana	Kali	0	20	20	20	20	20			
Kegiatan 2 : Penanganan Bencana Alam											
	Operasional Pusdalops PB	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Manajemen Logistik	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Pelatihan Kedaruratan Bencana	Kali	7	4	4	4	4	4			
	Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Monitoring daerah rawan bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Kerja bakti pasca kejadian bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
INDIKATOR SDG's	11.5.1.(c) Persentase edukasi proteksi kebakaran										
PROGRAM 1:Program PENCEGAHAN KEBAKARAN									4,659,527, 763		Dinas Kebakaran
Kegiatan 1 : Kegiatan Penanganan Kebakaran											
Kegiatan 2 : Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran											
INDIKATOR SDG's	11.6.1. Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai										
PROGRAM 1:Program PENATAAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN											Dinas PUPKP
Kegiatan 1 : Peningkatan kualitas sarana prasarana dasar permukiman									73,394,37 5,538		
	Pembangunan Sambungan Rumah	SR	262 SR	SR	262 SR	SR	262 SR	SR			
	Penanganan Talud Permukiman	meter	82,6 m	90 m	90 m	90 m	90 m	90 m			
	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	%	83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%			
INDIKATOR SDG's	11.6.1.(a) Persentase pengangkutan sampah										
PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									97,369,00 0,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Pengurangan Sampah											
	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R).		433 kelompok	448 kelompok	463 kelompok	478 kelompok	493 kelompok	508 kelompok			
	Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola.		1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi			
Kegiatan 2 : Penanganan Sampah											
	Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah menggunakan teknologi modern.		1 unit	7 unit	8 unit	10 unit	2 unit	2 unit			
	Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container yang direnovasi.		7 unit	8 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit			
Kegiatan 3 : Pemungutan Retribusi Kebersihan	Wajib Retribusi yang dipungut retribusi kebersihan/ persampahan.		50.507 WR	51.153 WR	51.808 WR	52.471 WR	53.143 WR	53.823 WR			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Kegiatan 4 : Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	Rata-rata sampah yang diangkut dari TPS ke TPA.		173.9 ton/hari	170.4 ton/hari	166.9 ton/hari	163.4 ton/hari	159.9 ton/hari	154.9 ton/hari			
INDIKATOR SDG's	11.7.1. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta										
PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK									40,327,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Pengelolaan RTH Publik											
	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dibangun.		2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi			
	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang kondisinya terpelihara.		33 lokasi	35 lokasi	38 lokasi	41 lokasi	44 lokasi	47 lokasi			
	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang direnovasi dengan penambahan elemen taman.		3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi			
Kegiatan 2 : Pertamanan dan Perindang Jalan											
	Taman kota yang kondisinya terpelihara.		154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi			
	Taman kota yang direnovasi dengan penambahan elemen taman dekoratif.		6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi			
	Pot taman, pergola dan elemen taman yang kondisinya terpelihara.		3.052 unit	3.132 unit	3.212 unit	3.292 unit	3.372 unit	3.452 unit			
	Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang.		80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit			
Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab											
INDIKATOR SDG's	12.4.1.(a) Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
PROGRAM 1:Program PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN									9,237,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Kajian Dampak Lingkungan											
	Kajian lingkungan hidup yang tersusun.	Dokumen	4	2	4	4	3	3			
	Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan.	Dokumen	850	850	850	850	850	850			
	Kebijakan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan.	Regulasi	1	2	2	2	2	2			
Kegiatan 2 : Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3											
	Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun.	Unit	100	75	50	50	50	50			
	Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan.	Izin	25	25	25	25	25	25			
	Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dipantau.	Usaha/ Kegiatan	40	40	50	50	60	60			
INDIKATOR SDG's	12.5.1.(a) Persentase sampah yang dikelola secara 3R										
PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									97,369,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Pengurangan Sampah											
	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R).		433 kelompok	448 kelompok	463 kelompok	478 kelompok	493 kelompok	508 kelompok			
	Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola.		1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi			
Kegiatan 2 : Penanganan Sampah											
	Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah menggunakan teknologi modern.		1 unit	7 unit	8 unit	10 unit	2 unit	2 unit			
	Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container yang direnovasi.		7 unit	8 unit	8 unit	9 unit	10 unit	10 unit			
Kegiatan 3 : Pemungutan Retribusi Kebersihan	Wajib Retribusi yang dipungut retribusi kebersihan/ persampahan.		50.507 WR	51.153 WR	51.808 WR	52.471 WR	53.143 WR	53.823 WR			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 4 : Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	Rata-rata sampah yang diangkut dari TPS ke TPA.		173.9 ton/hari	170.4 ton/hari	166.9 ton/hari	163.4 ton/hari	159.9 ton/hari	154.9 ton/hari			
INDIKATOR SDG's	12.6.1.(a) Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP									13,151,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Sekolah dan PP yang dibina menjadi sekolah berwawasan lingkungan.	Sekolah/ PP	254	271	284	297	310	322			
	Jumlah Kampung rintisan Kampung Iklim.	RW	65	79	93	107	121	135			
	Penyuluhan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup.	Jenis media publikasi	6	7	8	9	9	9			
Kegiatan 2 : Penaatan dan Pemantauan Lingkungan	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara.	Laporan	4	4	4	4	4	4			
	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air.	Laporan	3	3	3	3	3	3			
	Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau.	Usaha	80	115	120	125	130	135			
Kegiatan 3 : Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan pengujian parameter kualitas air.	Parameter	17	19	21	23	25	28			
	Layanan pengujian parameter kualitas udara.	Parameter	6	7	8	9	10	11			
INDIKATOR SDG's	12.b.1. Indeks kualitas atraksi pariwisata										
PROGRAM 9 :Program PENINGKATAN KUALITAS ATRAKSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											Dinas Pariwisata
Kegiatan 1 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif									3,611,438,761		
	Pembinaan Usaha Pariwisata		40 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali			
	Survey Kepuasan Wisatawan		1 Dokumen Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata		40 kali		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Jogja Kreatif		-	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali			
	Festival Ekonomi Kreatif		-		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Gelar potensi ekonomi kreatif		3 kali	2 kali	-	-	-	-			
	Kajian Ekonomi Kreatif		1 kali	-	-	-	-	-			
	Perhitungan lama tinggal wisatawan		1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	-			
	Penyusunan Dossier Jogja Kreatif City		1 Dokumen Laporan	-	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Kegiatan 2 : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata									8,007,546,771		
	Pentas Kangen Jogja		10 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali			
	PMPS		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pentas Kawasan		7 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	Event Khusus		40 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali			
	Pengiriman misi kesenian luar DIY		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Pengiriman misi kesenian dalam DIY		1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata		-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata		14 kali	-	-	-	-	-			
	FGD Atraksi Wisata		1 kali	-	-	-	-	-			
Tujuan 13 : Penanganan perubahan iklim											
INDIKATOR SDG's	13.1.2* Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap										
PROGRAM 1:Program KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM									12,929,012,192		BPBD
Kegiatan 1 : Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	Kampung	15	15	10	10	10	10			
	Pelatihan Penanggulangan bencana	Kali	10	15	10	10	10	10			
	Apel Siaga Bencana	Kali	1	1	1	1	1	1			
	Kerja bakti kesiapsiagaan bencana	Kali	0	20	20	20	20	20			
Kegiatan 2 : Penanganan Bencana Alam											
	Operasional Pusdalops PB	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Manajemen Logistik	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Pelatihan Kedaruratan Bencana	Kali	7	4	4	4	4	4			
	Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Monitoring daerah rawan bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
	Kerja bakti pasca kejadian bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12			
Tujuan 15 : Ekosistem daratan											
INDIKATOR SDG's	15.1.1. Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta										
	15.1.1.(a) Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik										
PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK									40,327,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Pengelolaan RTH Publik											
	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang dibangun.		2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi			
	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang kondisinya terpelihara.		33 lokasi	35 lokasi	38 lokasi	41 lokasi	44 lokasi	47 lokasi			
	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang direnovasi dengan penambahan elemen taman.		3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi			
Kegiatan 2 : Pertamanan dan Perindang Jalan	Taman kota yang kondisinya terpelihara.		154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi	154 lokasi			
	Taman kota yang direnovasi dengan penambahan elemen taman dekoratif.		6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Pot taman, pergola dan elemen taman yang kondisinya terpelihara.		3.052 unit	3.132 unit	3.212 unit	3.292 unit	3.372 unit	3.452 unit			
	Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang.		80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit			
Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh											
INDIKATOR SDG's	16.1.3.(a) Angka kriminalitas										
PROGRAM 1:Program PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN									6,929,326,256		Kantor Kesbang
Kegiatan 1 : Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat		10 kali	11 kali	12 kali	13 kali	14 kali	15 kali			
	Peringatan Serangan Umum 1 Maret		1 kali	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda) Kota Yogyakarta		24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali			
	Koordinasi forum kewaspadaan dini masyaralat (FKDM) Kota Yogyakarta		7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali			
	Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			
	Koordinasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik		10 kali	11 kali	12 kali	13 kali	14 kali	15 kali			
	Pengawasan orang asing (PORA)		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			
	Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta		13 kali	13 kali	14 kali	14 kali	14 kali	15 kali			
	Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta		1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Koordinasi antar forum yang ada di Kota Yogyakarta		18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali			
INDIKATOR SDG's	16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak										
PROGRAM 1:Program PERLINDUNGAN ANAK									9,076,955,405		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak											
Kegiatan 2 : Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak											
Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)											
INDIKATOR SDG's	16.3.1. (a) Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani										
PROGRAM 1:Program PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN									6,666,935,242		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengarusutamaan Gender											
Kegiatan 2 : Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan											
Kegiatan 3 : UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak											
INDIKATOR SDG's	16.3.1. (b) Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial										
PROGRAM 1:Program ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL											Dinas Sosial
									2,668,034,791		

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 1 : Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	Orang	40	55	55	55	55	55			
	2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ	Orang	75	85	85	85	85	85			
	3. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	Orang	40	40	40	40	40	40			
	4. Korban tindak kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	Orang	20	40	40	40	40	40			
	5. Anak rentan hidup dijalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	Orang	20	20	20	20	20	20			
	6. Laporan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	7. Perempuan rawan sosial eknomi yang mengikuti pelatihan	Orang	20	20	20	20	20	20			
	8. ODHA yang mengikuti penguatan sosial psikologis	Orang	0	20	20	20	20	20			
Kegiatan 2 : Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)									7,612,274, 051		
	1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	5. Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	6. Frekuensi Peringatan HDI	Kali	1	1	1	1	1	1			
	7.Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA	Laporan	1	1	1	1	1	1			
	8. Buku Profil KUBE yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0			
INDIKATOR SDG's	16.6.1* Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah										
PROGRAM 1:Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN									1,933,828, 376		BPKAD
Kegiatan 1 : Perencanaan Anggaran											
	Dokumen tentang Perda APBD TA. 2019 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2019		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2018 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD TA. 2018 dan Nota Keuangan RAPBD TA. 2019		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2018		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			
	Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2018 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2019		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan			
	Dokumen tentang Kode Rekening		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 2 : Pengendalian Anggaran											
	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPDdan DPA-SKPKD TA. 2018		44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD			
	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2018		44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD			
	Fasilitasi pencairan dana hibah		22 SKPD	22 SKPD	22 SKPD	22 SKPD	22 SKPD	22 SKPD			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial		2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD			
	Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Ijin diatas/diluar SHBJ		10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD			
PROGRAM 2 :Program PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER									3,222,759, 084		BPKAD
Kegiatan 1 : Pengendalian Anggaran Belanja Daerah											
	OPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah		44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD			
	Dokumen TPTGR		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
	Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2017 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2018		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,54% iuran Pemda kepada PT. TASPEN :		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Laporan SKPP yang diterbitkan		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Cakupan OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah		44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer	Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
PROGRAM 3 :Program PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD									3,222,759, 084		BPKAD
Kegiatan 1 : Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2017		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen LRA, LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Neraca, LO, LPE dan Calk Pemerintah Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan Realisasi APBD TA.2018, Semester I		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribulan Iv dan TA. 2018 Tribulan I, II, III		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			
	Cakupan Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual		44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD			
	Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual		44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD	44 OPD, 1 SKPKD/OPD			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD											
	Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah		16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali			
	Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah		20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali			
	Penyusunan Laporan Realisasi Penyertaan Modal		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen			
	Penyusunan Laporan perforasi		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			
	Penyusunan Laporan piutang daerah		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			
	Penyusunan Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Penyusunan Laporan pendapatan diterima di muka		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Penyusunan Laporan Dana Cadangan		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Cakupan Pengesahan laporan bulanan BLUD		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)			
	Cakupan OPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)	23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)			
	Kajian divestasi penyertaan modal pada PT Radio Swara Adhiloka		0	0	0	0	0	0			
PROGRAM 4 :Program PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN INVENTARISASI ASET									29,190,960,958		BPKAD
Kegiatan 1 : Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset											
	Dokumen RKBMD Pengadaan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen RKBMD Pemeliharaan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen RKBMD Pemanfaatan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen RKBMD Pemindahtanganan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen RKBMD Penghapusan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Buku Agenda		800 buah	800 buah	800 buah	800 buah	800 buah	800 buah			
	Kalender		10.000 eksemplar	10.000 eksemplar	10.000 eksemplar	10.000 eksemplar	10.000 eksemplar	10.000 eksemplar			
	Alat Tulis Kantor		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Gambar Walikota dan Wakil Walikota		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Station wagon/minibus		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			
	Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Sepeda motor		34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit			
	Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta Perlengkapan Kantor		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Barang Cetakan		4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket			
Kegiatan 2 : Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset											
	Dedaktible klaim asuransi		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun			
	Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Penilaian Barang Milik Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		0	0	0	0	0	0			
	Jasa Penilaian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD		0	0	0	0	0	0			
Kegiatan 3 : Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan											
	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta		4 bangunan	4 bangunan	4 bangunan	4 bangunan	4 bangunan	4 bangunan			
	Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset		44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD			
	Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			
	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD		44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD	44 SKPD/ OPD			
	Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pemasangan dan penggantian papan nama OPD dan Papan RTHP yang rusak		22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit			
	Pelaksanaan Sensus Barang Daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
INDIKATOR SDG's	16.6.2 Indeks pelayanan publik										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH											Sekretariat Daerah
Kegiatan 1 : Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur									3,013,864, 696		
	Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi		49 OPD/unit kerja	-	-	-	-	-			
	Penyusunan informasi jabatan dinas		21 OPD/ unit kerja	-	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022			
penyusunan evaluasi jabatan dinas dan kecamatan		50 OPD	-	-	-	-	-			
Penyusunan pola karier		1 laporan	-	-	-	-	-			
penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai		1 laporan	-	-	-	-	-			
Laporan Pembinaan Analisa jabatan		-	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan			
Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Laporan penyelarasan hasil analisa jabatan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Laporan analisa jabatan evaluasi dinas		-	21 PD/ unit kerja	18 PD/ unit kerja	18 PD/ unit kerja	18 PD/ unit kerja	18 PD/ unit kerja			
Laporan analisa jabatan evaluasi badan, setda dan setwan		-	13 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja			
Laporan analisa jabatan evaluasi kecamatan		-	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja			
Laporan analisa jabatan komprehensif		-	12 PD/ unit kerja	4 PD/ unit kerja	4 PD/ unit kerja	4 PD/ unit kerja	4 PD/ unit kerja			
Laporan evaluasi jabatan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
laporan analisa jabatan fungsional tertentu		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
laporan informasi jabatan badan, setda, dan setwan		-	15 PD/ unit kerja	-	-	-	-			
Laporan pengembangan aparatur		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Laporan Implementasi dan Pengembangan sistem pengukuran kinerja		-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
Laporan evaluasi pola karier		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
laporan Informasi jabatan kecamatan		-	-	14 PD/ unit kerja	-	-	-			
laporan informasi jabatan UPT		-	-	-	14 PD/ unit kerja	14 PD/ unit kerja	15 PD/ unit kerja			
buku pedoman anjab		-	-	1 dokumen	-	-	-			
buku pedoman evaluasi jabatan		-	-	1 dokumen	-	-	-			
laporan standar norma waktu kerja kecamatan		-	-	1 dokumen	-	-	-			
laporan resiko jabatan non kesehatan		-	-	1 dokumen	-	-	-			
Laporan standar norma waktu kerja TU SMP		-	-	-	1 dokumen	-	-			
laporan resiko jabatan non kesehatan		-	-	-	1 dokumen	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Laporan standar norma waktu kerja surveilance		-	-	-	-	1 dokumen	-			
Kegiatan 2 : Pemantapan pelayanan publik											
	pembinaan pelayanan publik		1 doku- men la- poran pe- nyelengga raan PP	-	-	-	-	-			
	Monev Pelayanan Publik		1 doku- men mo- nev pelayana n publik	-	-	-	-	-			
	Evaluasi SPP Kecamatan		14 kecamata n	-	-	-	-	-			
	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM		2 Laporan Pencapaia n SPM	-	-	-	-	-			
	persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik		5 OPD Pelayana n publik	-	-	-	-	-			
	Evaluasi PPK - BLUD		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	evaluasi regulasi pelayanan perizinan		penyeder hanaan, penyatua n regulasi jenis dan persyarat an perizinan	-	-	-	-	-			
	Survey Pengaduan Masyarakat		16 sekolah	-	-	-	-	-			
	pelaksanaan survey kepuasan masyarakat utilitas kota		4 jenis layanan	-	-	-	-	-			
	monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta		1 dokumen	-	-	-	-	-			
Kegiatan 3 : Pemantapan kelembagaan perangkat daerah									-		
	evaluasi kelembagaan		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	evaluasi penyusunan rincian tugas		37 OPD	-	-	-	-	-			
	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi		1 laporan	-	-	-	-	-			
	Penataan kelembagaan UPT Badan/ Dinas		62 UPT	-	-	-	-	-			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Kajian Kelembagaan		1 Dokumen kajian	-	-	-	-	-			
	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan		1 dokumen	-	-	-	-	-			
Kegiatan 4 : Pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah									-		
	Evaluasi dan Pendampingan pelaksanaan RB		8 area perubahan	-	-	-	-	-			
	Workshop Reformasi Birokrasi		1 kali	-	-	-	-	-			
	penyusunan roadmap RB		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP		1 dokumen laporan	-	-	-	-	-			
	Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	Evaluasi LKIP		1 kali	-	-	-	-	-			
	Pendampingan LKIP		1 kali	-	-	-	-	-			
	pengukuran capaian data LKIP		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	evaluasi E-LKIP		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	pendampingan E-LKIP		1 kali	-	-	-	-	-			
	penyusunan perjanjian kinerja		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	pendampingan penyusunan perjanjian kinerja		1 kali	-	-	-	-	-			
	penyusunan perubahan perjanjian kinerja		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	monev pengukuran capaian perjanjian kinerja		1 dokumen	-	-	-	-	-			
Kegiatan 5 : Pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi									-		
	penyusunan sistem, dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah		4 draft perwal/ kepwal	-	-	-	-	-			
	penyelenggaraan ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota		2 kali penyelenggaraan	-	-	-	-	-			
	evaluasi standar sarana dan prasarana kerja		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa		1 dokumen	-	-	-	-	-			
	peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja		1 dokumen	-	-	-	-	-			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	pendampingan penyusunan SOP		48 OPD/unit kerja	-	-	-	-	-			
	Pengembangan Budaya kerja		1 dokumen	-	-	-	-	-			
Kegiatan 6 : Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas									4,800,296, 586		
	draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		-	1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal	1 draft perwal/ kepwal			
	ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota		-	2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan			
	Workshop Hospitality Management		-	1 kali penyelenggaraan	-	-	-	-			
	rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa		-	1 draft perwal	1 draft perwal	1 draft perwal	1 draft perwal	1 draft perwal			
	rancangan peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja		-	1 draft perwal	-	1 draft perwal	1 draft perwal	1 draft perwal			
	Laporan pendampingan penyusunan SOP		-	SOP 45 kelurahan	SOP 50 UPT	SOP 16 SMP	SOP 90 SD dan 3 TK	-			
	Laporan pendampingan tatalaksana		-	15 PD/ unit kerja	15 PD/ unit kerja	10 PD/ unit kerja	10 PD/ unit kerja	-			
	Laporan Pembinaan Pelayanan Publik		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan Monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik		-	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP			
	Laporan pendampingan SPP		-	1 PD/unit kerja	1 PD/unit kerja	1 PD/unit kerja	1 PD/unit kerja	1 PD/unit kerja			
	Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM		-	2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM			
	frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti		-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan		-	1 doku-men pela-yanan perizinan	-	-	-	-			
	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD		-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja		-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Kajian Regulasi perizinan		-	-	1 dokumen kajian	-	-	-			
	Review Analisa Standar Belanja		-	-	1 dokumen	-	-	-			
Kegiatan 7 : Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan RSUD		-	1 dokumen	-	-	-	-			
	dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar		-	1 dokumen	-	-	-	-			
	dokumen evaluasi kelembagaan kantor kesatuan bangsa		-	1 dokumen	-	-	-	-			
	Laporan evaluasi rincian tugas dinas		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi rincian tugas setda dan setwan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi rincian tugas badan, inspektorat dan kecamatan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SIM Organisasi		-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Dokumen kajian kelembagaan		-	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian			
	Laporan penataan kelembagaan UPT		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area managemen perubahan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan organisasi		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area akuntabilitas		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area pengawasan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan dan managemen SDM Aparatur		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Laporan evaluasi kinerja organisasi		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan kajian kebijakan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan pengukuran indeks administrasi pemerintahan yang baik		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH, DAN KERUMAHTANGGAAN											Sekretariat Daerah
Kegiatan 1 : Pelayanan Kerumahtanggaan									11,741,940,658		
	Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen								
	Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen								
	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk		1 lokasi								
	Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar		7 lokasi								
	Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 Lokasi								
	Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 Lokasi								
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 Lokasi								
	Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing		1 kompleks balaikota								
	Peralatan kerja dan rumah tangga yang tersedia untuk Walikota dan Wakil Walikota		21 jenis								
	Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Laporan Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota			10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi			
	Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar			2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi			
	Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota			2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi			
	Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing			1 Kompleks Balaikota	1 Kompleks Balaikota	1 Kompleks Balaikota	1 Kompleks Balaikota	1 Kompleks Balaikota			
Kegiatan 2 : Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah									2,330,295,483		

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda		1 Dokumen								
	Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda		1 Dokumen								
	Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda		1 Dokumen								
	Pelayanan Perjalanan Dinas		75 kali								
	Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah		1 Dokumen								
	Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
Kegiatan 3 : Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta									121,279,244		
	Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 dokumen								
	Pengendalian Persuratan Dinas Setda Kota Yogyakarta		1 dokumen								
	Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
PROGRAM 3 :Program PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, DAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH											Sekretariat Daerah
Kegiatan 1 : Pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah									1,441,615,629		
	Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja		300 kali	1.104 kali	1.104 kali	1.104 kali	1.104 kali	1.104 kali			
	Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga		8 0rang	8 0rang	8 0rang	8 0rang	8 0rang	8 0rang			
	Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi		297 kali	480 kali	480 kali	480 kali	480 kali	480 kali			
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta									7,022,034,964		
	Frekuensi Latihan korps musik		20 kali	17 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali			
	Frekuensi Apel dan upacara		13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali			
	Frekuensi Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta		180 kali	180 kali	180 kali	180 kali	180 kali	180 kali			
	Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta		45 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali			
	Jumlah naskah sambutan		560 naskah								
Kegiatan 3 : Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli									712,839,503		
	Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli		176 kali	176 kali	176 kali	176 kali	176 kali	176 kali			
	Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli		232 kali	240 kali	240 kali	240 kali	240 kali	240 kali			
	Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli		92 kali	70 kali	70 kali	70 kali	70 kali	70 kali			
INDIKATOR SDG's	16.19.2.(a) Indeks Layanan Informasi Publik										
PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA STATISTIK									20,017,535,988		Dinas Kominfo dan Persandian
Kegiatan 1 : Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1. Pameran Sekaten		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	2. Penerbitan Media Pemerintah		8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali			
	3.Pengelolaan Website Jogjakota.go.id		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	4. Pengelolaan KIM		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	5. Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Radio		1515 kali	1515 kali	1515 kali	1515 kali	1515 kali	1515 kali			
	6. Sosialisasi Kebijakan pemkot Melalui Media Televisi		538 kali	538 kali	538 kali	538 kali	538 kali	538 kali			
	7. Sosialiasi kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang		425 kali	425 kali	425 kali	425 kali	425 kali	425 kali			
	8. Sosialiasi kebijakan Pemkot Melalui Pertunra		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	9.Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yk		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	1 Pembuatan Buku Statistik Kota Yogyakarta		14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik			
PROGRAM 2 :Program PENINGKATAN KOMUNIKASI PUBLIK									6,202,897, 101		Dinas Kominfo dan Persandian
Kegiatan 1 : Kehumasan dan Pelayanan Informasi	1. Pengkajian Berita		1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun			
	2. Deseminasi Perda/Perwal		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	3. Deseminasi LPPD akhir tahun		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	4. Sosialiasi APBD		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	5. Sosialiasi Hasil Audit BPK		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	6. Sosialiasi melalui ILM		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			
	7. Kerjama Penulisan		100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali			
	8 Advertorial		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	9. Ucapan Selamat		17 kali	17 kali	17 kali	17 kali	17 kali	17 kali			
	10. Jumpa Pers Wartawan		55 kali	55 kali	55 kali	55 kali	55 kali	55 kali			
	11. Peliputan Wartawan		44 kali	44 kali	44 kali	44 kali	44 kali	44 kali			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Keluhan dan Aduan	1. Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	2. Pengelolaan PPID		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	3. Dialog Interaktif Walikota Menyapa		432 kali	432 kali	432 kali	432 kali	432 kali	432 kali			
	4. Deseminasi PPID		6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali			
	5. Pengelolaan Call Center		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
PROGRAM 3 :Program OPTIMALISASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA									6,202,897, 101		Dinas Kominfo dan Persandian
Kegiatan 1 : Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	1. E-Gov Terkelola		26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit			
	2. Aplikasi Publik Yang terkelola		24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit			
	3. Perawa- tan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi		10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi			
	4. Pembangunan dan pengembangan redisain aplikasi		5 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi	5 aplikasi			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Perangkat Keras dan jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	1. Monitoring Jaringan Informasi		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali			
	2. Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan jaringan TI		3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis			
	a. Perbaikan dan Perawatan Server		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	b. Perbaikan dan perawatan Computer Client		10 unit/ bulan	10 unit/ bulan	10 unit/ bulan	10 unit/ bulan	10 unit/ bulan	10 unit/ bulan			
	c. Perbaikan dan Perawatan Jaringan Internet intranet		45 kel/bulan	45 kel/bulan	45 kel/bulan	45 kel/bulan	45 kel/bulan	45 kel/bulan			
	3. Pengadaan Belanja Modal Komputer Pendukung E Gov		4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis			
	4. Pengadaan CCTV		3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi			
	5. Pengadaan hardware Ruang Riset Teknologi		4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis			
	6. Pengadaan Perangkat Free Hotspot		20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi			
	7. Jasa Koneksi Internet		8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis			
	8. Pengadaan Lisensi Pengaman Jaringan		4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis			
	9. Pengadaan Virtual Privat Server		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	10. Pengembangan jaringan optik Luar kompleks		37 lokasi	37 lokasi	37 lokasi	37 lokasi	37 lokasi	37 lokasi			
Kegiatan 3 : Pengeloalaan dan Pengembangan Smart City											
	1. Perencanaan Infrastruktur ruang smart city operation center		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	2. Implementasi dan sosialiasi aplikasi smart city		45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan	45 kelurahan			
	3. Perangkat lunak aplikasi yang terintegrasikan		2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi			
	4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Egovermen		46 aplikasi	46 aplikasi	46 aplikasi	46 aplikasi	46 aplikasi	46 aplikasi			
	5 Pelayana Call Center		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan											
INDIKATOR SDG's	17.1.1* Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah										
	17.1.1.(a) Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD										
PROGRAM 1:Program PELAYANAN, PENDAFTARAN, DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH									10,263,05 3,377		BPKAD
Kegiatan 1 : Pelayanan Pajak Daerah											
	Sinkronisasi Data Obyek Pajak PBB-P2 dengan BPHTB		240 objek pajak	240 objek pajak	240 objek pajak	240 objek pajak	240 objek pajak	240 objek pajak			
	Pemeliharaan Obyek PBB-P2 Hasil Penilaian Individu		12 objek pajak	12 objek pajak	12 objek pajak	12 objek pajak	12 objek pajak	12 objek pajak			
	Pemeliharaan Data SISMIOP dan Data SIG PBB-P2		300 objek pajak	300 objek pajak	300 objek pajak	300 objek pajak	300 objek pajak	300 objek pajak			
	Pemeliharaan Data SIMPADA		500 wajib pajak	500 wajib pajak	500 wajib pajak	500 wajib pajak	500 wajib pajak	500 wajib pajak			
	Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Online		100 wajib pajak	100 wajib pajak	100 wajib pajak	100 wajib pajak	100 wajib pajak	100 wajib pajak			
Kegiatan 2 : Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah											
	Pemantauan SPTPD yang dikirim		22.000 SPTPD	22.000 SPTPD	22.000 SPTPD	22.000 SPTPD	22.000 SPTPD	22.000 SPTPD			
	Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP		60 WP	60 WP	60 WP	60 WP	60 WP	60 WP			
	Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru		500 WP	500 WP	500 WP	500 WP	500 WP	500 WP			
Kegiatan 3 : Penetapan Pajak Daerah											
	WP BPHTB yang diteliti		2000 WP	2000 WP	2000 WP	2000 WP	2000 WP	2000 WP			
	WP Hotel yang diperiksa secara lengkap		140 WP	140 WP	140 WP	140 WP	140 WP	140 WP			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	WP Hotel yang diperiksa secara sederhana		25 WP	25 WP	25 WP	25 WP	25 WP	25 WP			
	WP Restoran yang diperiksa secara lengkap		110 WP	110 WP	110 WP	110 WP	110 WP	110 WP			
	WP Restoran yang diperiksa secara sederhana		30 WP	30 WP	30 WP	30 WP	30 WP	30 WP			
	WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap		20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP			
	WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana		20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP			
	WP Parkir yang diperiksa secara lengkap		20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP			
	WP Parkir yang diperiksa secara sederhana		20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP	20 WP			
	WP yang dilakukan penilaian individu		12 WP	12 WP	12 WP	12 WP	12 WP	12 WP			
	WP yang dilakukan pendataan & penilaian massal (Kec.Ngampilan)		4000 WP	4000 WP	4000 WP	4000 WP	4000 WP	4000 WP			
	Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah		9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan			
	Penyampaian SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2			
PROGRAM 2 :Program PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH									19,355,829,423		BPKAD
Kegiatan 1 : Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah											
	Tunggakan pajak daerah yang ditagih		500 WP	500 WP	500 WP	500 WP	500 WP	500 WP			
	Buku kendali wajib pajak yang dilaporkan		84 laporan	84 laporan	84 laporan	84 laporan	84 laporan	84 laporan			
	Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke WP		3000 WP	3000 WP	3000 WP	3000 WP	3000 WP	3000 WP			
	Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah		600 WP	600 WP	600 WP	600 WP	600 WP	600 WP			
	SPPT PBB-P2 yang ditagih		7500 WP	7500 WP	7500 WP	7500 WP	7500 WP	7500 WP			
	WP yang mendapat pembinaan		750 WP	750 WP	750 WP	750 WP	750 WP	750 WP			
	WP yang mendapat kompensasi /Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran		425 WP	425 WP	425 WP	425 WP	425 WP	425 WP			
	WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB		325 WP	325 WP	325 WP	325 WP	325 WP	325 WP			
	WP daerah yang mendapat penghargaan		30 WP	30 WP	30 WP	30 WP	30 WP	30 WP			
	WP yang mendapat penyuluhan		3250 WP	3250 WP	3250 WP	3250 WP	3250 WP	3250 WP			
Kegiatan 2 : Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah											
	Wajib pajak PBB yang terverifikasi		4500 wajib pajak	4500 wajib pajak	4500 wajib pajak	4500 wajib pajak	4500 wajib pajak	4500 wajib pajak			
	Wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame yang terverifikasi		1000 wajib pajak	1000 wajib pajak	1000 wajib pajak	1000 wajib pajak	1000 wajib pajak	1000 wajib pajak			
	Laporan realisasi penerimaan pajak daerah		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen			
	Telaah restitusi pajak daerah		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Laporan jaminan bongkar reklame		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Laporan realisasi tunggakan pajak daerah		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen			
	Perforasi karcis, tiket, bill dll		27.000 buku	27.000 buku	27.000 buku	27.000 buku	27.000 buku	27.000 buku			
	Pengoperasian komputer POS PBB		62 Kompute Ar	62 Kompute Ar	62 Kompute Ar	62 Kompute Ar	62 Kompute Ar	62 Kompute Ar			
	Laporan rekonsiliasi PPJ dan PBB		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen			
INDIKATOR SDG's	17.5.1. Persentase peningkatan nilai investasi										
PROGRAM 1:Program PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN											Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kegiatan 1 : pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan									1,114,983,637		
	1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan		400 izin	400 izin	400 izin	400 izin	400 izin	400 izin			
	2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas PMP		2798 izin	2798 izin	2798 izin	2798 izin	2798 izin	2798 izin			
	3. analisa gambar situasi di dinas PM dan perizinan		950 GS	900 GS	900 GS	900 GS	900 GS	900 GS			
	4. analisa struktur bangunan gedung		129 IMB	129 IMB	129 IMB	129 IMB	129 IMB	129 IMB			
	5. pengolahan berkas permohonan IMB		1.300 berkas	1.300 berkas	1.300 berkas	1.300 berkas	1.300 berkas	1.300 berkas			
	6. klinik pelayanan perizinan		129 berkas	129 berkas	129 berkas	129 berkas	129 berkas	129 berkas			
	7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun		10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok			
	8. koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen pertelaan		10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok			
Kegiatan 2 : pelaksanaan operasional pelayanan perizinan									233,814,341		
	1. pelayanan pemohon izin		8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon			
	2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin		8000 berkas	8000 berkas	8000 berkas	8000 berkas	8000 berkas	8000 berkas			
	3. pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice Planing		500 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas			
	4. laporan hasil pengendalian administrasi perizinan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	5. pelaksanaan pencermatan permohonan SKKTR			200 berkas	200 berkas	200 berkas	200 berkas	200 berkas			
	6. pelaksanaan koordinasi izin PM			50 izin	50 izin	50 izin	50 izin	50 izin			
Kegiatan 3 : pelaksanaan Penerbitan perizinan									443,419,023		
	1. pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin		8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon	8000 pemohon			
	2. laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin		12 kali laporan	12 kali laporan	12 kali laporan	12 kali laporan	12 kali laporan	12 kali laporan			
	3. penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak		8 kel izin	8 kel izin	8 kel izin	8 kel izin	8 kel izin	8 kel izin			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
PROGRAM 2 :Program PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN											Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kegiatan 1 : pengawasan perizinan kota yogyakarta									193,634,801		
	1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas PM dan Perizinan		1200 izin	1500 izin	1500 izin	1500 izin	1500 izin	1500 izin			
	2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	4. Proses permohonan sertifikat laik fungsi (SLF)		35 permohonan	50 permohonan	50 permohonan	50 permohonan	50 permohonan	50 permohonan			
Kegiatan 2 : pengelolaan pengaduan perizinan kota yogyakarta									106,193,334		
	1. pelayanan pengaduan perizinan		60 peng-aduan	60 peng-aduan	60 peng-aduan	60 peng-aduan	60 peng-aduan	60 peng-aduan			
	2. analisa permasalahan pengaduan perizinan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	3. pengecekan lokasi pengaduan		30 peng-aduan	30 peng-aduan	30 peng-aduan	30 peng-aduan	30 peng-aduan	30 peng-aduan			
	4. evaluasi permasalahan perizinan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
PROGRAM 3 :Program PENGUATAN REGULASI DAN PENGEMBANGAN KINERJA LAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN											Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kegiatan 1 : pengkajian dan sosialisasi peraturan perizinan									1,019,258,511		
	1. kajian peraturan dibidang palayanan perizinan		3 dokumen	3 dokumen kajian	3 dokumen kajian	3 dokumen kajian	3 dokumen kajian	3 dokumen kajian			
	2. draft rancangan peraturan daerah/peraturan walikota/keputusan kepala dinas		4 dok draft	4 dok draft peraturan perizinan	4 dok draft peraturan perizinan	4 dok draft peraturan perizinan	4 dok draft peraturan perizinan	4 dok draft peraturan perizinan			
	3. sosialisasi peraturan perizinan melalui :										
	- dialog interaktif melalui radio		3 x siaran	3 x siaran	3 x siaran	3 x siaran	3 x siaran	3 x siaran			
	- sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan		2x pertemuan								
	- Iklan Layanan Masyarakat		2 paket								
	- penyederhanaan perizinan IMB dan izin gangguan		2 izin								
	- penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec. Sesuai dengan ketentuan		7 keca-matan								
***perubahan di tahun 2018**	- sosialisasi/dialog tatap muka		2x perte-muan	2x perte-muan	2x perte-muan	2x perte-muan	2x perte-muan				
	- pembinaan teknis perizinan di Kecamatan		7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan				

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	- percepatan pelayanan perizinan SIUP dan TDP		7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan				
Kegiatan 2 : pengukuran kinerja pelayanan									467,511,881		
	1. pengukuran kinerja melalui :										
	- survey IKM		6000 resp	6000 resp	6000 resp	6000 resp	6000 resp	6000 resp			
	- pelaksanaan evaluasi pelayanan penanaman modal dan perizinan Kota Yogyakarta		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	2. pemantapan pelembagaan ISO pada Dinas PMP Kota Yogyakarta		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
PROGRAM 4 :Program PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL											Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kegiatan 1 : pengelolaan data dan informasi perizinan									1,240,506,128		
	- pemeliharaan :										
	- aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE,SIPO,Simjaki		4 aplikasi	4 aplikasi SIM	4 aplikasi SIM	4 aplikasi SIM	4 aplikasi SIM	4 aplikasi SIM			
	- sub domain Dinas PM dan Perizinan		1 sub domain	1 sub domain	1 sub domain	1 sub domain	1 sub domain	1 sub domain			
	- pengembangan SIM PM dan Perizinan, SPIPISE,SIPO,Simjaki		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			
	- penyediaan hardware		2 macam	2 macam	2 macam	2 macam	2 macam	2 macam			
	a. printer dot matrik		4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit			
	b. monitor		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit			
	- berkas arsip perizinan terkelola dengan baik		31 jenis izin	31 jenis izin	31 jenis izin	31 jenis izin	31 jenis izin	31 jenis izin			
	- ahli media (scan & entri) dokumen gambar pada berkas IMB		19.482 lembar	19.482 lembar	19.482 lembar	19.482 lembar	19.482 lembar	19.482 lembar			
	- penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur		7500 berkas	7500 berkas	7500 berkas	7500 berkas	7500 berkas	7500 berkas			
	- duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur		220 pemohon	220 pemohon	220 pemohon	220 pemohon	220 pemohon	220 pemohon			
Kegiatan 2 : Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal									1,367,367,928		
	identifikasi potensi PM		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
	bahan Promosi		1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis			
	pelayanan informasi PM		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
	updating Informasi Perkembangan Investasi			18 update	18 update	18 update	18 update	18 update			
Kegiatan 3 : pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PM									377,479,556		
	pengendalian pelaksanaan PM		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
	monev kegiatan PM		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
	sosialisasi dan forum komunikasi di bidang PM		2 kali	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok			
INDIKATOR SDG's	17.14.1. Indeks pelaksanaan pembangunan										
PROGRAM 1:Program PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN											

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda									266,398,153		Sekretariat Daerah
	Renstra Setda		1 dokumen								
	Review Renstra Setda			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	RUP Setda		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	SOP PEP		2 dokumen								
	Petunjuk teknis		1 dokumen								
	LKIP Setda			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan koordinasi penataan sanitasi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Renja Setda			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Perjanjian kinerja Setda		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Pengukuran kinerja Setda		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	KAK perangkat daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 2 : Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan											
	Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
	Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		4 laporan	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan	4 laporan triwulanan			
	Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan		20 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan pengendalian kontrak kritis		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan peta pembangunan berbasis digital		12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan ekspose hasil pekerjaan konstruksi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
Kegiatan 3 : Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan									1,223,714,382		
	Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Buku Daftar Registrasi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Evaluasi AHS		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
PROGRAM 2 :Program PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA											Sekretariat Daerah
Kegiatan 1 : Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa									1,047,925, 057		
	Laporan Pengendalian Pelaksanaan aplikasi SPSE		1 Laporan								
	Laporan Pendampingan SIRUP		1 Laporan	1 laporan							
	Laporan Pendampingan Institusi		1 Laporan	1 laporan							
	Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk		1 Laporan	1 laporan							
	Laporan Hasil Surveilance ISO		1 Laporan								
	Laporan Verifikasi Berkas		1 Laporan								
	Laporan pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa		120 Peserta								
	Aplikasi SPSE yang terkendali			1 laporan							
	Implementasi Surveilance ISO			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
	Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Pendampingan Bidding				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
Kegiatan 2 : Operasional Pengadaan Barang/Jasa									1,456,917, 148		
	Laporan Pendampingan RPP dan RUP		48 SKPD/ Unit Kerja	1 Laporan							
	Laporan Pendampingan RPP				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa		1 Dokumen								
	Peraturan walikota pengadaan barang/jasa		1 Perwal								
	Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		1 laporan								
	Laporan pengembangan ULP percontohan		1 laporan	1 laporan							
	Laporan analisa Survey		1 laporan	1 laporan							
	Laporan penyusunan SOP pengadaan		1 laporan	1 laporan							
	FGD evaluasi pelaksanaan lelang dg penyedia/POKJA/PPK		1 Kali								
	FGD kebijakan pengadaan barang/jasa		1 Kali								
	sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa		2 Kali								
	Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Pengembangan ULP Percontohan			1 Laporan							
	Pelaksanaan Kinerja Pengadaan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Penyusunan Analisa Survey			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Penyusunan SOP Pengadaan			1 Laporan							
	Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Brg/Jasa				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Evaluasi Pelaksanaan lelang				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Kegiatan 3 : Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa									1,384,870,582		
	Laporan penyelesaian permasaslahan pengadaan		1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan pelaksanaan klinik pengadaan barang/jasa		1 laporan								
	Laporan Pengelolaan resiko pengadaan		1 laporan								
	Laporan pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan PPHP		2 Kali								
	Bimtek peningkatan kompetensi POKJA		1 Laporan								
	Kebijakan katalog lokal		1 Laporan								
	Kontrak payung dengan penilik barang/jasa lokal		1 laporan								
	Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Manajemen Resiko Pengadaan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Peningkatan Kapasitan SDM Pengadaan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan				2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan			
INDIKATOR SDG's	17.14.1. Indeks pelaksanaan pembangunan										
PROGRAM 1:Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI											Bappeda
Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan									2,412,465,064		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan			1 dokumen							

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan			1 dokumen							
	Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional			1 dokumen							
	Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi									497,873,767		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan		1 dokumen								
	Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1 dokumen							
	'Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1 dokumen							

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1 dokumen							
	Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi			1 laporan							
	Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 3 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah									627,468,7 10		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan		1 dokumen								
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah			1 dokumen							
	Analisa Fiskal Daerah		1 laporan	1 laporan							
	Kajian Potensi Investasi di Kota Yogyakarta			1 dokumen							

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah		1 laporan	1 laporan							
	Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD			1 laporan							
	Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Ekonomi Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
PROGRAM 2 :Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK											Bappeda
Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo									400,564,210		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan		1 dokumen								
	Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan		1 dokumen								
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo			1 dokumen							
	Laporan Strategis Perhubungan			1 laporan							
	Laporan Strategis Kominfo			1 laporan							

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Laporan Koordinasi Pokja Smartcity		1 laporan	1 laporan							
	Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid perhubungan dan kominfo				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman									1,628,220,636		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanan Sarpras Permukiman		1 dokumen								
	Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman		1 dokumen								
	Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun)		1 dokumen								
	Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan		1 dokumen								
	Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman			1 dokumen							

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Sanitasi			1 laporan							
	Iuran Sekber Kartamantul			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pekerjaan Umum dan Permukiman				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 3 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup									2,767,686,476		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang		1 dokumen								
	Iuran Sekber Kartamantul		1 dokumen								
	Laporan Penataan Kawasan Sungai		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup		1 dokumen								
	Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang		1 dokumen								
	Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan		1 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Penyusunan dokumen KLHS RPJMD		1 dokumen								
	Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)		1 laporan	1 laporan							
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			1 dokumen							
	Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Strategis Tata Ruang			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Ecodistrict			1 laporan							
	Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan			1 laporan							
	Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta			1 dokumen							
	Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi Lahan			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim			1 laporan							
	Dokumen Perencanaan Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
PROGRAM 3 :Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL											Bappeda
Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan									404,178,138		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan		1 laporan	1 laporan							
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			1 dokumen							
	Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan			1 laporan							
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat									3,232,069,684		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		1 dokumen								
	Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto		1 dokumen								
	Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021		1 dokumen								
	Laporan Kota Sehat		1 dokumen								
	Laporan Kota Inklusi		1 dokumen								
	Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan		1 laporan	1 laporan							
	Laporan Koordinasi Sektor Sosial		1 laporan	1 laporan							
	Laporan Kampung Taqwa Mrican		1 laporan								
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat			1 dokumen							
	Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)			1 laporan							
	Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto			1 laporan							
	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan			1 dokumen							
	Dokumen Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 3 : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur									288,624,797		
	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban		1 dokumen								
	Pengendalian Evaluasi Pemerintahan		1 dokumen								
	Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			1 laporan							
	Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur			1 dokumen							
	Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur			1 dokumen							
	Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur			1 dokumen							
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur			1 dokumen							
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Aparatur			1 dokumen							
	Dokumen Perencanaan Sektor Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
PROGRAM 4 :Program PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH											Beppeda
Kegiatan 1 : Kegiatan PerencanaanProgram Pembangunan Daerah									5,732,865,903		
	Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021		1 dokumen								
	Dokumen RKPD Tahun 2018		1 dokumen								
	Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017		1 dokumen								
	Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2018		1 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022			
Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017		1 dokumen								
Dokumen Renja SKPD		1 dokumen								
Dokumen Renstra SKPD		1 dokumen								
Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021		1 dokumen								
Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018		1 dokumen								
Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018		1 dokumen								
Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018		1 dokumen								
Musrenbang RPJMD		1 kali								
Dokumen Hasil Forum SKPD		1 dokumen								
Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD		1 dokumen								
Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan dan Bantuan Keuangan		1 dokumen								
Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021		1 dokumen								
Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD		1 dokumen								
Dokumen Analisis "Money FollowProgram" dalam RPJMD 2017-2022			1 dokumen							
Dokumen Analisis Tindak Lanjut Perencanaan Teknokratis			1 dokumen							
Dokumen SDG's Kota Yogyakarta			1 dokumen							
Dokumen Review RPJMD 2017-2022			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Dokumen RKPD Tahun (n+1)			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Dokumen RKPD Perubahan Tahun (n)			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun (n+1)			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun N			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Dokumen Renja OPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Dokumen Review Renstra OPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			

	Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta N+1			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta N+1			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun N+1			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Hasil Forum OPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Buku Pedoman Musrenbang RKPD N+1			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen perencanaan teknokratis, top down-bottom up sub bid Perencanaan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 2 : Kegiatan PengendalianProgram Pembangunan Daerah									3,058,928,678		
	Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil RPJPD		1 dokumen								
	Evaluasi Kebijakan RPJMD		1 dokumen								
	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD		1 dokumen								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD		1 dokumen								
	Evaluasi Kebijakan RKPD		1 dokumen								
	Evaluasi Pelaksanaan RKPD		1 dokumen								
	Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD		1 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD		1 dokumen								
	Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV		4 dokumen								
	Monitoring dan Evaluasi APBN, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		1 dokumen								
	Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan, dan Bantuan Keuangan Gubernur		1 dokumen								
	Sinkronisasi Perencanaan - Penganggaran		1 dokumen								
	Sinkronisasi Prioritas Pusat Daerah		1 dokumen								
	Laporan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016		1 dokumen								
	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV			6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
	Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV			6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
	Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari Pusat			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Kegiatan Bersumber dari DIY			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Monitoring dan EvaluasiProgram Prioritas Pembangunan Daerah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Evaluasi RPJPD				1 dokumen						
	Dokumen evaluasi teknokratis, top down-bottom up sub bid Pengendalian				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Kegiatan 3 : Kegiatan Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan									3,119,696,515		
	InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni		1 dokumen								
	InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan		1 dokumen								
	InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018		1 dokumen								
	Pengembangan Data dan Informasi		2 dokumen								

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta			1 dokumen							
	Dokumen Data Kewilayahan		1 dokumen								
	Dokumen Data Sektoral		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Analisa Data		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Data Series SIPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	InformasiProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan dan RencanaProgram dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
PROGRAM 5 :Program PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											Bappeda
Kegiatan 1 : Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah									2,627,317,173		
	Buku Jurnal Jarlit 2017		5 dokumen								
	Buku Inventarisasi Hasil Penelitian		80 Buku								
	Anugerah Penelitian		1 dokumen								
	Kajian Keuangan Daerah		1 dokumen								
	Laporan E-jarlit dan E-jurnal		1 laporan								
	Dokumen Penelitian		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen			
	Buku Jurnal Jarlit			1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku			
	Buku Inventarisasi Hasil Penelitian		1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku				
	Dokumen Penelitian Strategis Tematik			1 dokumen							
	Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitan di OPD			1 dokumen							
	Jurnal Jarlit Kota Yogyakarta			1 dokumen	1 dokumen						
Kegiatan 2 : Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis									4,334,914,698		
	Dokumen Analisa Kebijakan		1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			
	Kajian Smart City Tahap II		1 dokumen								
	Masterplan Transportasi Perkotaan		1 dokumen								
	Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah			1 dokumen							

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis)			1 dokumen							
	Dokumen Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Dokumen Data Kewilayahan Semester I dan II			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
Kegiatan : Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah									2,546,679,894		
	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida)		1 dokumen								
	Anugerah Inovasi dan Penelitian			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis			
	Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Dokumen Perancangan Inovasi Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Laporan Forum Inovasi Daerah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
	Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)			1 dokumen							
INDIKATOR SDG's	17.19.1.(a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi										
PROGRAM 1:Program PENINGKATAN PELAYANAN PERSANDIAN									4,901,719,365		Dinas Kominfo dan Persandian
Kegiatan 1 : Operasional persandian											
	1. Pengamanan Sinyal Frekwensi		11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan			
	2. Pemeliharaan Peralatan Persandian		30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit			
	3. Perbaikan dan Perawatan Perangkat Telekomunikasi		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	4. Penggantian dan Penataan Jaringan telepun		1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set			
	Pembayaran Pajak Komunikasi radio (HT)		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit			
Kegiatan 2 : Pengembangan Perssandian Dan Telekomunikasi											
	1 Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta		59 JKS	59 JKS	59 JKS	59 JKS	59 JKS	59 JKS			
	2. Laporan forum Komunikasi Persandian		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	3. Pengadaan Peralatan Sandi		1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set			
Kegiatan 3 : Pengewasan dan Pengendalian Telekomunikasi											
	1. . Laooran Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	2. Seminar pembinaan operasional Warnet dan Game online		50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta			
	3. Pengadaan peralatan pengawasan persandian		1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set			
INDIKATOR SDG's	17.19.2.(e) Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan										
PROGRAM 1:Program PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA STATISTIK									20,017,535,988		Dinas Kominfo dan Persandian
Kegiatan 1 : Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi											
	1. Pameran Sekaten		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
	2. Penerbitan Media Pemerintah		8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali			
	3.Pengelolaan Website Jogjakota.go.id		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	4. Pengelolaan KIM		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
	5. Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Radio		1515 kali	1515 kali	1515 kali	1515 kali	1515 kali	1515 kali			

Program/ Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar 2017	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp.)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
	6. Sosialisasi Kebijakan pemkot Melalui Media Televisi		538 kali	538 kali	538 kali	538 kali	538 kali	538 kali			
	7. Sosialiasi kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang		425 kali	425 kali	425 kali	425 kali	425 kali	425 kali			
	8. Sosialiasi kebijakan Pemkot Melalui Pertunra		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali			
	9.Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yk		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi dan Data Statistik											
	1 Pembuatan Buku Statistik Kota Yogyakarta		14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik	14 jenis statitik			

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Sosial

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN												
Indikator TPB/ SDGS:	**Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun**											
PROGRAM 1: Pendampingan intensif pemerintah desa dalam tata kelola dana desa												
Kegiatan 1 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan penguatan ekonomi	Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan penguatan ekonomi	unit kegiatan non fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/ pengelola air minum berbasis komunitas)	Pendampingan kelompok-kelompok usaha ekonomi (rumah kreasi yang ada di masyarakat	unit kegiatan non fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 3 : Meningkatkan promosi produksi usaha yang ada di masyarakat, kelompok keluarga (rumah kreasi dll.)	Peningkatan kegiatan promosi produksi usaha ekonomi keluarga yang ada di masyrakat, kelompok- kelompok keluarga	unit kegiatan non-fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 4: Pemda menciptakan ruang ker-ja dan ekonomi untuk masyarakat marginal Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Terciptanya ruang kerja dan ekonomi untuk masyrakat marginal								100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 5: Mendorong peran serta masya-rakat untuk melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan (Ubi, pertanian organik, pemanfaatan lahan) Kegiatan	Peningkatan peran masyarakat untuk melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan (ubi, pertanian organik, pemanfaatan lahan)								200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, dinas pertanian, dll)
Kegiatan 6: Meningkatkan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Data peningkatan RS yang bekerjasama dengan BPJS beserta jumlah masing-masing kamar disetiap RS. dan Jumlah peserta BPJS di DIY meningkat								50.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatandll)
	Peningkatan perusahaan/lembaga untuk memberikan program SJSN ketenagakerjaan kepada para pekerja								50.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas kesehatandll)
Kegiatan 7 ; Wilayah /Daerah Siaga: Melaksanakan pelatihan siaga bencana kepada semua desa di DIY	Meningkatnya desa-desa yang siap menghadapi bencana , desa memiliki komunitas yang terlatih dalam bencana								100.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan perangkat desa		Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan perangkat desa
Kegiatan 8. Meningkatkan Pelatihan mengatasi trauma psikologis pasca bencana terutama pada perempuan dan anak pada tenaga Puskesmas, LSM dan Ormas 9. GACA	Meningkatnya tenaga ahli yang siap membantu mengatasi trauma psikologis pasca bencana								100.000.000,-	Dinas kesehatan, LSM, Ormas, pekerja sosial		Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa, Ormas 'Aisyiyah
Indikator TPB/ SDGS:	**Membuat kota dan hunian yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan**											
PROGRAM 2: Penyediaan sistem transportasi yang aman, terjangkau, terakses dan berkelanjutan bagi semua orang												
Kegiatan 1: Penataan Zona manajemen dan Penyediaan Bus Sekolah Terjangkau di Seluruh DIY	Output: a) DIY memiliki sistem dan manajemen transportasi publik bagi anak anak sekolah b). Pemerintah dan swasta mengembangkan proyek pengadaan bus sekolah bagi warga DIY	Unit kegiatan fisik dan non fisik								Dinas Jalan Raya, Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa		Dinas Jalan Raya, Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa
Kegiatan 2: Penataan Kembali Manajamen Parkir Kota dan Pejalan Kaki	1). Mengadopsi sistem elektronik modern untuk manajemen revenues dari perparkiran jalan raya. 2). Para Pekerja Parkir mendapatkan pelatihan dan penataan sistem karir, kerja dan insentif baru. 3). Jalan raya memiliki jalur pejalan kaki dan sistem "speed limit" dengan law enforcement bagi pelanggar lalu lintas yang makin andal	Unit kegiatan fisik dan non fisik								Polisi, Pemda, Kampus, Swasta		Polisi, Pemda, Kampus, Swasta
Indikator TPB/ SDGS:	**Mengurangi Kelaparan, Mencapai Keamanan Pangan, Peningkatan Gizi dan Mempromosikan Pertanian yang Berkelanjutan**											
PROGRAM 3: Mengakhiri Kelaparan dan Memastikan Akses bagi semua Warga, terutama yang miskin dan rentan terutama balita, pada keamanan, gizi, dan makanan yang cukup sepanjang tahun												

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
Kegiatan 1: Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nutrisi dan Perlindungan dari Kelaparan bagi Warga Miskin dan Rentan	Output : a). Terciptanya komitmen dan regulasi skema keringanan pajak bagi pengusaha restoran dan hotel hotel papan atas yang terlibat dalam program donasi makanan tak tergunakan b). Terbentuknya lembaga sosial yang efektif untuk pengepul dan redistributor bantuan sosial penyediaan jaminan nutri dan makanan bagi warga miskin dan rentan yang membutuhkan	Unit kegiatan fisik dan non fisik										
PROGRAM 4: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia												
Kegiatan 1. meningkatkan Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan.	1.1 Output Kegiatan : Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (tahun 2010 : 346)	unit kegiatan fisik							150.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Dinas kesehatan, Puskesmas, LSM, Ormas dan perangkat desa
	1.2 Output Kegiatan : adanya program BPJS mengcover Jaminan persalinan, dan meningkatnya persentase persalin-an di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	unit kegiatan fisik							150.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas, PKBI		Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa
Kegiatan 2. Suami mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya menjelang dan sesudah persalinan	1.3. Output Kegiatan :Program peningkatan kapasitas untuk suami siaga	unit kegiatan non-fisik							Rp 100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 3. Pemberian layanan persalinan yang ramah kepada semua masyarakat tanpa memandang status pernikahan	1.4. Output Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan pada perempuan yang belum menikah untuk mengakses layanan persalinan dan adanya jaminan kerahasiaan pasien. (KTD)	unit kegiatan fisik							200.000.000,-			Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 4. Pelatihan untuk provider khususnya penanganan persalinan Ibu dengan HIV positif	1.5 Output kegiatan:Meningkatnya per-sentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	unit kegiatan non-fisik							100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyiyah
	1. Adanya SOP penanganan persalinan Ibu dengan HIV postif, 2. Semua provider mampu memberikan layanan persalinan ibu dengan HIV postif (KTD)	unit kegiatan non-fisik							100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Ikelompok pengajian, gereja, paguyuban sosial, PKK
PROGRAM 5: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapatdicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal												
Kegiatan 1. melakukan sosialisasi dan mengawal Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan.	1.1 Output Kegiatan : 2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	unit luasan fisik							150.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatan dll)
Kegiatan 2 . Suami mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya selama proses persalinan, dan mampu merawat bayi yang sudah lahir.	2.1 Output Kegiatan : meningkatnya pemahaman dan dan kesadaran suami untuk mendampingi istri saat melahirkan, dan perawatan bayi.	unit kegiatan non-fisik							150.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Puskesmas, Kader kesehatan, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyisyah
		unit kegiatan non-fisik										Dinkes, LSM, Ormas, Puskesmas
Kegiatan 3. Memberikan edukasi pentingnya imunisasi dan pendampingan kepada kelompok yang menolak terhadap program imunisasi	2.2 Output KegiatanMeningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015 : 71,2%).	unit non -fisik							100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud
Kegiatan 4. Pengelolaan kantin sehat disekolah-sekolah dan pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin . 5. Gerakan GACA	2.1 Output Kegiatan: Menurunnya Prevalensi stanting (pendek dan sangat pendek pada anak dibawah 2 tahun atau baduta)dan pada anak dibawah 5 tahun.	unit non fisik							250.000.000,-	Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas		Dispenbud, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas
Kegiatan 5. Sosialisasi Pola pangan sehat dan gizi seimbang.2. Penyediaan kantin sehat di sekolah. 3. Penyadaran makanan sehat untuk anak									250.000.000,-	Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud		Dinas pertanian, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas
PROGRAM 6: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												

Nama Program / Kegiatan	Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
Kegiatan 1. Provider memberikan Pendidikan Kesehatatan tentang TB	1.1 Output Kegiatan : Adanya upaya pencegahan penyakit TB pada keluarga, sehingga Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	unit luasan fisik							300.000.000,-			Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, dll
Kegiatan 2 : Provider memberikan informasi kepatuhan minum obat dan pencegahan penularan pada keluarga maupun masyarakat	barnya informasi fungsi kondom sebagai alat kontrasepsi dan mencegah IMS ke masuarakat	unit kegiatan non-fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver
	2.2 Output Kegiatan : tidak adanya pasien yang tidak patuh menum obat dan putus obat	unit kegiatan non-fisik							250.000.000,-			
Kegiatan 3. Provider memberikan Pendidikan Kesehatatan Reproduksi yang sehat dan aman klien	3.1 output Kegiatan : Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	unit kegiatan non-fisik							250.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas
Kegiatan 4. Provider memberikan informasi fungsi kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan	4.1. output kegiatan : Meningkatnya penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan								200.000.000,-	Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas/'Aisyiyah, Dispenbud, PKBI		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver
Kegiatan 5. Pemberian informasi perencanaan keluarga bagi remaja belum menikah (10-24 tahun) dan PUS (Pasangan Usia Subur),	Menurunnya Total Fertility Rate(TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).								250.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas/'Aisyiyah, KUA
Kegiatan 6. Pemberian wewenang kepada Kader desa/kelurahan untuk memberikan informasi dan distribusi alat kontrasepsi, Mendorong pelibatan laki-laki dalam KB, dan Setiap desa/kelurahan memiliki produk kebijakan kampanye PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), 2. Setiap desa memiliki organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes untuk kegiatan kampanye PUP.	Terjadinya penurunan pernikahan di usia dini (kurang dari 21 untuk perempuan dan kurang dari 25 untuk laki-laki), 2. Terjadinya penurunan angka unmeet need, Setiap desa memiliki organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes untuk kegiatan kampanye PUP.								300.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, Mitra Wacana, PKBI dan Ormas/'Aisyiyah, KUA
Kegiatan 7. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat berpendapat rendah melalui kebijakan yang ramah dan murah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Memaksimalkan potensi sumber mata air lokal untuk dimanfaatkan masyarakat bersama secara partisipatif.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%	unit non fisik							350.000.000,-			Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud, PKBI
Indikator TPB : Pendidikan yang berkualitas												
Program 7: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni , SMP/MTs/Sederajat, SMA/SMU/MA pada tahun2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).												
Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar untuk mencerdaskan bangsa, dan mendorong pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan gratis pada pendidikan dasar, dan menengah pertama serta menengah atas. Kegiatan 2 : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi, penyediaan taman bacaan/pustaka	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	unit luasan fisik							200.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 MENJADI 82,2% (2015:79,97%)								200.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA / SMK/MA /Sederajat paa tahun 2019 menjadi 91,63% (2015 : 82,42%)								200.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
	Output Kegiatan : Adanya kegiatan kampanye minat baca dan pemahaman litersi	unit luasan fisik							500.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
	Output Kegiatan : Adanya peningkatan taman bacaan/pustakaan di setiap pedukuhan dan desa dilindungi berbasis masyarakat (perdes pelestarian alam, dll)	unit luasan fisik							500.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
Program 8: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.												

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022				
Pemerintah daerah menyediakan ruang jaring pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan yang responsif gender	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	unit kegiatan non-fisik							300.000.000,-			Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI
	2. Setiap Desa mempunyai pelayanan dan pendampingan hukum dan pendampingan pasca trauma kekerasan (community crisis center)	unit kegiatan non-fisik							750.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI
1. Pendidikan politik untuk perempuan. 2. Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik. 3. Adanya produk kebijakan yang mendukung peningkatan keterwakilan permpuan di DPR.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).								300.000.000,-			Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI
	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil pemilu 2014: 16,6%).	unit kegiatan non-fisik							250.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Ekonomi

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau											
Indikator TPB/ SDGS:	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua										
PROGRAM 1: OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH											
1) ADVOKASI MEKANISME DISTRIBUSI ENERGI YANG TEPAT SASARAN. 2) MENDORONG PENGGUNAAN ENERGI BERSIH SECARA BERTAHAP MENGGANTIKAN ENERGI KOTOR	unit kegiatan non fisik							100,000,000	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)	DIY	LKY
PROGRAM 2: Penyiapan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Indikator : TPB											
1) Penyiapan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan era digital ekonomi. 2) peningkatan kualitas produk s/d packaging									1) setahun 1x @ 10.000.000 2) setahun 2x @ 10.000.000	DIY	Ciqal, Yasanti,
PROGRAM 3: peningkatan pertumbuhan UMKM											
Training, Chanelling, networking									sekali setahun @ Rp 10.000.000	DIY	Kadin
PROGRAM 4: peningkatan pertumbuhan UMKM											
Penyediaan pusat layanan korban di tempat kerja											Yasanti
PROGRAM 5: Penyelenggaraan fasilitas umum yang aksesible dan tenaga kerja bisa melayani dengan perspektif ramah konsumen											
pelatihan assertifitas									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Ciqal, Yasanti,
PROGRAM 6: 1) Penyediaan fasilitas umum yang aksesible. 2) adanya rambu2 bagi Penyandang Disabilitas. 3) informasi (running teks, braille)											
advokasi fasilitas umum yang aksesibel, Pelatihan aksesibilitas									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Ciqal
PROGRAM 7: mendorong tumbuhnya industri kreatif dan inklusif											
1) pemberdayaan bahan baku lokal maupun kearifan lokal. 2) monitoring implementasi perda disabilitas bidang tenaga kerja disabilitas									1) setahun 1x @ 5.000.000 2) 3bln sekali @ 1.000.000		Ciqal, LKY, Yasanti
PROGRAM 8: a) penerapan standar skala upah secara menyeluruh di segala sektor. B) peningkatan akses masyarakat miskin ke lembaga keuangan											
advokasi mengawal penyusunan standar skala upah (Workshop, Loby, Audiensi,									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Kadin, Ciqal, Yasanti, LKY, KPI

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau											
Indikator TPB/ SDGS: Jumlah Penduduk Berakses Air Minum											
PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas)			1x	1x				90 juta		Kota Yogyakarta	Forum Merti Code, dll
Kegiatan 3 : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan sanitasi air bersih berkelanjutan melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar di sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (sekolah sehat, sekolah bersih hijau sehat, dll)			2x	4x				175 juta		Kota Yogyakarta	Hijau

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
Kegiatan 4: Peningkatan pemahaman mengenai sanitasi air bersih berkelanjutan dan pengelolaan tata kelola sumber air bersih mandiri bagi kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, warga di lingkungan kumuh dan perempuan			1x	3x				125 juta		Kota Yogyakarta, Kab Gunungkidul, Kab Bantul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Indikator TPB/ SDGS: Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)											
PROGRAM 2: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
Kegiatan 2 : Peningkatan peran serta organisasi komunitas sekitar sungai dalam fungsi tata kelola limbar cair secara berkelanjutan (organisasi/paguyuban/forum komunikasi/kelompok pemerhati pelestari sungai)			3x	7x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul	Forum Komunikasi Winongo Asri, Forum Merti Code, Forum Gajahwong, Forum Kali Mbedog, dll
Kegiatan 4 : Peningkatan peran serta komunitas masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah padat secara mandiri (program bank sampah, komposting, pemilahan sampah, dll)								swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul	Bank Sampah Sukunan, Bank Sampah Badogan Bantul, dll
Kegiatan 5 : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelestarian sumber daya lingkungan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan-kegiatan praktik daur ulang mengurangi polusi dan limbah (program sekolah adiwiyata)			2x	4x				125 juta		Kota Yogyakarta	Hijau
PROGRAM 3: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau.											

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Sosial

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN												
Indikator TPB/ SDGS:	**Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun**											
PROGRAM 1: Pendampingan intensif pemerintah desa dalam tata kelola dana desa												
Kegiatan 1 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan penguatan ekonomi	Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan penguatan ekonomi	unit kegiatan non fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 2 : Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/ pengelola air minum berbasis komunitas)	Pendampingan kelompok-kelompok usaha ekonomi (rumah kreasi yang ada di masyarakat	unit kegiatan non fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 3 : Meningkatkan promosi produksi usaha yang ada di masyarakat, kelompok keluarga (rumah kreasi dll.)	Peningkatan kegiatan promosi produksi usaha ekonomi keluarga yang ada di masyrakat, kelompok- kelompok keluarga	unit kegiatan non-fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 4: Pemda menciptakan ruang ker-ja dan ekonomi untuk masyarakat marginal Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Terciptanya ruang kerja dan ekonomi untuk masyrakat marginal								100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 5: Mendorong peran serta masya-rakat untuk melakukan pengem-bangan pertanian berkelanjutan (Ubi, pertanian organik, pemanfaatan lahan) Kegiatan	Peningkatan peran masyarakat untuk melakukan pengembangan pertanian berkelanjutan (ubi, pertanian organik, pemanfaatan lahan)								200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, dinas pertanian, dll)
Kegiatan 6: Meningkatkan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Data peningkatan RS yang bekerjasama dengan BPJS beserta jumlah masing-masing kamar disetiap RS. dan Jumlah peserta BPJS di DIY meningkat								50.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatandll)
	Peningkatan perusahaan/lembaga untuk memberikan program SJSN ketenagakerjaan kepada para pekerja								50.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskes-mas, Dinas kesehatandll)
Kegiatan 7 ; Wilayah /Daerah Siaga: Melaksanakan pelatihan siaga bencana kepada semua desa di DIY	Meningkatnya desa-desa yang siap menghadapi bencana , desa memiliki komunitas yang terlatih dalam bencana								100.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan perangkat desa		Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas dan perangkat desa

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022				
Kegiatan 8. Meningkatkan Pelatihan meng-atasi trauma psikologis pasca bencana ter-utama pada perempuan dan anak pada te-naga Puskesmas, LSM dan Ormas 9. GACA	Meningkatnya tenaga ahli yang siap membantu mengatasi trauma psikologis pasca bencana								100.000.000,-	Dinas kesehatan, LSM, Ormas, pekerja sosial		Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa, Ormas 'Aisyiyah
Indikator TPB/ SDGS:	**Membuat kota dan hunian yang inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan**											
PROGRAM 2: Penyediaan sistem transportasi yang aman, terjangkau, terakses dan berkelanjutan bagi semua orang												
Kegiatan 1: Penataan Zona manajemen dan Penyediaan Bus Sekolah Terjangkau di Seluruh DIY	Output: a) DIY memiliki sistem dan mana-jemen transportasi publik bagi anak anak sekolah b). Pemerintah dan swasta mengembangkan proyek pengadaan bus sekolah bagi warga DIY	Unit kegiatan fisik dan non fisik								Dinas Jalan Raya, Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa		Dinas Jalan Raya, Dinas Pendidikan, Kampus, Pemda dan Swasa
Kegiatan 2: Penataan Kembali Manajamen Parkir Kota dan Pejalan Kaki	1). Mengadopsi sistem elektronik modern untuk manajemen revenues dari perpar-kiran jalan raya. 2). Para Pekerja Parkir mendapatkan pelatihan dan penataan sistem karir, kerja dan insentif baru. 3). Jalan raya memiliki jalur pejalan kaki dan sistem "speed limit" dengan law enforce-ment bagi pelanggar lalu lintas yang makin andal	Unit kegiatan fisik dan non fisik								Polisi, Pemda, Kampus, Swasta		Polisi, Pemda, Kampus, Swasta
Indikator TPB/ SDGS:	**Mengurangi Kelaparan, Mencapai Keamanan Pangan, Peningkatan Gizi dan Mempromosikan Pertanian yang Berkelanjutan**											
PROGRAM 3: Mengakhiri Kelaparan dan Memastikan Akses bagi semua Warga, terutama yang miskin dan rentan terutama balita, pada keamanan, gizi, dan makanan yang cukup sepanjang tahun												
Kegiatan 1: Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nutrisi dan Perlindungan dari Kelaparan bagi Warga Miskin dan Rentan	Output : a). Terciptanya komitmen dan regulasi skema keringanan pajak bagi pengusaha restoran dan hotel hotel papan atas yang terlibat dalam program donasi makanan tak tergunakan b). Terbentuknya lembaga sosial yang efektif untuk pengepul dan redistributor bantuan sosial penyediaan jaminan nutri dan makanan bagi warga miskin dan rentan yang membutuhkan	Unit kegiatan fisik dan non fisik										
PROGRAM 4: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia												
Kegiatan 1. meningkatkan Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan.	1.1 Output Kegiatan : Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (tahun 2010 : 346)	unit kegiatan fisik							150.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Dinas kesehatan, Puskesmas, LSM, Ormas dan perangkat desa
	1.2 Output Kegiatan : adanya program BPJS mengcover Jaminan persalinan, dan meningkat-nya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	unit kegiatan fisik							150.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas, PKBI		Dinas kesehatan, LSM, Ormas dan perangkat desa
Kegiatan 2. Suami mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya menjelang dan sesudah persalinan	1.3. Output Kegiatan :Program peningkatan kapasitas untuk suami siaga	unit kegiatan non-fisik							Rp 100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 3. Pemberian layanan persalinan yang ramah kepada semua masyarakat tanpa memandang status pernikahan	1.4. Output Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan pada perempuan yang belum menikah untuk mengakses layanan persalinan dan adanya jaminan kerahasiaan pasien. (KTD)	unit kegiatan fisik							200.000.000,-			Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI dll)
Kegiatan 4. Pelatihan untuk provider khususnya penanganan persalinan Ibu dengan HIV positif	1.5 Output Kkegiatan:Meningkatnya per-sentase persalinan oleh tenaga kesehat-an terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	unit kegiatan non-fisik							100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyiyah
	1. Adanya SOP penanganan persalinan Ibu dengan HIV postif, 2. Semua provider mampu memberikan layanan persalinan ibu dengan HIV postif (KTD)	unit kegiatan non-fisik							100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Ikelompok pengajian, gereja, paguyuban sosial, PKK
PROGRAM 5: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapatdicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal												

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022				
Kegiatan 1. melakukan sosialisasi dan mengawal Biaya gratis untuk persalinan di fasilitas kesehatan.	1.1 Output Kegiatan : 2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	unit luasan fisik							150.000.000,-	Dinas kesehatan, BPJS, LSM, Ormas		Mitrawacana.PEKKA, 'Aisyiyah, KPI, Puskesmas, Dinas Kesehatan dll)
Kegiatan 2 . Suami mempunyai pengetahu-an dan ketrampilan untuk mendampingi istrinya selama proses persalinan, dan mampu merawat bayi yang sudah lahir.	2.1 Output Kegiatan : meningkatnya pemahaman dan dan kesadaran suami untuk mendampingi istri saat melahirkan, dan perawatan bayi.	unit kegiatan non-fisik							150.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Puskesmas, Kader kesehatan, PKBI, Mitra Wacana, 'Aisyiyah
		unit kegiatan non-fisik										Dinkes, LSM, Ormas, Puskesmas
Kegiatan 3. Memberikan edukasi pentingnya imunisasi dan pendampingan kepada kelompok yang menolak terhadap program imunisasi	2.2 Output KegiatanMeningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015 : 71,2%).	unit non -fisik							100.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud
Kegiatan 4. Pengelolaan kantin sehat disekolah-sekolah dan pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin . 5. Gerakan GACA	2.1 Output Kegiatan: Menurunnya Prevalensi stanting (pendek dan sangat pendek pada anak dibawah 2 tahun atau baduta)dan pada anak dibawah 5 tahun.	unit non fisik							250.000.000,-	Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas		Dispenbud, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas
Kegiatan 5. Sosialisasi Pola pangan sehat dan gizi seimbang.2. Penyediaan kantin sehat di sekolah. 3. Penyadaran makanan sehat untuk anak									250.000.000,-	Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud		Dinas pertanian, Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas
PROGRAM 6: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
Kegiatan 1. Provider memberikan Pendidikan Kesehatatan tentang TB	1.1 Output Kegiatan : Adanya upaya pencegahan penyakit TB pada keluarga, sehingga Menurun-nya prevalensi Tuber-culosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	unit luasan fisik							300.000.000,-			Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, dll
Kegiatan 2 : Provider memberikan informasi kepatuhan minum obat dan pencegahan penularan pada keluarga maupun masyarakat	barnya informasi fungsi kondom sebagai alat kontrasepsi dan mencegah IMS ke masuarakat	unit kegiatan non-fisik							200.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver
	2.2 Output Kegiatan : tidak adanya pasien yang tidak patuh menum obat dan putus obat	unit kegiatan non-fisik							250.000.000,-			
Kegiatan 3. Provider memberikan Pendidikan Kesehatatan Reproduksi yang sehat dan aman klien	3.1 output Kegiatan : Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	unit kegiatan non-fisik							250.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas
Kegiatan 4. Provider memberikan informasi fungsi kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan	4.1. output kegiatan : Meningkatnya penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS kepada setiap masyarakat rentan								200.000.000,-	Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas/'Aisyiyah, Dispenbud, PKBI		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas, care giver
Kegiatan 5. Pemberian informasi peren-canaan keluarga bagi remaja belum meni-kah (10-24 tahun) dan PUS (Pasangan Usia Subur),	Menurunnya Total Fertility Rate(TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).								250.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, LSM dan Ormas/'Aisyiyah, KUA
Kegiatan 6. Pemberian wewenang kepada Kader desa/kelurahan untuk memberikan informasi dan distribusi alat kontrasepsi, Mendorong pelibatan laki-laki dalam KB, dan Setiap desa/kelurahan memiliki produk kebijakan kampanye PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), 2. Setiap desa memiliki organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes untuk kegiatan kampanye PUP.	Terjadinya penurunan pernikahan di usia dini (kurang dari 21 untuk perempuan dan kurang dari 25 untuk laki-laki), 2. Terjadinya penurunan angka unmeet need, Setiap desa memiliki organisasi PIK-R (Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja), 3. Adanya alokasi APBDes untuk kegiatan kampanye PUP.								300.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Dinkes, Posyandu, Mitra Wacana, PKBI dan Ormas/'Aisyiyah, KUA

Nama Program / Kegiatan / Output		Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022				
Kegiatan 7. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat berpendapat rendah melalui kebijakan yang ramah dan murah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Memaksimalkan potensi sumber mata air lokal untuk dimanfaatkan masyarakat bersama secara partisipatif.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%	unit non fisik							350.000.000,-			Dinas kesehatan, posyandu, LSM, Ormas, Dispenbud, PKBI
Indikator TPB : Pendidikan yang berkualitas												
Program 7: Meningkatnya Angka Partisipasi Murni , SMP/MTs/Sederajat, SMA/SMU/MA pada tahun2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).												
Menguatkan/sosilaisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar untuk mencerdaskan bangsa, dan mendorong pemerintah untuk	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	unit luasan fisik							200.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
memberikan layanan pendidikan gratis pada pendidikan dasar, dan menengah pertama serta menengah atas.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 MENJADI 82,2% (2015:79,97%)								200.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
Kegiatan 2 : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi, penyediaan taman bacaan/pustaka	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA / SMK/MA /Sederajat paa tahun 2019 menjadi 91,63% (2015 : 82,42%)								200.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
	Output Kegiatan : Adanya kegiatan kampanye minat baca dan pemahaman litersi	unit luasan fisik							500.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
	Output Kegiatan : Adanya peningkatan taman bacaan/pustakaan di setiap pedukuhan dan desa dilindungi berbasis masyarakat (perdes pelestarian alam, dll)	unit luasan fisik							500.000.000,-			Dindik, Mitra Wacana, KPI, 'Aisyiyah.
Program 8: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.												
Pemerintah daerah menyediakan ruang jaring pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan yang	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	unit kegiatan non-fisik							300.000.000,-			Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI
responsif gender	2. Setiap Desa mempunyai pelayanan dan pendampingan hukum dan pendampingan pasca trauma kekerasan (community crisis center)	unit kegiatan non-fisik							750.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI
1. Pendidikan politik untuk perempuan. 2. Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik. 3. Adanya produk kebijakan yang mendukung	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).								300.000.000,-			Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI
peningkatan keterwakilan permpuan di DPR.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil pemilu 2014: 16,6%).	unit kegiatan non-fisik							250.000.000,-	swadaya (hibah, sponsor,dll)		Aisyiyah, Mitra Wacana, dan KPI

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Ekonomi

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau											
Indikator TPB/ SDGS:	**Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua**										
PROGRAM 1: OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH											
1) ADVOKASI MEKANISME DISTRIBUSI ENERGI YANG TEPAT SASARAN. 2) MENDORONG PENGGUNAAN ENERGI BERSIH SECARA BERTAHAP MENGGANTIKAN ENERGI KOTOR	unit kegiatan non fisik							100,000,000	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)	DIY	LKY
PROGRAM 2: Penyiapan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Indikator : TPB											
1) Penyiapan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan era digital ekonomi. 2) peningkatan kualitas produk s/d packaging									1) setahun 1x @ 10.000.000 2) setahun 2x @ 10.000.000	DIY	Ciqal, Yasanti,
PROGRAM 3: peningkatan pertumbuhan UMKM											
Training, Chanelling, networking									sekali setahun @ Rp 10.000.000	DIY	Kadin
PROGRAM 4: peningkatan pertumbuhan UMKM											
Penyediaan pusat layanan korban di tempat kerja											Yasanti
PROGRAM 5: Penyelenggaraan fasilitas umum yang aksesible dan tenaga kerja bisa melayani dengan perspektif ramah konsumen											
pelatihan assertifitas									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Ciqal, Yasanti,

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
PROGRAM 6: 1) Penyediaan fasilitas umum yang aksesible. 2) adanya rambu2 bagi Penyandang Disabilitas. 3) informasi (running teks, braille)											
advokasi fasilitas umum yang aksesibel, Pelatihan aksesibilitas									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Ciqal
PROGRAM 7: mendorong tumbuhnya industri kreatif dan inklusif											
1) pemberdayaan bahan baku lokal maupun kearifan lokal. 2) monitoring implementasi perda disabilitas bidang tenaga kerja disabilitas									1) setahun 1x @ 5.000.000 2) 3bln sekali @ 1.000.000		Ciqal, LKY, Yasanti
PROGRAM 8: a) penerapan standar skala upah secara menyeluruh di segala sektor. B) peningkatan akses masyarakat miskin ke lembaga keuangan											
advokasi mengawal penyusunan standar skala upah (Workshop, Loby, Audiensi,									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Kadin, Ciqal, Yasanti, LKY, KPI

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator TPB/ SDGS:	**Jumlah Penduduk Berakses Air Minum**										
PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas)			1x	1x				90 juta		Kota Yogyakarta	Forum Merti Code, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan sanitasi air bersih berkelanjutan melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar di sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (sekolah sehat, sekolah bersih hijau sehat, dll)			2x	4x				175 juta		Kota Yogyakarta	Hijau
Kegiatan 4: Peningkatan pemahaman mengenai sanitasi air bersih berkelanjutan dan pengelolaan tata kelola sumber air bersih mandiri bagi kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, warga di lingkungan kumuh dan perempuan			1x	3x				125 juta		Kota Yogyakarta, Kab Gunungkidul, Kab Bantul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Indikator TPB/ SDGS:	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**										
PROGRAM 2: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
Peningkatan peran serta organisasi komunitas sekitar sungai dalam fungsi tata kelola limbar cair secara berkelanjutan (organisasi/paguyuban/forum komunikasi/kelompok pemerhati pelestari sungai)			3x	7x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul	Forum Komunikasi Winongo Asri, Forum Merti Code, Forum Gajahwong, Forum Kali Mbedog, dll
Peningkatan peran serta komunitas masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah padat secara mandiri (program bank sampah, komposting, pemilahan sampah, dll)								swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul	Bank Sampah Sukunan, Bank Sampah Badogan Bantul, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelestarian sumber daya lingkungan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan-kegiatan praktik daur ulang mengurangi polusi dan limbah (program sekolah adiwiyata)			2x	4x				125 juta		Kota Yogyakarta	Hijau
PROGRAM 3: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau.											
Peningkatan peran serta komunitas/masyarakat dalam perlindungan dan restorasi ekosistem lahan basah, serta berbasis budaya lokal (komunitas mangrove, komunitas muara, komunitas merti telaga, merti tuk/sumber air, dll)			1x	3x				390 juta			Hijau
Peningkatan kegiatan advokasi dan audit sosial penegakan hukum pengendalian penggunaan air tanah untuk kepentingan komersial dan proteksi kawasan resapan air dari kepentingan komersial (penegakan prosedur perijinan, implementasi perda/pergub/hukum adat, dll)			1x	4x				650 juta			LBH, Walhi, dll
PROGRAM 4: Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.											
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (program sekolah siaga bencana/sekolah aman, adaptasi perubahan iklim , dll)			4x	16x				830 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul, Kab Kulonprogo	Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana dalam lingkungan pembelajaran akademisi perguruan tinggi (pusat studi bencana, pusat kajian pembangunan berkelanjutan, KKN ESD, dll)			6x	16x				250 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul	PSBA UGM, PSL SADHAR, PSMB UPN, PSBA UMY, PSL UAD, dll

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan risiko bencana dan ketahanan iklim melalui inovasi media pembelajaran publik dan kegiatan program terkait (kampung hijau, kampung siaga, kampung sehat, kampung iklim, dll)			4x	16x				570 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, FPRB Desa, Kominfo,
Kegiatan 6: Melakukan penelitian mengenai kebutuhan terkait sistem transportasi publik dan aksesibilitas ruang publik			1x	2x				90 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 7: Advokasi sistem dan kebijakan layanan kursi roda yang mendukung akses perkotaan dan layanan publik yang aksesibel			1x	4x				45 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 8: Safari PRB bagi Penyandang Disabilitas Netra			1x	6x				120 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 9: Emergency Respon tanggap Bencana yang inklusif			1x	6x				60 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 10: Tersedianya sistem pedestrian yang akses bagi Penyandang Disabilitas			2x	6x				35 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 11: Kampanye Publik bagi tersedianya ruang hijau yang aksesibel			2x	6x				97 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
PROGRAM 5: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darta serta jasa lingkungannnya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional											
Peningkatan jumlah unit kegiatan peran serta organisasi komunitas peduli dalam upaya perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati (flora endemik, fauna endemik, pangan, obat, dll)			7x	16x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Forum Masyarakat Peduli Muara Jangkaran, FKWA, FMCU, Pasag Merapi, Masyarakat Hutan Adat Wonosadi, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan konservasi perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar/menengah, pendidikan publik, dengan menghargai kearifan lokal.			4x	12x				273 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Walhi, Hijau, Kutilang, Arupa, Javlec, Kanopi, Lestari, Damar, Kappala Indonesia, dll
PROGRAM 6: Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal											
Kegiatan 1 : Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan kampanye regulasi/peraturan daerah untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora/benih endemik dan satwa liar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal			2x	2x				265 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	BKSDA, TNGM, Hijau, Kanopi, Kutilang, WRC, COP, dll
Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penindakan hukum atas perburuan dan perdagangan jenis flora/benih endemik dan satwa liar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal			2x	6x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	BKSDA, TNGM, Kepolisian, dll
Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan kelestarian jenis flora dan satwa liar dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal (program breeding satwa liar endemik atau dilindungi, pemuliaan flora, pemberdayaan pendampingan komunitas hobi, dll), yang melibatkan secar aktif peran serta komunitas masyarakat.			2x	2x				975 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	BKSDA, Hijau, Komunitas Ular/Reptil, Komunitas Raptor, Komunitas Mamalia, dll
PROGRAM 7:Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi peningkatan produktivitas hasil pertanian dari gangguan risiko bencana, hama tanaman pangan, cuaca ekstrim, tata kelola, akses finansial, dan sebagainya, yang berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan.			2x	6x				645 juta		Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Perda, Dipertan, Disperindag, Pertanahan, Hijau, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan pembelajaran sumber daya lokal, dengan berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan, serta inklusif.			2x	6x				254 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau
PROGRAM 8: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
Kegiatan 1 : Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Diare di wilayah DIY			2x	6x				467 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Dinkes, Hijau, dll
Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian demam berdarah, monitoring persebaran epidemi demam berdarah di wilayah DIY.			3x	9x				200 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman	Eliminate Dengue Project - UGM
Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Leptospirosis, monitoring persebaran serta penurunan angka korban kematian pada petani di wilayah DIY.			1x	4x				389 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau, Dinkes, dll
PROGRAM 9: Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.											
Kegiatan 1 : Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan gerakan minat baca di sekolah dasar/madrasah/SLB.								265 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Dinas Pendidikan, Hijau, Komunitas Dongeng, Komunitas Buku, dll
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi budaya yang mendukung gerakan literasi publik, melalui pertunjukan wayang, ritual budaya lokal, hingga seni kontemporer. (dialog dan penyampaian pengetahuan)			14x	14x				28 milyar		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	IVAA - Festival Arsip, IKAPI - Bazaar Buku, Festival Dongeng Mentari, Festival Boneka Papermoon, Biennale, Ngayogjazz, Festival Kesenian Yogyakarta, dll
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan taman baca masyarakat.			4x	10x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Biblio Jaringan Perpustakaan Alternatif, Komunitas Cemara, Hijau, dll
PROGRAM 10: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua di wilayah perdesaan.											
Kegiatan 1 : Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program perekonomian pertanian organik, berbasis komunitas.			2x	4x				535 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program ekowisata , berbasis komunitas.			2x	4x				315 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau, Kutilang, Pusat Studi Pariwisata, Komunitas Desa Wisata Nusantara, POHA UGM, dll
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan ekonomi kreatif UMKM inklusif, yang melayani potensi produk kreativitas kelompok difabel.			2x	4x				425 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	YEU-YAKKUM, Ohana, Ciqal, Paluma, Sapda, Rumah Kreatif Jogja, dll

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
Indikator TPB/ SDGS:	**Jumlah Penduduk Berakses Air Minum**										
PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas)			1x	1x				90 juta		Kota Yogyakarta	Forum Merti Code, dll

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Ekonomi

Nama Program / Kegiatan / Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4) 2018	2019	2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau											
Indikator TPB/ SDGS:	**Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua**										
PROGRAM 1: OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH											
1) ADVOKASI MEKANISME DISTRIBUSI ENERGI YANG TEPAT SASARAN. 2) MENDORONG PENGGUNAAN ENERGI BERSIH SECARA BERTAHAP MENGGANTIKAN ENERGI KOTOR	unit kegiatan non fisik							100,000,000	swadaya (hibah, sponsor MAMPU,dll)	DIY	LKY
PROGRAM 2: Penyiapan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan pasar. Indikator : TPB											
1) Penyiapan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan era digital ekonomi. 2) peningkatan kualitas produk s/d packaging									1) setahun 1x @ 10.000.000 2) setahun 2x @ 10.000.000	DIY	Ciqal, Yasanti,
PROGRAM 3: peningkatan pertumbuhan UMKM											
Training, Chanelling, networking									sekali setahun @ Rp 10.000.000	DIY	Kadin
PROGRAM 4: peningkatan pertumbuhan UMKM											

Nama Program / Kegiatan / Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
			2018	2019	2020	2021	2022				
Penyediaan pusat layanan korban di tempat kerja											Yasanti
PROGRAM 5: Penyelenggaraan fasilitas umum yang aksesible dan tenaga kerja bisa melayani dengan perspektif ramah konsumen											
pelatihan assertifitas									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Ciqal, Yasanti,
PROGRAM 6: 1) Penyediaan fasilitas umum yang aksesible. 2) adanya rambu2 bagi Penyandang Disabilitas. 3) informasi (running teks, braille)											
advokasi fasilitas umum yang aksesibel, Pelatihan aksesibilitas									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Ciqal
PROGRAM 7: mendorong tumbuhnya industri kreatif dan inklusif											
1) pemberdayaan bahan baku lokal maupun kearifan lokal. 2) monitoring implementasi perda disabilitas bidang tenaga kerja disabilitas									1) setahun 1x @ 5.000.000 2) 3bln sekali @ 1.000.000		Ciqal, LKY, Yasanti
PROGRAM 8: a) penerapan standar skala upah secara menyeluruh di segala sektor. B) peningkatan akses masyarakat miskin ke lembaga keuangan											
advokasi mengawal penyusunan standar skala upah (Workshop, Loby, Audiensi,									sekali setahun @ Rp 10.000.000		Kadin, Ciqal, Yasanti, LKY, KPI

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Lingkungan

Nama Program / Kegiatan / Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator TPB/ SDGS: **Jumlah Penduduk Berakses Air Minum**											
PROGRAM 1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
Peningkatan jumlah organisasi komunitas dalam fungsi tata kelola sumber air bersih mandiri secara berkelanjutan. (pamsikarta/pengelola air minum berbasis komunitas)			1x	1x				90 juta		Kota Yogyakarta	Forum Merti Code, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan sanitasi air bersih berkelanjutan melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar di sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (sekolah sehat, sekolah bersih hijau sehat, dll)			2x	4x				175 juta		Kota Yogyakarta	Hijau
Kegiatan 4: Peningkatan pemahaman mengenai sanitasi air bersih berkelanjutan dan pengelolaan tata kelola sumber air bersih mandiri bagi kelompok rentan seperti Penyandang Disabilitas, warga di lingkungan kumuh dan perempuan			1x	3x				125 juta		Kota Yogyakarta, Kab Gunungkidul, Kab Bantul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Indikator TPB/ SDGS: **Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanaka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**											
PROGRAM 2: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
Peningkatan peran serta organisasi komunitas sekitar sungai dalam fungsi tata kelola limbar cair secara berkelanjutan (organisasi/paguyuban/forum komunikasi/kelompok pemerhati pelestari sungai)			3x	7x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul	Forum Komunikasi Winongo Asri, Forum Merti Code, Forum Gajahwong, Forum Kali Mbedog, dll
Peningkatan peran serta komunitas masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah padat secara mandiri (program bank sampah, komposting, pemilahan sampah, dll)								swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, Kab Gunungkidul	Bank Sampah Sukunan, Bank Sampah Badogan Bantul, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelestarian sumber daya lingkungan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan-kegiatan praktik daur ulang mengurangi polusi dan limbah (program sekolah adiwiyata)			2x	4x				125 juta		Kota Yogyakarta	Hijau
PROGRAM 3: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau.											
Peningkatan peran serta komunitas/masyarakat dalam perlindungan dan restorasi ekosistem lahan basah, serta berbasis budaya lokal (komunitas mangrove, komunitas muara, komunitas merti telaga, merti tuk/sumber air, dll)			1x	3x				390 juta			Hijau
Peningkatan kegiatan advokasi dan audit sosial penegakan hukum pengendalian penggunaan air tanah untuk kepentingan komersial dan proteksi kawasan resapan air dari kepentingan komersial (penegakan prosedur perijinan, implementasi perda/pergub/hukum adat, dll)			1x	4x				650 juta			LBH, Walhi, dll
PROGRAM 4: Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.											
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah. (program sekolah siaga bencana/sekolah aman, adaptasi perubahan iklim , dll)			4x	16x				830 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul, Kab Kulonprogo	Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, dll

Nama Program / Kegiatan / Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
			2018	2019	2020	2021	2022				
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana dalam lingkungan pembelajaran akademisi perguruan tinggi (pusat studi bencana, pusat kajian pembangunan berkelanjutan, KKN ESD, dll)			6x	16x				250 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul	PSBA UGM, PSL SADHAR, PSMB UPN, PSBA UMY, PSL UAD, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan risiko bencana dan ketahanan iklim melalui inovasi media pembelajaran publik dan kegiatan program terkait (kampung hijau, kampung siaga, kampung sehat, kampung iklim, dll)			4x	16x				570 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau, anggota-anggota Forum PRB DIY, FPRB Desa, Kominfo,
Kegiatan 6: Melakukan penelitian mengenai kebutuhan terkait sistem transportasi publik dan aksesibilitas ruang publik			1x	2x				90 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 7: Advokasi sistem dan kebijakan layanan kursi roda yang mendukung akses perkotaan dan layanan publik yang aksesibel			1x	4x				45 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 8: Safari PRB bagi Penyandang Disabilitas Netra			1x	6x				120 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 9: Emergency Respon tanggap Bencana yang inklusif			1x	6x				60 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 10: Tersedianya sistem pedestrian yang akses bagi Penyandang Disabilitas			2x	6x				35 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
Kegiatan 11: Kampanye Publik bagi tersedianya ruang hijau yang aksesibel			2x	6x				97 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Ohana, Ciqal, Sapda, Dinsos, Jogja Berdaya, YEU, Yakkum, dll
PROGRAM 5: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darta serta jasa lingkungannnya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional											
Peningkatan jumlah unit kegiatan peran serta organisasi komunitas peduli dalam upaya perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati (flora endemik, fauna endemik, pangan, obat, dll)			7x	16x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Forum Masyarakat Peduli Muara Jangkaran, FKWA, FMCU, Pasag Merapi, Masyarakat Hutan Adat Wonosadi, dll
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan konservasi perlindungan, pelestarian, restorasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui integrasi kurikulum pembelajaran pendidikan dasar/menengah, pendidikan publik, dengan menghargai kearifan lokal.			4x	12x				273 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Walhi, Hijau, Kutilang, Arupa, Javlec, Kanopi, Lestari, Damar, Kappala Indonesia, dll
PROGRAM 6: Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal											
Kegiatan 1 : Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan kampanye regulasi/peraturan daerah untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora/benih endemik dan satwa liar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal			2x	2x				265 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	BKSDA, TNGM, Hijau, Kanopi, Kutilang, WRC, COP, dll
Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penindakan hukum atas perburuan dan perdagangan jenis flora/benih endemik dan satwa liar dilindungi/endemik serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal			2x	6x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	BKSDA, TNGM, Kepolisian, dll
Peningkatan inovasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan kelestarian jenis flora dan satwa liar dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan hidupan liar secara ilegal (program breeding satwa liar endemik atau dilindungi, pemuliaan flora, pemberdayaan pendampingan komunitas hobi, dll), yang melibatkan secar aktif peran serta komunitas masyarakat.			2x	2x				975 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	BKSDA, Hijau, Komunitas Ular/Reptil, Komunitas Raptor, Komunitas Mamalia, dll
PROGRAM 7:Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi peningkatan produktivitas hasil pertanian dari gangguan risiko bencana, hama tanaman pangan, cuaca ekstrim, tata kelola, akses finansial, dan sebagainya, yang berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan.			2x	6x				645 juta		Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Perda, Dipertan, Disperindag, Pertanahan, Hijau, dll

Nama Program / Kegiatan / Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2017) (3)	Target Tahunan (4)					Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
			2018	2019	2020	2021	2022				
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan sejak usia dini melalui integrasi pembelajaran pendidikan dasar, melalui kegiatan pembelajaran sumber daya lokal, dengan berbasis komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan, serta inklusif.			2x	6x				254 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau
PROGRAM 8: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
Kegiatan 1 : Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Diare di wilayah DIY			2x	6x				467 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Dinkes, Hijau, dll
Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian demam berdarah, monitoring persebaran epidemi demam berdarah di wilayah DIY.			3x	9x				200 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman	Eliminate Dengue Project - UGM
Inovasi kegiatan-kegiatan penurunan prevalensi angka kejadian Leptospirosis, monitoring persebaran serta penurunan angka korban kematian pada petani di wilayah DIY.			1x	4x				389 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau, Dinkes, dll
PROGRAM 9: Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.											
Kegiatan 1 : Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan gerakan minat baca di sekolah dasar/madrasah/SLB.								265 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Dinas Pendidikan, Hijau, Komunitas Dongeng, Komunitas Buku, dll
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi budaya yang mendukung gerakan literasi publik, melalui pertunjukan wayang, ritual budaya lokal, hingga seni kontemporer. (dialog dan penyampaian pengetahuan)			14x	14x				28 milyar		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	IVAA - Festival Arsip, IKAPI - Bazaar Buku, Festival Dongeng Mentari, Festival Boneka Papermoon, Biennale, Ngayogjazz, Festival Kesenian Yogyakarta, dll
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi gerakan melek literasi, melalui dukungan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan taman baca masyarakat.			4x	10x				swadaya		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Biblio Jaringan Perpustakaan Alternatif, Komunitas Cemara, Hijau, dll
PROGRAM 10: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua di wilayah perdesaan.											
Kegiatan 1 : Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program perekonomian pertanian organik, berbasis komunitas.			2x	4x				535 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan program ekowisata , berbasis komunitas.			2x	4x				315 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	Hijau, Kutilang, Pusat Studi Pariwisata, Komunitas Desa Wisata Nusantara, POHA UGM, dll
Peningkatan kegiatan-kegiatan inovasi perekonomian perdesaan melalui bentuk pengembangan ekonomi kreatif UMKM inklusif, yang melayani potensi produk kreativitas kelompok difabel.			2x	4x				425 juta		Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Gunungkidul	YEU-YAKKUM, Ohana, Ciqal, Paluma, Sapda, Rumah Kreatif Jogja, dll

Matrik Kegiatan Non Pemerintah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh											
Indikator TPB/ SDGS: Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											
PROGRAM 1: Mendorong Masyarakat peduli KDRT											
1. Sosialisasi UU PKDRT, 2. Pelatihan Paralegal bagi anggota KPI 3. Pembuatan Posko PIPA KDRT								Rp. 100.000.000 (Swadaya dan Pemerintah)/Tahun		Kab. Gunung-kidul, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo	KPI DIY

Nama Program / Kegiatan / Output	Satuan	Tahun Dasar (2017)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022				
PROGRAM 2: Mendorong penyadaran masyarakat terhadap pembangunan yang berkeadilan 2. Pembentukan Community crisis center di level desa/ kelurahan untuk pemberiam layanan. 3.Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak untuk anak usia dini.											
1. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi anak dan remaja (disabilitas)								100.000.000 (swadaya dan pemerintah)/tahun		Kab. Gunung-kidul, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo	Sapda
2. Penguatan Disability People Organization (DPO) melalui self defense untuk perempuan dengan disabilitas											
3. Sosialisasi Pembangunan infra struktur yang menjaga prinsip kesepakatan dan kemanusiaan yang tidak beresiko bencana											
4. Pendidikan hukum di setiap line pendidikan dan masyarakat											
5. Membangun kegiatan antar sekolah untuk mengurangi kekerasan antar pelajar.											
6. Pelibatan masyarakatat (remaja, laki-laki, permpuan, lansia) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan sosial											
PROGRAM 3: Penyadaran Hukum kepada masyarakat											
1. Sosialisasi Bantuan Hukum Prodeo kepada masyarakat								Rp. 100.000.000 (Swadaya dan Pemerintah)/Tahun		Kab. Gunung-kidul, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo	PBHI
2. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat											
3. Pelatihan Keterampilan Hukum Pidana dan Hukum Perdata											
PROGRAM 4: 1.Mendorong parpol sosialisasi caleg perempuan untuk duduk di legislatif 2. Kaderisasi perempuan di parpol 3.Mendorong parpol untuk pemenuhan quota 30% di legislatif 4. Mendorong adanya kebijakan untuk pemenuhan quota 30% di setiap level pemerintah											
1. Diskusi dengan parpol untuk mendorong peningkatan legislatif perempuan di legislatig								Rp. 150.000.000/Tahun (Swadaya dan Pemerintah		Kab. Gunung-kidul, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo	KPI DIY
2. Kampanye caleg perempuan dengan parpol											
3. Pelatihan pendidikan pemilih untuk pemula dan masyarakat menjadi pemilh cerdas											
4. Pelatihan caleg perempuan untuk menjadi anggota legislatif .											
5. Sosialisasi caleg perempuan											
6. Pelatihan Kepemimpinan perempuan											
7. Diskusi dengan pemerintah unuk pemenuhan quota di level eksekutif											
8. Membangun jaringan dengan LSM, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, pemerintah, parpol											
PROGRAM 5: Mengkaji Kebijakan Diskriminasi Hak atas Pertanahan terkait Instruksi Kepala Daerah DIY 5 Maret tahun 1975 (K.898/I/A/1975)											
1. Diskusi Kajian tentang Instruksi Kepala Daerah DIY tahun 1975.								Rp. 75.000.000 (swadaya dan pemerinta)		DIY	ICM, Forum LSM
2. Sosialisasi Hasil Kajian tentang Instruksi Kepala Daerah DIY tahun 1975.											
3. Lobby /Audiensi terkait Hasil Kajian tentang Instruksi Kepala Daearh DIY tahun 1975.											